

Abdul Qadim Zallum



MALAPETAKA RUNTUHNYA KHILAFAH

كيف هدمت الخلافة

Abdul Qadim Zallum

MALAPETAKA RUNTUHNYA KHILAFAH



**Al Azhar
Press**

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan
I. Malapetaka Runtuhnya Khilafah II. Abdul Qadim Zallum
III. Arief B. Iskandar

Judul:
Malapetaka Runtuhnya Khilafah
Judul Asli:
Kaifa Hudimatil Khilafah

15,5 x 23,5 cm; 236 hlm

ISBN : 979-3118-65-2
Penulis : Abdul Qadim Zallum
Penyunting : Arief B. Iskandar
Penata Letak : Tim Al Azhar Press
Desain Sampul : Tim Al Azhar Press

Al Azhar Press 2011

Cetakan II, **Syawal 1432 H - September 2011 M**

Penerbit : Al Azhar Press
Alamat : Jl. Ciremai 104 Bantarjati, Bogor 16153
Telp : (0251) 8360665
Fax : (0251) 8360732
website : www.al-azharpress.com
e-mail : alazhar_press@yahoo.com

DAFTAR ISI

Pertarungan Antara Islam dan Kekufuran	9
Konspirasi Negara-Negara Eropa Melawan Negara Islam	14
Munculnya Gerakan Wahabi dan Pemerintahan Saudi	14
Konspirasi Inggris Melawan Daulah Islam	21
Upaya Prancis Menyerang Daulah Islam	22
Pengaruh Semangat Nasionalisme dan Sentimen Separatisme	24
Peran Markas Kegiatan Beirut dalam Menentang Khalifah	25
Peran Markas Kegiatan Istanbul Dalam Menentang Daulah Islam	28
Peran Kedutaan Negara-Negara Eropa Dalam Mendirikan Organisasi dan Partai Bagi Bangsa Arab	34
Misionarisme dan Serangan Budaya	38
Peran Markas Kegiatan di Malta Dalam Invasi Misionaris	39
Penyebarluasan Ekspedisi Misionari di Negeri Syam	39
Menghasut Masyarakat Syam	40
Upaya Memasukkan Hukum-Hukum Konstitusi Barat	43
Midhat Pasha Berupaya Menyusun Konstitusi Daulah Islam Dari Sistem Barat	45
Khalifah Abdul Hamid Menentang Konstitusi Midhat Pasha	48

Pengadopsian Undang-Undang Barat.....	52	Inggris Mengubah Strateginya	133
Pengaruh Fatwa Ulama dalam Pengadopsian		Rencana Inggris Menyerahkan Izmir Kepada Yunani	135
Undang-Undang Barat	53	Musthafa Kemal Memulai Pemberontakannya Melawan	
Kekeliruan Fatwa-fatwa Tersebut	56	Khilafah	139
Demokrasi Bertentangan Dengan Islam	71		
Kebebasan Umum Dalam Sistem Demokrasi Bertentangan		Dukungan Inggris Terhadap Pemberontakan Musthafa Kemal .	141
Dengan Islam	82		
Dampak Serangan Budaya dan Perundang-Undangan	87	Tahap Pertama Pemberontakan Musthafa Kemal	144
Upaya Memecah-Belah Daulah Khilafah	88	Sandiwaru Pendudukan Samsun	146
		Pemberontakan Bersenjata Musthafa Kemal	146
Upaya Sekutu Membujuk Jamal Pasha	91	Konferensi Ardh Rum	148
Kemunculan Musthafa Kemal	96	Inggris Menghalangi Sultan Mengirim Pasukan Untuk	
		Memadamkan Pemberontakan Musthafa Kemal	150
Musthafa Kemal Berupaya Menarik Mundur Daulah dari		Konferensi Sivas	151
Perang Dunia dan Menandatangani Perjanjian Damai		Musthafa Kemal Menjalin Kesepahaman dengan Khalifah	
dengan Inggris.....	99	untuk Mempersiapkan Pemberontakan Baru	154
Konspirasi Musthafa Kemal Menentang Daulah Islam	101	Musthafa Kemal Berhasil Mengumpulkan Pendukung	
Musthafa menjadi obyek perhatian dan sumber		Untuk Membebaskan Negara	158
kekhawatiran berbagai kalangan.	103		
Musthafa Kemal Melanjutkan Upayanya Merebut		Musthafa Kemal Menjadikan Ankara Sebagai Markasnya	161
Kekuasaan	106		
Musthafa Kemal Mengosongkan Suriah dan		Musthafa Kemal Kembali Memberontak	164
Menyerahkannya Kepada Inggris	108	Inggris Menduduki Istambul	165
		Kemarahan Rakyat Atas Dukungan Sultan Kepada Sekutu	166
Daulah Utsmaniyah Menyerah.....	112	Musthafa Kemal Mengumumkan Pemilihan Parlemen Baru	168
Inggris Memecah-Belah Daulah Khilafah	113	Musthafa Kemal Mendirikan Struktur Negara Di Ankara	169
Menjadikan Nasionalisme dan Patriotisme Sebagai		Sultan Mengirimkan Pasukan Untuk Menghancurkan	
Landasan Untuk Memecah-Belah Khilafah	114	Pemerintahan Ankara	171
Konsentrasi Inggris di Ibu Kota Untuk Menghapuskan		Penyiaran Isi Perjanjian Dainai Menguntungkan	
Khilafah	119	Musthafa Kemal	171
Upaya Inggris Menghancurkan Khilafah Melalui Aktivitas		Penguatan Pemerintahan Ankara Dan Hubungan	
Politik dan Intervensi Terhadap Perundang-Undangan	122	Langsung Dengan Sejumlah Negara.....	177
Upaya Inggris untuk Menciptakan Kevakuman Politik	127	Pimpinan Delegasi Sultan Menyerahkan Hak Bicara Atas Nama	
		Dua Delegasi Kepada Ketua Delegasi Ankara	180

Musthafa Kemal Menyiapkan Peperangan Melawan Yunani	184
Yunani Memulai Peperangan Melawan Turki	185
Yunani Menarik Mundur Pasukan Dikarenakan Tekanan Sekutu	188
Inggris Mempromosikan Musthafa Kemal Secara Besar-besaran	189
Para Politisi dan Perwira Mengingatkan Musthafa Kemal Untuk Tidak Menghapus Khilafah	192
Pemisahan Kekuasaan Dari Khilafah	194
Inggris Menetapkan Syarat Penghapusan Khilafah dan Sekularisasi Negara	201
Pukulan Mematikan	204
Berbagai Persoalan Utama Serta Tindakan Antara Hidup dan Mati	212
Persoalan Utama Menurut Islam	217
Menegakkan Khilafah Dan Hukum Allah Adalah Masalah Utama Kaum Muslim	229

PERTARUNGAN ANTARA ISLAM DAN KEKUFURAN

Sejak munculnya fajar kebangkitan Islam, pertarungan sengit antara pemikiran Islam dan pemikiran kufur serta peperangan antara kaum Muslim dan kaum kafir terus berlangsung. Ini dimulai saat Rasulullah saw. diutus oleh Allah SWT. Pada awalnya yang terjadi hanyalah pertarungan intelektual (pemikiran), tidak disertai dengan pertarungan fisik. Keadaan ini terus berlangsung hingga berdiri Negara Islam di Madinah, serta ketika pasukan bersenjata dibentuk dan kekuasaan ditegakkan. Sejak itulah Rasulullah saw. memadukan per-tarungan pemikiran dengan pertempuran fisik. Ayat-ayat tentang jihad turun pada masa itu, diikuti dengan berbagai pertem-puran fisik yang terus berlangsung. Di atas jalan (*tharîqah*) inilah—pertarungan pemikiran dan pertempuran fisik— pertarungan akan terus berlangsung hingga Hari Kiamat, yaitu sam-pai Allah SWT mewariskan bumi beserta seluruh isinya kepada kaum Muslim.

Dari sini jelaslah bahwa kekufuran adalah musuh Islam, dan orang-orang kafir adalah musuh kaum Muslim; tentu selama di dunia ini ada Islam dan kekufuran serta ada kaum Muslim dan orang-orang kafir. Ini akan terus berlangsung hingga suatu hari saat mereka semuanya dimusnahkan. Pertarungan ini adalah haq, pasti, dan terjadi sepanjang masa. Karena itu, realitas ini harus benar-benar dipahami dengan jelas oleh kaum Muslim setiap saat dan sepanjang hidupnya. Realitas ini juga harus dijadikan tolak ukur dalam menentukan setiap bentuk

hubungan antara Islam dan kekufuran serta antara kaum Muslim dan orang-orang kafir.

Pertarungan pemikiran pada masa awal kebangkitan Islam berlangsung terus berkelanjutan selama tiga belas tahun. Pertarungan ini adalah pertarungan yang paling berat dan paling keras. Namun demikian, pada akhirnya pemikiran Islam berhasil mengalahkan pemikiran kufur, dan Allah SWT telah menjadikan Islam sebagai pemenang. Lalu berdirilah di Madinah Daulah Islamiyah (Negara Islam) yang mampu menjaga wilayah kekuasaan Islam, melindungi kehormatan kaum Muslim, serta menyebarluaskan hidayah Islam kepada seluruh umat manusia di dunia ini melalui jihad. Melalui jihad ini, dimulailah sejumlah peperangan yang berat dan dahsyat secara berturut-turut antara Islam dan kekufuran serta antara tentara kaum Muslim dan tentara kaum kafir. Kemenangan di kedua medan pertarungan tersebut pada akhirnya berada di tangan kaum Muslim. Meskipun kaum Muslim mengalami kekalahan pada sebagian medan pertempuran, secara umum mereka selalu meraih kemenangan dalam peperangan. Mereka tidak pernah sekalipun menderita kekalahan dalam peperangan selama enam abad. Bahkan kaum Muslim selalu meraih kemenangan dalam seluruh pertempuran selama enam abad berturut-turut. Negara Islam menjadi negara *pertama* (adidaya) selama kurun tersebut. Sepanjang sejarah manusia, hal ini tidak pernah dialami bangsa-bangsa lain selain kaum Muslim; juga tidak pernah terjadi kecuali hanya pada Negara Islam.

Akan tetapi, orang-orang kafir, khususnya negara-negara Eropa, tidak pernah melupakan Islam; mereka selalu berusaha menyerang Islam. Mereka juga tidak pernah melupakan kaum Muslim; mereka selalu berusaha menghancurkan institusi kaum Muslim. Setiap kali mereka memiliki kesempatan, mereka selalu berusaha menyerang kaum Muslim atau menyiapkan berbagai konspirasi terhadap kaum Muslim. Selama masa-masa terakhir abad ke-6 Hijrah (abad ke-11 Masehi) dan masa-masa awal abad ke-7 Hijrah (abad ke-12 Masehi), negara-negara Eropa mulai mendeteksi adanya perpecahan dalam tubuh pemerintahan Daulah Islamiyah. Beberapa wilayah (provinsi) memisahkan diri dari Daulah Islamiyah. Sejumlah *wali* (gubernur) juga

berinisiatif melakukan otonomi dalam beberapa kebijakan internal seperti dalam masalah angkatan bersenjata, keuangan, kekuasaan, dan sebagainya. Akibatnya, Daulah Islamiyah berubah menyerupai negara federasi, bukan negara kesatuan sebagaimana mestinya. Pada beberapa wilayah kekuasaan Khalifah tersingkir. Khalifah tinggal sebutan yang didoakan di atas mimbar-mimbar, dalam pencetakan mata uang dengan menggunakan namanya, dan dalam pengiriman sejumlah uang dari *kharaj* kepadanya. Negara-negara Eropa mencium keadaan ini. Mereka kemudian mengirimkan Pasukan Salib untuk menyerang kaum Muslim. Sejak itu terjadilah Perang Salib yang terus berlangsung kira-kira satu abad. Dalam perang ini, kaum Muslim dapat dikalahkan; sementara kaum kafir berhasil menguasai seluruh wilayah Syam—yaitu Palestina, Libanon, dan Suriah. Mereka menguasai wilayah ini selama beberapa dekade, bahkan menguasai sejumlah negeri seperti Tarablus di wilayah Syam selama seratus tahun.

Pertempuran yang terjadi antara Pasukan Salib dan kaum Muslim terus berlangsung tanpa henti selama seratus tahun. Berbagai upaya kaum Muslim untuk merebut kembali sejumlah wilayah yang dikuasai Pasukan Salib juga tidak pernah berhenti. Namun demikian, peperangan ini benar-benar telah mengguncang umat Islam, menurunkan status Daulah Islamiyah, serta mengakibatkan kerugian di pihak kaum Muslim. Kaum Muslim berhasil dihancurkan oleh kaum kafir. Walhasil, kemenangan berpihak kepada kaum kafir. Memang, kemenangan kekufuran atas Islam tidak begitu tampak nyata, baik secara intelektual maupun spiritual. Namun demikian, rasa malu, kekalahan, dan kehinaan sungguh mengharu-biru kaum Muslim; sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya oleh hati manusia manapun. Karena itulah, masa-masa Perang Salib dipandang sebagai masa-masa kekalahan kaum Muslim. Memang, kaum Muslim pada akhirnya berhasil mengalahkan Pasukan Salib dan berhasil mengusir mereka dari negeri-negeri Islam. Namun demikian, kaum Muslim gagal meneruskan misi pembebasan/penaklukan (*futuḥât*), atau tidak berhasil melanjutkan peperangan melawan orang-orang kafir. Sebabnya karena tidak lama setelah Perang Salib berakhir, datang pasukan Mongol. Terjadilah pembantaian yang sangat memilukan di Bagdad. Malapetaka

pun menimpa Islam dan kaum Muslimin. Peristiwa ini terjadi pada tahun (656 H/1258 M). Pada tahun ini pula Damaskus jatuh ke tangan bangsa Mongol. Setelah itu terjadilah Pertempuran Ain Jalut pada tanggal 3 September 1260 M, yang berakhir dengan kekalahan pasukan Mongol.

Kekalahan pasukan Mongol ini mampu menggerakkan kembali semangat jihad dalam jiwa kaum Muslim. Mereka mulai menyadari lagi pentingnya melanjutkan upaya mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Sejak itu, kaum Muslim memulai kembali sejumlah pertempuran melawan orang-orang kafir. Pertama-tama adalah jihad melawan Byzantium. Sejumlah pertempuran terjadi. Sejumlah kemenangan pun datang susul-menyusul. Keadaan ini terjadi sekitar abad ke-7 Hijrah (abad ke-13 Masehi). Saat itu kaum Muslim melanjutkan penaklukannya, meneruskan peperangan, mengarungi berbagai medan pertempuran. Kemenangan demi kemenangan kembali selalu bisa diraih oleh kaum Muslim. Sekalipun kaum Muslim mengalami sejumlah kekalahan dalam pertempuran, secara umum mereka berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai negeri-negeri kaum kafir. Daulah Islamiyah kemudian menjadi negara pertama (adidaya). Keadaan ini terus berlangsung selama empat abad atau sampai pertengahan abad ke-12 Hijrah (abad ke-18 Masehi), yakni sampai terjadinya Revolusi Industri di Eropa. Revolusi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan negara-negara Eropa.

Kaum Muslim terhenyak dan bingung menyikapi revolusi tersebut. Perimbangan kekuasaan di dunia pun segera mengalami perubahan. Daulah Islamiyah mulai mengalami kemunduran secara perlahan-lahan hingga akhirnya menjadi mangsa negara-negara kafir yang serakah. Daulah Islamiyah mulai melepaskan sejumlah wilayah yang pernah ditaklukannya dan sejumlah negeri yang pernah tunduk di bawah kekuasaannya. Sebaliknya, negara-negara kafir mulai merebut wilayah-wilayah tersebut sejengkal demi sejengkal. Peristiwa ini menandai awal kemunduran Islam sekaligus akhir dari kejayaan umat Islam.

Sejak saat itu, negara-negara Eropa mulai berpikir untuk menghapuskan Daulah Islamiyah sekaligus menghancurkan Islam dari

kancan kehidupan dan pergaulan antar bangsa. Dengan kata lain, mereka mulai memikirkan Perang Salib baru. Namun demikian, tidak seperti Perang Salib lama, Perang Salib baru ini tidak sekadar berupa invasi militer untuk mengalahkan tentara Muslim dan menaklukkan Daulah Islamiyah. Perang Salib baru ini lebih menakutkan dan menimbulkan akibat yang lebih dahsyat. Peperangan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mencabut akar-akar Daulah Islamiyah. Dengan begitu, tidak akan ada lagi benih-benih yang tertinggal yang dapat menumbuhkannya kembali. Peperangan tersebut juga dirancang untuk mencabut akar-akar Islam dari dalam jiwa kaum Muslim. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang tersisa kecuali tumpukan seremoni keagamaan dan aktifitas ritual spiritual belaka. []

KONSPIRASI NEGARA-NEGARA EROPA MELAWAN NEGARA ISLAM

Ada perbedaan di antara negara-negara kafir dalam upaya membagi wilayah kaum Muslim. Akan tetapi, pada dasarnya mereka bersepakat sepenuhnya terhadap gagasan untuk menghancurkan Islam. Berbagai upaya mereka melakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Mula-mula mereka menyulut semangat nasionalisme dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Eropa. Mereka mendorong setiap bangsa di Eropa untuk melawan Daulah Islam. Mereka juga memberikan bantuan senjata dan dana kepada bangsa-bangsa di Eropa untuk memberontak terhadap Daulah Islam. Demikianlah sebagaimana yang terjadi di Serbia dan Yunani. Negara-negara Eropa berusaha menikam Daulah Islam dari belakang. Prancis menyerang Mesir sekaligus menjajahnya pada bulan Juli 1798, kemudian bergerak menuju Palestina dan mendudukinya. Prancis berupaya menduduki seluruh wilayah Syam untuk memukul secara telak Daulah Islam. Akan tetapi, mereka berhasil dilumpuhkan. Bahkan mereka berhasil diusir dari Mesir dan dipaksa menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya kepada Daulah Islam.

Kemunculan Gerakan Wahabi dan Pemerintahan Saudi

Inggris berupaya menyerang Daulah Islam dari dalam melalui agennya, Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Untuk itu Gerakan Wahabi mulai diorganisir dengan membentuk kelompok di tengah-

tengah masyarakat. Kelompok ini awalnya dipimpin oleh Muhammad bin Saud, yang dilanjutkan oleh anaknya, Abdul Aziz. Inggris memberikan bantuan senjata dan dana kepada mereka. Lalu mereka meneruskan upaya untuk merampas wilayah kaum Muslim yang berada dalam kekuasaan Khilafah. Mereka melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Khalifah dan melawan pasukan Amirul Mukminin dengan dukungan dan bantuan dari Inggris. Gerakan Wahabi berupaya merampas wilayah yang dipimpin oleh Khalifah. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengatur wilayah tersebut sesuai dengan mazhab yang mereka anut sekaligus menghancurkan mazhab lain dengan kekerasan. Mereka menyerang Kuwait dan mendudukinya pada tahun 1788. Mereka lalu bergerak ke utara sampai mereka mengepung Bagdad. Mereka berupaya merampas Karbala dan makam Husain ra., cucu Rasulullah saw. Mereka berniat menghancurkan makam tersebut dan melarang kaum Muslim untuk mengunjunginya.

Pada tahun 1803 Gerakan Wahabi menyerang Makkah sekaligus mendudukinya. Pada musim semi tahun 1804, Madinah jatuh ke tangan mereka. Mereka menghancurkan kubah besar yang digunakan untuk menaungi makam Rasulullah saw. dan mempreteli seluruh batu perhiasan dan ornamen-ornamennya yang sangat berharga. Setelah menyelesaikan perampasan seluruh wilayah Hijaz, mereka bergerak menuju Syam mendekati kota Hims. Pada tahun 1810, mereka menyerang Damaskus untuk kedua kalinya. Saat yang sama, mereka juga menyerang Najaf. Damaskus mempertahankan diri dengan gagah berani dan mencapai kemenangan. Namun demikian, pada saat mengepung Damaskus, gerakan Wahabi bergerak ke utara dan menyebarluaskan kekuasaannya ke hampir seluruh wilayah Suriah hingga ke Halab (Aleppo).

Telah diketahui dengan pasti bahwa gerakan Wahabi ini diprovokasi dan didukung oleh Inggris. Alasannya, karena keluarga Saud adalah agen Inggris. Inggris memanfaatkan mazhab Wahabi—yang merupakan salah satu mazhab Islam dan pendirinya adalah salah seorang mujtahid—dalam sejumlah kegiatan politik untuk melawan Daulah Islamiyah dan menyerang mazhab-mazhab lain. Dengan itu, akan timbul perang antar mazhab dalam tubuh Daulah Utsmaniyah.

Pengikut mazhab Wahabi tidak menyadari masalah ini. Sebaliknya, Raja Saudi dan pengikutnya menyadari sepenuhnya hal ini. Sebabnya, karena hubungan yang terjadi bukanlah antara Inggris dan Muhammad bin Abdul Wahab, mujtahid pendiri mazhab Wahabi, namun antara Inggris dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud dan dilanjutkan oleh keturunan Ibnu Saud.

Muhammad bin Abdul Wahab awalnya bermazhab Hanbali. Ia lalu berijtihad dalam sebagian masalah. Ia memandang bahwa kaum Muslim yang mengikuti mazhab lain berbeda dengannya dalam sejumlah perkara. Ia lalu menyerukan pendapatnya, mengamalkannya sekaligus menyerang dengan sengit pendapat-pendapat lain. Akibatnya, ia menghadapi perlawanan dan penentangan yang bertubi-tubi dari sejumlah ulama, pemimpin, dan tokoh masyarakat. Mereka memandang bahwa berbagai pendapat Abdul Wahab bertentangan dengan hal-hal yang selama ini mereka pahami dari al-Kitab dan as-Sunnah. Sebagai contoh, ia menyatakan bahwa berziarah ke makam Rasulullah saw. yang agung adalah haram dan termasuk salah satu kemaksiatan. Ia bahkan lebih jauh menyatakan bahwa siapa saja yang berziarah ke makam Rasulullah saw. tidak berhak mengqashar shalatnya saat dalam perjalanan. Alasannya, karena ia melakukan safar dalam kemaksiatan. Muhammad bin Abdul Wahab mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah saw:

Janganlah bersusah-payah melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidku ini, Masjid al-Haram. dan Masjid al-Aqsa.

Dari hadits ini, Muhammad bin Abdul Wahab memahami bahwa Rasulullah saw. telah melarang kaum Muslim untuk bersusah-payah melakukan perjalanan ke tempat lain selain ke tiga masjid tersebut. Dengan demikian, menurutnya, bersusah-payah berziarah ke makam Rasulullah saw. sama dengan bersusah-payah selain ke tiga masjid itu. Artinya, perbuatan tersebut termasuk perbuatan haram dan berdosa.

Sebaliknya, mazhab-mazhab lain berpendapat bahwa berziarah ke makam Rasulullah saw. adalah sunnah dan *mandûb*, yang pelakunya diberi pahala. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Akan tetapi sekarang, berziarahlah kalian.

Karena itu, menziarahi makam Rasulullah saw. tentu lebih utama dimasukkan ke dalam pengertian hadits di atas. Apalagi terdapat sejumlah hadits lain yang menjelaskan ihwal ziarah kubur. Mereka memandang hadits yang dijadikan dalil oleh Muhammad bin Abdul Wahab dikhususkan untuk menziarahi masjid-masjid. Artinya, konteksnya berkaitan dengan aktivitas menziarahi masjid-masjid, tidak lebih dari itu. Hadits tersebut tidak bersifat umum, namun bersifat khusus dan berkaitan dengan topik tertentu: *Janganlah kalian bersusah-payah untuk melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid.* Dengan demikian kaum Muslim tidak boleh berziarah ke Masjid Aya Sofia di Istanbul atau ke Masjid Umayyah di Damaskus. Alasannya, karena Rasulullah saw. telah membatasi ziarah ke masjid-masjid hanya ke tiga masjid tersebut, tidak lebih. Oleh karena itu, kaum Muslim tidak boleh berziarah ke masjid lain selain ke tiga masjid di atas. Dengan demikian, masalahnya khusus terkait dengan menziarahi masjid.

Berbeda dengan masalah itu, kaum Muslim boleh berkunjung untuk keperluan bisnis, mengunjungi kerabat dan teman, atau mengunjungi tempat-tempat wisata, dan sebagainya. Dengan demikian, hadits tersebut tidak secara khusus melarang aktivitas safar dan membatasi kunjungan hanya ke tiga masjid itu. Akan tetapi, hadits di atas melarang kaum Muslim untuk berziarah ke masjid lain selain ke tiga masjid tersebut. Atas dasar ini, para penganut mazhab yang lain menganggap pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pendapat yang salah dan bertentangan dengan apa yang selama ini mereka pahami dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Konflik antara Muhammad bin Abdul Wahab dan para penganut mazhab lainnya semakin sengit hingga Abdul Wahab diusir dari negerinya.

Pada tahun 1740, Abdul Wahab meminta perlindungan kepada Muhammad bin Saud, pemimpin Bani Anzah. Saud bermusuhan dengan Syaikh Uyainah dan dia tinggal di Dir'iyyah, jaraknya hanya enam jam perjalanan dari Uyainah. Di sanalah Saud berjumpa dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang diterima dan disambut dengan hangat. Abdul Wahab lalu menyebarluaskan berbagai pendapat dan pemikirannya di tengah-tengah masyarakat Dir'iyyah dan daerah-daerah di sekitarnya. Ia mendakwahkan berbagai gagasan dan pendapatnya dalam jangka beberapa waktu hingga memperoleh sejumlah pendukung dan pengikut. Amir Muhammad bin Saud pun mulai menunjukkan minatnya pada berbagai pemikiran dan pendapat Abdul Wahab. Ibn Saud pun mulai mendekati Abdul Wahab.

Pada tahun 1747, Muhammad Ibn Saud mengumumkan penerimaannya terhadap berbagai pendapat dan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Ibn Saud juga mengumumkan dukungannya kepada Abdul Wahab sekaligus pada berbagai pemikiran dan pendapatnya. Dengan adanya aliansi di antara keduanya, dimulailah gerakan Wahabi hingga muncul ke permukaan dengan wujud gerakan dakwah maupun melalui jalur pemerintahan. Muhammad bin Abdul Wahab mulai mendakwahkan gagasan-gagasannya dan mengajari masyarakat tentang hukum-hukum yang diadopsinya. Pada saat yang sama, Muhammad bin Saud menerapkan hukum-hukum yang diadopsi gerakan Wahabi tersebut atas penduduk yang berada di bawah pemerintahan dan kekuasaannya.

Gerakan Wahabi mulai menyebarluaskan pengaruhnya ke daerah-daerah dan kabilah-kabilah di sekitar Dir'iyyah melalui gerakan dakwah dan melalui jalur pemerintahan. Kekuasaan Muhammad bin Saud pun mulai bertambah luas. Hanya dalam jangka waktu 10 tahun ia berhasil menjadikan wilayah seluas 30 mil persegi menyerahkan kekuasaan kepadanya dan pada mazhab baru itu. Namun demikian, perluasan wilayah itu dicapai melalui jalan dakwah dan kekuasaan pemimpin suku Anzah. Tidak seorang pun yang menentang dan melawannya. Bahkan Amir al-Ihsa' yang pernah mengusir Muhammad bin Abdul Wahab dari Uyainah tidak menentang ekspansi tersebut. Ia juga tidak berusaha mengumpulkan pasukan untuk melawannya,

kecuali pada tahun 1757. Namun, Amir al-Ihsa' berhasil dikalahkan. Muhammad bin Saud lalu merampas kekuasaannya. Akibatnya, kekuasaan suku Anzah atau kekuasaan Muhammad bin Saud dan kekuasaan mazhab yang baru ini (Wahabi) berhasil memerintah Dir'iyyah dan wilayah di sekitarnya, termasuk menguasai al-Ihsa'. Pada saat itulah mazhab Wahabi diterapkan di seluruh wilayah tersebut dengan dukungan dari penguasa.

Namun demikian, setelah perseteruannya dengan Amir al-Ihsa' dan penaklukan wilayah kekuasaannya, gerakan Wahabi terhenti sampai di sini. Tidak banyak diketahui apakah setelah itu gerakan Wahabi masih meluas atau tetap berlangsung dengan sejumlah aktivitas. Yang pasti, gerakan ini hanya terbatas di wilayah itu. Perjalanan Muhammad bin Saud pun terhenti sampai di sini. Mazhab Wahabi juga terhenti sampai di batas wilayah ini. Setelah ini mazhab ini pun 'tidur' terlelap dan mengalami stagnasi.

Pada tahun 1765 Muhammad bin Saud meninggal dunia. Kepemimpinan suku Anzah dilanjutkan oleh anaknya, Abdul Aziz. Abdul Aziz melanjutkan jejak langkah kepemimpinan ayahnya. Ia memerintah wilayah yang pernah berada dalam kekuasaan ayahnya itu. Akan tetapi, Abdul Aziz tidak melakukan aktivitas gerakan atau perluasan apapun ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan demikian, gerakan Wahabi tetap tertidur dan terhenti. Tidak ada informasi apapun yang terdengar mengenai gerakan ini. Tidak ada satu pun wilayah tetangganya yang menyebut-nyebut gerakan ini atau merasa khawatir terhadap invasinya.

Namun demikian, 41 tahun sejak kemunculan gerakan Wahabi, yakni dari tahun 1747 hingga 1788, atau setelah 31 tahun (1757-1788) sejak masa stagnasinya, gerakan Wahabi tiba-tiba memulai lagi aktivitasnya. Gerakan Wahabi menyusun metode baru dalam menyebarluaskan mazhabnya. Lalu mazhab ini pun dikenal secara luas di luar perbatasan, di seluruh sudut Negara Islam dan ke negara-negara lain. Gerakan ini mulai menimbulkan keguncangan dan kekhawatiran di wilayah-wilayah sekitarnya, bahkan menciptakan keguncangan dan kekhawatiran di seluruh Negara Islam.

Pada tahun 1787 Abdul Aziz terdorong untuk mendirikan suatu Dewan Imarah sekaligus membentuk sistem kepemimpinan dengan

sistem pewarisan (secara turun-temurun) atau yang dikenal dengan putra mahkota. Sistem ini mengharuskan Abdul Aziz menunjuk anaknya Sa'ud sebagai penggantinya. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian berkumpul. Di hadapan orang-orang tersebut, Abdul Aziz menyatakan bahwa hak imarah (kekuasaan) ditentukan hanya untuk keluarganya dan bahwa yang berhak melanjutkan kepemimpinannya hanyalah anak-anaknya. Pada kesempatan itu, ia juga mengumumkan salah seorang anaknya, Sa'ud, sebagai penggantinya. Kemudian orang-orang tersebut, yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab, memberikan persetujuan sekaligus pengakuan terhadap ketetapan tersebut. Dengan begitu, Dewan Imarah didirikan untuk suatu negara, bukan untuk suatu kabilah atau beberapa kabilah. Tampak pula bahwa kepemimpinan mazhab Wahabi pun ditentukan hanya untuk keluarga dan keturunan Muhammad bin Abdul Wahab.

Setelah penetapan pergantian kepemimpinan keemiran (kerajaan) dan mazhab Wahabi, gerakan ini tiba-tiba memulai kembali aktivitasnya dengan melakukan penaklukan dan perluasan wilayahnya. Dalam menyebarluaskan mazhabnya, gerakan Wahabi kembali mengangkat senjata. Pada tahun 1788, Abdul Aziz memberangkatkan pasukan yang sangat besar dan bersenjata lengkap. Pasukan tersebut menyerang Kuwait, menaklukkannya sekaligus menduduki wilayah tersebut. Sebelumnya, pasukan Inggris pernah berusaha merebut Kuwait dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Namun, mereka mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena negara-negara lain—Prancis, Jerman, dan Rusia—menentanginya, sementara Daulah Khilafah juga melakukan perlawanan sengit terhadap Inggris. Upaya pemisahan Kuwait dari kekuasaan Daulah Islam dan gerak maju pasukan Inggris ke arah utara untuk melindungi wilayah itu telah mengundang perhatian negara-negara besar seperti Rusia, Jerman, dan Prancis, termasuk Daulah Islam, tentang rencana Inggris untuk menguasai sendiri Negara Islam. Selain itu, peperangan tersebut akan tampak jelas bersifat perang mazhab yang dapat membangkitkan emosi keagamaan.

Demikianlah, kaum Wahabi tiba-tiba memulai kembali aktivitasnya setelah mereda selama beberapa dekade. Mereka

melanjutkan aktivitasnya dengan metode baru, yaitu menyebarluaskan mazhab Wahabi melalui jalan peperangan dan penaklukan. Tujuannya adalah untuk menghapuskan simbol-simbol mazhab-mazhab lain dari realitas kehidupan sekaligus menggantinya dengan mazhab mereka. Mereka memulai aktivitasnya dengan menyerang Kuwait dan merampas wilayahnya. Kemudian mereka mengiringinya dengan sejumlah ekspansi ke wilayah-wilayah lain. Akibatnya, mereka mengundang kekhawatiran dan gangguan bagi wilayah-wilayah di sekitar Semenanjung Arab: Irak, Syam, dan Daulah Utsmaniyah sebagai Daulah Khilafah. Mereka mengacungkan pedang untuk memerangi kaum Muslim. Tujuannya adalah agar mereka mau menanggalkan keyakinan mereka yang berbeda dengan pendapat mazhab Wahabi. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk menganut paham Wahabi. Gerakan Wahabi juga berusaha memerangi Khalifah dan menaklukan negeri-negeri Islam.

Pada tahun 1792 Muhammad bin Abdul Wahab meninggal. Anaknya kemudian menggantikan kedudukannya, persis sebagaimana Sa'ud menggantikan kedudukan bapaknya, Abdul Aziz. Demikianlah, pada masa-masa selanjutnya para amir dari keluarga Sa'ud menganut mazhab Wahabi sebagai alat politik untuk menyerang Daulah Utsmaniyah sebagai Daulah Khilafah. Mereka juga menyulut sejumlah perang mazhab di antara kaum Muslim.

Konspirasi Inggris Melawan Daulah Islam

Keagenan dan kesetiaan keluarga Sa'ud kepada Inggris adalah perkara yang telah diketahui dengan pasti oleh Daulah Islam dan negara-negara besar lainnya seperti Prancis, Jerman, dan Rusia. Telah diketahui pula bahwa mereka benar-benar dikendalikan oleh Inggris. Inggris sendiri tidak pernah menyembunyikan sikapnya dalam mendukung Saudi sebagai suatu negara. Di samping itu, sejumlah besar senjata dan perlengkapan perang yang dikirimkan melalui India serta dana yang digunakan untuk membiayai perang dan melengkapi pasukan mereka tidak lain adalah senjata dan dana dari Inggris. Karena itulah, negara-negara Eropa lainnya, terutamanya Prancis, menentang

gerakan Wahabi karena dianggap sebagai representasi dari gerakan Inggris.

Daulah Khilafah pernah berupaya untuk menghentikan gerakan Wahabi, namun gagal menghentikan mereka. *Wali* (gubernur bawahan Khalifah) di Madinah, Bagdad dan Damaskus tidak mampu mengendalikannya. Selanjutnya Khilafah meminta Gubernur Mesir, Muhammad Ali, untuk mengerahkan sejumlah pasukan untuk memerangi gerakan Wahabi ini. Pada awalnya, Muhammad Ali tidak menjalankan tugas ini. Tentu saja, karena ia adalah agen Prancis, dan Prancis lah yang membantunya saat berupaya melakukan revolusi di Mesir sekaligus merebut kekuasaan di kegubernuran Mesir, yang kemudian memaksa Khilafah untuk memberikan pengakuan kepadanya. Namun demikian, atas persetujuan dan bujukan Prancis, Muhammad Ali memenuhi permintaan Sultan (Khalifah) pada tahun 1811. Muhammad Ali mengirim anaknya, Thassun, untuk memerangi kaum Wahabi. Sejumlah pertempuran pun berlangsung antara tentara Mesir dan kaum Wahabi. Akhirnya, tentara Mesir berhasil menduduki Madinah pada tahun 1812. Kemudian pada tahun 1816 Muhammad Ali mengirim putranya, Ibrahim dari Kairo, yang mendesak kaum Wahabi hingga mereka mundur sampai ke ibu kotanya, Dir'iyah, dan berlindung di sana. Selanjutnya Ibrahim mengepung mereka pada bulan April 1818. Pengepungan berlangsung sepanjang musim panas. Pada bulan September 1818 kaum Wahabi menyerah. Pasukan Ibrahim menghancurkan Dir'iyah hingga rata dengan tanah. Diriwayatkan bahwa Ibrahim menghancurkan sepenuhnya Dir'iyah hingga tidak tampak lagi bekas-bekasnya yang tertinggal. Dengan begitu, berakhirlah konspirasi Inggris melawan Daulah Islam pada masa itu.

Upaya Prancis Menyerang Daulah Islam

Setelah Inggris, Prancis berupaya menyerang Daulah Islam dari belakang melalui agennya, Muhammad Ali, Gubernur Mesir. Prancis mendukung secara terbuka Muhammad Ali, baik secara politik maupun internasional. Lalu Muhammad Ali memisahkan diri dan menyatakan perang terhadap Khalifah. Ia kemudian bergerak untuk menaklukkan Syam pada tahun 1831. Ia berhasil menduduki Palestina, Libanon,

dan Suriah. Ia juga mulai menyusup ke Anatolia. Akan tetapi, Khalifah kemudian mengirim pasukan yang kuat untuk melawannya. Inggris, Rusia, dan kedua negara Jerman turut serta menentang Muhammad Ali. Pada bulan Juli 1840, Inggris, Rusia, dan kedua negara Jerman membentuk kerjasama yang disebut dengan "*Quadrilateral Alliance*" (Aliansi Empat Negara). Melalui aliansi ini, dengan dalih untuk mempertahankan kesatuan Daulah Utsmaniyah, keempat negara tersebut memaksa Muhammad Ali untuk menyerahkan Suriah. Sikap negara-negara Eropa tersebut menguntungkan posisi Khalifah secara internasional. Hal itu membantu Khalifah untuk memerangi Muhammad Ali sekaligus memaksanya untuk keluar dari Suriah, Palestina, dan Libanon. Selanjutnya, Muhammad Ali kembali ke Mesir. Khalifah pun rela untuk tetap menjadikannya sebagai gubernur di bawah kekuasaan Khalifah. []

PENGARUH SEMANGAT NASIONALISME DAN SENTIMEN SEPARATISME

Upaya negara-negara Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Rusia, untuk menghapuskan Daulah Islam dari realitas kehidupan terus berlangsung. Namun demikian, berbagai upaya mereka untuk menghantam Daulah Islam dari belakang melalui sejumlah perang yang terorganisasi, dengan melibatkan banyak pasukan bersenjata, dan melalui sejumlah medan pertempuran selalu mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut bukan hanya karena kekuatan pertahanan yang dimiliki Khalifah semata, tetapi terutama karena konstelasi politik internasional serta konflik di antara negara-negara Eropa dalam membagi-bagi pampasan perang (daerah-daerah jajahan, *peny.*).

Sebaliknya, berbagai upaya yang dilakukan oleh negara-negara Eropa itu di sejumlah wilayah Eropa, seperti Serbia, Hongaria, Bulgaria, Yunani dan sebagainya menuai keberhasilan. Hal itu karena mereka berupaya menguasai wilayah-wilayah itu dengan cara membangkitkan semangat nasionalisme dan sentimen separatisme yang disebut dengan gerakan "kemerdekaan". Karena itulah, negara-negara Eropa itu kemudian mengadopsi cara ini—yaitu membangkitkan semangat nasionalisme dan sentimen "kemerdekaan" atau separatisme—ke seluruh negeri/wilayah yang berada dalam naungan Bendera Islam (Daulah Khilafah Islam) yang diperintah oleh Khalifah kaum Muslim. Mereka memusatkan kegiatannya terutama kepada bangsa Arab dan Turki. Prancis dan Inggris membuka kedutaan di Istanbul. Dimulailah

upaya membangkitkan nasionalisme dan separatisme di wilayah-wilayah utama kaum Muslim. Kegiatan mereka secara khusus dilakukan di Bagdad, Damaskus, Beirut, Kairo, dan Jeddah. Dua markas kegiatan didirikan untuk melaksanakan misi ini, yaitu di Istanbul untuk menyerang Daulah Islam di ibukotanya, dan di Beirut untuk menyerang Daulah Islam melalui provinsi-provinsinya, khususnya di negeri-negeri yang menggunakan Bahasa Arab.

Peran Markas Kegiatan Beirut dalam Upaya Melawan Khilafah

Markas kegiatan di Beirut yang merupakan markas kufur untuk menyerang Islam dan Daulah Islam. Markas tersebut telah dirancang untuk bekerja dalam jangka panjang, dengan tujuan untuk meraih hasil-hasil dengan jangkauan yang luas. Adapun markas kegiatan di Istanbul dirancang untuk tujuan jangka pendek, yakni untuk memperoleh hasil-hasil dalam waktu yang singkat tetapi menimbulkan pengaruh yang luas. Dengan demikian, markas kegiatan di Beirut dirancang layaknya racun yang mematikan. Markas ini mampu mengubah ribuan anak-anak kaum Muslim menjadi kafir. Markas ini juga mampu mengubah berbagai interaksi sosial yang Islami menjadi interaksi yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan kufur. Ternyata, pengaruh yang ditimbulkan oleh markas kegiatan ini sangat efektif dalam menyerang Daulah Islam selama Perang Dunia Pertama.

Di Beirut kaum kafir Barat memulai aktivitas politik segera setelah Ibrahim Pasha ditarik secara langsung dari Syam. Pada tahun 1842, suatu komite dibentuk untuk mendirikan asosiasi ilmiah di bawah bimbingan dan program langsung dari *The American Mission*. Komite itu menjalankan programnya selama lima tahun hingga tahun 1847, yaitu saat mereka mendirikan suatu asosiasi yang dikenal dengan *The Science and Arts Association* (Asosiasi Sains dan Seni). Asosiasi ini dipimpin oleh dua orang Nasrani, yang dikenal sebagai kaki-tangan Inggris yang paling berbahaya. Mereka adalah Butrus al-Bustani dan Nasif al-Yaziji. Mereka didukung oleh Kolonel Churchill dari Inggris dan Eli Smith serta Cornilos Van Dick dari Amerika.

Tujuan asosiasi ini pada mulanya tidak jelas. Namun kemudian, tujuan mereka mulai tampak jelas saat mereka menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan kepada kalangan dewasa dan mendirikan sekolah bagi anak-anak. Mereka juga memberikan motivasi kepada kalangan dewasa dan kalangan anak-anak, membiasakan mereka dengan budaya Barat, mengajari mereka berbagai pemikiran Barat, serta mengarahkan mereka pada tujuan tertentu. Akan tetapi, sekalipun mereka berusaha dengan keras, selama dua tahun mereka hanya mampu merekrut 50 orang anggota saja dari seluruh wilayah Syam. Semuanya beragama Nasrani dan kebanyakan berasal dari Beirut. Tidak ada seorang Muslim pun yang tertarik untuk bergabung dengan asosiasi ini. Bahkan dari kalangan *Druze* pun tidak ada yang menjadi anggotanya.

Kemudian asosiasi lain didirikan pada tahun 1850 dengan nama *Eastern Association* (Asosiasi Ketimuran). Asosiasi ini didirikan oleh Gerakan Jesuit di bawah pengawasan Pendeta Jesuit dari Prancis yang bernama Hendri Debrenier. Seluruh anggota asosiasi ini beragama Nasrani.

Pada tahun 1857, sebuah asosiasi kembali didirikan. Asosiasi ini menggunakan model baru yang berbeda dengan sebelumnya, yakni membatasi anggotanya hanya dari bangsa Arab saja; non-Arab tidak diperkenankan menjadi anggota asosiasi ini. Para pendirinya juga berkebangsaan Arab. Dengan cara ini, asosiasi ini berhasil menarik sejumlah kaum Muslim dan beberapa orang *Druze*. Mereka direkrut dalam kapasitasnya sebagai bangsa Arab. Sejumlah besar anggota bergabung hingga mencapai 150 orang. Beberapa tokoh duduk dalam kepengurusan, antara lain Muhammad Arsalan dari kelompok *Druze*, Hussain Bayham dari kalangan Islam, serta Ibrahim al-Yaziji dan anak Butrus al-Bustani dari kalangan Nasrani. Dua orang yang disebut terakhir adalah orang-orang yang merancang ide asosiasi tersebut serta berusaha keras untuk mewujudkannya. Keberhasilan asosiasi ini mendorong kaum kafir Barat untuk melakukan pendekatan langsung guna membangkitkan semangat nasionalisme dan sentimen separatisme, tanpa harus melalui cara menyebarluaskan pengetahuan,

serta menjalankan aktivitas secara terbuka tanpa melalui berbagai intrik dan kebohongan.

Pada tahun 1875 didirikan lagi sebuah organisasi bernama *The Secret Association* (Asosiasi Rahasia) oleh lima orang pemuda, yang merupakan lulusan dari Fakultas Protestan di sebuah universitas di Beirut. Kelima pemuda tersebut beragama Nasrani. Sejumlah kecil orang kemudian bergabung dengan asosiasi ini. Organisasi ini mulai memusatkan kegiatannya atas dasar suatu ide politik dan kemudian menjadi sebuah partai politik. Partai ini tegak di atas dasar nasionalisme Arab dan dianggap sebagai partai politik pertama yang berbasis nasionalisme Arab yang didirikan di wilayah kaum Muslim. Partai politik ini menyeru bangsa Arab serta mempropagandakan Arabisme dan nasionalisme. Partai ini berusaha memicu sentimen permusuhan terhadap Daulah Utsmaniyah dan menyebutnya sebagai "Negara Turki". Partai ini memperjuangkan pemisahan agama dari negara, menegakkan nasionalisme Arab sebagai dasar persatuan, serta mengubah loyalitas kaum Muslim pada akidah Islam menjadi loyal pada nasionalisme Arab semata.

Partai ini menerbitkan banyak selebaran sekaligus menyebarkan secara rahasia. Di antara selebaran tersebut ada yang berisi tuduhan terhadap Turki. Mereka menuduh Turki telah merampas Khilafah dari tangan bangsa Arab, melanggar kemuliaan syaria Islam dan bertindak sewenang-wenang dalam agama. Padahal pada kenyataannya, para aktivis organisasi rahasia ini dan para pengurusnya seluruhnya berasal dari kalangan Nasrani yang membenci Islam.

Setelah itu, berbagai gerakan nasionalis mulai bermunculan dan menyebar. Nasionalisme pun mulai berkembang luas. Namun demikian, kegiatan di Beirut ini dirancang oleh sejumlah negara Eropa dengan target hanya untuk merekrut mata-mata serta melakukan upaya-upaya yang bertujuan menghancurkan pemikiran Islam dan jiwa kaum Muslim. Secara politik, target yang ingin diraih asosiasi ini menurun. Meskipun demikian, secara intelektual, pengaruh yang ditimbulkannya sangat membahayakan.

Peran Markas Kegiatan Istambul dalam Menentang Negara Islam

Sebagaimana markas kegiatan di Beirut, markas di Istanbul dimanfaatkan oleh kaum kafir Barat untuk menyerang Negara Islam di pusat pemerirtahan serta menyerang para pejabatnya. Sementara itu, kaum kafir melakukan sejumlah aksi. Aksi yang paling penting dan menuai hasil yang paling hebat adalah pendirian organisasi "Turki Muda" alias "Komite Persatuan dan Kemajuan" (*Union and Progress Committee*). Komite ini pertama kali didirikan di Paris oleh para pemuda Turki yang benaknya telah dipenuhi dengan pemikiran Prancis dan dididik secara kuat dengan konsep "Revolusi Prancis". Sejak awal, organisasi ini didirikan sebagai komite revolusi rahasia. Pemimpin kelompok revolusioner ini adalah Ahmad Ridha Beik. Dia adalah figur yang cukup terkenal di kalangan masyarakat yang mempunyai gagasan untuk mengimpor kebudayaan Barat ke negeri kelahirannya, Turki. Komite ini kemudian mendirikan cabang-cabangnya di Berlin, Salanik, dan Istanbul.

Markas kegiatan di Paris diorganisasi dengan sangat rapi. Program-programnya sangat radikal. Cara-cara publikasinya dijalankan dengan solid. Mereka menerbitkan surat kabar yang bernama, *The News*. Surat kabar tersebut diselundupkan ke Istanbul bersama-sama dengan surat-surat dari Eropa, yang kemudian diterima oleh sekelompok pemuda Turki untuk disebarluaskan secara rahasia. Kelompok ini juga menerbitkan sejumlah leaflet politik yang diselundupkan dengan cara yang sama.

Di Berlin, markas kegiatan didirikan oleh masyarakat kelas menengah, mantan menteri negara, mantan pejabat tinggi, dan politisi ulung. Mereka menyerukan reformasi dan pelaksanaan urusan-urusan kenegaraan sesuai dengan sistem pemerintahan Jerman. Mereka menyerukan penyatuan berbagai kelompok masyarakat di dalam Daulah Utsmaniyah serta mendirikan suatu bentuk pemerintahan seperti Federasi Jerman.

Di Salanik, sebagian besar anggota markas kegiatan adalah para perwira militer yang terdidik dan memiliki pengaruh sangat kuat di kalangan angkatan bersenjata. Mereka dipersiapkan untuk melakukan

revolusi. Sejumlah pemimpin tokoh terkemuka (*Sheikh*) bergabung sehingga semakin memperkuat organisasi ini. Selain itu, beberapa pejabat muda, seperti Tal'at yang di kemudian hari diangkat menjadi perdana menteri, juga bergabung. Namun demikian, organisasi ini diperintah dan dikendalikan dari Paris. Mereka tidak pernah membantah pendapat Paris. Markas kegiatan di Paris mengarahkan mereka sepenuhnya pada berbagai teori dan pandangan Barat. Markas ini juga berusaha membangkitkan semangat perlawanan di kalangan mereka.

Penginapan kaum Masonis, terutama penginapan Italia yang besar di Salanik, sering digunakan untuk melaksanakan aktivitas kelompok ini. Secara kultural kelompok ini terbantu. Berbagai rapat sering diadakan di kamar-kamar penginapan kaum Masonis ini. Mata-mata negara tidak mungkin bisa mengakses kamar-kamar tersebut sekeras apa pun upaya yang mereka lakukan. Banyak anggota penginapan Masonis ini bergabung dengan Komite Persatuan dan Kemajuan. Komite menerima penggabungan tersebut dalam rangka memperbanyak anggotanya, memperkuat pengaruhnya, serta demi memperoleh bantuan. Selanjutnya, para anggota komite mendapatkan keuntungan dari cara-cara kaum Masonis membuka hubungan dengan Istanbul. Dengan begitu, mereka pun semakin dekat dengan Istana.

Organisasi Turki Muda atau Komite Persatuan dan Kemajuan memulai rapat-rapat rahasia dan mempersiapkan revolusi. Peristiwa tersebut terus berlangsung hingga tahun 1908, yaitu ketika komite ini melancarkan revolusi dan melakukan kudeta atas pemerintahan. Kekuatan komite ini semakin nyata. Negara-negara Eropa pun menunjukkan dukungannya. Pada musim gugur 1908, menjelang peresmian parlemen, para anggota komite cabang Salanik mengadakan suatu konferensi. Konferensi ini dianggap sebagai unjuk kekuatan yang pertama kalinya. Pemimpin partai pada saat itu adalah pendirinya, yaitu Ahmad Ridha Beik. Pada kesempatan itu, ia berpidato di hadapan para delegasi untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa senangnya atas keberhasilan partai. Dia juga menegaskan bahwa para penguasa Eropa menunjukkan keinginan baiknya terhadap pergerakan kaum nasionalis dan menyatakan kepuasannya terhadap keadaan negara (Turki).

Pada saat itu juga, yakni pada musim gugur 1908, Inggris mengangkat seorang duta besar baru untuk Istanbul bernama Gerald Luther. Saat tiba di Istanbul, sang duta besar baru itu disambut hangat oleh sekelompok orang dari Komite Persatuan dan Kemajuan. Mereka bahkan melepaskan kuda-kuda penarik kereta dari kereta Gerald Luther, lalu mereka menarik kereta tersebut beramai-ramai. Artinya, mereka rela menggantikan posisi kuda-kuda itu demi menunjukkan penghormatan yang luar biasa terhadap sang duta besar. Semua itu atas inisiatif dan dorongan Komite Persatuan dan Kemajuan sendiri. Kekaguman para aktivis organisasi ini terhadap pemikiran Barat sampai pada kondisi dimana mereka tidak lagi menyadari berbagai kontradiksi pemikiran tersebut dengan realitas hukum yang diterapkan di dalam Daulah Islam. Bahkan mereka sama sekali tidak menyadari pertentangannya dengan Islam. Kecerobohan dan ketidakcermatan mereka menunjukkan kebodohan mereka di mata bangsa Eropa. Bahkan seorang diplomat yang bekerja di Istanbul sampai pernah berkomentar, *"Mereka sering melakukan langkah kedua sebelum melakukan langkah pertama."*

Para aktivis Komite Persatuan dan Kemajuan terlalu terburu-buru menyerahkan berbagai urusan pemerintahan pada orang-orang yang telah dipengaruhi oleh hukum-hukum dan pemikiran Barat hingga akhirnya mereka mendapatkan kekuasaan dari Partai Turki Muda.

Ketika mereka menyadari bahwa siapa yang mengendalikan angkatan bersenjata pasti memiliki seluruh kekuasaan, maka mereka berupaya melakukan pengangkatan pimpinan angkatan bersenjata berdasarkan kebijakan partai. Akibatnya, seluruh anggota tentara memilih masuk partai daripada berkarir di militer. Mereka juga membuat undang-undang yang menyatakan, bahwa berdasarkan hukum, setiap warga negara Daulah Utsmaniyah mempunyai hak yang sama, sebagaimana yang dimiliki oleh seluruh bangsa Turki, serta harus melakukan kewajiban yang sama.

Komite tersebut mengendalikan sepenuhnya kekuasaan seluruh negara, sekarang dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, gagasan yang dipilih Barat untuk menyerang Negara Islam dan menghancurkan Khilafah berhasil dengan baik. Gagasan itu adalah

mendapatkan kekuasaan melalui anggota-anggota partai yang berkuasa dan melalui pendukung-pendukungnya yang tidak saja menganggap bahwa Islam tidak sesuai untuk masa sekarang, namun juga menganggap bahwa hanya pemikiran dan budaya Baratlah yang paling sesuai. Mereka juga menganggap bahwa penjagaan atas nasionalisme Turki merupakan salah satu kegiatan utama partai. Bahkan kesetiaan mereka terhadap nasionalisme Turki melebihi kesetiaan mereka pada apapun. Mereka menyombongkan dan mencurahkan segenap perhatian mereka pada nasionalisme ini. Mereka sampai menganggap bahwa Turki lebih baik daripada negeri-negeri kaum Muslim lainnya dan bahwa bangsa Turki lebih baik daripada seluruh kaum Muslim lainnya.

Dengan demikian, pendirian Partai Turki Muda atau Komite Persatuan dan Kemajuan merupakan salah satu aktivitas paling keji yang dilakukan Barat untuk menghancurkan Daulah Islam dan Islam. Cara tersebut memberikan hasil yang sangat cepat, mengingat tidak ada metode lain yang lebih cepat bagi sebuah partai untuk mengambil alih kekuasaan, selain dengan menggali jurang pemisah di antara para warga negara sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi jembatan yang dapat menghubungkan mereka. Karena itulah nasionalisme merupakan perkara yang paling berbahaya, yang memecah-belah umat serta menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan peperangan di kalangan mereka. Meskipun keanggotaan komite terbuka bagi semua warga negara, paham nasionalisme yang mereka anut telanjur membangkitkan gagasan nasionalisme di kalangan rakyat Daulah Islam. Demikianlah, bangsa Albania di Astana lalu mendirikan komite mereka sendiri, dan diikuti oleh bangsa Sirkasia dan Kurdi. Bangsa Romawi dan Armenia telah mendirikan organisasi rahasia mereka sebelumnya, lalu menjadikannya legal.

Bangsa Arab juga mendirikan organisasi yang dinamakan Persaudaraan Arab-Utsmaniyah di Astana. Mereka juga membuat suatu perkumpulan organisasi dengan nama yang sama. Namun, Komite Persatuan dan Kemajuan bersifat rasis, khususnya terhadap bangsa Arab. Mereka membiarkan setiap kaum mendirikan organisasi etnik sendiri, namun mereka mulai menentang pendirian organisasi-

organisasi Arab. Mereka membubarkan Komite Arab dan menutup perkumpulan organisasi tersebut dengan keputusan pemerintah. Mereka juga melakukan praktik diskriminasi etnik dalam tubuh angkatan bersenjata. Mereka menarik perwira-perwira Arab dari wilayah mereka masing-masing ke Istanbul dan menghalangi mereka mengikuti pendidikan militer ke Jerman. Mereka juga menghalangi anggota komite yang berkebangsaan Arab menjadi anggota Komite Sentral partai ini, meskipun mereka membuka keanggotaan komite ini bagi seluruh warga negara Daulah Utsmaniyah tanpa memandang apakah mereka berkebangsaan Turki, Arab, Sirkasia, atau Albania. Namun, ketika komite berhasil mengambil-alih kendali pemerintahan dan bangsa Turki mempunyai pengaruh yang kuat, mereka bertindak otoriter dan melarang anggota komite berkebangsaan Arab menduduki posisi-posisi penting. Mereka bahkan mulai mengubah komite tersebut menjadi komite yang khusus bagi bangsa Turki. Hal ini diikuti dengan langkah-langkah yang diterapkan padasejumlah badan pemerintahan, misalnya melepaskan Kementerian Wakaf dari tangan seorang Arab dan menyerahkannya kepada seorang berkebangsaan Turki. Mereka juga mengangkat orang-orang Turki untuk menduduki posisi Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Mereka juga mengangkat orang-orang berkebangsaan Turki sebagai gubernur di wilayah-wilayah Arab, yang dipilih dari orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab.

Upaya mereka semakin sempurna dengan menjadikan bahasa Turki sebagai bahasa resmi negara. Bahkan mereka sampai mengajarkan tata bahasa Arab (nahwu dan sharaf) dengan bahasa Turki. Penghinaan mereka terhadap bahasa Arab sedemikian rupa hingga seorang duta besar Daulah Utsmaniyah di Washington membuat suatu komunikasi pada tahun 1909. Komunikasi itu berisi larangan bagi warga negara Daulah Utsmaniyah yang tinggal Amerika untuk menggunakan bahasa selain bahasa Turki pada waktu berhubungan dengan kedutaan, sekalipun ia tahu bahwa dari sekitar setengah juta warga negara yang tinggal di Amerika tidak satu pun yang dapat berbahasa Turki.

Rasisme antara bangsa Turki dan Arab di kalangan militer semakin menyolok dan menjadi-jadi. Para perwira berkebangsaan Turki yang menjadi anggota Komite Persatuan dan Kemajuan

memperlihatkan sikap rasisme dalam melaksanakan promosi dan penempatan posisi-posisi penting dalam angkatan bersenjata. Para perwira berkebangsaan Arab menunjukkan kemarahannya. Namun demikian, mereka tetap menyadari kewajibannya untuk tetap setia pada Daulah Islamiyah. Mereka sadar bahwa masalah ini bukan sekadar masalah persatuan bangsa Turki dan bangsa Arab, namun masalah persatuan umat Islam. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa ketaatan mereka kepada Khalifah di Istanbul merupakan perintah dari Allah SWT, sementara Allah telah mengharamkan pembangkangan kepadanya. Mereka juga menyadari bahwa sesama Muslim adalah bersaudara; dilarang membiarkannya dizalimi maupun menzaliminya. Namun, beberapa perwira Arab mulai terpengaruh dengan keadaan ini. Pada akhir 1909 mereka meminta suatu pertemuan dengan kalangan yang berpengaruh dalam Komite Persatuan dan Kemajuan. Permintaan ini dikabulkan, lalu mereka mengadakan pertemuan di Istanbul. Mereka merundingkan sejumlah langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan secara pasti permasalahan antara bangsa Arab dan Turki. Pertemuan itu hampir saja menghasilkan keputusan untuk mengembalikan persatuan, membuang sikap-sikap rasis, dan mengembalikan semuanya hanya pada akidah Islam. Namun, beberapa tokoh muda Turki yang memuja nasionalisme Turki dibandingkan akidah Islam—seperti Ahmad Agha Beik, Yusuf Aqsyurah Beik dan yang lainnya—beranggapan bahwa terlalu menyakitkan untuk melepaskan nasionalisme mereka dan menyerahkan kesetiaan mereka hanya pada Islam. Mereka menyela dan memaki perwakilan bangsa Arab dengan kata-kata yang kasar sambil mengagungkan bangsa Turki. Akibatnya, pertemuan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya.

Komite meneruskan kebijakan rasis tersebut. Saat seluruh kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki, mereka mulai mengubah program-program komite menjadi khusus bagi kepentingan bangsa Turki. Perubahan ini memicu pengunduran diri semua anggota berkebangsaan Arab, Albania, Armenia, dan sejumlah anggota berkebangsaan Turki yang masih menjadikan akidah Islam sebagai asas, bukan nasionalisme.

Peran Kedutaan Negara-negara Eropa dalam Meletakkan Fondasi berbagai Organisasi dan Partai bagi Bangsa Arab

Dari kejadian ini, beberapa kedutaan negara Eropa mulai aktif membuat kontak-kontak dengan bangsa Arab. Mereka kemudian turut mendirikan Partai Desentralisasi dengan Kairo sebagai pusatnya dan Rafiq al-Azhim sebagai ketuanya. Mereka juga mendirikan sejumlah organisasi seperti Komite Reformasi di Beirut dan Forum Sastra serta sejumlah organisasi lainnya. Inggris dan Prancis menyusup di barisan orang-orang Arab yang menyerukan paham nasionalisme itu serta memberikan dana bagi gerakan tersebut. Pada tanggal 18 Juni 1913, dengan bantuan Prancis, pemuda-pemuda Arab mengadakan konferensi di Paris, yang menjadi deklarasi pertama kaum nasionalis Arab dalam bersekutu dengan Inggris dan Prancis melawan Daulah Utsmaniyah.

Ketika anggota Komite Persatuan dan Kemajuan mencium gelagat ini, mereka mendirikan *Turk Ojaghi Committee* yang berarti Komite Persaudaraan Turki. Tujuan komite ini adalah menghapuskan Islam dan mengubah Daulah Utsmaniyah menjadi Negara Turki. Kemudian mereka mulai menerbitkan buku-buku dan jurnal-jurnal ateistik. Di antaranya adalah buku karya penulis terkenal Turki, Jalal Nouri Beik, yang berjudul *The History of The Future* (Sejarah Masa Depan). Dalam buku itu ia menulis:

Penting bagi Pemerintah Astana untuk memaksa orang-orang Suriah meninggalkan tanah airnya. Negeri-negeri Arab, khususnya Irak dan Yaman, harus diubah menjadi koloni Turki, dalam rangka menyebarluaskan bahasa Turki sebagaimana bahasa agama ini (bahasa Arab). Dalam rangka melindungi masyarakat kita, kita wajib untuk menjadikan seluruh wilayah Arab menjadi wilayah Turki. Sebab, generasi muda Arab mulai dihindangi fanatisme rasial. Hal ini memberi kita ancaman berupa kesulitan yang besar sehingga kita harus berupaya mencegahnya sejak sekarang.

Dengan demikian, gejala nasionalisme dan sentimen patriotisme mempengaruhi jiwa. Akibatnya kesetiaan pada Islam berubah menjadi

kesetiaan pada nasionalisme dan patriotisme. Kecenderungan ini membutuhkan mereka tentang petunjuk Islam mengenai ancaman atau bahaya nasionalisme dan patriotisme. Tolak ukur bagi pemegang kekuasaan negara adalah nasionalisme dan patriotisme. Padahal Islam menyerukan persatuan bagi bangsa Arab dan bangsa Turki.

Lebih lanjut, pada saat Jamal Pasha berada di Suriah, ia menyaksikan para pemuda Arab melakukan upaya pengkhianatan terhadap Daulah Islam sesuai dengan petunjuk Prancis dan perintah Inggris. Ia menjadi semakin yakin ketika ia berhasil merampas dokumen yang ditemukan di konsulat Prancis di Damaskus. Oleh karena itu, ia bermaksud membujuk bangsa Arab untuk memelihara persatuan di kalangan warga Daulah Islam. Kemudian ia mengundang para pemimpin Arab pada pertemuan yang diadakan di Damaskus. Pada kesempatan itu ia berpidato di hadapan mereka dan mendesak mereka untuk bersatu. Di antara isi pidatonya tersebut, ia mengatakan sebagai berikut:

Anda harus percaya bahwa komite bangsa Turki yang Anda saksikan di Astana dan di tempat lain yang beranggotakan orang-orang Turki tidak bertentangan dengan aspirasi bangsa Arab. Anda benar-benar mengetahui tanpa ragu bahwa di dalam Kesultanan Utsmaniyah telah ada sejumlah pergerakan seperti pergerakan Bulgaria, Yunani, dan Armenia; lalu sekarang berdiri pergerakan Arab. Orang-orang Turki benar-benar telah lupa akan keberadaannya hingga mereka takut menyebut kebangsaannya. Spirit patriotisme mereka telah mati hingga mereka khawatir bangsa mereka akan terpecah-belah. Oleh karena itu, dengan tujuan untuk mengakhiri kekhawatiran ini, maka orang-orang Turki Muda bangkit dengan semangat untuk mendapatkan penghargaan yang layak. Mereka mengangkat senjata untuk mengajarkan semangat patriotik di kalangan bangsa Turki.

Dia menambahkan, "Hari ini saya mampu meyakinkan Anda sekalian bahwa aspirasi bangsa Turki sama sekali tidak bertentangan dengan aspirasi bangsa Arab, karena bangsa Arab dan Turki tidak lain adalah sesama saudara dengan tujuan-tujuan patriotiknya."

Dia juga menambahkan, “Ringkasnya, aspirasi utama partai tersebut, yaitu Partai Turki Muda (Persatuan dan Kemajuan) adalah untuk mendapatkan kehormatan bangsa Turki di mata bangsa-bangsa lain di dunia, dan untuk menegakkan hak hidupnya di sisi bangsa-bangsa lain pada abad kedua puluh.”

Demikianlah pidato Jamal Pasha yang bermaksud untuk menyatukan kaum Muslim di bawah bendera Khilafah Islamiyah dan menggagalkan usaha-usaha yang dilakukan bangsa Arab untuk memisahkan diri dari Turki, yaitu dari Khilafah, serta menghalangi mereka meminta bantuan dari kaum kafir Prancis dan Inggris.

Aktivitas Jamal Pasha yang memberikan hukuman gantung kepada para pengkhianat yang bekerjasama dengan Prancis dan Inggris dalam menentang Khilafah sungguh dapat dibenarkan. Alasannya, karena para pengkhianat tersebut, baik dari kalangan Muslim maupun kafir, telah mengingkari kebenaran Islam. Ia juga dibenarkan ketika menghancurkan setiap pengkhianat dan individu yang berusaha melawan Khilafah, sekalipun dia berjuang demi patriotisme, terlebih jika individu tersebut melawan Khilafah bersama dengan kaum kafir dan di bawah perintahnya. Namun, Jamal Pasha dan Partai Turki Muda (Komite Persatuan dan Kemajuan) juga pantas dihukum dan dipenjara karena memelihara ide patriotisme. Pidato menyejukkan yang ia sampaikan merupakan suatu kekeliruan. Sikap separatisme patriotik tidak seharusnya disikapi dengan cara tersebut, karena pidato tersebut mengindikasikan adanya doktrin-doktrin yang merusak, serta tidak memperhatikan Islam sebagai satu-satunya perekat antar warga negara dan satu-satunya ideologi bagi tegaknya Khilafah.

Kata-kata yang seharusnya dia ucapkan—yang dianggap sebagai keputusan akhir dan tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata selain itu—adalah bahwa kita semua harus memberikan kesetiaan hanya pada akidah Islam. Kita tidak boleh memberikan kesetiaan pada selain itu. Akidah ini harus menjadi satu-satunya tolok ukur bagi semua aktivitas kita. Namun, alih-alih mengatakan kalimat di atas, ia justru menenangkan kaum Muslim yang berbahasa Arab dengan berkata, “Aspirasi bangsa Arab tidak bertentangan sama sekali dengan aspirasi bangsa Turki.” Ia juga mengatakan, “Bangsa Arab dan Turki tidak lain

adalah sesama saudara dengan tujuan-tujuan patriotiknya.” Ia pun mengatakan, “Aspirasi utama partai tersebut, yaitu Partai Turki Muda (Persatuan dan Kemajuan) adalah untuk mendapatkan kehormatan bangsa Turki di mata bangsa-bangsa lain di dunia, dan untuk menegakkan hak hidupnya di sisi bangsa-bangsa lain pada abad kedua puluh”; yaitu dengan bangsa Inggris, bangsa Prancis, bangsa Italia, dan bangsa Yunani, atau dengan kata lain dengan bangsa-bangsa kafir.

[]

MISIONARISME DAN SERANGAN BUDAYA

Demikianlah, upaya membangkitkan nasionalisme dan sentimen patriotik di pusat pemerintahan Daulah Islam akhirnya membawa hasil. Negara-negara Eropa, khususnya Prancis dan Inggris, meraih keberhasilan yang luar biasa melakukan serangan terhadap Daulah Islam dengan serangan yang dahsyat dan keji. Namun, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya tidak berhenti dengan hanya menggunakan cara itu saja. Sejak abad akhir ke-16, mereka telah menggunakan cara lain dalam menentang Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa permusuhan yang membara dalam jiwa mereka, kebencian yang memuncak dalam kalbu-kalbu mereka terhadap Islam, serta permusuhan mereka terhadap pemikiran dan hukum Islam. Dengan demikian, selain menggunakan cara di atas, mereka juga menggunakan jalan lain untuk menyerang akidah dan hukum-hukum Islam. Istanbul dan Beirut adalah dua kota yang dipergunakan kaum kafir sebagai markas. Mereka juga berusaha menjadikan Kairo sebagai salah satu basisnya.

Di Beirut mereka merancang rencana yang dapat memberikan pengaruh dalam jangka panjang. Secara bertahap mereka mengeluarkan generasi muda dari atmosfer Islam dan mempengaruhi pemikiran kaum Muslim pada umumnya. Mereka menjalankan rencana tersebut melalui misionarisme dan serangan budaya yang berkedok ilmu pengetahuan. Untuk itu mereka menyiapkan dana yang sangat

besar. Mereka mendirikan beberapa organisasi misionaris, terutama berasal dari Prancis, Inggris, dan Amerika. Mereka juga melakukan serangan budaya melalui berbagai misi dan misionaris. Tujuannya adalah untuk meraih simpati warga negara beragama Nasrani serta menimbulkan keraguan pada kalangan Muslim terhadap agama mereka dan mengguncang akidahnya.

Peran Markas Kegiatan Malta dalam Invasi Misionaris

Kaum kafir mendirikan suatu pusat misionaris yang besar di Malta. Tempat ini digunakan sebagai markas misionaris dan pusat serangan budaya ke wilayah Islam. Dari sinilah kaum misionaris melancarkan serangannya. Mereka bermarkas di Malta selama beberapa waktu. Namun, mereka merasa perlu segera memperluas aktivitasnya. Kemudian mereka berpindah ke Syam pada tahun 1625. Mereka berupaya mendirikan gerakan misionaris di sana. Namun, aktivitas mereka sangat terbatas, tidak lebih dari sekadar mendirikan beberapa sekolah kecil dan menerbitkan beberapa buku agama. Mereka harus menderita dan terpaksa harus berpindah-pindah akibat halangan, penolakan, dan permusuhan dari semua orang, baik Muslim maupun Nasrani. Namun demikian, mereka masih gigih bertahan sampai tahun 1773. Saat itu, organisasi misionaris Jesuit dihapus dan lembaga-lembaga mereka ditutup, kecuali sejumlah misionaris yang lebih lemah seperti organisasi misionaris "Azariyyin".

Penyebarluasan Ekspedisi Misionaris di Negeri Syam

Meski tanpa kehadiran organisasi misionaris, pengaruh misionaris yang lemah beserta aktivitasnya tetap berjalan di Malta. Namun, pada tahun 1820 mereka memperbaharui kegiatannya. Mereka mendirikan pusat misionaris pertama di Beirut. Pada awalnya perhatian utama mereka terfokus pada kegiatan misionaris keagamaan dan budaya religius, sementara perhatian dalam masalah pendidikan masih lemah. Pada tahun 1834, ekspedisi misionaris meluas ke seluruh Syam. Hal ini terjadi berkat dorongan dari Ibrahim Pasha yang membolehkan mereka memasuki wilayah Syam secara leluasa. Ibrahim bersimpati terhadap gerakan misionaris dan mendukung pengaruh dan instruksi

dari Prancis. Begitu Ibrahim Pasha menguasai Syam—Palestina, Libanon, dan Suriah—kaum misionaris dari Inggris, Prancis dan Amerika disambut dan diterima dengan hangat oleh pemerintahan Ibrahim Pasha. Akibatnya, aktivitas mereka pun semakin intensif. Sebuah sekolah dibuka di desa Ainturah, Libanon. Organisasi misionaris Amerika pun mengirimkan mesin cetak ke Beirut untuk mencetak dan menerbitkan buku-buku. Aktivitas seorang misionaris terkenal dari Amerika, Eli Smith, menjadi sangat menonjol. Sebelumnya, ia bekerja di Malta sebagai relawan yang bertugas mengawasi percetakan misionaris. Ia datang ke Beirut pada tahun 1827. Namun, karena takut terhadap kaum Muslim dan jenuh karena kurangnya produktivitas, akhirnya ia kembali ke Malta saat dirinya tidak tahan lagi. Ia kembali lagi ke Beirut pada tahun 1834 atas pengaruh Prancis dan berkat pertolongan Muhammad Ali dan anaknya, Ibrahim Pasha. Misionaris ini dan istrinya mendirikan sebuah sekolah wanita. Jangkauannya pun semakin luas. Selanjutnya ia membaktikan hidupnya untuk bekerja di Beirut khususnya dan Syam pada umumnya. Demikianlah, segala usahanya mendorong maju kegiatan misionarisme.

Sementara itu, Ibrahim Pasha berinisiatif menerapkan kurikulum pendidikan Mesir sebagai kurikulum resmi di Suriah, termasuk Libanon. Kurikulum tersebut diadopsi dari kurikulum pendidikan Prancis. Hal ini merupakan peluang bagi kaum misionaris untuk memberikan sumbangan terhadap pendidikan dari sudut pandang misionaris, sesuai dengan rencana kaum kafir. Semakin lama, keterlibatan mereka semakin meluas, termasuk dalam bidang pers. Dengan demikian, gerakan misionaris menjadi semakin aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dengan cara yang sangat mencolok.

Menghasut Masyarakat Syam

Ketika Ibrahim Pasha ditarik dari negeri Syam pada tahun 1840, pemberontakan, kekacauan, dan gangguan keamanan meluas di Syam. Perwakilan negara-negara Barat, terutama kaum misionaris, mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya pengaruh Daulah Utsmaniyah. Mereka mulai menyusut konflik di tengah-tengah masyarakat Syam. Akibatnya, terjadilah serangkaian pembantaian di

tahun 1860. Bersamaan dengan terjadinya pembantaian-pembantaian itu, negara-negara Barat datang dengan mengirimkan pasukan perang ke pantai-pantai negeri Syam. Prancis mendaratkan pasukan angkatan daratnya di Beirut. Hal ini semakin memperkuat pengaruh kaum misionaris dan memperkokoh kekuatannya. Prancis semakin aktif mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Demikian pula kaum Jesuit. Mereka membuka berbagai sekolah dan perguruan tinggi, termasuk di antaranya perguruan tinggi Jesuit yang dinamakan Universitas Jesuit St. Joseph. Pada tahun 1866, misionaris Amerika membuka perguruan tinggi Protestan yang sekarang dikenal sebagai Universitas Amerika di Beirut. Universitas tersebut dipandang sebagai lembaga kufur yang paling berbahaya di negeri kaum Muslim. Lembaga ini melancarkan berbagai serangan yang sangat dahsyat terhadap pemikiran-pemikiran Islam, menentang kaum Muslim, serta mengubah keyakinan ribuan kaum muda Muslim menjadi pemikiran-pemikiran kufur.

Kedatangan kaum misionaris dan serangan budaya yang dialami oleh Daulah Islam tidak semata-mata berasal dari Prancis, Inggris, dan Amerika. Perhatian juga diberikan oleh kaum kafir Kekaisaran Rusia yang mengirimkan sejumlah besar ekspedisi misionaris. Salah satu ekspedisi misionaris dari Rusia yang tiba di negeri kaum Muslim terdiri dari para biarawati Karodt yang ikut serta memainkan peranan dalam melawan Islam bersama kelompok-kelompok misionaris lainnya. Memang, terdapat perbedaan sudut pandang politik di antara kelompok-kelompok misionaris dan perwakilan negara-negara Barat tersebut. Namun, mereka tetap bersepakat dalam hal pendekatan politik yang digunakan serta kepentingan yang diharapkan. Pendekatan yang dimaksud adalah: menghidupkan kebudayaan Barat di wilayah Timur; menegakkan akidah sekularisme yang memisahkan agama dari negara dan menjadikannya sebagai akidah kaum Muslim; membangkitkan keraguan kaum Muslim terhadap agamanya; serta memprovokasi kaum Muslim agar merendahkan sejarahnya sendiri dan memuja Barat beserta kebudayaannya. Semua bentuk serangan ini dilakukan dengan penuh rasa permusuhan dan penghinaan terhadap Islam dan kaum Muslim.

Selain itu mereka juga mendirikan suatu gerakan yang bertujuan mengarahkan orang-orang untuk kembali mempelajari bahasa Arab. Namun, tujuannya adalah untuk menjauhkan umat dari agama Islam dan mengarahkan mereka pada apa yang disebut dengan *Arabisme*. Gerakan ini dijalankan oleh kaum misionaris Nasrani sekalipun mereka kurang memahami bahasa Arab hingga tidak mampu mengapresiasi keindahan gaya bahasa al-Quran. Kaum Maronit, yang kebanyakan bertugas dalam ekspedisi-ekspedisi misionaris, sering membahas upaya membangkitkan kembali sastra Arab kuno dan memperkenalkan kembali gaya bahasa Arab klasik. Di antara tokoh-tokoh Maronit yang aktif dalam usaha tersebut adalah Nasif al-Yaziji dan Pendeta Louis Sheikho.

Dengan demikian, kaum Maronit memelopori kampanye nasionalisme Arab dan menghasut orang-orang untuk mengikuti paham tersebut. Mereka juga memelopori kebangkitan bahasa Arab dan mendorong orang untuk memusatkan perhatiannya pada masalah tersebut. Selanjutnya, berbagai buku dan terbitan yang membawa pemikiran-pemikiran Barat mulai bermunculan. Badai besar mengenai wacana kebangsaan Arab, Arabisme, dan bahasa Arab melanda wilayah tersebut. Hal ini disertai dengan pengabaian terhadap Islam dan pemikiran-pemikiran Islam.

Demikianlah, pusat misionaris di Beirut telah melancarkan serangan terhadap akidah Islam dan pemikiran-pemikiran Islam sekaligus mengarahkan kaum Muslim pada pemikiran-pemikiran Barat.

Pusat misionaris ini berhasil mewujudkan hasil-hasil yang sangat merusak. Pusat misionaris ini juga berhasil menciptakan pengaruh yang sangat besar bagi hilangnya pemikiran-pemikiran Islam dalam berbagai interaksi sosial, hubungan muamalah, dan berbagai aspek kehidupan lainnya serta bagi penghancuran Daulah Islam. []

UPAYA MEMASUKKAN HUKUM-HUKUM KONSTITUSI BARAT

Berkaitan dengan markas kegiatan di Istambul, negara-negara Barat merasa tidak puas dengan hanya merusak anak-anak kaum Muslim di berbagai universitas dan sekolah serta melalui propaganda. Mereka juga memusatkan perhatian pada Daulah Islam. Tujuannya adalah mengubah sistem pemerintahan dan hukum-hukum syariah dengan cara menghilangkannya, lalu menggantinya dengan hukum-hukum Barat. Untuk itu, mereka telah menempuh berbagai cara.

Pada tahun 1839 Sultan Abdul Majid I naik ke tampuk kekuasaan sebagai khalifah. Pada saat itu beliau baru berusia 16 tahun. Rashid Pasha, yang sebelumnya adalah duta besar Daulah Utsmaniyah di London, kembali ke Istambul. Dia diangkat sebagai menteri luar negeri. Tidak lama setelah menduduki jabatannya, dia mulai mengkampanyekan sistem pemerintahan parlementer. Dia juga menyatakan bahwa dirinya telah ditetapkan untuk memajukan Daulah Utsmaniyah agar menjadi negara modern melalui konstitusi yang menjamin hak-hak warga negara. Dia juga menyatakan penghapusan berbagai kekurangan dalam Daulah Islam. Rashid Pasha dengan mudah mengamankan diri dan rencananya itu di belakang Sultan yang masih muda. Sementara itu, dokumen konstitusi dipersiapkan dengan penuh rahasia.

Pada tanggal 3 November 1839, seluruh tokoh *Sublime Porte* (pemerintahan), perwakilan masyarakat Istambul, perwakilan warga

negara di luar negeri, serta anggota korps diplomatik diundang pada pertemuan yang diselenggarakan di Istana Negara di pantai Laut Marmara. Mereka diundang untuk mendengarkan pembacaan “Naskah Yang Mulia” yang dikenal dengan sebutan “*Kalkhanah*”. Dokumen konstitusi dibacakan di depan para undangan tersebut. Dokumen itu berisi sekumpulan hukum Eropa yang dilengkapi dengan sejumlah perhatian terhadap hukum Islam. Inilah upaya pertama memasukkan konstitusi Barat ke dalam sistem pemerintahan Daulah Islam. Namun demikian, dokumen ini masih sebatas tulisan dan belum diterapkan dalam sistem pemerintahan.

Pada tahun 1855, negara-negara Eropa, khususnya Inggris, menekan Daulah Utsmaniyah untuk melaksanakan reformasi konstitusional. Di bawah tekanan negara-negara tersebut, pada tanggal 1 Februari 1855, Sultan mengeluarkan rancangan konstitusi hasil reformasi yang kemudian dikenal sebagai “*Dokumen Hemayun*”. Dalam naskah tersebut, Sultan menjamin hak-hak warga negara sebagaimana yang tercantum dalam “*Kalkhanah*”.

Sejumlah hak khusus dirancang bagi kaum Nasrani. Contohnya dalam hal pengaturan hak-hak sipil oleh suatu komite yang beranggotakan masyarakat sipil, pemuka agama, dan anggota masyarakat lain yang dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, diputuskan pula untuk tidak memaksa kaum Muslim yang murtad agar kembali pada agama Islam. Tugas-tugas kemiliteran diwajibkan juga atas kaum Nasrani sebagaimana diwajibkan atas kaum Muslim. Sebelumnya, tugas-tugas kemiliteran itu terbatas hanya diwajibkan atas kaum Muslim. Demikian pula orang asing dibolehkan memiliki tanah di wilayah Daulah Islam Utsmaniyah.

“*Dokumen Hemayun*” tersebut segera mendapat reaksi dari warga negara. Kaum Muslim menyadari bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan syaria Islam. Kaum Nasrani pun merasa ragu-ragu atas penerapannya. Namun demikian, negara-negara Eropa terus-menerus melakukan tekanan dengan alasan reformasi. Daulah Islam tidak dapat begitu saja menerapkan konstitusi tersebut. Keadaan ini berlangsung hingga tampilnya seseorang bernama Midhat Pasha sebagai tokoh dalam lingkungan pemerintahan. Dia adalah orang yang

benaknya sudah diraskui oleh pemikiran-pemikiran Barat. Dia adalah pemuja kebudayaan Barat sejati. Dia memutuskan untuk menyusun sebuah konstitusi yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran Barat. Tujuannya adalah untuk memuaskan negara-negara Barat. Dia juga berupaya menjadikan Daulah Islam berkedudukan sama dengan negara-negara Barat.

Midhat Pasha Berupaya Menyusun Konstitusi Daulah Islam dari Sistem Barat

Midhat Pasha adalah Menteri Kehakiman dalam Kabinet Muhammad Rushdie Pasha pada masa Kekhalifahan Abdul Aziz. Dia pernah berusaha membujuk Khalifah Abdul Aziz untuk menyusun suatu rancangan konstitusi berdasarkan sistem demokrasi Barat. Dia pernah menulis surat kepada Khalifah dan mendorongnya memperbaiki status quo dengan menetapkan suatu konstitusi baru. Dalam suratnya kepada Khalifah ia antara lain memaparkan “kerusakan-kerusakan” Daulah Islam sebagai berikut:

Yang Mulia tentu menyadari sepenuhnya, bahwa obat yang menyembuhkan untuk mengobati penyakit ini adalah mencabut sumber penyakit yang sama-sama kita ketahui dengan baik. Jika sumber penyakit itu kita hilangkan maka penyakit itu pun akan hilang. Jika Anda mengeluarkan “*Dokumen Hemayun*” baru—maka di dalamnya Anda harus menekankan kepatuhan pada hukum dan sistem pemerintahan serta kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin dan antara yang tua dan yang muda di mata hukum. Anda pun harus mengembalikan kekuasaan pada lembaga-lembaga yang berhak, membelanjakan uang untuk segala keperluan sesuai dengan kehendak para pemberi, mengembalikan kekuasaan Negara kepada *Sublime Porte* (pemerintah/para menteri). Dengan begitu, mereka dapat mengambil keputusan dan menyerahkannya kepada Anda. Anda pun tidak memonopoli keuangan Negara dan hak-hak khusus. Bendahara Negara juga tidak membelanjakan satu sen pun uang Negara tanpa persetujuan pemerintah. Tanggung jawab pegawai sipil senior dan junior ditentukan secara jelas. Para menteri

bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap akibat dari aktivitas-aktivitasnya. Semua harus diterapkan atas seluruh keluarga dan staf pribadi Anda. Jika semua ini diterapkan maka hasil yang diharapkan akan dapat dicapai dengan pertolongan Allah SWT dan Negara akan dapat menemukan jalan sesuai dengan yang Anda harapkan.

Sebelum menyerahkan surat ini kepada Khalifah, Midhat Pasha mengemukakan surat tersebut kepada pemerintah (para menteri). Mereka pun menyetujuinya. Mereka juga sepakat bahwa Perdana Menteri lah yang seharusnya menyerahkan surat tersebut kepada Sultan Abdul Aziz.

Sultan Abdul Aziz menemui Midhat Pasha sebagaimana mestinya dan menerima suratnya tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Abdul Aziz sangat murka. Ia memerintahkan untuk segera memecat Midhat Pasha dari pemerintahan serta mengasingkannya sebagai *wali* (gubernur) di Salonika. Namun demikian, ia tidak tinggal lama di sana dan segera kembali ke Istanbul. Ia bersekongkol dengan Husain Awni Pasha—Menteri Kepolisian Negara—untuk memberhentikan Sultan Abdul Aziz dari kursi kekuasaan. Mereka berdua kemudian menjalin konspirasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut dan *Syaikhul Islam*. Keduanya sepakat dengan Midhat Pasha dan Husain Awni Pasha untuk memberhentikan Khalifah. Mereka menetapkan tanggal bagi pemberhentian Khalifah tersebut, yaitu pada bulan-bulan awal tahun 1876. Pada malam tanggal tersebut, Midhat Pasha mengirimkan sebuah memorandum tanpa nama ke negara-negeri Eropa, kecuali Rusia, yang menyatakan bahwa pemberhentian Sultan merupakan masalah yang tidak dapat dihindari sesuai dengan syaria Islam yang menetapkan bahwa Kepala Negara haruslah seorang dengan akal pikiran yang sehat.

Pada malam hari tanggal 30 Mei 1876, angkatan laut mendaratkan pasukan di depan Istana Negara *Dulamah Bagjah*. Pasukan angkatan darat bergabung untuk selanjutnya bersama-sama mengepung Istana. Kepada Sultan disampaikan berita pemberhentiannya. Fatwa pemberhentian yang dikeluarkan oleh

Syaikhul Islam dibacakan di hadapan Sultan. Kemudian beliau dibawa keluar dari *Saray* (Istana Negara). Pada malam itu juga Murad V diangkat sebagai Khalifah.

Demikianlah Midhat Pasha memecat Khalifah dengan bekerjasama dengan negara-negara Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman, kecuali Rusia. Rusia menolak penegakan konstitusi bagi Daulah Islam karena konstitusi itu berasal dari sistem demokrasi Barat.

Pengangkatan Murad V sebagai Khalifah bagi kaum Muslim setelah pemberhentian Sultan Abdul Aziz dimaksudkan untuk memudahkan penegakan konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan Barat. Sebab, Murad dibesarkan dengan budaya Barat dan dikenal sebagai orang yang cerdas. Dengan begitu, harapan bagi penegakkan dan penerapan konstitusi diletakkan di pundaknya.

Namun, kesehatan Murad telah memburuk akibat ketidakstabilan mentalnya. Sekalipun demikian, Midhat Pasha terus berupaya mendeklarasikan konstitusi. Ia banyak berdiskusi dengan ajudan-ajudannya selama Murad dalam keadaan sakit. Dia mempelajari hukum dan sistem pemerintahan negara-negara Eropa dan menyusun rancangan konstitusi hingga final. Akan tetapi, keadaan mental Murad telanjur diketahui oleh semua orang. Karena itu, pemberhentiannya dari kedudukannya sebagai khalifah tidak dapat lagi dihindari. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1876, *Syaikhul Islam* menyatakan pemberhentiannya.

Pada tanggal 1 September 1876, saudaranya, Abdul Hamid naik tahta menjadi Khalifah bagi kaum Muslim. Tidak lama kemudian, Midhat Pasha diangkat menjadi perdana menteri. Pada saat itu, Inggris menyelenggarakan suatu konferensi di Istanbul dengan mengundang duta besar negara-negara besar. Tujuannya adalah memeruskan 'penyelesaian damai' bagi masalah Balkan melalui serangkaian usulan. Pada konferensi itu, Daulah Islam kembali ditekan untuk segera melakukan reformasi. Midhat Pasha segera menanggapi tekanan tersebut dengan menyusun sebuah komite yang beranggotakan 16 pegawai sipil, 10 orang ulama, dan 2 orang perwira tinggi militer. Mereka ditugasi untuk menyusun rancangan konstitusi bagi negara.

Setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya komite berhasil menyetujui suatu rancangan konstitusi yang diilhami dari konstitusi Belgia. Konstitusi tersebut diumumkan secara resmi dengan nama *Qânûn Asâs* (Undang-undang Dasar) pada tanggal 23 Desember 1876. Dengan demikian, konstitusi negara resmi, yakni konstitusi Belgia, ditambah sejumlah pertimbangan pada beberapa aspek Islam, menjadi konstitusi Daulah Islam.

Dalam konstitusi tersebut, sejumlah hal ditetapkan bagi seluruh warga negara dan kebebasan pribadi mereka diakui. Islam tidak lagi menjadi konstitusi Daulah. Sebagai gantinya, Islam ditetapkan sebagai agama negara, dalam arti, bahwa hari-hari libur umum dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya ditetapkan berdasarkan sudut pandang Islam. Konstitusi juga menetapkan bahwa suatu badan perwakilan rakyat dibentuk melalui dua majelis, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Anggota-anggota kedua majelis tersebut mendapatkan kekebalan parlementer. Mereka tidak dikenai hukum negara maupun hukum syariah sampai hak kekebalan tersebut dilepaskan. Mereka ditetapkan bersidang setiap tanggal 1 November, yang dibuka dengan pidato dari Khalifah. Undang-undang yang diusulkan kedua majelis tersebut harus segera diterapkan jika telah disahkan oleh tiap majelis dan diratifikasi oleh Sultan. Dengan kata lain, penyusunan undang-undang dilakukan oleh dua lembaga. Selanjutnya, mereka juga menetapkan bahwa penyusunan anggaran diserahkan kepada Dewan Perwakilan. Selain itu, mereka menetapkan bahwa Mahkamah Agung terdiri dari 10 anggota senat, 10 penasihat pemerintah, dan 10 penasihat dari Pengadilan Banding. Mereka juga menetapkan bahwa aturan-aturan di wilayah negara harus didasarkan pada asas desentralisasi.

Khalifah Abdul Hamid Menentang Konstitusi Midhat Pasha

Konstitusi tersebut jelas disusun berdasarkan konsep sistem demokrasi yang merupakan sistem kufur. Sistem ini bertentangan dengan Islam. Hukum-hukumnya pun bertentangan dengan Islam. Begitu konstitusi itu diterapkan maka penerapannya berimplikasi pada penghapusan sistem Khilafah dan penegakkan suatu negara yang sama persis dengan negara-negara Eropa lainnya, seperti Belgia yang

konstitusinya dijadikan sumber rujukan konstitusi Daulah Islam. Akibatnya, Pemerintah (*Sublime Porte*) tidak dapat menerapkannya. Khalifah Abdul Hamid, para ulama, dan para tokoh kaum Muslim menentang konstitusi itu. Dalam hal ini, *Sublime Porte* (Pemerintah) menolak untuk menerapkan konstitusi tersebut sekaligus menolak keinginan negara-negara besar.

Khalifah Abdul Hamid mencium gelagat dan rasa permusuhan dari Inggris. Beliau segera mengungkapkan upaya mereka saat menjalin kontak dengan para pejabat Pemerintah. Pada tanggal 5 Februari 1877, beliau memecat Midhat Pasha dari kedudukannya sebagai *mu'âwin* (pembantu Khalifah) dan "membuangnya" karena dianggap melakukan pengkhianatan terbesar, yaitu menjalin kontak dengan Inggris dan menyandarkan kebijakannya pada negara-negara Barat. Negara-negara besar, khususnya Inggris, tidak pernah lalai terhadap Daulah Utsmaniyah. Mereka berupaya terus-menerus memaksakan penerapan konstitusi yang disusun Midhat Pasha. Oleh sebab itu, mereka mengadakan konferensi untuk membahas masalah Balkan dan Daulah Utsmaniyah beserta reformasi internalnya.

Pada tanggal 13 Juni 1878 diselenggarakan Konferensi Berlin yang dipelopori oleh negara-negara besar: Inggris, Prancis, Rusia, dan Jerman. Disraeli, Perdana Menteri Inggris keturunan Yahudi, bertindak sebagai utusan Inggris pada konferensi ini. Wakil Jerman pada waktu itu, Otto van Bismark, berpihak pada Daulah Utsmaniyah, dengan menentang Inggris dalam konferensi itu. Pertemuan tersebut berlangsung selama empat minggu. Sejumlah resolusi dihasilkan. Di antaranya tuntutan terhadap Daulah Utsmaniyah untuk melakukan reformasi modern dalam sistem pemerintahannya. Akan tetapi, Khalifah Abdul Hamid mengabaikan resolusi-resolusi tersebut, dan justru berkonsentrasi memperkuat pasukan perangnya. Beliau mulai menghancurkan orang-orang yang menyerukan ketergantungan kepada Barat atau yang menuntut penghapusan sistem Islam dan pengadopsian sistem Barat. Para pengikut gagasan itu dipaksa meninggalkan negeri dan mereka pun mendirikan markas-markasnya di Paris dan Jenewa.

Khalifah Abdul Hamid melanjutkan upayanya mengkonsolidasikan institusi Khilafah kepada kaum Muslim agar mereka mampu

berhadapan dengan pemikiran-pemikiran Barat. Akan tetapi sayang, beliau mengalami kegagalan. Sementara itu, negara-negara Barat, meskipun belum dapat memaksakan sistem demokrasi atas Daulah Islam, mereka memperoleh keberhasilan dalam memasukkan perundang-undangan Barat. Mereka terus-menerus berupaya hingga Partai Turki Muda memberontak terhadap Sultan pada tahun 1908. Mereka mendeklarasikan konstitusi pada tanggal 21 Juli 1908 di Salonika. Pada bulan yang sama mereka bergerak menuju Istambul dan mendudukinya. Mereka memaksa Sultan menyetujui konstitusi dan mengangkat menteri-menteri yang dapat mereka terima.

Pada tanggal 17 November 1908 peresmian parlemen dilaksanakan. Sultan Abdul Hamid untuk sementara waktu menyerah pada keinginan Partai Turki Muda. Namun, beliau tetap bermaksud menghapus konstitusi dan kembali pada syariah Islam.

Pada tanggal 13 April 1909, revolusi terhadap pemerintahan yang baru meletus. Para tentara memberontak serta mengepung para perwiranya. Mereka berteriak-teriak, "Jatuhkan Turki Muda! Jatuhkan Turki Muda!" Demikianlah, peperangan yang bersemangat keagamaan melawan inovasi modern dinyatakan. Mayoritas massa pun bergerak dengan semangat berapi-api melawan konstitusi baru.

Pada tanggal 15 April, Sultan mengangkat Taufiq Pasha sebagai perdana menteri. Beliau memberikan tugas kepadanya untuk mengembalikan penerapan syariah dan hukum-hukum Islam serta menghapuskan konstitusi baru. Namun, tentara di Salonika kembali memberontak terhadap Sultan, merampas kekuasaan, dan membubarkan pemerintahan.

Pada tanggal 26 April, suatu komite nasional dibentuk. Berdasarkan fatwa dari *Syaikhul Islam*, komite tersebut memutuskan memberhentikan Sultan Abdul Hamid. Saudara Abdul Hamid, Muhammad Risyad naik tahta. Konstitusi pun kembali diterapkan. Dengan demikian, sistem pemerintahan dalam Daulah Utsmaniyah berubah dari sistem Khilafah menjadi konstitusional parlementer. Yang tersisa hanyalah seorang kepala negara yang disebut sebagai khalifah yang menguasai kesultanan. Kemudian muncullah parlemen beserta pemerintah (dewan menteri) yang berkuasa penuh; undang-undang

pun disusun oleh parlemen. Peran hukum syariah dalam pemerintahan dan perundang-undangan telah berakhir.

Pertarungan tersebut merupakan pertarungan dalam masalah konstitusi. Sementara itu, hukum syariah yang dipakai sebagai acuan peradilan bahkan telah mengalami sejumlah perubahan di masa-masa sebelumnya. Sejak tahun 1856 upaya penggunaan hukum-hukum Barat telah dimulai. Akibat tekanan yang terus menerus dari negara-negara Barat, khususnya Inggris dan Prancis, dari agen-agen Barat dan sebagian kaum Muslim yang ganderung dengan "merek", Daulah Islam mengadopsi sejumlah hukum Barat sejak masa Kekhalifahan Sultan Abdul Majid. Hukum-hukum tersebut mulai diperkenalkan pada Daulah, diterapkan, dan digunakan para hakim di pengadilan. Pada tahun 1275 H (1857 M) Daulah mengeluarkan UU Hukum Pidana Negara Utsmani. Pada tahun 1276 H (1858 M) Daulah mengeluarkan UU Keuangan dan Perdagangan. Pada tahun 1288 H (1870 M) Daulah menjadikan lembaga peradilan menjadi dua macam, yaitu peradilan syariah dan peradilan umum (sipil) yang sistemnya akan dibentuk. Pada tahun 1295 H (1877 M) undang-undang bagi pembentukan peradilan sipil dikeluarkan. Pada tahun 1296 H (1878 M) suatu keputusan tentang pokok-pokok UU Pemilikan dan Pidana telah dikeluarkan. *Syaikhul Islam* dan sejumlah ulama lainnya mengeluarkan fatwa yang isinya membolehkan mengadopsi hukum-hukum Barat tersebut dengan alasan bahwa hukum-hukum itu tidak bertentangan dengan Islam. Pada tahun 1286 H (1876 M), ketika para ulama tidak mendapatkan dalil-dalil yang membolehkan negara menerapkan hukum sipil, diterbitkanlah *Al-Majallah* sebagai UU dalam transaksi-transaksi bisnis (*muamalah*), sedangkan UU sipil dihindari. Kemudian pada tahun itu juga diupayakan pembuatan UU dengan cara meniru UU sipil kuno Prancis. UU tersebut disusun berdasarkan hukum-hukum yang mereka ambil dari buku-buku fikih dengan tetap menjaga isi UU sipil tersebut, baik dari sisi aktivitas-aktivitas maupun lainnya sepanjang sesuai dengan pendapat fikih. Dasar UU sipil Prancis itu—yang dikenal dengan jiwa (*spirit*) teks—bahkan diambil dan dibuat pasal yang berbunyi: *Prinsip dalam kitab hukum terletak pada maksud dan makna yang terkandung (substansinya) bukan susunan pernyataan dan kata-katanya.* []

PENGADOPSIAN UNDANG-UNDANG BARAT

Demikianlah, hukum syariah dan fikih Islam telah ditinggalkan. Sebaliknya, undang-undang dan hukum Barat telah diadopsi. Cara pengadopsian undang-undang Barat tersebut berbeda-beda satu sama lain. Beberapa undang-undang Barat diadopsi begitu saja—teks dan hukumnya—tanpa mempertimbangkan ada-tidaknya di dalam fikih Islam; apakah hukum itu bertentangan atau tidak dengan hukum-hukum syariah. Contohnya adalah UU Pidana yang menghapuskan *hudûd*. Sebagian UU diadopsi dengan pertimbangan bahwa hukum-hukum tersebut terdapat dalam fikih Islam, sekalipun pertimbangan fikih itu diberikan oleh “mujtahid” yang tidak dikenal atau oleh fukaha yang bukan mujtahid. Dengan kata lain, jika hukum itu dijumpai dalam buku-buku fikih, atau sesuai dengan pendapat salah seorang ulama, maka hukum itu dapat diadopsi. Begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah UU Pokok-pokok Peradilan. Sebagian UU ditiru dalam hal kodifikasi, kategorisasi, dan kasus-kasusnya dengan tetap menjadikan hanya hukum-hukum syariah sebagai pasal-pasal. Contohnya adalah *Al-Majallah (al-Ahkam al-'Adhliyah)* yang merupakan hukum syariah diakomodasi dengan meniru UU Sipil Prancis. Dengan demikian, UU yang digunakan para hakim dalam pengadilan merupakan UU Barat, bukan syariah Islam, sekalipun beberapa bagian UU tersebut merupakan hukum-hukum syariah.

Pengaruh Fatwa Ulama dalam Pengadopsian Undang-Undang Barat

Yang memungkinkan masuknya hukum-hukum sistem demokrasi sebagai konstitusi Daulah Islam dan hukum-hukum UU Barat sebagai hukum yang diterapkan dalam peradilan Islam di negara Khilafah adalah fatwa-fatwa para ulama—khususnya fatwa dari *Syaikhul Islam*—yang menyatakan bahwa hukum dan undang-undang itu tidak bertentangan dengan Islam. Fatwa-fatwa tersebut menyebutkan bahwa sistem demokrasi tidak bertentangan dengan Islam dan bahwa Islam adalah agama yang demokratis. Fatwa dari *Syaikhul Islam* menyatakan bahwa Daulah Islam boleh mengadopsi undang-undang Barat dan boleh menerapkannya dalam peradilan bagi kaum Muslim. Sebab, Islam tidak melarang adopsi tersebut. Oleh karena itu, aturan-aturan sistem demokrasi pun dijadikan sebagai konstitusi Daulah Islam. Sementara itu, mayoritas kaum Muslim menganggap sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem Khilafah. Sebab, sejauh ini yang menjadi kepala negara adalah seseorang yang disebut khalifah meski sistem hukum yang diterapkan bukan hukum-hukum Islam.

Selanjutnya, undang-undang Barat diterapkan dalam sistem peradilan Daulah Islam dan dianggap sebagai undang-undang Islam. Jadi, Daulah tetap dianggap sebagai Daulah Islam yang menerapkan Islam—sekalipun kenyataannya negara menerapkan undang-undang Barat—sepanjang Islam ‘tidak melarang’ pengadopsian undang-undang Barat itu. Dengan demikian, penerapan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan negara dan undang-undang Barat dalam peradilan Daulah Islam tidak mempengaruhi status “keislaman” Daulah atau status “keislaman” undang-undang yang diterapkan dalam pandangan mayoritas kaum Muslim. Alasannya, karena mayoritas kaum Muslim berpandangan bahwa Islam tidak melarang pengadopsian undang-undang Barat. Bahkan kaum Muslim mendukung penerapan sistem dan undang-undang Barat itu.

Lebih dari itu, bagi sebagian kaum Muslim, pengadopsian itu dianggap sebagai bagian dari proses reformasi dalam Daulah Islam. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa undang-undang dan hukum-hukum tersebut adalah undang-undang dan hukum kufur.

Kaum Muslim justru menerima dan diam saja atas pemberlakuan undang-undang dan hukum kufur tersebut. Andaikata pun ada yang tidak setuju terhadap undang-undang dan hukum-hukum kufur itu, mereka tidak pernah buka suara dan berupaya menentang Khalifah atau menuntutnya berbuat sesuatu. Andaikata ada yang tidak setuju dengan penghapusan *hudūd*, misalnya, ia tidak pernah menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka dengan menentang Khalifah atau menuntutnya untuk memberlakukannya kembali.

Alasan di balik fatwa Syaikhul Islam dan sebagian ulama lainnya mengenai kebolehan mengadopsi sistem demokrasi dan undang-undang Barat dapat dikembalikan pada tiga perkara:

Pertama: Pada saat itu telah tertanam dalam benak kaum Muslim, bahkan hingga saat ini, bahwa Islam membolehkan umatnya menganut berbagai hal yang bukan berasal dari Islam sejauh tidak bertentangan dengan Islam dan tidak dilarang oleh dalil-dalil syariah. Mereka menggunakan dalil bahwa: *Rasulullah saw. pada masa Jahiliyah menjumpai berbagai perjanjian yang berlaku di masyarakat, dan Beliau pun menyetujuinya. Selain itu, Beliau juga melarang segala sesuatu yang tidak disetujuinya.* Dengan demikian, apa pun yang Beliau setuju akan dibolehkan, dan yang Beliau larang tidak boleh dikerjakan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa boleh mengadopsi berbagai pemikiran, hukum atau undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak dijumpai dalil yang melarangnya.

Kedua: Perkara mubah adalah segala perbuatan atau perkara yang tidak ada kesempitan/kesulitan di dalamnya (*lâ haraja fih*). Tidak adanya kesempitan/kesulitan menunjukkan mubahnya suatu hal. Jadi, mengambil sesuatu yang tidak dijelaskan pelarangannya merupakan suatu hal yang mubah. Lebih jauh lagi, jika syariah mendiamkan suatu perkara dan tidak menjelaskan hukumnya, maka perkara tersebut merupakan hal yang mubah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda (yang artinya): *Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan sejumlah kewajiban. Karena itu, janganlah kalian mengabaikannya. Allah telah melarang beberapa perkara. Karena itu, janganlah kalian melanggarnya. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu. Karena itu, janganlah kalian melampauinya. Allah juga telah*

memaafkan beberapa perkara karena kemurahan-Nya, bukan karena kelalaian-Nya. Karena itu, janganlah kalian mencari-carinya. (HR al-Baihaqi dan al-Hakim).

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw. bersabda (yang artinya): *Apa saja yang didiamkan adalah yang dimaafkan.* (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dengan demikian, segala perkara yang tidak dilarang oleh syariah adalah mubah. Segala sesuatu yang tidak didapati nash/dalilnya, yang berarti syariah mendiamkannya, juga merupakan hal yang mubah. Pengambilan hukum-hukum dan undang-undang yang tidak dijelaskan atau dilarang oleh syariah adalah juga mubah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesulitan/dosa di dalamnya. Lagi pula, tidak ada larangan mengenai perkara-perkara itu, karena perkara-perkara tersebut tidak dijelaskan oleh syariah, dan didiamkan oleh syariah.

Ketiga: Kenyataan yang telah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat dari waktu ke waktu, bahkan sampai sekarang, bahwa demokrasi berasal dari Islam. Alasannya, karena demokrasi tegak di atas prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan kesetaraan. Islam juga menjadikan kekuasaan ada pada umat. Islam menyamakan kedudukan orang kaya dengan orang miskin. Islam juga menyamakan hak dan kewajiban seorang menteri (wazir) dengan seorang penggembala kambing. Islam mengatur urusan di antara mereka atas dasar syura. Islam menjadikan amar makruf nahi mungkar sebagai prinsip yang terpenting. Pada masa modern, syura diformalkan dalam bentuk parlemen. Amar makruf nahi mungkar diformulasikan dalam peradaban modern sebagai kebebasan pers untuk melakukan kritik serta kebebasan individu dan kelompok untuk mengarang dan mengeluarkan pendapatnya secara terbuka. Masyarakat boleh menerima atau menolak apapun yang mereka lihat dan mereka dengar sesuai dengan keinginan mereka. Tidak seorang pun, termasuk pemerintah dan gubernur yang *ma'shûm*. Yang dapat meluruskan, menghalangi, dan membatasi mereka adalah kesadaran opini publik dengan kebebasannya mengeluarkan pendapat. Inilah yang, menurut mereka, disebut dalam al-Qu'ran sebagai: *Ta'âwanû 'ala al-birri wa at-taqwâ* (Tolong-menolong dalam kebaikan). Dengan demikian, disimpulkan bahwa demokrasi

berasal dari Islam, yang dijelaskan dalam al-Qur'an, dan diperintahkan oleh Rasulullah saw.

Kekeliruan Fatwa-fatwa Tersebut

Berdasarkan semua alasan di atas, dikeluarkanlah sejumlah fatwa mengenai kebolehan pengambilan konstilusi demokrasi dan undang-undang Barat. Sementara itu, Daulah tetap dianggap sebagai Negara Islam yang menjalankan sistem Khilafah. Perundang-undangnya pun tetap dianggap sebagai undang-undang Islam karena hukum-hukum yang diadopsi dianggap sebagai hukum Islam.

Akibat fatwa itulah maka terjadi kesalahan dan penyimpangan. Hal itu karena berbagai pemikiran di seputar ketiga perkara di atas menunjukkan kesalahan fatal dalam memahami Islam. Kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan oleh sejumlah alasan.

Pertama: Ada perbedaan antara pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah dan hukum-hukum syariah dengan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan sebagainya. Umat Islam memang boleh mengambil pemikiran-pemikiran asing tentang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Namun, kaum Muslim tidak boleh mengambil pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum (sebagai pandangan hidup) selain dari yang dibawa oleh Rasulullah saw., baik dari al-Quran maupun as-Sunnah, atau yang ditunjukkan oleh keduanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. (yang artinya): *Aku hanyalah manusia seperti kalian. Jika aku memerintahkan sesuatu mengenai agama kalian maka ambillah. Jika aku memerintahkan sesuatu mengenai urusan dunia kalian maka aku hanyalah manusia biasa.* (HR Muslim).

Perintah ini juga dapat disimak dari hadits Rasulullah tentang perkawinan putik kurma: *Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.*

Dengan demikian, hal-hal yang bukan bagian dari syariah atau tidak termasuk ke dalam perkara akidah dan hukum-hukum syariah dapat diambil sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan syariah, yaitu akidah

dan hukum-hukum syariah, kaum Muslim hanya boleh mengambilnya dari apa yang dibawa Rasulullah saw. saja. Selain itu, tidak. Sistem demokrasi dan undang-undang Barat adalah pandangan hidup yang melahirkan hukum-hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan manusia. Hal itu terkait dengan perundang-undangan. Oleh karena itu tidak boleh mengadopsi undang-undang dan hukum kecuali dari apa yang dibawa Rasulullah saw., yaitu hukum-hukum syariah semata.

Kedua: Rasulullah saw. secara eksplisit telah melarang kita mengambil segala sesuatu selain dari yang Beliau bawa untuk kita. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda (yang artinya): *Siapa saja yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini, yang bukan bagian darinya, maka tertolak.* (HR Muslim).

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah telah bersabda (yang artinya): *Siapa saja melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan adalah tertolak.*

Abu Hurairah juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda (yang artinya): *"Hari Akhir tidak akan datang sampai umatku mengikuti jalan bangsa-bangsa sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta."* Atas ucapan Rasulullah ini, orang-orang bertanya, "Apakah mereka itu bangsa Persia dan Romawi?" Rasulullah lalu menjawab, *"Siapa lagi selain mereka."* (HR al-Bukhari).

Abu Said al-Khudri juga menuturkan bahwa Rasulullah telah bersabda (yang artinya): *"Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya."* Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah menjawab, *"Siapa lagi selain mereka."* (HR al-Bukhari).

Hadits-hadits ini dengan jelas melarang kita untuk mengambil segala sesuatu dari selain Islam. Hadits pertama, yang disampaikan dalam dua narasi, dengan jelas melarang kaum Muslim mengambil dan melakukan sesuatu yang bukan berasal dari Islam, karena dengan jelas dinyatakan: *fahuwa radd[un]* (maka tertolak). Lalu kedua hadits

terakhir menyebutkan makna pelarangan itu. Pelarangan itu dapat dikenakan dalam masalah pengambilan aturan konstitusi dan hukum-hukum dari selain Islam. Alasannya, karena tindakan demikian berarti melakukan suatu perbuatan yang lain dari yang telah diperintahkan, bahkan lebih jauh lagi, mengambil dari sumber selain dari yang diperintahkan. Perbuatan ini sama saja dengan mengikuti perbuatan orang-orang yang mirip dengan bangsa Persia dan Romawi, yaitu Inggris dan Prancis, yang merupakan keturunan bangsa Romawi. Dengan demikian, umat Islam haram mengambil hukum-hukum dan aturan-aturan tersebut.

Ketiga: Rasulullah Muhammad saw., sekalipun dalam kedudukannya sebagai Rasul, tidak pernah memberikan penjelasan mengenai suatu hukum atau perkara yang ditanyakan kepada Beliau sebelum mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Rasulullah akan menunggu sampai Allah SWT menurunkan wahyu yang berisi penjelasan tentang perkara itu. Ibnu Mas'ud menuturkan: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang ruh dan Beliau tetap diam sampai ayatnya diturunkan. (HR al-Bukhari).

Jabir bin Abdullah juga menuturkan, "Aku pernah sekali waktu sakit. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar menengokku. Beliau datang pada saat aku tidak sadar. Beliau berwudhu dan menuangkan air ke badanku sehingga aku sadar kembali dan bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana aku memperhitungkan hartaku? Apa yang harus aku lakukan dengan hartaku?' Rasul saw. tidak menjawab apapun sampai ayat tentang hukum waris diturunkan." (HR al-Bukhari).

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa kaum Muslim dilarang mengambil sesuatu selain dari apa yang telah Allah turunkan. Jika Rasulullah saw. menahan diri dalam memberikan penjelasan hukum sampai turun ayat kepada Beliau maka hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengambil selain dari yang diturunkan oleh Allah SWT.

Keempat: Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim untuk mengambil apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Allah SWT juga memerintahkan kita menyerahkan permasalahan sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah saw. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa saja yang Rasul perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah dan apa saja yang Beliau larang atas kalian maka tinggalkanlah. (QS al-Hasyr: 7).

Ini berarti bahwa kaum Muslim tidak boleh mengambil segala sesuatu selain dari yang dibawa Rasulullah saw. Dalam hal ini, *mafhûm mukhâlafah* (pemahaman kebalikan) dari frasa *apa saja yang Beliau larang atas kalian* (yaitu: apa saja yang tidak Beliau larang atas kalian, penerj.) tidak dapat dipakai. *Mafhûm* ini terhapus oleh dalil-dalil syariah yang secara umum melarang kaum Muslim untuk mengambil sesuatu selain dari syariah Islam. Demikian sebagaimana Allah SWT berfirman:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

Demi Tuhanmu, mereka sesungguhnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan. (QS an-Nisa': 65).

Allah SWT juga berfirman:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْحَقُوا إِلَىٰ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾

Mereka hendak berhukum kepada *thâghûl*, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari *thâghûl* itu. (QS an-Nisa': 60).

Rasulullah saw. juga bersabda (yang artinya): *Siapa saja yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan adalah tertolak.*

Dalam hal ini, jika suatu dalil syariah memberikan pemahaman selain dari yang dapat disimpulkan (*mafhûm mukhâlafah*) maka pemahaman itu tidak dapat diterapkan dan harus dihapuskan, sebagaimana pada firman Allah SWT:

﴿وَلَا تُكْرَهُوا قِتَابَتَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنِ ارْدَنْ حَظًّا﴾

Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian. (QS an-Nur: 33).

Pemahaman kebalikan yang dapat muncul dari ayat itu adalah: jika budak-budak itu tidak menginginkan kesucian maka kita boleh memaksanya melakukan pelacuran. Pemahaman kebalikan ini tidak dapat dipakai dan terhapus dengan ayat yang secara umum melarang pelacuran. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ﴾

Janganlah kalian mendekati zina. (QS al-Isra: 32).

Oleh karena itu, makna dari ayat tersebut) adalah agar kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan Rasulullah dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya serta hanya terikat dengan perintah dan larangannya. Kaum Muslim tidak boleh menghalalkan apapun kecuali yang Allah halalkan dan tidak mengharamkan apapun kecuali apa yang Allah haramkan. Apa saja yang tidak dibawa oleh Rasul kepada kita tidak boleh kita ambil. Sebaliknya, apa saja yang tidak diharamkan oleh Rasul maka kita juga tidak boleh mengharamkannya. Namun demikian, tidak berarti tidak adanya pelarangan tentang hal tersebut berarti hal tersebut boleh diambil (mubah). Akan tetapi, kita tidak boleh mengambil kecuali berasal dari syariah. Ayat ini bermakna bahwa tidak boleh mengharamkan segala sesuatu yang tidak Allah haramkan. Demikianlah makna ayat tersebut Allah SWT berfirman:

﴿فَيَحْذَرُ الَّذِينَ خَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

Hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. (QS an-Nur: 63).

Jika ayat di atas (QS an-Nur: 3) dibandingkan dengan QS al-Hasyr: 7—sementara telah diketahui bahwa kata *mâ* (apa saja) dalam firman-Nya *wâ mâ âtâkum* (apa saja yang ia perintahkan kepada kalian) dan *wa mâ nahâkum* (apa saja yang ia larang atas kalian) mempunyai makna umum—maka tampak secara jelas mengenai kewajiban untuk mengambil segala sesuatu hanya dari Rasulullah saw. dan bahwa mengambil selain dari Beliau adalah perbuatan dosa yang mengakibatkan hukuman yang pedih bagi pelakunya.

Allah SWT juga berfirman:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

Demi Tuhanmu, mereka sesungguhnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan. (QS an-Nisa': 65).

Dalam ayat ini, Allah SWT menyangkal keimanan seseorang yang berhukum pada selain Rasulullah di dalam perbuatannya. Ayat ini secara pasti membatasi tindakan berhukum dalam semua permasalahan hanya pada apa yang dibawa Rasulullah saw.

Selain itu, Allah SWT juga mencela orang-orang yang ingin menyerahkan penyelesaian masalahnya (berhakim) pada selain apa yang dibawa Rasulullah saw. Allah SWT berfirman:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ

مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا

بِهِۦٓ﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan pada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada *thâghû*t, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari *thâghû*t itu. (QS an-Nisa': 60).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa berhukum pada selain apa yang diturunkan kepada Rasulullah saw. merupakan suatu penyimpangan (kesesatan), karena itu berarti berhakim kepada *thâghû*,

Kelima: Hukum-hukum syariah merupakan seruan *Asy-Syâri'* yang berhubungan dengan perilaku dan perbuatan hamba-hamba. Kaum Muslim diperintahkan untuk menghukumi perilaku dan mengatur urusan mereka sesuai dengan seruan *Asy-Syâri'* tersebut. Jika mereka mengambil sesuatu sekadar 'tidak bertentangan' dengan seruan-Nya dalam menghukumi perbuatan mereka atau mengatur urusannya, maka berarti mereka tidak mengambil hukum syariah. Alasannya, karena mereka tidak mengambil hukum syariah yang sebenarnya, tetapi sekadar yang tidak bertentangan dengannya. Dengan demikian, pengambilan hukum tersebut tidak dapat dianggap sebagai mengambil hukum syariah. Selain itu, jika seseorang mengambil hukum yang sesuai dengan hukum syariah, namun bukan dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, maka pengambilan hukum itu tidak dapat dianggap sebagai berhukum pada hukum-hukum syariah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang, karena mengambil bukan hukum syariah, tetapi mengambil selain hukum syariah. Itu berarti merupakan tindakan tidak berhukum pada apa yang dibawa Rasulullah saw., tetapi berhukum pada selain apa yang dibawa Rasulullah saw., sekalipun terdapat kesesuaian dengannya.

Sekali lagi, itu karena kaum Muslim diperintahkan untuk mengambil hukum syariah semata, bukan yang lain. Sebagai gambaran, dalam masalah pernikahan, syariah menentukan tatacaranya dengan konsep pemberian dan penerimaan (*ijab-qabul*), yaitu dengan lafal *inkâh* (menikahkan) dan lafal *tazwîj* (penerimaan nikah) serta kehadiran dua orang saksi Muslim. Jika seorang Muslim dan Muslimah datang ke gereja, kemudian seorang pendeta menikahkan keduanya dengan tatacara Nasrani menggunakan lafal *inkâh* dan *tazwîj* dan disaksikan oleh dua orang Muslim, apakah pernikahan mereka telah sesuai dengan hukum syariah? Dengan kata lain, apakah mereka telah mengikuti apa yang dibawa Rasulullah ataukah mengambil hukum yang menyimpang dan tidak sah? Contoh lainnya, jika seorang Nasrani meninggal dan keluarganya hendak membagi harta warisannya sesuai dengan hukum

Islam karena dianggap lebih adil dan bermanfaat, kemudian datang ke pengadilan syariah untuk meminta surat penentuan/pembagian waris, apakah mereka dianggap berhukum pada hukum syariah, atau sekadar mengambil hukum itu karena dirasa lebih adil dan menguntungkan? Jelas, bahwa keduanya tidak mengambil hukum syariah, karena mengambil hukum syariah harus disertai dengan kesadaran penuh dan niat semata-mata mengikuti hukum yang dibawa Rasulullah, bahwa hal tersebut merupakan bagian dari perintah dan larangan Allah SWT. Hanya dengan kesadaran itulah maka pengambilan hukum itu dianggap sebagai berhukum pada aturan syariah. Pengambilan hukum syariah semata-mata atas dasar rasa keadilan dan kemanfaatan tidak dianggap sebagai mengambil hukum syariah. Ayat tersebut berbunyi, "*sampai mereka berhukum kepadamu*" dan "*apa yang rasul bawa maka laksanakanlah*".

Jadi, suatu hukum harus diambil atas dasar bahwa hukum itu adalah bagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dengan alasan tersebut, maka hukum yang diambil selain dari apa yang dibawa Rasulullah saw. tidak dianggap sebagai hukum syariah, tanpa memandang apakah hukum tersebut sesuai atau bertentangan dengan syariah. Bahkan, tindakan demikian tidak dianggap berhukum pada apa yang dibawa Rasulullah jika suatu hukum syariah diambil atas dasar bahwa hukum tersebut dianggap lebih adil dan bermanfaat.

Keenam: Persetujuan (*iqrâr*) Rasulullah atas perjanjian-perjanjian kufur adalah khusus bagi Beliau sendiri, dalam kapasitasnya sebagai rasul. Alasannya, karena persetujuan Beliau merupakan hukum bagi kaum Muslim sebagaimana perkataan dan perbuatan Beliau. Kapasitas kerasulan ini tidak diberikan kepada orang lain selain Beliau. Oleh sebab itu, setiap perbuatan, perkataan, dan persetujuannya dianggap sebagai undang-undang yang didasarkan atas wahyu yang diturunkan kepada Beliau. Tidak ada orang lain selain Beliau yang mempunyai hak untuk menentukan hukum dan perundang-undangan. Perjanjian-perjanjian yang beliau setujui merupakan hukum syariah sekalipun perjanjian-perjanjian tersebut dibuat pada masa Jahiliyah. Sebab, persetujuan Rasulullah menjadi dalil bahwa perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum syariah sekalipun hukum tersebut berisi

perkara peribadatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persetujuan Rasulullah terhadap perjanjian-perjanjian itulah yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum, bukan kenyataan bahwa perjanjian-perjanjian itu terjadi pada masa Jahiliah dan tidak bertentangan dengan Islam.

Para Sahabat menganggap sikap diam Rasulullah sebagai dalil hukum syariah. Diriwayatkan bahwa daging biawak pernah dihidangkan di atas meja untuk dimakan, namun Beliau tidak memakannya. Ibnu Abbas menganggap sikap diam Rasulullah sebagai dalil yang menghalalkan daging biawak, sekalipun Rasulullah sendiri tidak memakannya. Selain itu masih banyak kejadian lain yang menunjukkan bahwa sikap diam Rasulullah saw. menjadi dalil hukum-hukum syariah.

Ketujuh: Perkara yang mubah bukanlah perkara yang tidak ada kesempatan/kesulitan di dalamnya (*lâ haraja fihî*), karena tidak adanya kesulitan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan bukan petunjuk kemubahan yang ditentukan oleh syariah. Takhyîr (pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan) tidak mengharuskan adanya kesempatan/kesulitan. Pelarangan sesuatu tidak berarti perintah untuk melakukan yang sebaliknya. Begitu pula, kewajiban melakukan suatu perkara bukan selalu berarti pengharaman perkara yang sebaliknya. Tidak adanya kesempatan/kesulitan dapat berarti kewajiban, sebagaimana dalam ayat Allah SWT:

﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾

Siapa saja yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa baginya melakukan sa'i. (QS al-Baqarah: 158).

Sa'i dalam ibadah haji dan umrah merupakan suatu kewajiban, bukan perkara mubah. Selain itu, tidak adanya dosa juga dapat bermakna rukhsah (keringanan), sebagaimana dalam firman Allah SWT:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا﴾

Jika kalian bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kalian meng-qashar shalat kalian. (QS an-Nisa': 101).

Pada kedua ayat tersebut, tidak adanya kesempatan bukan bermakna pembolehan. Oleh sebab itu, mubah bukanlah perkara yang tidak ada kesempatan di dalamnya. Akan tetapi, mubah adalah perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil syariah yang berasal dari seruan *Asy-Syâri'* yang mengindikasikan kebebasan memilih untuk melakukan atau meninggalkannya, tanpa alternatif lain.

Dengan demikian, *ibâhah* (pembolehan) adalah izin yang diberikan syariah untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. *Takhyîr* ada yang secara langsung dijelaskan oleh nash secara eksplisit, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ﴾

Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam. Karena itu, datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu sebagaimana yang kalian kehendaki. (QS al-Baqarah: 223).

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾

Makanlah makanan yang banyak lagi baik dimana saja kalian sukai. (QS al-Baqarah: 35).

Takhyîr juga bisa dengan cara disimpulkan dari penunjukkan nash (*madlûl nash*), sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾

Jika kalian telah menyelesaikan ihram maka berburulah. (QS al-Maidah: 2).

Demikian pula beberapa firman Allah SWT berikut:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾

Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kalian di muka bumi. (QS al-Jumu'ah: 10).

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian. (QS al-Baqarah: 57).

Selain itu. *Ibâhah* (kebolehan) merupakan salah satu hukum syariah. Hukum syariah merupakan seruan *Asy-Syâri'* yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Untuk itu, diperlukan dalil-dalil syariah yang menunjukkan bahwa perkara itu benar-benar perkara yang mubah. Tidak adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkan hukum suatu perkara—apakah wajib, atau mandub, atau haram, atau makruh—bukan berarti bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang mubah. Akan tetapi, diperlukan dalil-dalil syariah untuk menunjukkan kebolehan (*ibâhah*) perkara itu.

Berkaitan dengan berbagai benda (*asyyâ'*) dan perbuatan-perbuatan (*af'âl*) sebelum datangnya hukum syariah, seperti bermacam-macam perjanjian dan muamalah di dalam masyarakat, kemubahannya bukan merupakan kelanjutan dari praktik sebelum datangnya hukum syariah, namun diperoleh dari dalil-dalil syariah yang menunjukkan hukumnya. Perdagangan, misalnya, telah dijelaskan melalui dalil syariah, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS al-Baqarah: 275).

Mempekerjakan seseorang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Beliau pernah mempekerjakan seseorang dari Bani ad-Dail sebagai penunjuk jalan. Dengan demikian, halalnya jual-beli dan mempekerjakan seseorang berasal dari dalil-dalil syariah, dan bukan semata-mata sebagai kelanjutan dari praktik pada masa Jahiliyah. Selain ayat-ayat al-Quran, sabda Rasulullah saw. merupakan dalil-dalil syariah sebagaimana perbuatan atau sikap diam (*taqrîr*) Rasulullah saw. Jadi, berbagai perkara—baik berupa benda, perbuatan, perjanjian, atau muamalah

yang dipraktikkan sejak masa Jahiliyah, berlangsung hingga zaman Islam, dan terus dipraktikkan oleh kaum Muslim—adalah karena memang ada dalil-dalil syariah yang membolehkannya, baik melalui ayat-ayat al-Quran, sabda Rasulullah saw. serta perbuatan atau sikap diam Beliau; bukan sekadar sebagai kelanjutan dari praktik pada masa Jahiliyah. Adapun terkait dengan perkara-perkara yang dipraktikkan sejak masa Jahiliyah, namun belum ada ketetapan dalil syariahnya, maka tidak dibolehkan mengambilnya, sekalipun tidak ada penjelasan tentang pelarangannya. Yang perlu diupayakan adalah terus menggali hukum syariah untuk mendapatkan dalil syariah bagi perkara-perkara itu. Dengan demikian, pembolehan perkara-perkara yang telah ada sejak zaman Jahiliyah dan terus berlangsung setelah kedatangan Islam ditetapkan melalui hukum syariah.

Jelas keliru mengatakan bahwa kemubahan perkara-perkara itu terus berlanjut karena syariah mendiampkannya. Keliru pula mengatakan bahwa perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh syariah adalah termasuk perkara-perkara yang mubah. Alasannya, karena syariah tidak akan mendiampkan suatu perkara, tetapi menjelaskannya melalui dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara itu. Sikap diam Rasulullah tidak dapat dianggap sebagai sikap diam syariah, tetapi justru merupakan penjelasan syariah. Alasannya, karena sikap diam Rasulullah saw. sama kedudukannya dengan ucapan dan perbuatan Beliau; juga sama kedudukannya dengan ayat-ayat al-Quran, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah.

Seorang Muslim tidak patus mengatakan bahwa Allah SWT mendiampkan suatu perkara dan tidak menjelaskan suatu hukum atasnya, sementara ia membaca firman Allah SWT:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

Pada hari ini Aku telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian, mencukupkan nikmat-Ku bagi kalian, dan meridhai Islam sebagai agama kalian. (QS al-Maidah: 3).

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu. (QS an-Nahl: 89).

Dengan demikian, tidak patut seorang Muslim mengatakan bahwa ada realitas tanpa hukum syariah, yang bermakna bahwa syariah mengabaikan realitas tersebut dan tidak menetapkan hukumnya. Dengan begitu berarti perkara tersebut tidak ada dalilnya dari Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah, atau tidak ada suatu petunjuk hukum pun melalui 'illat syar'iyah yang menjelaskan dalilnya—baik secara eksplisit (sharâhah), melalui penunjukkan (dalâlah), atau melalui pengambilan kesimpulan (istinbâth), ataupun melalui analogi (qiyâs)—yang menjelaskan hukum yang berkaitan dengan realita-realita tersebut; baik wajib, mandûb, haram, makruh, atau mubah. Seorang Muslim tidak boleh berpandangan seperti ini. Sebab, itu berarti tindakan menghina hukum syariah dengan mengatakannya sebagai aturan yang tidak sempurna, yang akan mengakibatkan pembenaran aktivitas berhukum pada selain hukum syariah. Tindakan ini bertentangan dengan firman Allah SWT:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

Demi Tuhanmu, mereka sesungguhnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. (QS an-Nisa': 65).

Jika syariah dianggap tidak menjelaskan hukum suatu perkara—sehingga kaum Muslim mengambil aturan dari selain syariah—maka mereka dianggap berhukum pada selain hukum syariah. Ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Pernyataan bahwa syariah tidak menjelaskan hukum untuk semua peristiwa sehingga diperkenankan mengambil hukum dari selain syariah juga merupakan pernyataan yang keliru. Pernyataan bahwa segala perkara yang didiamkan oleh syariah adalah perkara yang mubah juga merupakan pernyataan yang tidak

dapat diterima. Alasannya, karena dengan pernyataan tersebut berarti kaum Muslim boleh berhukum selain pada hukum syariah. Tindakan ini sekaligus menghujat syariah karena dianggap mendiamkan sejumlah perkara dan tidak menjelaskan hukumnya. Di samping itu, pernyataan tersebut bertentangan dengan realita, karena sesungguhnya syariah sama sekali tidak mendiamkan satu perkara pun.

Memang, ada hadits Rasulullah saw. yang berbunyi (yang artinya): *Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan sejumlah kewajiban. Karena itu, janganlah kalian mengabaikannya. Allah telah melarang beberapa perkara. Karenaitu, janganlah kalian melanggarnya. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu. Karena itu, janganlah kalian melampauinya. Allah juga telah memaafkan beberapa perkara karena kemurahan-Nya, bukan karena kelalaian-Nya. Karena itu, janganlah kalian mencari-carinya.* (HR al-Baihaqi dan al-Hakim).

Hadits ini menjelaskan pelarangan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak dijelaskan oleh syariah secara tekstual. Hadits ini isinya mirip dengan hadits yang berisi sabda Rasulullah saw., sebagaimana dituturkan Saad bin Abi Waqash (yang artinya): *Sesungguhnya orang yang paling berdosa di antara kaum Muslim adalah orang yang bertanya (kepada Rasulullah saw.) tentang sesuatu yang tidak dilarang atas mereka, namun kemudian menjadi terlarang akibat pertanyaan tersebut.* (HR al-Bukhari).

Banyak hadits yang menjelaskan masalah itu, antara lain, Rasulullah saw., sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra., pernah bersabda (yang artinya): *Hindarkan dariku perkara-perkara yang tidak aku jelaskan kepada kalian. Sebab, orang-orang sebelum kalian binasa karena pertanyaan mereka yang terus-menerus serta perbantahannya terhadap nabi-nabi mereka. Tinggalkan perkara-perkara yang telah aku larang dan laksanakan sebaik-baiknya perkara yang aku perintahkan kepada kalian.* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Selain itu, ada riwayat sebagai berikut: Rasulullah saw. pernah membacakan firman Allah SWT (yang artinya): *Allah memerintahkan manusia untuk beribadah haji. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Rasulullah diam. Kemudian ia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Rasulullah tetap diam. Lalu orang*

itu bertanya untuk yang ketiga kalinya, “Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?” Kemudian Rasulullah bersabda, “*Demi Allah Yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika aku menjawab pertanyaan ini maka perkara ini menjadi wajib; dan jika perkara ini (ibadah haji setiap tahun) menjadi wajib maka kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Jika tidak kalian kerjakan maka kalian akan berdosa. Jadi, hindarkan aku dari perkara-perkara yang tidak aku perintahkan kepada kalian.*”

Dengan demikian, makna dari ucapan Rasulullah saw.: “*Dia telah memaafkan beberapa perkara*”, lalu dalam riwayat lain berbunyi, “*Yang Dia diamkan adalah yang dimaafkan*”, adalah bahwa Allah SWT telah meringankan kewajiban kita. Jadi, janganlah bertanya (lagi) agar tidak membebani kalian. Sebagai contoh adalah masalah ibadah haji. Kewajiban melaksanakan ibadah haji telah ditentukan secara umum. Lalu seseorang bertanya apakah ibadah tersebut dilaksanakan setiap tahun. Namun, Allah SWT telah meringankan ibadah tersebut dengan mewajibkannya hanya satu kali dalam seumur hidup. Hal itu untuk meringankan beban kaum Muslim dan menunjukkan kasih-sayangNya kepada manusia. Jadi, Allah SWT telah memaafkan dan mendiamkan pelaksanaan ibadah haji setiap tahun. Kaum Muslim tidak perlu menanyakannya lebih lanjut. Hal inilah yang dimaksud dalam kalimat, “*Jadi, janganlah mencari-carinya*”, setelah kalimat, “*Dia telah memaafkan beberapa perkara karena kemurahan-Nya*”. Jadi, masalah yang dibahas dalam hadits ini adalah larangan atas kaum Muslim untuk menanyakan lebih lanjut perkara-perkara yang tidak ditetapkan pelarangannya. Hadits tersebut tidak bermakna bahwa Allah SWT tidak menjelaskan sejumlah hukum syariah. Riwayat lain yang menyatakan, “*Yang Dia diamkan adalah yang dimaafkan*” juga menunjukkan bahwa masalahnya berkaitan dengan larangan mencari-cari dan menanyakan lebih jauh perkara-perkara yang telah diringankan dan tidak diharamkan oleh Allah SWT. Jadi, manakala suatu perkara tidak dilarang Allah SWT maka hal ini merupakan keringanan dari-Nya. Dengan kata lain, perkara-perkara yang tidak Allah SWT jelaskan pelarangannya merupakan perkara-perkara yang dimaafkan dan diringankan. Karena itu, kaum Muslim tidak perlu mencari-cari dan bertanya-tanya lebih jauh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan (kepada Nabi kalian) hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian niscaya akan menyusahkan kalian. (QS al-Maidah: 101).

Ayat ini kemudian dilanjutkan:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنۡ أَشْيَآءٍ إِنۡ تُبَدَّ لَكُمۡ تَسْوُكُمۡ﴾

Allah telah memaafkan kalian tentang hal itu. (QS al-Maidah: 101).

Demokrasi bertentangan dengan Islam

Delapan: Demokrasi sepenuhnya bertentangan dengan Islam, baik secara global maupun partikular (rinci). Kontradiksi tersebut tercermin dalam beberapa aspek, yaitu:

- a. Demokrasi memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat; mempercayakan kepada rakyat semua perkara dalam kehidupan. Jadi, manusia adalah rujukan utama dalam segala hal. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rakyat adalah sumber kekuasaan: rakyat adalah sumber kekuasaan perundang-undangan, sumber kekuasaan hukum, dan sumber kekuasaan pemerintahan. Rakyatlah yang menyusun undang-undang, mengangkat para penguasa, dan melaksanakan pemerintahan. Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Alasannya, karena Islam menyerahkan kedaulatan kepada syariah, bukan kepada rakyat. Dalam Islam, syariah merupakan rujukan bagi segala perkara dan satu-satunya rujukan utama. Dalam hal kekuasaan, Islam menyerahkan kekuasaan penyusunan perundang-undangan kepada Allah SWT, bukan kepada manusia. Allah sajalah yang menyusun segala aturan dan hukum dalam masalah peribadatan, muamalah, hukum pidana, dan sebagainya. Tidak seorang pun boleh menyusun perundang-undangan, meski hanya satu aturan saja. Dalam Islam rakyat hanya berwewenang untuk menjalankan kekuasaan. Rakyatlah yang memilih dan mengangkat pemimpinnya. Jadi, rakyat hanya menjadi sumber kekuasaan eksekutif semata. Merekalah yang memilih dan

mengangkat seseorang untuk memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Dalam kekuasaan kehakiman, Khalifah atau yang mewakilinya memegang kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Khalifah mengangkat hakim-hakim atau menunjuk seseorang untuk mengangkat hakim-hakim. Tidak seorang pun rakyat, baik secara individu atau berkelompok, berhak mengangkat seorang hakim. Wewenang ini hanya dimiliki oleh Khalifah atau orang yang ditunjuk oleh Khalifah.

- b. Kepemimpinan dalam sistem demokrasi bersifat kolektif, tidak individual. Kekuasaan juga dipegang secara kolektif, tidak secara individual. Dalam demokrasi (parlementer), kekuasaan dijalankan oleh suatu dewan menteri yang disebut kabinet. Kepala negara, baik seorang presiden maupun raja, merupakan figur yang berkuasa namun tidak berhak memerintah. Yang memerintah dan memegang kekuasaan adalah kabinet. Sistem ini bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, kepemimpinan adalah milik satu orang, tidak bersifat kolektif. Kekuasaan juga dipegang oleh satu orang dan tidak secara kolektif. Abu Said al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda (yang artinya): *Apabila tiga orang melakukan perjalanan, mereka harus mengangkat satu orang di antara mereka sebagai amir (pemimpin).* (HR Abu Dawud).

Abdullah bin Umar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda (yang artinya): *Tidak boleh tiga orang dimana pun berada di muka bumi tanpa mengangkat salah seorang sebagai amir di antara mereka.* (HR Ahmad).

Kata *ahad* (seseorang) merujuk pada suatu bilangan, yaitu satu, dan tidak lebih. Hal ini disimpulkan dari *mafḥûm mukhâlafah* (pemahaman kebalikan) dari kata *ahaduhum* (seseorang di antara mereka). Dalam masalah ini pemahaman kebalikan dapat diterapkan dan penunjukannya sesuai dengan penunjukan dalam teks dalil tersebut. Pemahaman kebalikan tidak dapat digunakan jika pemahaman tersebut terhapus oleh dalil-dalil yang lain. Dalam pemahaman kebalikan terhadap kedua hadits di atas, pemahaman itu tidak terhapus oleh dalil yang lain sehingga pemahaman kebalikan itu dapat dipakai. Dengan demikian, hadits tersebut

bermakna, “Mereka harus mengangkat seorang amir,” dan tidak boleh lebih,” serta, “kecuali mengangkat seorang amir dan tidak boleh lebih”. Dengan demikian, *mafḥûm mukhâlafah* kedua hadits tersebut bermakna bahwa haram menyerahkan *imârah* (kekuasaan pemerintahan) kepada lebih dari satu orang. Pemahaman ini didukung oleh aktivitas Rasulullah saw. yang selalu menunjuk seorang amir pada setiap kejadian. Beliau tidak pernah mengangkat lebih dari seorang amir pada satu wilayah. Adapun kekuasaan pemerintahan dijabat oleh seorang kepala negara—yang disebut Amirul Mukminin—atau khalifah yang mendapat amanat kekuasaan dari seluruh umat. Khalifah adalah seorang yang memiliki wewenang penuh atas kekuasaan dan pemerintahan; tidak seorang pun berbagi kekuasaan dengannya. Dengan demikian, kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam dipegang secara individual.

- c. Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi terdiri dari sejumlah lembaga, bukan satu lembaga. Pemerintah merupakan satu lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Adapun lembaga-lembaga yang lain merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan memerintah dan kekuasaan pada bidangnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai misal, asosiasi pengacara yang mempunyai kekuasaan dan aturan tersendiri pada masalah-masalah kepengacaraan, mulai dari memberikan pengesahan kepada para pengacara untuk beipraktik, skorsing, dan penuntutan kepada mereka, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan dunia kepengacaraan. Demikian pula lembaga-lembaga lain seperti ikatan dokter, asosiasi ahli farmasi, perhimpunan insinyur sipil, dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai wewenang dalam bidang masing-masing sama dengan wewenang yang dimiliki negara. Negara sendiri tidak memiliki wewenang dalam bidang-bidang tertentu sebagaimana yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut. Hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, negara dan pemerintah merupakan lembaga tunggal yang memegang kekuasaan. Khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki wewenang penuh, sementara orang lain sama sekali tidak memiliki wewenang. Rasulullah saw. bersabda (yang artinya): *Imam adalah*

seorang penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kata *huwa* (dia) dalam tatabahasa Arab sarana untuk memberikan pembatasan sekaligus merupakan kata ganti yang berdiri sendiri. Jadi, kalimat yang berbunyi *wa huwa mas'ûl[un]* (ia bertanggung jawab) menunjukkan pembatasan tanggung jawab itu hanya kepada Imam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di dalam negara, baik individu maupun kelompok, yang memiliki kekuasaan dan wewenang selain Khalifah.

d. Dalam sistem demokrasi, meminta pendapat rakyat mengenai masalah pemerintahan dipandang sebagai suatu kewajiban. Penguasa harus meminta pendapat rakyat atau lembaga perwakilan rakyat; ia tidak boleh melakukan aktivitas kecuali jika rakyat mendelegasikannya. Ia juga tidak boleh menentang keinginan dan pendapat rakyat. Jadi, meminta pendapat rakyat merupakan suatu kewajiban penguasa dalam negara demokrasi. Hal ini bertentangan dengan Islam, karena Islam menganggap upaya meminta pendapat umat, atau yang disebut *syura* (musyawarah), hanya bersifat *mandûb* (sunnah), bukan wajib. Dengan demikian, Khalifah disunahkan meminta pendapat umat dan tidak diwajibkan untuk itu. Sebab, sekalipun Allah SWT memuji *syura*, Dia hanya membatasinya hanya pada perkara-perkara mubah. Pembatasan *syura* pada perkara-perkara mubah ini menjadi *qarînah* (petunjuk) bahwa *syura* hanya merupakan perbuatan yang *mandûb*, bukan wajib. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *mandûb* bagi Khalifah untuk bermusyawarah dengan umat, karena Allah SWT telah memuji *syura* namun membatasinya hanya pada perkara-perkara mubah.

e. Dalam sistem demokrasi, pemerintah terikat dengan suara mayoritas rakyat dalam setiap masalah, dalam perundang-undangan atau perkara lainnya. Pada beberapa kasus mereka menetapkan suara mayoritas jika melebihi 51% suara; pada kasus-kasus lain mereka menetapkan suara mayoritas jika melebihi 2/3 suara. Hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, pendapat mayoritas tidak selalu mengikat. Penjelasanannya adalah sebagai berikut: *Pertama*,

hukum-hukum syariah tidak bergantung pada suara mayoritas maupun minoritas. Namun, setiap orang wajib menyerahkan semuanya pada hukum syariah. Dalil yang menjadi dasar alasan ini adalah kenyataan bahwa pada Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah saw. mengambil wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Beliau; Beliau mengesampingkan pendapat Abu Bakar dan Umar. Beliau bahkan mengesampingkan pendapat seluruh kaum Muslim, menolak pendapat mereka sekaligus memaksa mereka untuk patuh pada keputusan Beliau serta mengabaikan kemarahan dan penolakan mereka. Beliau bersabda kepada mereka (yang artinya): *Aku hanyalah hamba Allah dan aku tidak akan melanggar perintah-Nya*.

Hal ini membuktikan bahwa yang dominan di mata Rasulullah bukanlah pendapat mayoritas maupun minoritas, namun apa yang telah ditetapkan melalui wahyu, yaitu dalil-dalil syariah. Jika terdapat sejumlah dalil maka dalil terkuatlah yang diikuti. Jadi, hukum yang diambil dan dijadikan panutan adalah dalil yang terkuat. Namun demikian, yang berhak mewajibkan umat mengambil salah satu dalil dan menjadikannya sebagai undang-undang adalah Khalifah, karena hanya dia yang memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum syariah. Demikian pula yang ditunjukkan oleh Imam Sahabat, yang menjelaskan bahwa Imam memiliki hak untuk mengambil hukum-hukum tertentu dan memerintahkan penerapannya. Kaum Muslim wajib mematuhi dan mengesampingkan pendapatnya sendiri. Prinsip-prinsip syariah menetapkan:

Perintah Imam harus dilaksanakan secara lahir dan batin.

Perintah Imam menghilangkan perbedaan.

Sultan mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan permasalahan baru yang muncul.

Yang diterapkan pada hukum-hukum syariah juga diterapkan pada definisi-definisi syariah, yakni faktor yang dominan adalah kekuatan dalil, dan hanya Khalifah semata yang memiliki hak untuk mengadopsinya. Dengan demikian, pendapat Khalifahlah yang diunggulkan dan mengikat. Suatu pendapat yang menyatakan suatu pemikiran mengenai suatu masalah tertentu akan menghasilkan satu atau lebih aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut akan dipelajari berdasarkan pokok permasalahannya. Dengan kata lain, terhadap pendapat yang berkaitan dengan sejumlah aktivitas yang harus diambil, diperlukan suatu pemahaman dan pengkajian terhadap pokok permasalahannya. Dengan pemahaman dan pengkajian tersebut maka dapat ditentukan suatu keputusan untuk melakukan atau meninggalkannya, atau cara melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Artinya, jika berhubungan dengan masalah pendapat, perang, dan siasat maka harus didasarkan pada kebenarannya, bukan pada pendapat yang didukung secara mayoritas. Contoh: Bagaimana cara mengupayakan kebangkitan umat, apakah dengan meningkatkan pemikirannya atau meningkatkan ekonominya (kesejahteraan)-nya? Perang melawan orang murtad pada masa Kekhalifahan Abu Bakar ra., apakah dianggap sebagai penolakan hukum syariah (perkara zakat) atau semata-mata pemberontakan bersenjata? Solusi yang ditempuh oleh Ali ra. dalam menangani wali-walinya ketika ia menjabat sebagai khalifah, apakah dengan mempertahankan, memberhentikan, atau mempertahankan sebagian dan memberhentikan lainnya? Solusi Ali dalam menangani masalah Muawiyah, haruskah dia segera memberhentikan Muawiyah sebagai gubernur (wali) Syam, atau mempertahankannya sampai Ali berhasil mengokohkan kekuasaannya ke seluruh wilayah Dalam Islam? Masalah mengangkat al-Quran kepada Ali ra. (*tahkîm*), apakah benar-benar menjadikan al-Quran sebagai rujukan atau semata-mata hanya siasat? Daulah Utsmaniyah akan membangun rel kereta api dari Istanbul sampai ke Baghdad, apakah proyek ini akan diberikan kepada kontraktor Jerman atau kontraktor Belgia? Upaya Inggris bergabung dengan Masyarakat Eropa pada tahun

1962, perlukah Inggris bergabung dengan organisasi itu? Dengan kata lain, apakah dengan bergabung ke organisasi itu Inggris dapat mempertahankan posisinya di mata internasional dan pengaruhnya atas seluruh Eropa, atau hanya akan menimbulkan kerugian ekonomi dan politik? Pembangunan di Mesir, apakah dengan cara membangun industri berat atau dengan membangun danau? Program persenjataan nuklir Turki, apakah diupayakan dengan sumberdaya dan dana dari dalam negeri atau diserahkan kepada investor asing? Daulah Utsmaniyah berusaha meningkatkan pendidikan, apakah dengan jalan memperbanyak sekolah dan universitas atau dengan memperbaiki kurikulum pendidikan?

Dalam menentukan setiap kebijakan yang membutuhkan pemahaman dan pengkajian, ketepatan dan kelayakan (*fit and proper*) harus menjadi pertimbangan utama, bukan pendapat mayoritas. Dalil mengenai masalah ini dapat dipahami dari aktivitas Rasulullah saw. ketika bersama-sama kaum Muslim berkemah di dekat sumber air Badar. Hubab bin Mundzir tidak setuju dengan tempat itu. Dia dikenal sebagai ahli peperangan dan sangat mengenal tempat itu dengan baik. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Apakah ini tempat yang ditunjukkan Allah SWT untuk engkau duduki sehingga kita tidak boleh membantah maupun berpindah dari sini atau hanya sekadar pendapat dan taktik peperangan?" Rasulullah menjawab, "Ini hanya masalah pendapat, peperangan, dan siasat." Kemudian Hubab berkata, "kalau begitu, ini bukanlah tempat yang tepat untuk berhenti." Kemudian ia menunjuk tempat lain yang menurut pendapatnya lebih tepat. Segera Rasulullah dan kaum Muslim pun berdiri dan berpindah ke tempat yang ditunjuk. Dalam hadits ini Rasulullah saw. mengabaikan pendapat Beliau sendiri maupun pendapat kaum Muslim. Beliau memilih untuk mengikuti pendapat yang lebih tepat dan layak; Beliau merasa puas hanya dengan pendapat satu orang dalam perkara-perkara yang disebut Rasulullah sebagai masalah "pendapat, peperangan, dan siasat" itu. Rasulullah saw. menerapkan pendapat ini atas seluruh kaum Muslim karena Beliau menganggap pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling tepat dan paling layak. Hal ini

menunjukkan bahwa dalam hal pendapat-pendapat yang terkait dengan masalah “pendapat, perang, dan siasat”, ketepatan dan kelayakan harus menjadi pertimbangan utama, bukan pendapat mayoritas. Khalifahlah yang memutuskan pendapat yang dianggapnya paling tepat dan paling layak, mengingat bahwa yang mernutuskan pendapat terbaik dalam Perang Badar adalah Rasulullah saw. dalam kedudukannya sebagai kepala negara, bukan sebagai utusan Allah SWT.

Termasuk dalam pendapat yang membutuhkan pemahaman dan pengkajian adalah pendapat mengenai masalah-masalah teknis. Masalah-masalah teknis adalah masalah-masalah yang membutuhkan pemahaman, pengkajian, dan keahlian dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dalam riwayat Perang Badr di atas, pendapat Hubab ibn Mundzir dapat diterima karena pendapat tersebut berhubungan dengan masalah teknis peperangan, sementara Hubab dikenal sebagai ahli peperangan dan sangat mengenal daerah Badr itu. Mirip dengan masalah-masalah tersebut adalah masalah penentuan definisi-definisi non-syariah (teknis dan sains) yang membutuhkan pemikiran dan pengkajian.

Terhadap pendapat-pendapat yang berhubungan dengan aktivitas yang tidak membutuhkan pemahaman dan pengkajian oleh para ahli, pertimbangan utama diberikan kepada pendapat mayoritas dan pendapat ini bersifat mengikat. Contoh: pemilihan khalifah, antara milih si A atau si B; saat mengangkat seorang penengah, mengangkat si C atau si D; atau saat memilih proyek pembangunan, membangun sekolah atau rumah sakit; atau ketika hendak memberikan bantuan kepada petani, berupa bantuan dana atau bantuan alat pertanian, pupuk, dan bibit; dan sebagainya. Dengan demikian, bagi setiap aktivitas yang tidak memerlukan pemahaman dan pengkajian para ahli atau para teknisi maka keputusan diserahkan kepada pendapat mayoritas. Dalam hal ini, Khalifah dan Khalifah terikat dengan keputusan tersebut. Dalam suatu hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menerima pendapat mayoritas kaum Muslim pada saat Perang Uhud untuk

keluar dari Madinah, sekalipun Beliau menganggap pendapat ini keliru dan bukan merupakan pendapat yang terbaik. Demikian pula para Sahabat senior yang mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat mayoritas kaum Muslim. Rasulullah dan para Sahabat berpendapat bahwa mereka sebaiknya tetap berada di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat mayoritas dalam perkara ini adalah pendapat yang diunggulkan dan bersifat mengikat.

Beberapa orang mungkin sulit membedakan aktivitas yang membutuhkan pemahaman dan pengkajian para ahli dengan aktivitas yang tidak memerlukannya. Namun, jika dalil-dalil kedua aktivitas itu dicermati dengan baik maka perbedaan kedua aktivitas tersebut akan jelas. Kepada Hubab bin Mundzir dalam Perang Badar Rasul saw. bersabda, “Ini adalah masalah pendapat, perang, dan siasat.” Artinya, aktivitas berkemah di tempat itu berkaitan dengan perkara-perkara yang semestinya dirujuk kepada para ahli, yaitu masalah militer yang memerlukan pemikiran dan pengkajian, dan bagian dari siasat untuk mengalahkan musuh yang membutuhkan analisis. Adapun pada Perang Uhud Rasulullah saw. bersabda kepada kaum Muslim, “Apabila kalian berpendapat bahwa sebaiknya kita tetap di Madinah dan membiarkan mereka berkemah, lalu jika mereka berkemah, mereka akan berada pada posisi yang buruk. Jika mereka berusaha masuk kota, kita dapat melawan mereka di sini.”

Atas tawaran Rasulullah tersebut sebagian kaum Muslim berkata, “Ya Rasulullah, pimpinlah kami menyerang musuh. Kalau tidak, mereka akan menganggap kita pengecut dan terlalu lemah untuk melawan mereka.”

Atas jawaban ini, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, “Ya Rasulullah, tetaplah di Madinah. Janganlah keluar melawan mereka. Demi Allah, kami tidak pernah keluar (kota Madinah) melawan musuh kecuali hanya mendapatkan bencana, dan tidak seorang pun yang menyerang masuk kota tanpa menderita kekalahan. Jadi, biarkan musuh di sana. Apabila mereka tetap tinggal di sana, mereka akan berada dalam kesulitan. Jika mereka berusaha masuk kota, kaum laki-laki akan melawan mereka dan kaum wanita serta anak-

anak akan melempari mereka dari atas mereka. Jika mereka mundur, mereka mundur dengan putus asa sebagaimana saat mereka datang. “

Dengan demikian, masalahnya adalah antara tetap tinggal atau keluar dari kota, bukan menentukan tempat peperangan. Dengan kata lain, masalahnya bukan tentang apakah mereka harus menyiapkan serangan di dalam kota dan menyerang musuh dari sana atau mereka harus menyiapkan serangan di bukit Uhud. Masalahnya adalah bahwa musuh telah datang kepada mereka, kemudian apakah mereka akan keluar melawan mereka, atau tetap tinggal di dalam kota dan jika musuh mencoba masuk, mereka akan melawannya, sementara jika musuh tidak menyerang, mereka akan membiarkannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang nyata antara kedua kejadian itu dan aktivitas Rasulullah dalam menyikapinya. Perbedaan kedua kejadian tersebut terletak pada penentuan keputusannya, yaitu: antara bertindak berdasarkan pendapat yang paling tepat dan paling baik dengan aktivitas yang diambil berdasarkan pendapat mayoritas. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara aktivitas yang memerlukan pemahaman dan pengkajian dan aktivitas yang tidak membutuhkannya. Pada sisi yang lain, aktivitas yang pokok masalahnya sangat penting dan bersifat kritis akan selalu memerlukan pemikiran dan pengkajian, berbeda sifatnya dengan aktivitas yang tidak memiliki pokok masalah, atau pokok permasalahannya tidak kritis, atau telah diketahui secara umum. Inilah perbedaan antara kedua aktivitas tersebut; walaupun membutuhkan kajian yang mendalam, jelas bahwa perbedaan itu ada dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, pendapat mayoritas dalam Islam hanya dapat diambil jika pendapat tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak memerlukan pemikiran dan pengkajian para ahli. Adapun aktivitas-aktivitas pada situasi lainnya tidak dapat diserahkan pada pendapat mayoritas. Hal ini didukung oleh hadits Rasulullah saw. yang meriwayatkan bahwa Beliau pernah berkata kepada Abu Bakar dan Umar (yang artinya): *Jika kalian berdua*

bersepakat dalam suatu musyawarah maka aku tidak akan menentangnya. (HR Ahmad).

Hadits ini memberikan bukti bahwa pendapat mayoritas dapat diunggulkan. Namun demikian, Rasulullah membatasi kesepakatan itu dengan suatu pernyataan: *fi masyûrah* (dalam musyawarah). Jika kalimat Rasul saw., “*mâ khâlaftukumâ* (aku tidak akan rnenentangnya)” dibandingkan dengan penentangan Beliau terhadap Abu Bakar dan Umar saat Perjanjian Hudaibiyah atau ketika Beliau memilih pendapat Hubab bin Mundzir daripada pendapat kaum Muslim dalam Perang Badar, maka jelas bahwa kata *fi masyûrah* (dalam musyawarah) merupakan pengikat (*qayyid*) untuk tidak menentang keduanya. Jadi, sikap tidak menentang tersebut berkaitan dengan masalah-masalah hasil musyawarah, yang sangat berbeda dengan wahyu dari Allah SWT atau dengan masalah “pendapat, perang, dan siasat”. Dengan demikian, hadits tersebut menunjukkan bahwa keputusan berdasarkan pendapat mayoritas dapat diunggulkan dan mengikat dalam perkara-perkara selain hukum-hukum syariah dan selain masalah pendapat, perang, dan siasat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam.

- f. Pada beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, sejumlah individu mempunyai kekebalan yang melindunginya dari undang-undang. Dengan kekebalan yang mereka miliki, undang-undang tidak dapat menyentuh mereka. Contohnya adalah kekebalan yang dimiliki oleh para kepala negara dan anggota parlemen. Jika kepala negara melanggar hukum, ia tidak akan dihukum atau tunduk pada undang-undang karena ia memiliki kekebalan tersebut. Begitu pula para anggota parlemen; jika mereka melakukan tindakan kriminal ketika melakukan tugas-tugas keparlemenan, mereka tidak dihukum dan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku selama kekebalan tersebut belum dicabut. Hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam tidak ada seorang pun warga Daulah Islam yang memiliki kekebalan di depan hukum. Kepala negara sama kedudukannya dengan warga negara biasa. Jika ia melanggar hukum maka ia akan dihukum dan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Aturan yang sama juga diberlakukan kepada para anggota Majelis Syura; setiap anggotanya berkedudukan sama dengan masyarakat biasa lainnya. Jika seseorang melakukan kejahatan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kedudukannya di pemerintahan, atau tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah pemerintahan, maka orang itu akan diajukan ke pengadilan umum. Namun, jika kejahatan yang dituduhkan berkaitan dengan kedudukannya di pemerintahan atau bersangkut-paut dengan masalah-masalah pemerintahan maka orang itu akan diajukan ke Pengadilan *Mazhâlim* (Mahkamah *Mazhalim*). Kekebalan dalam Islam hanya diberikan kepada para utusan dari negara-negara lain yang datang membawa misi-misi diplomatik. Hanya merekalah yang mempunyai kekebalan, yaitu kekebalan diplomatik; selain mereka tidak ada seorang pun yang mempunyai kekebalan tersebut.

Kebebasan Umum dalam Sistem Demokrasi Bertentangan dengan Islam

Dalam sistem demokrasi, dikenal apa yang disebut dengan kebebasan umum, yang terdiri antara lain dari: kebebasan berperilaku; kebebasan berkepemilikan; kebebasan beragama; dan kebebasan menyatakan pendapat. Jadi, setiap orang berhak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bagi mereka, tidak ada hukuman bagi pelaku perzinahan, bahkan tidak boleh ada hukuman bagi perbuatan tersebut, karena hukuman itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pribadi. Selain itu, mereka boleh berupaya mendapatkan sesuatu dengan segala cara. Mereka boleh mengumpulkan kekayaan dengan cara berjudi, menipu, dan menimbun. Mereka juga boleh menganut akidah apapun dan menyatakan pendapat apa saja sesuai dengan keinginannya. Semua ini bertentangan dengan Islam. Alasannya, karena dalam Islam tidak dikenal kebebasan mutlak, dalam arti kebebasan tanpa kepatuhan dalam melakukan setiap perbuatan. Islam membatasi perbuatan kaum Muslim dengan kewajiban mereka untuk taat pada hukum-hukum syariah. Setiap perbuatan kaum Muslim harus diselaraskan dengan hukum syariah. Kebebasan umum tidak dikenal dalam kehidupan kaum Muslim. Tidak ada kebebasan pribadi

dalam Islam. Karena itu, laki-laki dan wanita yang berzina akan dihukum cambuk. Bahkan suami atau istri yang berzina akan mendapatkan hukuman rajam. Islam juga tidak mengenal kebebasan kepemilikan. Karena itu, tidak boleh mengumpulkan harta kekayaan melalui judi atau usaha-usaha lain yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Harta kekayaan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang tidak sesuai dengan hukum syariah haram untuk dimiliki, seperti riba. Seseorang juga tidak boleh mengumpulkan kekayaan dengan cara menipu atau berbuat curang dalam perdagangan serta melakukan monopoli. Selain itu, dalam Islam tidak dikenal kebebasan beragama. Seorang Muslim yang mengganti agamanya (*murtad*) akan mendapat hukuman mati jika tidak bertobat. Dalam hal kebebasan berpendapat, Islam memperbolehkan kaum Muslim menyatakan pendapatnya selama tidak mendatangkan dosa. Bahkan Islam mewajibkan setiap Muslim menyampaikan kebenaran dimana pun dan kapan pun. Dalam hadits Ubaidah bin Shamit, ketika kaum Anshar memberikan baiatnya kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda (yang artinya): *Bahwa kami akan menyampaikan kebenaran di mana pun kami berada; kami tidak akan takut terhadap celaan siapa pun di jalan Allah.* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Islam juga memerintahkan kita untuk menentang penguasa zalim dengan pendapat kita dan mengoreksi tindakan keliru mereka. Rasul saw. bersabda (yang artinya): *Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muththalib dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa, lalu ia memberikan nasihat kepadanya, namun kemudian penguasa itu membunuhnya.* (HR al-Hakim).

Ini tidak dianggap sebagai kebebasan menyatakan pendapat, namun kepatuhan pada hukum-hukum syariah. Dalam beberapa hal, menyatakan pendapat merupakan perkara yang mubah, sementara dalam beberapa kasus lain, menyatakan pendapat (kebenaran) merupakan suatu kewajiban. Dengan demikian, Islam bertentangan dengan demokrasi dalam perkara yang disebut sebagai kebebasan umum, karena dalam Islam tidak dikenal kebebasan, kecuali kebebasan dalam hal memerdekakan budak.

Dari hanya ketujuh hal di atas, telah nyata perbedaan antara Islam dan demokrasi. Telah jelas pula bahwa sistem demokrasi dan

hukum-hukum Islam merupakan dua hal yang sama sekali berbeda, karena terdapat perbedaan yang nyata antara kedua hal tersebut. Perbedaan keduanya sangat menyolok. Dengan demikian, jelas bahwa demokrasi sama sekali lain dengan Islam.

Dari yang telah dijelaskan dalam bab ini, terlihat dengan jelas bahwa pemahaman yang menyatakan, “Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak dilarang oleh dalil-dalil tekstual adalah perkara-perkara yang dapat diambil sebagai hukum,” merupakan pemahaman yang salah. Melalui pengkajian yang teliti terhadap dalil-dalil syariah juga telah jelas bahwa pengambilan hukum selain dari yang dibawa oleh syariah merupakan pengambilan hukum kufur, karena sama artinya dengan mengambil sesuatu selain dari yang diturunkan Allah SWT. Apalagi Allah SWT telah melarang kita untuk merujuk pada selain hukum syariah sebagaimana dalil-dalil yang telah disampaikan di muka, seperti:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

Demi Tuhanmu, mereka sesungguhnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan. (QS an-Nisa': 65).

Rasulullah saw. juga bersabda sebagai berikut (yang artinya): Setiap amalan yang tidak kami perintahkan adalah tertolak. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Allah SWT dengan jelas melarang kaum Muslim mengambil hukum selain dari yang telah Dia turunkan, sebagaimana firman-Nya kepada Rasulullah saw.:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾

Hendaklah kamu memutuskan perkara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. (QS al-Maidah: 49).

Ayat di atas dilanjutkan dengan ayat berikut:

﴿وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

Berhati-hatilah kamu dari mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang telah Allah turunkan kepadamu. (QS al-Maidah: 49).

Allah SWT tidak berhenti sampai di sini, namun melanjutkan dengan mencela orang-orang yang berhukum dengan hukum-hukum selain dari yang telah Allah turunkan. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan adalah kafir. (QS al-Maidah: 44).

Pada ayat lain, Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan adalah zalim. (QS al-Maidah: 45).

Pada ayat yang lain lagi Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan adalah fasik. (QS al-Maidah: 47).

Ayat-ayat ini sangat menekankan kewajiban untuk mematuhi apa yang telah diturunkan Allah SWT, membatasi pengambilan hukum hanya dari hukum-hukum-Nya dan melarang secara mutlak untuk mengambil hukum-hukum lain selain dari-Nya. Dengan demikian, mengadopsi undang-undang Barat dan hukum-hukum demokrasi bukan hanya sekadar kesalahan, namun sama saja dengan mengambil hukum-hukum kufur yang telah Allah haramkan, sekalipun hukum-hukum tersebut sesuai bahkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah. Oleh karena itu mengambil hukum yang identik dengan hukum syariah tetap diharamkan, mengingat bahwa hukum tersebut tidak diambil dari syariah. Demikian pula penerapan undang-undang

Barat pada kaum Muslim saat ini sama saja artinya dengan penerapan hukum-hukum kufur atas mereka, tanpa memandang apakah hukum tersebut sesuai atau bertentangan dengan syariah. Jika seorang Muslim menyewa seorang pekerja atau mengontrak rumah atau mobil, dan melaksanakan perjanjian sewa-menyewa itu dengan undang-undang Barat, maka hal ini sama artinya dengan menerapkan hukum kufur, yang diharamkan Islam. Sebaliknya, jika ia melaksanakan perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan hukum syariah maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang halal, baik perjanjian tersebut sesuai atau tidak dengan undang-undang yang berlaku di negeri itu. []

DAMPAK SERANGAN BUDAYA DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini membahas topik tentang ketergelinciran dan kelengahan kaum Muslim yang mengakibatkan berlakunya konstitusi (UUD) dan undang-undang yang berasal dari konstitusi dan undang-undang Barat. Hal ini berarti menandakan pengambilan hukum-hukum kufur oleh Daulah Islam. Serangan budaya Barat yang menyapu seluruh negeri kaum Muslim dan serangan perundang-undangan Barat terhadap sistem pemerintahan Daulah dan undang-undang Islam telah mengguncang akidah kaum Muslim dan menyingkirkan pemikiran-pemikiran Islam dari benak sebagian besar umat Islam. Lebih jauh, serangan-serangan tersebut mengguncang keberadaan Daulah Islam, dan bahkan menumbangkan substansinya, hingga tinggal bangunan fisiknya saja. Hal ini disebabkan karena substansi Daulah Islam adalah berupa sekumpulan konsep-konsep (*mafâhîm*), standar-standar (*maqâ'yis*), ketundukan-ketundukan (*qanâ'ât*), serta sekumpulan manusia yang diikat menjadi satu oleh suatu kekuasaan. Jadi, jika seluruh konsep-konsep, standar-standar, dan ketundukan-ketundukan di antara kelompok manusia itu telah hancur dan berubah substansinya maka tumbang pula keberadaan negara tersebut, atau paling tidak, asas (landasan) yang membentuk pondasi negara tumbang, meski strukturnya masih berdiri. Kondisi tanpa pondasi ini menyebabkan struktur negara yang masih berdiri menjadi sangat mudah untuk diruntuhkan. Tanpa serangan budaya dan perundang-undangan ini,

bangsa kafir tidak akan mampu menghancurkan Daulah Islam. Namun, negara-negara kafir berhasil memecah-belah kaum Muslim dalam kotak-kotak nasionalisme-kebangsaan, utamanya nasionalisme Turki dari Arab. Ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan mereka mengguncang berbagai konsep, kriteria, dan keyakinan umat Islam. Ini juga merupakan kelanjutan dari kesuksesan mereka menyingkirkan hukum syariah dan menggantinya dengan hukum-hukum demokrasi dan undang-undang kufur Barat sebagai prinsip dasar tegaknya Khilafah dan rujukan sistem peradilan. Setelah mereka sukses, mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang tertinggal yang dapat menyelamatkan struktur Daulah Islam. Oleh karena itu, negara-negara kafir Barat tersebut mulai berpikir untuk menghancurkan Khilafah dan menghapuskannya untuk selama-lamanya.

Tidak lama setelah Perang Dunia I pecah dan Daulah Utsmani berpihak kepada Jerman, negara-negara kafir mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan Khilafah. Mereka segera menyiapkan strategi untuk meraih tujuan ini.

Upaya Memecah-belah Daulah Khilafah

Negara-negara Eropa tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu saat umat Islam akan diperintah dengan hukum-hukum selain hukum Islam, atau bahwa mereka dapat menguasai kaum Muslim secara langsung, karena mereka adalah kaum kafir di mata Islam. Oleh karena itu, untuk memperlemah Daulah Islam dan menyingkirkannya, mereka memusatkan perhatiannya dalam upaya memecah-belah Daulah Islam menjadi sejumlah “pemerintahan Islam” yang tunduk pada pengaruh mereka. Dalam pembicaraan antara Rusia, Inggris, dan Prancis pada tahun 1915—pada saat terjadi Perang Dunia I—dijelaskan masalah ini. Dalam suatu memorandum yang diajukan kepada Rusia sebagai jawaban memorandum Rusia mengenai masalah ini, Prancis dan Inggris memasukkan satu pasal yang menyatakan, “Melindungi tempat-tempat suci di negeri-negeri Islam dan wilayah Arab di bawah pemerintahan negara Islam yang merdeka.”

Dalam memorandum Rusia yang dikirim sebagai jawaban atas memorandum Inggris-Prancis tersebut, juga dinyatakan dalam salah

satu pasal bahwa, “Penanganan suatu keputusan yang krusial mengenai hubungan pada masa mendatang antara “negara-negara Islam” yang akan Anda dirikan di atas puing-puing reruntuhan Negara Ottoman dan memisahkan mereka dari Khilafah merupakan suatu permasalahan bagi Pemerintahan Yang Mulia Tsar.” Ditambahkan pula, “Pemerintahan Yang Mulia Tsar dengan tulus mengharapkan (Anda) dapat menghapuskan Khilafah dari bangsa Turki, namun pada saat yang sama kami sungguh-sungguh berharap Anda menjamin kebebasan melaksanakan ibadah haji dan tidak sedikitpun ikut campur dalam perkara-perkara yang dapat melukai hati kaum Muslim.”

Dalam suatu telegram yang membahas sejumlah tuntutan Italia yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Rusia, seorang duta besar Rusia untuk Inggris menyatakan, “Pemerintah Italia mendukung usulan Rusia mengenai pentingnya memisahkan “pemerintahan Islam”—yang akan didirikan di Hijaz di atas reruntuhan Kesultanan Ottoman—dari Khilafah dan menempatkannya sepenuhnya di bawah kendali Inggris. Pemerintah Italia mendukung dengan seluruh kekuatannya upaya untuk menyingkirkan Khilafah dari bangsa Turki dan menghapuskannya untuk selama-lamanya.”

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sekutu berniat memperlemah dan menghapuskan Khilafah. Namun demikian, tidak satu pun dari kaum Muslim yang berkeinginan atau dapat menerima upaya penghapusan Khilafah itu. Bahkan para pengkhianat dari golongan Muslim Arab yang berkomplot dengan Inggris justru menyerukan berdirinya Khilafah di tangan bangsa Arab. Sebagaimana bangsa Turki, mereka dengan sepenuh hati mengikatkan diri mereka pada Khilafah, cinta dan kesetiaan mereka pada Khilafah berakar kuat dalam jiwa mereka. Bahkan para aktifis Turki Muda pun memiliki kesetiaan pada Khilafah dan berupaya mempertahankan tiap bagian dari struktur bangunan Daulah Islam. Tidak pernah terdengar ada seorang Muslim yang mempunyai keinginan dan dapat menerima penghapusan Khilafah, apalagi yang berupaya menghapuskannya. Dengan demikian, penghapusan Khilafah merupakan keinginan yang berlebihan, meski jika seluruh wilayah kaum Muslim dikuasai para imperialis Eropa.

Oleh karena itu, negara-negara Sekutu menyembunyikan niat tersebut dan merahasiakannya rapat-rapat hingga tidak seorang pun mengetahuinya. Sebagai gantinya, mereka berupaya menyerang Daulah Utsmani dari dalam melalui sejumlah inisiatif yang dapat membuat Daulah Utsmani mundur dari peperangan dan membuat suatu perjanjian damai dengan Sekutu. Negara Sekutu memusatkan perhatian pada upaya ini dan mulai melaksanakannya. []

UPAYA SEKUTU MEMBUJUK JAMAL PASHA

Tidak seorang pun yang dapat mempengaruhi Daulah Utsmaniyah dan membuatnya mundur dari Perang Dunia atau membuat perjanjian damai, selain dari kalangan perwira angkatan bersenjata yang berpengaruh. Orang-orang di luar kalangan tersebut posisinya tidak dapat melakukan sesuatu. Para pengkhianat dari kalangan Arab yang biasa berkomplot dengan Inggris dan Prancis ternyata tidak mampu mencapai tingkatan sebagai politisi yang berpengaruh. Mereka tidak dapat diharapkan oleh majikan mereka—Inggris dan Prancis—untuk mempengaruhi kebijakan negara. Tugas mereka hanya sebatas sebagai mata-mata terhadap Daulah dan melakukan sejumlah tindakan sabotase terhadap berbagai kepentingan Daulah. Bahkan pimpinan para pengkhianat itu, Syarif Hussain bin Ali, terlalu lemah untuk dapat mempengaruhi kebijakan Daulah. Yang diharapkan Inggris darinya adalah sekadar melakukan tindakan-tindakan sabotase terhadap angkatan bersenjata Daulah Utsmani, dan membuat opini publik di kalangan militer agar kaum Muslim tidak mempunyai rasa permusuhan terhadap negara-negara Eropa, yang dapat mengobarkan semangat jihad sebagaimana yang diwajibkan syariah, mengingat bahwa mereka adalah kaum kafir di mata Islam. Oleh karena itu, bangsa Arab tidak menjadi pusat perhatian negara-negara Sekutu selama Perang Dunia I, dalam upayanya membuat

Daulah Utsmani menarik diri dari peperangan. Negara-negara Sekutu lebih memusatkan perhatiannya dalam menggarap para perwira Turki.

Dari sejumlah perwira Turki, ada dua orang perwira yang menjadi tumpuan harapan Sekutu, yaitu Jamal Pasha dan Musthafa Kemal. Kedua orang itu dikenal karena dua hal. *Pertama*, kebencian mereka terhadap Jerman serta ketidaksetujuan mereka atas keikutsertaan Daulah Utsmani dalam Perang Dunia dan bersekutu dengan Jerman. *Kedua*, ambisi keduanya untuk merebut kekuasaan serta upaya mereka untuk meraih tujuan-tujuannya. Pada saat itu Musthafa Kemal adalah perwira junior yang tidak terlalu berharga, sekalipun ia merupakan perwira yang cerdas, ambisius, dan aktif menentang Daulah. Adapun Jamal Pasha mempunyai kedudukan yang berpengaruh, khususnya karena ia adalah salah satu dari tiga orang yang memerintah Daulah Utsmani. Ketiga orang tersebut adalah Perdana Menteri Tal'at, Anwar Pasha—Menteri Perang—dan Jamal Pasha selaku Panglima Divisi Keempat Angkatan Bersenjata dan Gubernur Suriah. Oleh sebab itu, Sekutu berupaya sekuat tenaga untuk mempengaruhi Jamal Pasha. Selama Pertempuran Dardanella (Pertempuran Gallipoli) di awal kekalahannya, Sekutu berupaya membuat kontak dengan Jamal Pasha dan mempengaruhinya agar memberontak terhadap Daulah Utsmaniyah. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa Inggris berhasil menyerang Istambul dan merebut Gallipoli pada tanggal 25 April 1915, sekalipun kemudian tentara Turki berhasil menahan laju pergerakan pasukan Inggris. Selanjutnya, tentara Inggris tidak mampu bergerak satu langkah pun dan menderita kerugian yang sangat besar; bahkan komandan Sekutu, Jendral Hamilton, pada tanggal 16 Agustus terpaksa mengirimkan telegram kepada Lord Kitchener—Menteri Perang Inggris—untuk meminta bala bantuan dan amunisi.

Pada tanggal 14 Oktober, Pemerintah Inggris memberhentikan Jenderal Hamilton sebagai komandan Pertempuran Dardanella. Inggris lalu mengangkat Jenderal Charles Monroe sebagai gantinya untuk melakukan evaluasi Pertempuran Dardanella. Pada tanggal 28 Oktober, Monroe tiba di Dardanella. Bersama-sama dengan stafnya dia mempelajari situasi pasukan Sekutu di sepanjang garis pantai Laut

Dardanella dan parit-parit pertahanan pasukan Inggris. Selanjutnya, ia menulis surat kepada Lord Kitchener mengusulkan perlunya evakuasi. Menteri Perang Lord Kitchener merasa khawatir dengan telegram dari Monroe, dan memutuskan untuk segera berangkat ke Dardanella. Dia tiba di sana pada tanggal 9 November dan segera melakukan inspeksi terhadap posisi pasukan Sekutu di sepanjang garis pantai dan kantong-kantong pertahanan pasukan Inggris dan Prancis. Dia menyimpulkan bahwa pasukan Sekutu masih dapat mempertahankan kedudukannya jika pasukan Turki tidak mendapatkan meriam dan amunisi dari Jerman, karena hal ini dapat membuat posisi pasukan Sekutu menjadi sangat kritis.

Pada tanggal 15 Desember, pasukan Sekutu tiba-tiba mengevakuasi diri dari posisinya. Pada saat yang kritis dan membingungkan akibat pertempuran Dardanella, Sekutu berupaya mengontak Jamal Pasha dan merundingkan upaya untuk memberontak terhadap Daulah Utsmaniyah. Tampaknya, perundingan tersebut berlangsung secara efektif dan Jamal Pasha pun menyepakati prinsip-prinsipnya dengan sejumlah syarat. Pada tanggal 26 November 1915, Kementerian Luar Negeri Rusia mengirimkan kepada dua kedutaannya di Paris dan Roma sebuah telegram bernomor 6391. Cuplikan isi telegram tersebut adalah:

Kabar yang sampai kepada kita dari kalangan Armenia di Istambul menginformasikan, bahwa Jamal Pasha bersedia melaksanakan gerakan-gerakan melawan Pemerintah Istambul dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Sekutu mengakui kedaulatan Negara Ottoman, yang dipimpin oleh seorang sultan, yang meliputi wilayah-wilayah Suriah, Palestina, Irak, Arab, Sisilia, Armenia, dan Kurdistan.
- (2) Jabatan sultan diserahkan kepada Ahmad Jamal Pasha dan anak-anak serta keturunannya akan mewarisi kesultanan tersebut.
- (3) Ahmad Jamal Pasha akan menyatakan bahwa sultan yang sekarang berkuasa beserta pemerintahannya adalah kaki tangan Jerman dan menyatakan perang terhadap mereka.

- (4) Pada saat Jamal Pasha menyatakan pemberontakannya dan mengerahkan pasukannya melawan Pemerintah, Sekutu memberikan bantuan berupa persenjataan, makanan, dan peralatan militer kepada pasukannya.
- (5) Negara-negara Sekutu harus memberi Jamal Pasha bantuan keuangan yang diperlukan sampai akhir peperangan.
- (6) Jamal Pasha bersedia menyerahkan kawasan selat dan Istambul kepada Sekutu.
- (7) Jamal Pasha sanggup mengamankan rute untuk membantu bangsa Armenia.

Demikianlah syarat-syarat yang dinyatakan dalam telegram tersebut. Tampaknya Rusia telah mempertimbangkan syarat-syarat tersebut bersama Inggris dan Prancis. Rusia dapat menerima syarat-syarat tersebut, sementara Inggris dan Prancis tidak dapat menerimanya. Pada tanggal 12 Desember 1915, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia mengirimkan telegram nomor 6130 kepada duta besarnya di Bukarest (Rumania), yang isinya antara lain: "Dimungkinkan untuk memenuhi syarat-syarat Jamal Pasha sebagaimana yang diinginkan; jika perlu, kita mengamatkannya dengan janji dari Sekutu untuk memberikan segala yang diinginkannya."

Namun demikian, tampaknya Sekutu menolak kesepakatan Rusia tersebut. Pada tanggal 27 Desember 1915, duta besar Rusia untuk Prancis mengirim telegram kepada Pemerintah Rusia yang menyatakan:

Kami telah menerima telegram anda nomor 6391. Salinannya telah kami serahkan kepada Mousieur Brian yang menyatakan ketertarikannya terhadap isi telegram tersebut dan dia juga menyatakan bahwa ia akan membahasnya pada rapat kabinet besok, sebelum terlambat. Dia juga mengatakan kepada kami, bahwa dalam masalah ini, sekalipun syarat-syarat ini dapat kita terima, mereka tidak sepakat dengan ambisi-ambisi Inggris sehingga mereka akan menolak argumentasi Inggris.

Selanjutnya, Prancis membatalkan penerimaan atas syarat-syarat Jamal Pasha tersebut. Pada tanggal 29 Desember 1915, duta besar Rusia untuk Prancis mengirimkan telegram sebagai kelanjutan telegram sebelumnya. Dinyatakan dalam telegram itu, "Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa Pemerintah Prancis dengan tegas menolak kesepakatan tersebut hingga mereka tidak memperhalus pernyataan keberatannya." Ditambahkan pula, "Yang pasti adalah bahwa Prancis sangat menghargai beberapa usulan Anda dan bahwa mereka menyadari pentingnya memprovokasi pemberontakan di dalam Kesultanan Ottoman. Mereka bahkan yakin bahwa pemberontakan tersebut akan sangat menguntungkan mereka dalam Perang Dunia. Namun demikian, mereka melihat bahwa usulan Anda bernegosiasi dengan Jamal Pasha tidak lebih dari sekadar upaya memenuhi ambisi Anda untuk merebut Istambul dan kawasan selat, tanpa menyiapkan suatu usaha untuk mendapatkan kedaulatan bagi Prancis di Timur."

Kemudian, Inggris menyatakan penolakannya ikut serta dalam perundingan itu. Pada tanggal 27 Januari 1916, duta besar Rusia di London mengirimkan sebuah telegram kepada Menteri Luar Negeri Rusia di St. Petersburg yang menyatakan, "Nicholson telah memberitahukan kepada kami bahwa setelah mempelajari masalah ini sekali lagi dan memeriksa dengan teliti setiap aspeknya, Pemerintah Inggris menganggap perlu untuk menghentikan keikutsertaannya dalam perundingan ini dan mengabaikannya untuk selamanya." Hal ini menunjukkan bahwa gagasan Sekutu untuk membujuk Turki menarik diri dari Perang Dunia dan mempengaruhi sejumlah perwira untuk merebut kekuasaan mengalami kegagalan. Namun demikian, mereka tetap berusaha memecah-belah Daulah Utsmaniyah dan menghapus Khilafah. Oleh karena itu, mereka menolak usulan Jamal Pasha dan menolak berunding dengannya, mengingat bahwa salah satu syarat Jamal Pasha adalah menjaga kesatuan wilayah Islam, paling tidak dalam bentuk federasi, dan syarat lainnya yang menghendaki keberadaan Khilafah. Wajar jika mereka menolak usulan ini dan berusaha melakukan inisiatif lainnya.

Adapun upaya lainnya dengan memperlakui Syarif Makkah, Hussain bin Ali, telah banyak diketahui, namun tetap tidak dapat

membuat Daulah Utsmaniyah mundur dari peperangan. Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa mereka terpaksa melakukan upaya-upaya lain dengan memperlak sejumlah perwira Turki. Sejumlah perundingan antara Inggris dan tokoh-tokoh Turki dapat berlangsung secara efektif, tidak lain disebabkan karena Inggris memiliki agen-agen di dalam Daulah Utsmani, seperti Arif Pasha, Damad Farid, dan sebagainya.

Sebelum Perang Dunia I, seorang atase militer Inggris sangat aktif melakukan berbagai aksi dan kontak dengan leluasa. Atase militer ini kembali ke Istanbul setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata, dan memainkan peranan utama bersama-sama dengan komandan pasukan Sekutu, dalam penghapusan Khilafah. Sangat mungkin bahwa ia telah membuat sejumlah kontak dan menyusun jaringan, meski tidak satu pun yang terungkap.

Kemunculan Musthafa Kemal

Pada awal pecahnya peperangan, Musthafa Kemal tidak banyak dikenal, sekalipun dia diketahui memuja pemikiran Barat dan menentang pemikiran-pemikiran Islam. Dia juga diketahui condong pada Inggris dan membenci Jerman. Hanya setelah keikutsertaannya dalam Pertempuran Ana Forta namanya dikenal luas dan dihormati. Sejak saat itu, ia diberitakan secara luas dan namanya pun semakin terkenal.

Pada musim semi 1915, pada awal tahun ke-2 Perang Dunia I, Jerman menghentikan upayanya merebut wilayah-wilayah Prancis, karena baik Jerman maupun Prancis tidak akan mampu saling mengalahkan dan mencapai kemenangan mutlak. Sementara itu, pasukan Rusia menderita kekalahan yang pahit. Bahkan mereka tidak mampu bangkit lagi dan meneruskan perlawanannya jika negara-negara Barat tidak segera bertindak dan memberikan suplai amunisi yang sangat banyak. Sekutu Barat memberangkatkan kapal-kapal bermuatan amunisi untuk tujuan tersebut, namun armada ini diblokade di Laut Tengah sehingga tidak dapat mencapai Rusia. Oleh sebab itu, mereka harus melakukan serangan ke Istanbul dan membuka selat agar kapal-kapal tersebut dapat sampai ke Rusia dan memberikan bantuan kepadanya secara teratur. Panglima pasukan Utsmani pada waktu itu

dipegang oleh Jenderal Jerman, Otto Liman van Sanders. Ia menyerahkan komando salah satu divisi kepada "Qa'im Maqam" Musthafa Kemal Beik, dan pada saat itulah pasukan Sekutu melancarkan serangannya.

Pada tanggal 15 April 1915, Inggris berupaya menyusun suatu serangan total. Mereka memasuki kancah pertempuran. Pasukan Inggris dapat mencapai Gallipoli dan berhasil menceraiberaikan pasukan Utsmani. Akibatnya, Jenderal Sanders terpaksa mengundurkan diri dari posisinya sebagai komandan tempur dan digantikan oleh Qaim Maqam Musthafa Kemal yang pada waktu itu masih berpangkat kolonel. Musthafa menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan Utsmani di dekat Ana Forta, suatu wilayah yang paling rawan di dekat Dardanella. Pertempuran terjadi pada suatu lembah. Saat itu pasukan Turki menguasai puncaknya, sedangkan pasukan Inggris berada di bawah berusaha menduduki puncak tersebut. Pertempuran berlangsung selama sehari-hari. Tidak satu pun di antara kedua pasukan tersebut yang mendapatkan kemenangan. Akhirnya, tercapai keadaan status quo ketika kedua pasukan berhasil mempertahankan kedudukannya masing-masing.

Keadaan status quo ini berlangsung selama berbulan-bulan, yaitu sampai pada malam 15 Desember 1915, ketika pasukan Inggris tiba-tiba mengundurkan diri secara rahasia dari wilayah yang didudukinya di sepanjang garis Pantai Gallipoli. Kapal-kapal perang Sekutu segera meninggalkan medan pertempuran setelah pasukan Inggris naik ke atas kapal dengan terburu-buru. Evakuasi pasukan Inggris mengakhiri pertempuran tersebut. Ketika pertempuran berakhir, Musthafa memberikan laporan pertempuran kepada Jenderal Sanders. Pada saat itu Musthafa juga mempersembahkan jam tangannya yang hancur terkena peluru. Ketika Sanders menerima jam tangan tersebut, ia langsung menyerahkan jam tangan emasnya kepada Musthafa, dan menyimpan jam tangan yang hancur itu sebagai suvenir.

Pasca pertempuran Ana Forta tersebut, Musthafa menjadi seorang bintang. Ia mendapatkan ketenaran di kalangan angkatan bersenjata. Pertempuran tersebut juga diberitakan secara luas serta dianggap sebagai kemenangan yang sangat penting bagi Musthafa

Kemal atas pasukan Inggris. Sekalipun Musthafa Kemal menyembunyikan gagasannya untuk tidak ikut serta dalam Perang Dunia serta memperoleh popularitas akibat kemenangannya dalam pertempuran Ana Forta, ia tetap mempertahankan pendapatnya tentang perlunya Daulah Utsmaniah mengundurkan diri dari peperangan. Musthafa tidak merasa puas dengan sekadar mengusung gagasan tersebut dan mendapatkan ketenaran di kalangan militer dan masyarakat. Ia juga berupaya mempengaruhi sejumlah tokoh yang berpengaruh untuk mendapatkan dukungan atas gagasannya tersebut, sekalipun ia hanya menemukan perbedaan dan kejengkelan dari tokoh-tokoh tersebut. Akibatnya, ia justru menjadi obyek kecurigaan dari sejumlah kalangan. Sekalipun banyak pihak mempercayai kemampuan militer Musthafa Kemal, tidak seorang pun disiapkan untuk mendorongnya ikut campur tangan dalam masalah-masalah politik negara. Mereka justru menghalanginya bilamana ia berupaya mengambil bagian dalam politik kenegaraan secara praktis. Ia sangat memuja Inggris, mempercayai sepenuhnya, dan yakin akan kemampuan Inggris, serta tidak ragu sedikit pun bahwa Inggris akan memenangkan peperangan dan Jerman akan ditaklukkan. Karena alasan inilah ia menjadi obyek kecurigaan banyak pihak. Begitu pula orang-orang yang dekat dengan Musthafa; mereka menjadi obyek kecurigaan penguasa dan berada dalam pengawasan. []

MUSTHAFa KEmAL BERUPAYa MENARIK MUNDUR DAULAH DARI PERANG DUNIA DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN DAMAI DENGAN INGGRIS

Kememenangan Musthafa Kemal atas pasukan Inggris pada pertempuran Dardanella menjadi suatu hal yang menarik. Kemenangan tersebut mempengaruhi semangat juang angkatan bersenjata Utsmani dan kaum Muslim di seluruh wilayah Daulah Utsmaniyah. Kemenangan tersebut juga mempengaruhi mental pasukan Sekutu. Namun demikian, kemenangan dalam pertempuran yang ia pimpin tersebut justru dipergunakan oleh Musthafa Kemal untuk menimbulkan keraguan di kalangan rakyat terhadap kemampuan negara dalam melawan Inggris, serta untuk melancarkan gagasannya tentang perlunya menarik mundur negara dari peperangan dan menandatangani perjanjian damai dengan Inggris. Ia kembali memulai 'perang domestik' dengan Daulah dengan tujuan agar Daulah meninggalkan persekutuan dengan Jerman dan membuat kerjasama dengan Inggris. Jika sebelum pertempuran dia menyimpan gagasan ini hanya untuk dirinya sendiri, namun setelah kembali dari pertempuran ia mulai menyebarluaskan pendapat-pendapatnya tersebut kepada masyarakat, khususnya kalangan perwira militer, dan berupaya mempengaruhi para pejabat dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Ia bahkan mulai bertemu dengan para menteri dan memperbincangkan pendapat-pendapatnya tersebut secara terbuka serta berusaha mempengaruhi mereka.

Dalam suatu kesempatan, Musthafa menemui Menteri Luar Negeri di kantornya. Menteri Luar Negeri pada waktu itu dijabat oleh

Nasimi Beik, yang merupakan salah satu tokoh yang menganjurkan keikutsertaan Turki dalam perang dunia dan bersekutu dengan Jerman. Nasimi Beik menyambut hangat Musthafa, mengingat bahwa ia adalah pahlawan perang Ana Forta, dan berbincang dengannya secara santun. Kata-kata Nasimi Beik penuh dengan optimisme, khususnya mengenai kemenangan yang dicapai oleh Daulah dan kekalahan Sekutu pada pertempuran Dardanella. Menteri Luar Negeri sangat menghargai kemenangan ini dan menyadari sepenuhnya dampak yang timbul akibat kekalahan ini pada negara-negara Sekutu.

Kekalahan Sekutu pada pertempuran ini membuat Rusia terus mengalami kekurangan suplai amunisi yang sangat mereka butuhkan. Kekalahan ini juga mengakibatkan Prancis menjadi sasaran empuk serangan kilat Jerman akibat ketidakmampuan Rusia melakukan perlawanan. Ini berarti bahwa Jerman berhasil mengamankan front timur. Perimbangan kekuatan ini menguntungkan Jerman dan Daulah Utsmaniyah. Inilah yang menyebabkan optimisme Menteri Luar Negeri. Namun, Musthafa Kemal berupaya menimbulkan pesimisme dan meyakinkan Menteri Luar Negeri terhadap pendapatnya. Karena merasa bahwa argumen menteri cukup kuat, Musthafa terpaksa melakukan peringatan dengan berkata, "Anda harus mencatat apa yang saya katakan! Jika Anda membiarkan para politisi terus-menerus mempengaruhi Anda, Anda akan menemukan permasalahan yang lebih besar dari yang Anda dan para politisi bayangkan."

Menteri Nasimi Beik merasa tersinggung dengan ucapan ini sehingga ia berkata dengan arogan, "Saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan."

Musthafa Kemal menjawab, "Yang saya maksud adalah bahwa negara ini menghadapi kehancuran dan Anda berpura-pura tidak melihatnya. Jelas Anda memaksakan masalah ini karena Anda adalah seorang menteri. Namun keyakinan pribadi Anda pasti sama sekali berbeda. Anda pasti tidak mengabaikan seluruh realitas yang terjadi dan Anda sesungguhnya menyadari sumber penyakit dan letak bencana tersebut."

Menteri Nasimi terperangah dengan pernyataan ini. Ia kemudian berkata kepada Musthafa dengan nada yang tegas, "Kolonel, jika Anda

datang kepada saya untuk melemparkan keraguan Anda terhadap situasi negara ini, saya memberitahukan bahwa saat ini merupakan waktu dan tempat yang tidak tepat untuk melemparkan keraguan seperti itu. Anda telah melakukan kesalahan dengan datang kepada saya. Saya dan para kolega menteri sepenuhnya yakin dengan Panglima Angkatan Bersenjata. Oleh sebab itu, saya menganjurkan agar Anda menemuinya. Dengan itu, ia dapat menghilangkan rasa takut Anda dan menghapuskan kekhawatiran Anda."

Menteri Nasimi kemudian mempersilakan Musthafa Kemal pergi meninggalkan kantornya.

Keesokan harinya, Menteri Luar Negeri menjelaskan kepada Panglima Angkatan Bersenjata perihal pembicaraannya dengan Musthafa Kemal dan meminta kepadanya untuk memberikan hukuman yang pantas kepada Musthafa Kemal. Panglima memutuskan membuang Musthafa ke wilayah Kaukasus. Musthafa dibuang ke Kaukasus dan berada di sana selama lebih dari satu tahun, tanpa mampu melakukan aktivitas apa pun.

Pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri tersebut menandai upaya resmi yang dilakukan oleh Musthafa Kemal dalam rangka membujuk Daulah untuk mundur dari peperangan serta mempengaruhi para negarawan, para menteri, dan para perwira untuk bertindak seperti itu. Pada waktu itu, tidak ada petunjuk bahwa dia melakukan inisiatif tersebut berdasarkan kontakannya dengan Inggris. Jadi, tindakannya tersebut dianggap sebagai pendapat pribadi yang semata-mata berasal darinya. Dengan membuang Musthafa Kemal berarti Daulah menyingkirkan gagasan tersebut. Namun demikian, sejumlah kejadian berlangsung sejak saat itu. Kejadian-kejadian tersebut diprovokasi oleh Musthafa Kemal. Tujuannya adalah dalam rangka mengimplementasikan pemikiran-pemikirannya dengan menggunakan kekuatan serta ditujukan untuk merebut kekuasaan secara paksa. Dengan demikian, pengkhianatannya terlihat dengan nyata.

Konspirasi Musthafa Kemal Menentang Daulah Islam

Konspirasi pertama terjadi pada saat Musthafa ditugaskan di Kaukasus. Suatu upaya kudeta berlangsung di Istanbul. Musthafa Kemal

Musthafa Kemal Berupaya Menarik Mundur Daulah... 101

patut diduga terlibat dalam konspirasi ini. Seorang perwira bernama Mayor Yaqub Jamil Beik berkomplot dengan sejumlah kawannya untuk menjatuhkan Pemerintah. Salah satu kutipan pernyataan Yaqub Jamil di hadapan kawan-kawannya adalah, "Orang-orang yang menganggap dirinya besar sesungguhnya adalah orang-orang kerdil. Negara menyerukan perlunya menyingkirkan orang-orang tersebut dari posisi-posisi mereka di pemerintahan dan menggantinya dengan orang-orang yang memiliki patriotisme yang lebih besar dan ketulusan."

Kawan-kawannya menyela, "Menyingkirkan orang-orang tersebut merupakan perkara yang mudah. Namun, dapatkah engkau menunjukkan orang yang menurut pandanganmu dapat mengembalikan pemerintahan seperti semula?"

Yaqub Jamil menjawab, "Musthafa Kemal."

Namun konspirasi makar ini tersingkap. Yaqub Jamil dan teman-temannya lalu dijatuhi hukuman mati. Musthafa Kemal mendengar berita ini ketika ia berada di Kaukasus. Bagi Musthafa, berita ini sangat mengejutkan; bagai suara petir di siang hari. Berita ini sampai ke Musthafa melalui Dr. Hilmi Beik, salah seorang anggota konspirasi yang berhasil kabur dari Istanbul ke Kaukasus dan meminta perlindungan kepada Musthafa. Pemerintah Istanbul memerintahkan Musthafa menangkap Dr. Hilmi Beik dan mengembalikannya ke Istanbul. Namun, Musthafa justru mengirimkan sebuah telegram kepada Pemerintah yang berbunyi, "Doktor Hilmi sekarang berada dalam perlindungan saya."

Pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya diam, karena menganggap bahwa konfrontasi dengan Musthafa akan menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, menjadi jelas di mata Pemerintah dan sejumlah tokoh penting di negara dan kalangan angkatan bersenjata, bahwa Musthafa Kemal memiliki keinginan untuk merebut kekuasaan dan menarik mundur Daulah dari Perang Dunia. Jadi, Musthafa Kemal terjun dalam kancah perpolitikan tidak sekadar dengan mengusung pemikiran dan gagasannya, tetapi juga dengan menggunakan berbagai metode untuk melaksanakan pemikiran dan gagasannya tersebut. Oleh sebab itu,

Musthafa menjadi obyek perhatian dan sumber kekhawatiran berbagai kalangan.

Konspirasi kedua terjadi ketika Daulah Utsmani mulai mengalami kekalahan di Ardh Rum (tanah Romawi) dan jatuhnya Bagdad pada bulan Maret 1917 ke tangan pasukan Inggris. Keberanian Musthafa dalam menentang Pemerintah menjadi semakin jelas. Dia mulai menyerukan secara terbuka penarikan Daulah dari Perang Dunia. Apalagi ketika pasukan Rusia meningkatkan serangannya atas Ardh Rum, yang akhirnya jatuh ke tangan mereka. Sekalipun Pemerintah masih dapat menutup-nutupi kerugian dan kekalahan yang dideritanya, serangan Inggris atas Irak dan jatuhnya Bagdad menjadikan kerugian dan kekalahan yang diderita Daulah Utsmani terlihat nyata.

Inggris menyerang Irak dengan pasukan yang didatangkan dari India. Namun, tentara Utsmani memberikan perlawanan dan berhasil menahan laju serangan Inggris. Mereka juga berhasil menahan bala bantuan Inggris. Pada tanggal 29 April 1916, pasukan Utsmani berhasil memaksa pasukan Jenderal Tomshend yang mengepung Kut al-Amara untuk menyerah dan menawan seluruh anggota pasukan tersebut. Namun demikian, pasukan Inggris yang diturunkan di wilayah tersebut mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada pasukan Utsmani. Dengan itu, keunggulan pasukan Inggris itu pun tampak nyata dalam berbagai pertempuran dan perimbangan kekuatan pun semakin menguntungkan Inggris.

Pada bulan Februari 1917, Inggris berhasil menduduki Kut al-Amara. Selanjutnya, pada bulan Maret mereka berhasil menguasai Bagdad dan segera bergerak menuju Mosul. Hal ini merisaukan Pemerintah dan rakyat Daulah Utsmaniyah. Muncullah pendapat untuk mencopot Anwar Pasha dari kedudukannya sebagai Menteri Perang. Bahkan Partai Persatuan dan Kemajuan—yang pada saat itu menjadi partai Pemerintah, sedangkan Anwar Pasha merupakan salah satu tokoh utamanya—juga mengusulkan pencopotan itu.

Dengan demikian, masalah penggantian Anwar sebagai kepala Kementerian Perang pun menjadi bahasan utama dalam Pemerintahan. Sejumlah nama diusulkan untuk menempati posisi tersebut, yaitu Jamal Pasha, Marshal Izzat Pasha, dan Musthafa Kemal. Kedudukan sebagai

Menteri Perang memerlukan pengalaman dan kepandaian dalam perkara-perkara politik. Karena itu, penunjukkan Jamal Pasha atau Izzat Pasha untuk posisi tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan. Sebab, Jamal Pasha dianggap gagal dalam jabatannya sebagai Gubernur Suriah, sementara Izzat Pasha belum mempunyai cukup pengalaman dalam masalah politik. Dengan demikian, Musthafa Kemal jelas menjadi pilihan yang masih tersisa.

Namun, telah diketahui secara luas bahwa Musthafa Kemal mempunyai keinginan untuk menjatuhkan Pemerintah dan menarik diri dari peperangan. Pandangannya tentang Perang Dunia juga telah diketahui dengan baik. Dia pernah ditolak karena menulis surat kepada Pemerintah untuk menghentikan peperangan. Dia juga sepenuhnya yakin bahwa Jerman secara politis telah kalah perang dan secara militer mereka tidak mungkin mampu memenangkan peperangan. Dia juga meragukan kemampuan Turki dalam melanjutkan peperangan. Sebab, dia beranggapan bahwa Sekutu memerlukan jalur di Laut Dardanella untuk menghubungkannya dengan negara-negara Sekutu di belahan Timur, sementara Rusia dipandang sebagai lawan Daulah Utsmaniyah. Semua pendapat Musthafa Kemal itu telah diketahui dengan baik dan pernah disampaikan secara terbuka. Tidak seorang pun yang meragukan bahwa jika Musthafa Kemal menjadi Panglima Angkatan Bersenjata, dia akan melakukan perubahan-perubahan yang radikal dalam Pemerintahan dan kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, suara-suara yang menyerukan pencopotan Anwar Pasha pun segera berkurang. Mereka mulai menyerukan upaya-upaya untuk merebut Bagdad secepatnya.

Anwar mendekati Komandan Tertinggi Jerman dan meminta mereka meneruskan suplai bala bantuan dan amunisi untuk merebut Bagdad. Jerman segera mengambil langkah-langkah untuk membantu sekutu mereka, Anwar, agar tetap berada dalam jabatannya. Salah satu langkahnya adalah dengan mengirimkan Jenderal Erich van Falkenheim beserta sejumlah besar pasukannya. Falkenheim membentuk suatu pasukan baru yang diberi nama *Thunderbolt* serta men jadikan Hilb (Allepo) sebagai markas besar komandonya. Musthafa Kemal

dipromosikan sebagai Jenderal dan ditunjuk sebagai Panglima Divisi ke-4 di bawah Panglima Tertinggi Jenderal Falkenheim.

Musthafa Kemal merasa benci dengan ide menempatkan seorang Jerman sebagai Panglima Tertinggi. Dia menganggap bahwa berbagai upaya untuk merebut Bagdad merupakan usaha yang sia-sia; setiap upaya tersebut akan mengalami kegagalan. Dia bahkan berpandangan bahwa upaya-upaya tersebut akan mendatangkan kerugian yang amat besar bagi pasukan Utsmani. Lebih lanjut ia menjelaskan kepada masyarakat tentang kebodohan seruan untuk merebut kembali Bagdad dan kesalahan kebijakan Anwar Pasha. Dia juga menjelaskan kerugian dan kerusakan yang akan diderita Daulah sebagai hasil kebijakan perang yang buruk. Kemudian dia mulai berbicara secara rinci mengenai kerugian yang diderita Daulah Utsmaniyah akibat ketundukannya kepada Jerman. Akibatnya, konflik Musthafa Kemal dengan Jenderal Falkenheim tidak dapat dielakkan. Falkenheim berusaha dengan segala cara yang persuasif untuk melunakkan pendapat Musthafa Kemal. Namun, semuanya mengalami kegagalan. Falkenheim tetap mengizinkan Musthafa Kemal mengikuti rapat-rapat komandan.

Rencana yang disusun adalah dengan menyerang Bagdad melalui darat dan Terusan Suez lewat serangan udara. Dengan menyerang Terusan Suez, pasukan Inggris tidak akan mampu mengirimkan bantuan kepada pasukannya di Irak. Namun, Musthafa Kemal mengkritik rencana ini dengan kasar dan menyatakan bahwa rencana tersebut akan gagal total. Panglima dari Jerman mengabaikan kritik tersebut, sementara tak seorang pun—kecuali Jamal Pasha—yang mendukung pendapat tersebut. Jelas, karena kedua orang tersebut—Musthafa dan Jamal—adalah dua perwira yang membenci Jerman dan menganggap perlu menarik diri dari Perang Dunia. Dengan demikian, Jamal Pasha mendukung pendapat Musthafa Kemal dalam diskusi tersebut. Namun, rencana itu tetap akan diteruskan, karena Panglima Falkenheim dan para komandan lainnya menganggap bahwa rencana itu adalah rencana yang bagus dan akan berhasil.

Perselisihan antara Musthafa Kemal dan Jenderal Falkenheim berkepanjangan. Suatu ketika, kabinet perang mengadakan rapat untuk

mempersiapkan serangan. Rapat tersebut dibayangi dengan suasana perdebatan yang panas. Falkenhein menyerang Musthafa dengan kata-kata pedas. Musthafa Kemal pun membalasnya. Akhirnya, Musthafa Kemal mengajukan pengunduran dirinya, namun Anwar Pasha menolak pengunduran diri tersebut, dan memerintahkannya kembali ke Kaukasus. Namun, Musthafa tidak mematuhi perintah tersebut dan menolak kembali ke Kaukasus. Anwar berpandangan bahwa cara yang terbaik untuk menyelesaikan situasi ini dan menghindari pemberontakan adalah dengan cara memberi Musthafa Kemal cuti sakit dalam waktu yang tak terbatas. Namun Falkenhein tidak sepakat dengan pemberian cuti dan menganjurkan untuk menuntut komandan pemberontak itu di hadapan ke pengadilan militer. Pada akhirnya, mereka sepakat memberi Musthafa Kemal cuti untuk waktu yang tidak terbatas. Pada waktu itu Musthafa sedang berada di Aleppo dan merencanakan pergi ke luar kota. Musthafa menyatakan bahwa ia sedang membutuhkan sejumlah uang. Ketika itu, Musthafa meminjam 10 ekor kuda pilihan, dan berniat untuk menjualnya, namun ia belum mendapatkan pembelinya. Untuk itu, Jamal Pasha menawarkan bantuannya dengan memberi Musthafa uang sejumlah 2000, dan akan memberikan lagi 3000 setelah ia kembali ke Istanbul.

Melihat aktivitas tersebut, tampak jelas bahwa Musthafa Kemal menunjukkan sikap yang sangat bertentangan dengan Daulah Utsmani dalam konfliknya melawan Inggris.

Musthafa Kemal Melanjutkan Upayanya Merebut Kekuasaan

Konspirasi ketiga secara nyata menunjukkan bahwa Musthafa Kemal tidak lagi sekadar menyerukan pendapatnya dan berupaya menentang perintah komandan. Namun, dia mulai melanjutkan upayanya merebut kekuasaan. Dia juga melakukan sejumlah aktivitas yang menunjukkan bahwa ia sedang menjalin kontak dengan Inggris untuk dapat menerapkan gagasan dan pikirannya.

Pada tanggal 3 Juli 1918, Sultan Muhammad Rashad meninggal dan tahta kesultanan diserahkan kepada Muhammad Wahiduddin atau dikenal dengan nama Muhammad ke-5. Musthafa menganggap bahwa telah tiba kesempatan baginya untuk merebut kekuasaan, karena ia

baru saja mendampingi Muhammad Wahiduddin berkunjung ke Jerman menemui Hindenburg. Sebelumnya, Anwar menugaskan Musthafa Kemal mendampingi Muhammad Wahiduddin, sang putra mahkota, supaya ia dapat menyaksikan kebesaran Jerman yang diharapkan dapat mengubah pandangan Musthafa.

Tidak lama setelah mereka kembali dari Jerman, Muhammad Rashad meninggal dunia. Muhammad Wahiduddin pun naik tahta. Musthafa Kemal merasa gembira atas kesempatan mendampingi Wahiduddin belum lama ini. Dia berharap dapat mempengaruhi Sultan baru itu dengan pikiran dan gagasannya. Dengan begitu, Sultan akan mengangkatnya menjadi menteri. Musthafa menemui Sultan yang baru secara kekeluargaan. Sultan Wahiduddin pun menyambutnya secara hangat dan santun. Sultan bahkan berkenan menyalakan sebatang rokok untuk Musthafa. Hal ini mendorong Musthafa untuk berbicara secara terus-terang mengenai pandangannya. Musthafa menjelaskan strateginya dan mengingatkan Sultan akan bahaya yang mengancam Daulah. Musthafa juga menganjurkan agar Sultan mengendalikan sepenuhnya angkatan bersenjata sekaligus mencopot Anwar dan para komandan perang berkebangsaan Jerman. Dengan begitu, Wahiduddin dapat mengendalikan seluruh kekuatan sehingga menjadi penguasa yang efektif, bukan sekadar menyandang nama sultan. Dia juga menyatakan kesiapannya mengemban tanggung jawab sebagai Panglima Tertinggi agar dapat menyelamatkan Turki dari jurang kehancuran. Musthafa juga menganjurkan agar Sultan menghapuskan persekutuannya dengan Jerman dan menandatangani kesepakatan damai unilateral sebelum terlambat. Atas pendapat dan gagasan tersebut, Wahiduddin bertanya, "Apakah ada para perwira lain yang berpandangan sama dengan Anda?"

Musthafa menjawab, "Ada banyak perwira, Yang Mulia."

Namun demikian, Wahiduddin tidak menjanjikan apapun. Karena itu, Musthafa menemui Wahiduddin untuk yang kedua kalinya. Namun, Sultan tetap tidak menjanjikan apa-apa. Kembali Musthafa menemui Sultan Muhammad Wahiduddin untuk yang ketiga kalinya dan menjelaskan pandangan-pandangannya sekali lagi. Wahiduddin menyimak penjelasan Musthafa dengan baik sampai selesai. Kemudian

Sultan membalikkan badannya dan berkata dengan tegas dan keras, "Saya telah mengatur semua urusan saya sesuai dengan pandangan Yang Terhormat Anwar Pasha dan Tal'at Pasha." Sultan segera mengusir Musthafa Kemal.

Kurang dari dua pekan kemudian, Wahiduddin memanggil Musthafa Kemal. Ketika Musthafa datang menghadap, Sultan telah dikelilingi para stafnya dan sejumlah komandan Jerman. Setelah menyambut Musthafa dengan hangat, Wahiduddin berkata kepada mereka, "Inilah Musthafa Kemal. Dia adalah salah seorang pejabat yang paling cakap dan saya percayai."

Sultan kemudian menoleh ke arah Musthafa Kemal dan berkata, "Yang saya hormati, Musthafa Kemal, saya menunjuk Anda sebagai komandan front Suriah. Ini adalah jabatan yang sangat strategis dan saya mengharapkan Anda segera berangkat ke sana. Jangan biarkan wilayah tersebut jatuh ke tangan musuh. Saya yakin, Anda dapat menjalankan tugas ini dengan baik, dan saya mendelegasikan kepada Anda agar anda dapat mengambil kebijakan yang terbaik."

Sultan Wahiduddin lalu mempersilakan Musthafa segera meninggalkan tempat, tanpa memberinya kesempatan berbicara satu patah kata pun.

Musthafa Kemal Mengosongkan Suriah dan Menyerahkannya kepada Inggris

Konspirasi Musthafa Kemal yang keempat adalah ketika Musthafa berangkat ke front Suriah untuk melawan Inggris, dia justru menyerahkan wilayah tersebut kepada Inggris dan menarik pasukannya sampai Anatolia.

Setelah menerima perintah dari Sultan Wahiduddin, dia berangkat ke markas komando front Suriah. Dia tiba di sana pada akhir Agustus 1918 dan melapor kepada Panglima Tertinggi Liman von Sanders, yang menggantikan Falkenheim sejak ia kembali ke Jerman pada musim semi 1918. Sanders menyambut Musthafa dengan hangat karena ia telah mengenal Musthafa sejak pertempuran Ana Forta. Sanders menyerahkan kepada Musthafa jabatan Panglima Pasukan Divisi ke-7 yang menguasai bagian tengah lini pertahanan. Tidak lama

setelah menerima jabatan komandan pasukan di front pertahanan, ia mengeluh sakit ginjal sehingga harus beristirahat di tempat tidur Markas Komando di Nablus sejak 1 September 1918. Pada tanggal 19 September, pasukan Inggris mulai melakukan serangan terhadap front Suriah. Karena itu, Musthafa menarik mundur pasukannya sampai ke Sungai Jordan. Ia membawa pasukannya menyeberangi sungai menuju ke gurun. Dengan tergesa-gesa dia mundur mengikuti jalur kereta api tanpa berhenti hingga ke Damaskus.

Di Damaskus, pada tanggal 27 September Panglima Tertinggi Sanders memerintahkannya membuat garis pertahanan di Riah. Musthafa berangkat ke Riah untuk melaksanakan perintah itu. Namun, tidak lama berselang dia kembali menghadap Liman von Sanders. Dia menyampaikan bahwa upaya membuat pertahanan itu tidak akan bermanfaat dan bahwa upaya mengorganisasi pasukan untuk lini pertahanan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia menyarankan agar pasukan ditarik mundur sejauh 100 mil ke arah Aleppo dan meninggalkan seluruh wilayah Suriah, dengan dalih, agar dapat memblokade jalan ke arah Turki.

Ketika mendengar saran seperti itu, Jenderal Sanders berkata kepada Musthafa, "Saya tidak dapat mengeluarkan perintah untuk melaksanakan strategi tersebut. Saya juga tidak dapat bertanggung jawab meninggalkan wilayah Daulah Utsmani seluas itu sebagai sasaran yang empuk bagi musuh tanpa memberikan perlawanan hingga tembakan terakhir."

Musthafa berkata, "Saya bertanggung jawab sepenuhnya."

Kemudian Musthafa mengeluarkan perintah untuk segera menghentikan semua konfrontasi dengan musuh dan bersiap-siap melakukan evakuasi besar-besaran menuju Aleppo, dengan dalih, untuk mempertahankan Turki. Dia pun segera menarik mundur pasukan. Dia tiba di Aleppo pada tanggal 6 Oktober 1918.

Dalam masa itu pula, beberapa pemimpin Arab yang diprovokasi oleh agen intelijen Inggris, Lawrence, meminta kepada Musthafa Kemal agar menggunakan pengaruhnya untuk membujuk Pemerintah. Pada saat yang sama, setelah Musthafa sampai ke Aleppo, gerakan kapal perang Inggris di Teluk Iskandaron semakin intensif. Pada

tanggal 14 Oktober, tiga kapal torpedo memasuki kawasan Teluk. Salah satu kapal menaikkan bendera putih dan kemudian menurunkan sebuah perahu kecil yang membawa sejumlah perwira Inggris dan Prancis ke tepi pantai untuk bertemu dengan komandan garnisun Turki. Tidak lama berselang, perahu tersebut kembali ke kapal, dan kemudian kapal torpedo itu pun meninggalkan Teluk.

Setelah Musthafa Kemal membuat garis pertahanan 10 mil di utara Aleppo, dia mengirimkan telegram kepada Sultan yang isinya merekomendasikan Izzat Pasha sebagai kepala pemerintahan. Dia juga mengusulkan pembentukan kabinet baru dengan memberikan jabatan-jabatan kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam telegram tersebut, termasuk meminta jabatan Menteri Perang untuk dirinya agar dia dapat memegang komando atas seluruh pasukan Turki.

Dia tidak menerima jawaban Sultan atas telegramnya tersebut. Namun demikian, dia menerima berita yang menyebutkan bahwa Anwar dan Tal'at telah jatuh, dan bahwa Izzat Pasha diangkat menjadi kepala pemerintahan. Dia juga mendapat berita bahwa kabinet baru yang terbentuk berisi orang-orang yang dia rekomendasikan dalam telegramnya. Izzat Pasha juga mengirimkan telegram pribadi kepadanya yang berbunyi, "Insya Allah, saya berharap bahwa kita dapat bertemu sebagai teman begitu syarat-syarat dalam perjanjian damai telah ditandatangani."

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa Musthafa Kemal berangkat ke Suriah bukan dengan niat untuk berperang, namun sesungguhnya ia mencari cara untuk melaksanakan rencananya, begitu ia sadar bahwa upayanya mempengaruhi Sultan Wahiduddin mengalami kegagalan dan dia pun dibuang ke front pertahanan. Sakit ginjal yang menjadi alasan baginya untuk beristirahat di Nablus serta penarikan mundur pasukannya ke Damaskus menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan. Namun, penarikan mundur pasukannya dari seluruh wilayah Suriah hingga menjadikan Suriah sebagai mangsa empuk bagi pasukan Inggris serta perlawanannya terhadap perintah Panglima Tertinggi sangat mungkin disebabkan karena kerjasama Musthafa Kemal dengan Inggris. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dia pernah menjalin kontak dengan agen intelijen Inggris, Lawrence, melalui

pemimpin-pemimpin Arab yang pernah memintanya agar menggunakan pengaruhnya untuk membujuk Pemerintah, yaitu agar menarik mundur dari Perang Dunia dan membuat perjanjian damai unilateral dengan Sekutu. Hal ini didukung pula dengan kenyataan bahwa dia pernah berkata akan membuat garis pertahanan di Aleppo untuk mempertahankan Turki dan dia hanya mengambil pasukan berkebangsaan Turki. Lebih lanjut, konspirasi ini juga didukung dengan fakta bahwa dia pernah mengirim telegram kepada Sultan, dan akhirnya ia menerima telegram pribadi dari Izzat Pasha yang mengatakan, "Saya berharap bahwa kita dapat bertemu sebagai teman begitu syarat-syarat dalam perjanjian damai telah ditandatangani." []

DAULAH UTSMANIYAH MENYERAH

Pada saat Anwar menguasai pemerintahan, ia pernah berusaha membangkitkan kembali sisa-sisa pasukan Utsmani yang pernah memenangkan banyak pertempuran. Ia bermaksud memerintahkan pasukan tersebut untuk segera kembali ke Ibukota Istanbul untuk menghadapi gerak maju musuh. Namun, orang-orang dekatnya, termasuk orang-orang yang dulu pernah mendukungnya, beranggapan bahwa hal itu sudah terlambat dan mereka menolak kebijakan tersebut. Ia justru dipaksa untuk menyerah dan menandatangani perjanjian damai. Sekutu menerima penyerahan tersebut. Anwar pun menandatangani perjanjian damai. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan sejumlah perundingan untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian damai itu. Dengan demikian berarti Daulah Utsmaniyah telah menyerah dan berada dalam kekuasaan Sekutu.

Namun, penguasaan Daulah Utsmani oleh negara-negara Sekutu tidak berarti bahwa Daulah menjadi salah satu koloni atau wilayah jajahan negara-negara Sekutu. Penguasaan itu juga tidak bersifat permanen, karena peperangan ini merupakan peperangan antara dua pihak yang salah satunya mengalahkan yang lain. Dengan demikian, pihak pemenang berhak menentukan syarat-syarat perdamaian atas pihak yang kalah, sementara yang kalah tetap menjadi negara yang memiliki kedaulatan internal maupun eksternal. Di sisi lain, yang menyerah bukanlah negara Turki, namun Khalifah kaum

Muslim, atau menurut istilah Sekutu adalah Kekaisaran Ottoman. Dengan demikian, yang menyerah kepada Sekutu adalah Daulah Khilafah, bukan negara Turki. Jadi, menurut aturan internasional, pemenang Perang Dunia itu adalah Sekutu, sedangkan pihak yang kalah adalah Daulah Utsmaniyah serta pihak-pihak yang bergabung di dalamnya, yakni setiap orang yang hidup di bawah naungan bendera Negara Khilafah atau yang memiliki loyalitas padanya.

Inggris Memecah-belah Negara Khilafah

Sejak semula Inggris berniat memecah-belah Daulah Utsmaniyah dalam kapasitasnya sebagai Negara Islam dan menghapus sistem pemerintahan Khilafah. Karena itu, mereka melakukan perundingan-perundingan damai tersebut dengan satu tujuan, yaitu agar mereka dapat merealisasikan niat tersebut. Itulah sebabnya, dalam bernegosiasi dengan Daulah Utsmani mereka memakai metode yang berbeda dari perundingan mereka dengan Jerman. Inggris mengabaikan kenyataan bahwa kedua negara tersebut telah bekerjasama melawan Sekutu pada Perang Dunia I. Tentu, kemenangan Sekutu atas Jerman sama saja dengan kemenangan Sekutu atas Daulah Utsmaniyah. Dengan demikian, mestinya Sekutu memperlakukan kedua negara itu secara seimbang. Inggris memperlakukan Jerman sesuai dengan hukum dan aturan internasional tentang penyelesaian peperangan antara dua negara, yakni satu pihak menjadi pemenang sedangkan yang lain menjadi pihak yang dikalahkan. Sementara itu, terhadap Daulah Utsmaniyah, Inggris memberikan perlakuan dan penyelesaian yang berbeda. Begitu perang berakhir, Inggris segera memecah-belah Daulah menjadi beberapa wilayah—yang sebagian besar di antaranya dikuasai Inggris—dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai dengan rencana yang telah disiapkan selama peperangan. Inggris juga mulai menghalangi sekutu-sekutunya dalam memperebutkan kedudukan penting di wilayah-wilayah bekas Daulah Utsmaniyah. Inggris kemudian memusatkan perhatiannya pada Khilafah dalam rangka mencari cara yang terbaik untuk menghapuskannya.

Menjadikan Nasionalisme dan Patriotisme Sebagai Landasan untuk Memecah-belah Khilafah

Berkaitan dengan upaya melakukan politik *divide et impera* (pecah-belah dan kuasai), Inggris menggunakan nasionalisme dan sentimen patriotik yang ditanamkan pada kaum Muslim pada masa-masa sebelumnya yang mulai memberikan hasil. Jadi, saat tersebut merupakan momentum yang sangat tepat bagi Inggris untuk memanfaatkan kecenderungan nasionalisme tersebut sebagai landasan untuk memecah-belah Negara Khilafah. Untuk itulah mereka menjadikan wilayah yang berbahasa Turki menjadi satu entitas tersendiri. Inggris mulai menggunakan aturan serta pengaruh mereka yang sangat besar untuk membangkitkan semangat kebangsaan Turki. Mereka berupaya membangkitkan gagasan kemerdekaan bangsa Turki, yang berarti menyatakan pemisahannya dari wilayah-wilayah Islam lainnya, atau wilayah Khilafah Utsmani. Sementara itu, bangsa Turki menganggap makna kemerdekaan tersebut adalah bebas dari kekuasaan negara-negara Sekutu. Mereka mengabaikan kenyataan sesungguhnya bahwa pernyataan merdeka tersebut berarti lepas sepenuhnya dari kekuasaan Negara Khilafah. Inggris juga memotong-motong wilayah yang dihuni bangsa Arab menjadi beberapa bagian. Meski sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh Inggris, potongan-potongan wilayah tersebut tidak disatukan menjadi satu entitas sebagaimana keadaan sebelumnya. Inggris justru membagi wilayah tersebut menjadi beberapa entitas sesuai dengan konsep yang telah disiapkan selama peperangan.

Dengan demikian, Inggris memecah-belah secara fisik Daulah Islam yang ditaklukkannya menjadi beberapa negara kecil. Itu dilakukan sebelum mereka membuat perjanjian damai dengan Negara Khilafah dan bahkan sebelum menyepakati syarat-syarat perdamaian tersebut. Tidak lama berselang setelah Inggris menguasai wilayah tersebut, mereka segera membagi Daulah menjadi sejumlah negara kecil dan mulai memerintah mereka seakan-akan 'negara-negara' tersebut adalah negara-negara yang baru saja dijajah. Ini sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan konvensi internasional. Sebab, penguasaan wilayah oleh negara

pemenang perang tidak berarti bahwa dia secara sepihak berhak menentukan nasib negara atau membagi-bagi wilayah yang dikuasainya. Yang menentukan nasib negara yang kalah perang adalah kesepakatan-kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak dalam perundingan damai, sekalipun jika kesepakatan tersebut dicapai melalui paksaan. Contoh yang paling dekat adalah fakta bahwa meskipun Berlin dikuasai selama lebih dari empat puluh tahun, nasibnya tidak ditentukan pada saat pendudukan, tetapi pada saat dilakukan perjanjian damai dan dicapainya kesepakatan-kesepakatan dengan Sekutu.

Dengan demikian, sesungguhnya Inggris melakukan tindakan yang tidak sah dengan membagi wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah yang dikuasainya segera setelah mereka menyerah. Ini berarti bahwa Inggris kembali melanggar hukum internasional. Sebab, Inggris telah melakukan tindakan sepihak sebelum membuat kesepakatan dengan Sekutu dan sebelum menandatangani perjanjian damai atau menyepakati syarat-syarat perjanjian damai, dan bahkan sebelum Sekutu mengajukan usulan syarat-syarat perdamaian.

Sesungguhnya, negeri-negeri tersebut seluruhnya merupakan bagian dari Negara Khilafah, yaitu: Libanon, Suriah, Irak, Palestina, Jordania Timur, Hijaz, dan Yaman. Semua negara tersebut berada di bawah bendera Daulah Utsmaniyah sekaligus merupakan wilayah-wilayahnya. Wilayah-wilayah tersebut bukan merupakan entitas tersendiri, yang memiliki hukum dan aturan tersendiri, serta tak satu pun di antara mereka yang memiliki kedaulatan, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, tak seorang pun dari penghuni wilayah tersebut yang memiliki mandat untuk melakukan perundingan-perundingan internasional. Perundingan internasional yang dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut atas nama wilayah itu merupakan perundingan yang tidak sah, tidak dapat diakui, serta tidak dapat dijadikan pertimbangan. Bahkan Mesir yang berada dalam kekuasaan dan mandat Inggris tetap dipandang sebagai bagian dari Negara Utsmani. Pada waktu penduduk Mesir menghendaki keluarnya Inggris dari wilayah itu, sesungguhnya mereka menyerukan untuk kembali ke negara mereka di bawah bendera Khilafah Islamiyah, yaitu Daulah Utsmaniyah, sehingga mereka kembali di bawah bendera Khalifah kaum

Muslim. Musthafa Kemal menyerukan evakuasi pasukan Inggris dan mengembalikan Mesir sebagai bagian dari Khilafah di Istambul.

Oleh karena itu, perundingan mengenai penguasaan wilayah tersebut oleh pihak Sekutu sebagai pemenang perang seharusnya dilakukan dengan Khalifah sebagai pemegang kekuasaan di Istambul, bukan dengan pihak-pihak lain. Syarif Hussain bin Ali—penguasa Hijaz—sesungguhnya tergabung dalam kekuasaan Khalifah, meski kemudian ia memberontak kepada Khalifah. Namun demikian, pemberontakan tersebut tidak berarti diperolehnya hak untuk bertindak sebagai penguasa suatu negara. Orang-orang yang dianggap Inggris dan Prancis sebagai para pemimpin Arab di Damaskus, Beirut, dan Bagdad adalah para pengkhianat, sebagaimana Hussain. Sesungguhnya mereka tidak mempunyai hak dan mandat untuk melakukan perundingan damai dengan Sekutu. Orang-orang itu tidak lebih baik daripada Hussain, baik dalam hal pengaruhnya maupun kedudukannya di mata para warga negara. Hussain bin Ali yang dianggap oleh negara sebagai seorang syarif bagi seluruh Hijaz tidak lebih adalah orang biasa yang mengkhianati umat dan negaranya serta bekerja sebagai mata-mata bagi musuh-musuh umat. Karena itu, tidak layak dia bertindak sebagai delegasi perundingan.

Namun demikian, Inggris mengabaikan kenyataan ini. Mereka melakukan perundingan-perundingan dengan para warga lokal wilayah-wilayah yang dikuasainya mengenai masa depan tanah airnya serta nasib bangsanya, meski mereka menyadari sepenuhnya bahwa perundingan-perundingan tersebut tidak memiliki bobot internasional dan tidak dapat dijadikan pertimbangan. Akan tetapi, Inggris secara efektif melakukan perundingan dengan mereka serta memberinya hak untuk berbicara dan mengambil kebijakan atas nama negara-negara mereka. Inggris melakukan upaya ini dalam rangka menancapkan cengkeramannya atas wilayah-wilayah yang dikuasainya. Hal ini sesuai dengan rencana yang telah mereka siapkan dan sesuai dengan peta baru yang telah mereka susun untuk membagi-bagi wilayah tersebut. Kemudian mereka melakukan perundingan internasional dengan Khalifah, atau orang-orang yang mewakilinya, dengan tujuan agar dapat menghapuskan Khilafah, serta sebagai peran tambahan agar

perundingan tersebut dianggap resmi dan telah dapat diselesaikan secara tuntas. Metode perundingan semacam ini menjadikan Inggris dapat mendiktekan syarat-syaratnya kepada Khalifah. Inggris tetap saja melakukan perundingan-perundingan dengan cara seperti itu, meski hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, Inggris memecah belah Daulah Islam menjadi negara-negara kecil yang berada di bawah pengaruhnya.

Demikianlah cara Inggris membagi wilayah yang dikuasainya. Sementara itu, meski hal ini tidak berhubungan dengan kaum Muslim, Inggris juga melarang negara-negara sekutunya untuk memperebutkan kedudukan di wilayah bekas Daulah Utsmaniyah. Manuver ini dilakukan Inggris untuk membantu melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk menghapuskan dan menghancurkan Khilafah. Dengan demikian, sangat penting bagi kita untuk mempelajari langkah-langkah ini agar dapat memahami manuver-manuver politik Inggris.

Negara-negara Sekutu turut serta dalam Perang Dunia dengan tujuan-tujuan yang berbeda, meski mereka berperang dalam pihak yang sama. Sesungguhnya mereka saling berselisih satu sama lain, saling bersaing, dan saling membenci. Masing-masing negara menyimpan rencana jahat untuk negara lain. Inggris pada saat itu menjadi adidaya internasional, sementara Prancis, Rusia, Jerman, dan Itali menjadi saingannya. Ketika Inggris memasuki kancah Perang Dunia melawan Jerman dan Daulah Utsmani, mereka berusaha membujuk negara-negara lain untuk ikut serta dalam peperangan atau paling tidak bertahan sampai perang berakhir. Untuk itu, Inggris membuat berbagai kesepakatan rahasia dengan negara-negara besar lainnya dan menggodanya dengan tanah jajahan yang melimpah, yang dapat mereka bagi-bagi di antara mereka setelah memenangkan peperangan. Oleh karena itu, Inggris menjanjikan kepada Italia, melalui suatu perjanjian rahasia yang ditandatangani di London pada tanggal 26 April 1915, untuk memberikan wilayah Antalya di Turki dan wilayah-wilayah sekitarnya di sepanjang Laut Tengah sebagai hadiah bagi Italia atas keikutsertaannya dalam Perang Dunia.

Setahun kemudian pada tahun 1916, Inggris, Prancis, dan Rusia menyepakati perjanjian rahasia Sykes-Picot mengenai pembagian

Kekaisaran Ottoman, yang kemudian menjadi dasar bagi perjanjian damai antara Sekutu dan Musthafa Kemal. Namun demikian, perjanjian rahasia Sykes-Picot ini tidak diungkapkan kepada Italia yang tetap tidak tahu-menahu selama beberapa waktu sampai akhirnya Italia mengetahuinya. Italia merasa marah mengetahui perjanjian tersebut dan segera menyerukan untuk membagi wilayah jajahan, termasuk membagi wilayah bekas Kekaisaran Ottoman.

Pada tanggal 27 April 1917, Inggris, Prancis, dan Rusia menandatangani perjanjian yang mereka susun bersama. Dalam perjanjian tersebut, Italia dijanjikan mendapat wilayah Izmir dan seluruh bagian barat Anatolia sampai Konya yang akan diperintah dengan mandat dari Italia. Perjanjian tersebut juga berisi pasal-pasal lain.

Tidak lama setelah perang berakhir, Inggris segera menduduki Istanbul dan seluruh negeri yang berbahasa Arab. Prancis juga segera menguasai wilayah yang disepakati dalam perjanjian sehingga mereka pun menduduki Libanon. Namun, Inggris berupaya menghentikan Prancis yang hendak menguasai Suriah, sekalipun Prancis berhasil menduduki Suriah pada tahun 1920.

Pada tahun 1919, Italia menguasai kota Antalya dan daerah-daerah di sekitarnya, dan Inggris pun membiarkannya. Namun kemudian, Inggris keberatan dengan upaya Italia untuk menguasai wilayah Izmir. Inggris dan Prancis bersama-sama menentang Italia dan menghalanginya menguasai Izmir dan bagian barat Anatolia. Mereka beralih bahwa perjanjian yang menyebutkan pemberian wilayah tersebut kepada Italia tidak berlaku dan dihapuskan, karena tidak ditandatangani oleh Rusia. Untuk menahan Italia, Inggris menguasai Izmir kepada Yunani atas nama Sekutu. Inggris melakukan sejumlah manuver selama empat tahun, sampai Inggris mencapai keadaan sesuai dengan yang diinginkannya, yaitu merampas kekuasaan, menghapuskan Khilafah, dan memberikan pukulan yang mematikan kepada Islam dalam kancah internasional. Akhirnya, Inggris mengadakan Konferensi Lausanne ke-2 dan mencapai situasi internasional yang dia inginkan.

Konsentrasi Inggris di Ibukota untuk Menghapuskan Khilafah

Inggris mengkonsentrasikan upayanya di Ibukota Negara Khilafah. Tujuannya adalah agar dapat memperoleh metode untuk menghapuskan Khilafah. Selain melakukan manuver politik menghadapi negara-negara sekutunya dan membagi-bagi wilayah jajahan, Inggris juga memusatkan seluruh perhatiannya pada Turki, khususnya pada ibukota Negara Khilafah. Oleh karena itu, segera setelah pendeklarasian perjanjian damai, kapal-kapal perang Inggris bergerak untuk mengambil-alih Selat Bosphorus, sementara pasukan mereka menduduki Istanbul dan benteng-benteng pertahanan di Laut Dardanella, begitu pula area-area militer yang penting di seluruh Turki. Adapun pasukan Prancis menduduki Antep, sementara pasukan Italia menguasai Bira dan jalur kereta api. Komandan pasukan Inggris Harrington ditunjuk sebagai Komandan Jenderal Sekutu di Turki.

Dengan demikian, pasukan Inggris secara efektif telah menguasai Turki dan menjalankan kekuasaannya atas seluruh wilayah. Pendudukan Prancis dan Italia hanya bersifat formalitas dan hanya sekadar menunjukkan keberadaannya saja. Jadi, kontak yang terjadi antara Negara Khilafah dengan Sekutu mengenai berbagai masalah dalam wilayah Turki sesungguhnya merupakan kontak dengan Inggris saja. Oleh karena itu, sesungguhnya Inggris bekerja seorang diri di Turki, sementara negara-negara sekutunya tidak memainkan peran dalam mengatur masalah-masalah internal Turki.

Inggris juga melakukan sejumlah manuver politik untuk mengendalikan Negara Khilafah, atau Kerajaan Ottoman menurut istilah mereka, sejak deklarasi perjanjian damai. Mereka memusatkan permainan politik mereka di Turki dengan tujuan untuk menggulingkan Pemerintah dan menghancurkan Khilafah.

Inggris melakukan berbagai upaya untuk menjerumuskan Khilafah dalam krisis politik semenjak deklarasi perjanjian damai. Mereka menerima kesepakatan damai dari negara dan menandatangani perjanjian tersebut bersama Tal'at dan Anwar. Namun, ketika mereka diminta merundingkan kesepakatan-kesepakatan damai tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka tidak siap berunding dengan Tal'at dan Anwar Pasha. Alasan, keduanya merupakan tokoh-tokoh yang

bertanggung jawab atas keikutsertaan Daulah Utsmaniyah dalam Perang Dunia. Jadi, mereka menuntut terbentuknya pemerintahan baru.

Telegram yang dikirimkan Musthafa Kemal dari Aleppo yang merekomendasikan Marsekal Izzat Pasha menunjukkan bahwa telah tiba waktu untuk pergantian jabatan Perdana Menteri. Kemudian, Izzat Pasha pun diangkat menjadi Perdana Menteri dan membentuk pemerintahan baru. Izzat menulis telegram khusus kepada Musthafa Kemal yang berbunyi. "Saya berharap bahwa kita dapat bertemu sebagai teman begitu syarat-syarat dalam perjanjian damai telah ditandatangani." Telegram ini dengan jelas menunjukkan bahwa pergantian jabatan ini terjadi berkat peran Musthafa Kemal bersama Sekutu, meskipun dapat diartikan bahwa hal ini semata-mata terjadi secara kebetulan belaka. Namun, kejadian-kejadian berikutnya menunjukkan bahwa kemungkinan tersebut sangat tipis.

Izzat Pasha mulai melakukan perundingan-perundingan untuk menyelesaikan syarat-syarat perjanjian damai. Pendapat yang lazim menyebutkan bahwa jika suatu perjanjian damai unilateral bisa disepakati dengan cepat maka negara dapat menghindari jalan buntu sehingga ia tidak menderita kerugian yang besar. Beberapa pihak berprasangka baik kepada Inggris dan yakin bahwa Inggris akan membantu Negara Ottoman serta merasa puas dengan keluarnya Daulah Utsmani dari Perang Dunia untuk selanjutnya berdiri sebagai pihak yang netral. Mereka berupaya menghentikan gerak maju pasukan Sekutu dan mencegahnya dari upaya menduduki Dardanella. Mereka meminta Tomsend (Jenderal Inggris yang pernah ditawan di Kut al-Amara) menjadi penengah untuk membujuk Colthorpe (Admiral armada kapal perang Inggris yang baru saja memasuki Pelabuhan Madras di pintu masuk Dardanella) agar tidak melanjutkan gerak laju armadanya sampai mereka menuntaskan perundingannya dengan Sekutu. Namun Tomsend menolak permohonan tersebut dan memaksa mereka menyerah setelah mereka kehilangan harapan melawan Inggris.

Perundingan berlangsung dengan tergesa-gesa di atas kapal perang Super yang membawa Admiral Colthorpe sehingga tidak ada peluang untuk berkonsultasi dengan Prancis. Dengan demikian, Inggris merundingkan kesepakatan damai secara sepihak atas nama Sekutu,

dan akhirnya dicapai kesepakatan damai pada tanggal 30 Oktober 1918. Selanjutnya Inggris menjelaskan kesepakatan tersebut kepada sekutunya, Prancis. Namun, hal ini dilakukan setelah Inggris secara efektif menguasai sebagian besar wilayah penting di Turki dan meninggalkan sekutu-sekutunya, Prancis dan Italia yang kemudian menduduki wilayah-wilayah tertentu untuk sekadar mengambil bagian.

Hanya beberapa bulan setelah kesepakatan damai ini dicapai, Inggris memerintahkan Khalifah menyingkirkan Izzat Pasha dari pemerintahan dan membentuk pemerintahan baru. Sebab, pemerintahan Izzat Pasha dinilai bertanggung jawab atas keputusan Tal'at dan Anwar Pasha, yang harus ditangkap dan diserahkan kepada Sekutu, mengingat bahwa salah satu pasal dalam perjanjian damai menyatakan bahwa semua orang yang bertanggung jawab atas Perang Dunia harus diserahkan kepada Sekutu. Dalam hal ini, sekali lagi Inggris mulai menciptakan serangkaian krisis politik bagi Negara Khilafah. []

UPAYA INGGRIS MENGHANCURKAN KHILAFAH MELALUI AKTIVITAS POLITIK DAN INTERVENSI TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

Telah tampak bahwa Inggris sangat berharap dapat segera menciptakan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan. Inggris berupaya menghancurkan Khilafah. Inggris juga sekaligus berupaya menegakkan sistem republik melalui metode yang legal dan dengan sesuai undang-undang (sah), tanpa harus melakukan kudeta militer atau revolusi bersenjata. Karena itulah, Inggris mulai berupaya menempuh sejumlah strategi politik.

Setelah Izzat Pasha disingkirkan, Khalifah memerintahkan Taufiq Pasha untuk membentuk pemerintahan baru. Taufiq dikenal sebagai agen Inggris. Taufiq adalah pejabat pada masa Khalifah Abdul Hamid. Ia kemudian diangkat menjadi duta besar Daulah Utsmaniyah di London. Ia mendapatkan simpati dan pujian dari Inggris. Namun, ketika ditugasi untuk menyusun pemerintahan, ia tidak mampu lagi menunjukkan kinerja yang memuaskan pada usianya yang telah mencapai delapan puluh tahun. Karena itu, Inggris tidak dapat berharap banyak terhadap kinerja Taufiq Pasha.

Namun demikian, sebelum memutuskan untuk mengganti Taufiq dan membentuk pemerintahan baru, Inggris berupaya membubarkan parlemen yang disebut dengan nama Dewan Dua Utusan. Upaya pembubaran ini disebabkan karena anggota dewan ini dipilih oleh rakyat dari seluruh wilayah Daulah Utsmaniyah atau Daulah Khilafah. Jadi, dewan tersebut bukan merupakan parlemen Turki, yang

husus beranggotakan bangsa Turki. Selain itu, sebagian besar utusan merupakan anggota Partai Turki Muda dan Partai Persatuan dan Kemajuan, yaitu partainya Anwar dan Jamal Pasha, yang memandang perlu untuk mempertahankan Khilafah dan seluruh bagian Daulah Utsmaniyah. Dengan demikian, mereka tidak mungkin menyetujui penghapusan Khilafah atau menyepakati upaya pemisahan sejumlah wilayah dari Turki.

Inggris juga berusaha menciptakan kevakuman politik. Pembubaran parlemen merupakan cara yang cukup ampuh untuk menciptakan kevakuman ini. Oleh sebab itu, Inggris berupaya untuk membubarkan parlemen. Pada awalnya mereka berusaha membubarkan dewan dengan jalur konstitusi, tanpa perlu intervensi dari Sultan. Musthafa Kemal mencoba menggunakan penyelesaian konstitusional, namun mengalami kegagalan. Kemudian Sultan secara mengejutkan membubarkan parlemen melalui sebuah dekrit. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya suatu tuntutan yang sangat meyakinkan kepada Sultan. Akibatnya, ia tidak mampu menolaknya.

Kejadian detailnya adalah sebagai berikut: Setelah membentuk pemerintahan—dengan mengangkat para menteri—Taufiq Pasha diwajibkan mendapatkan pernyataan kepercayaan dari parlemen sesuai dengan aturan konstitusi. Artinya, perlu diadakan sidang parlemen untuk melakukan pemungutan suara. Musthafa Kemal, yang baru saja datang dari Halab dan Adhanah, berusaha meyakinkan para anggota parlemen untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Musthafa memiliki kawan di parlemen dari kalangan Partai Turki Muda yang menguasai mayoritas parlemen, di antaranya adalah Fathi Bek yang sangat berpengaruh. Tepat sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Fathi Bek mengumpulkan sejumlah anggota parlemen untuk bertemu dengan Musthafa Kemal di salah satu ruangan di gedung parlemen. Musthafa menyodorkan usulannya untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Namun, para anggota dewan tersebut keberatan dengan usulan Musthafa Kemal. Mereka beralasan, mosi tidak percaya kepada pemerintah pasti akan berakibat pada pembubaran parlemen. Atas alasan ini, Musthafa tidak dapat lagi menyembunyikan tujuannya. Ia kemudian melontarkan bantahan, "Hal ini justru lebih

baik dan lebih kekal. Sebab, dengan begitu, kita tinggal menunggu waktu dan menyiapkan kepentingan kita untuk membentuk pemerintahan baru yang kita inginkan.”

Bel tanda berlangsungnya sidang berbunyi. Para anggota dewan segera menuju ke ruang sidang parlemen. Namun, ketika tiba waktunya pemungutan suara, dan petugas mengumumkan hasilnya, ternyata mayoritas suara memberikan pernyataan percaya kepada pemerintahan pimpinan Taufiq Pasha.

Mendengar hasil ini, Musthafa Kemal segera meninggalkan gedung parlemen. Setibanya di rumah, ia segera menelepon istana, dan meminta suatu pertemuan secepatnya dengan Sultan. Sultan Wahiduddin sepenuhnya menyadari pemikiran-pemikiran Musthafa Kemal dan mengetahui ambisinya untuk merebut kekuasaan. Sultan tahu persis bahwa Musthafa memiliki sekutu yang berkuasa di kalangan angkatan bersenjata, dan ia pun sangat berpengaruh di kalangan mereka. Sementara itu, kekhawatiran utama Wahiduddin adalah tahtanya dan menganggap bahwa Musthafa merupakan ancaman baginya. Jadi, ketika Musthafa meminta kesempatan segera bertemu dengannya, Wahiduddin segera menyetujuinya. Sultan menentukan waktu pertemuan pada hari Jumat yang akan datang. Sultan Wahiduddin memilih saat pertemuan pada hari Jumat karena bertepatan dengan diadakannya acara “*Salammalik*”, yaitu acara saat Khalifah bertemu dengan rakyatnya yang datang untuk memberikan salam kepadanya. Maksudnya adalah agar Musthafa Kemal menyatakan hubungannya dengan Sultan dan menegaskan kesetiaannya (loyalitas) kepada Khalifah di hadapan umum, sekaligus melaksanakan shalat Jumat bersamanya. Kemudian Sultan akan mengatur pertemuannya dengan Musthafa yang menurut perkiraannya akan berlangsung secara tertutup.

Selesai shalat Jumat, Sultan meminta Musthafa Kemal mengikutinya ke dalam kamar tamu. Dengan hati-hati, Sultan berbincang-bincang dengan Musthafa selama satu jam penuh. Beberapa bagian pembicaraan sempat terdengar. Sultan bertanya kepada Musthafa Kemal, “Saya sepenuhnya yakin bahwa para komandan dan pejabat menaruh kepercayaan yang besar kepada Anda. Jadi, dapatkah

Anda memberikan jaminan kepada saya bahwa militer tidak akan bertindak melawan saya?”

Musthafa Kemal menjawab, “Yang Mulia. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, saya melihat bahwa pada saat ini para komandan tidak menemukan alasan untuk memberontak terhadap kekuasaan Anda. Saya bahkan dapat menegaskan bahwa sama sekali tidak ada alasan bagi kekhawatiran Anda tersebut.”

Atas jawaban ini, Sultan berkata, “Saya tidak berbicara tentang saat ini. Namun, saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang.” Tidak jelas apa jawaban Musthafa Kemal atas pernyataan Sultan ini. Akan tetapi, tampaknya Musthafa memberikan jawaban yang dapat menjamin keamanan Sultan, karena kemudian Sultan berkata, “Anda adalah komandan yang bijaksana. Anda pasti dapat mempengaruhi kolega Anda, membujuk mereka untuk tenang dan mendesak mereka untuk mempertimbangkan masak-masak setiap keputusan.”

Pertemuan khusus yang tidak dihadiri oleh orang lain ini menimbulkan tanda tanya bagi orang-orang yang berada di istana. Mereka berusaha mencari tahu apa yang diperbincangkan. Ternyata pada hari itu juga Sultan mengeluarkan keputusan yang memerintahkan pembubaran parlemen, tanpa menentukan waktu untuk pemilihan umum yang baru. Keputusan ini mengejutkan semua orang, khususnya karena keputusan ini tidak didasari alasan yang jelas. Tidak ada dasar konstitusional atau alasan yang dijelaskan atas pembubaran ini. Oleh sebab itu, masyarakat berkesimpulan bahwa Musthafa Kemal lah yang mendorong Khalifah untuk membubarkan parlemen dan mempengaruhi keputusannya. Alasannya, karena permintaan audiensi dengan Sultan tersebut terjadi segera setelah Musthafa berupaya mempengaruhi para anggota parlemen untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang dapat mengakibatkan pembubaran parlemen. Pada pertemuan tersebut, Musthafa memang berusaha mendorong Sultan untuk membubarkan parlemen.

Namun demikian, fakta-fakta di sekitar pembubaran parlemen itu menunjukkan bahwa keputusan Khalifah tersebut tidak berhubungan dengan pengaruh Musthafa Kemal. Keputusan itu dikeluarkan pada

hari yang sama dengan pertemuan tersebut. Artinya, mustahil bahwa keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan Sultan dan Musthafa Kemal. Apalagi hari itu adalah hari Jumat yang menjadi hari libur umum. Selain itu, Musthafa baru sekali itu bertemu dengan Sultan setelah penandatanganan perjanjian damai. Artinya, sebesar apapun pengaruh Musthafa Kemal, permintaannya tidak mungkin dikabulkan secepat itu.

Fakta-fakta di sekitar pembubaran parlemen menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah disiapkan sebelum pertemuan Sultan dengan Musthafa Kemal. Selain itu, keputusan yang sewenang-wenang itu secara pasti menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada alasan di luar kendali Khalifah. Dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut diusulkan oleh Inggris, karena merekalah satu-satunya kekuatan yang secara langsung mengendalikan Khalifah dan seluruh negara.

Pembubaran parlemen tersebut mengakibatkan kegemparan dan kebingungan di seluruh negeri. Isu yang berkembang antara lain bahwa Partai Turki Muda mempersenjatai para pendukungnya untuk melakukan revolusi di wilayah Asia Kecil, karena pembubaran itu merupakan pukulan telak bagi mereka. Atas kegemparan ini, Taufiq Pasha mundur. Ia digantikan oleh Damad Farid Pasha. Ia dikenal dengan julukan "Pria Inggris", yang juga merupakan menantu Sultan.

Sementara itu, Musthafa Kemal menyewa rumah di Shilly, suatu daerah di pinggiran Bira. Ia tinggal di sana sebagai rakyat biasa. Dia meninggalkan aktivitas politiknya dan hidup secara *low profile*. Beberapa kali ia terlihat mengunjungi beberapa klub dan bergaul dengan orang-orang kalangan atas. Namun demikian, ia tetap terlihat sangat hati-hati. Pembicaraannya tidak pernah menyinggung suatu masalah tertentu. Tidak seorang pun mengetahui apakah ia berada di pihak Sultan atau menentang Sultan.

Namun demikian, Sultan tetap waspada terhadap niat Musthafa Kemal, karena ia mengenal betul pemikiran dan tujuan-tujuan Musthafa Kemal. Oleh sebab itu, Sultan menentang dengan keras dan berupaya menyerang Musthafa Kemal. Ia pernah berkata kepada orang-orang dekatnya bahwa Musthafa Kemal berusaha menjauhkan keluarganya

dari bangsa Turki serta menimbulkan permusuhan masyarakat terhadap dirinya dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Akan tetapi, pensiunnya Musthafa dari aktivitas politik tidak memberikan alasan bagi Sultan untuk menjustifikasi kekhawatirannya. Akibatnya, sejumlah kalangan mencela Sultan dalam permusuhan terhadap Musthafa Kemal.

Begitu Damad Farid berhasil menyusun pemerintahan dan mendapatkan persetujuan dan penerimaan dari Inggris, kekhawatiran Sultan terhadap ancaman atas kekuasaannya semakin memuncak. Sultan sampai beranggapan bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan tahtanya tanpa bantuan Inggris. Oleh karena itu, ia berusaha menunjukkan kekuatan para pendukungnya kepada Damad Farid. Sultan dan Damad Farid menggunakan segala cara untuk menyenangkan pemerintah Inggris. Mereka mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Friends of Britain* (Sahabat-sahabat Inggris). Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya kepada organisasi ini. Inggris memberikan pendanaan yang melimpah dan menggiurkan bagi organisasi ini. Namun demikian, rakyat umum serta mayoritas kalangan muda dan perwira militer merendahkan Inggris serta menyembunyikan kebencian terhadap penjajah.

Demikianlah, Sultan dan Perdana Menteri benar-benar jatuh dalam pengaruh penjajah Inggris dan sepenuhnya mengandalkan bantuan mereka. Inggris kemudian mengangkat seorang komisaris tinggi di Istanbul untuk menjalankan urusan politik di negara tersebut bersama-sama dengan Jenderal Harrington, Komandan Tertinggi pasukan Sekutu. Sejak saat itu mereka mulai mendiktekan pendapat-pendapat mereka kepada Sultan dan memanipulasinya sesuai keinginan mereka. Akibatnya, Sultan kehilangan kekuasaan politik praktisnya. Ia menjadi layaknya seorang tahanan. Kekuasaannya jatuh ke tangan Sekutu, atau tepatnya dipegang oleh Inggris, melalui Komisaris Tinggi Pemerintah Inggris dan Jenderal Harrington.

Upaya Inggris untuk Menciptakan Kevakuman Politik

Selanjutnya, Inggris berupaya menciptakan kevakuman politis agar mereka dapat mengisinya sesuai dengan keinginannya. Di permukaan mereka membiarkan urusan politik diatur oleh kaum

pribumi. Sebaliknya, mereka mendorong agen-agensya untuk melakukan berbagai aktivitas politik. Mereka menjadi aktor di balik layar. Mereka berupaya menciptakan kekacauan dan instabilitas politik. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketidakmampuan kaum pribumi dalam menjalankan pemerintahan sehingga akhirnya dapat menyebabkan kevakuman politis.

Kevakuman bermakna ketidakmampuan untuk menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas negara. Dengan kata lain, kevakuman berarti bahwa terdapat kekuasaan, namun kekuasaan tersebut tidak dapat diwujudkan dan tidak memiliki kemampuan yang cukup. Kevakuman dapat terjadi secara politis, militer, maupun strategis.

Kevakuman politis terjadi manakala negara dalam keadaan tidak stabil, tidak terkoordinasi, dan terperosok dalam kekacauan dan instabilitas politik. Dalam keadaan seperti ini, negara harus mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan fungsinya dan melanjutkan pemerintahannya. Kekuatan dan kemampuan tersebut dapat berasal dari dalam negara sendiri maupun dari luar.

Setelah menguasai Daulah Utsmaniyah, Inggris membatasi kekuasaan Daulah Utsmaniyah hanya pada wilayah Turki. Inggris lalu memberikan kekuasaan kepadanya untuk membuat kebijakan dan mengatur urusan negara. Jadi, sesungguhnya Inggris telah menciptakan suatu kekuasaan di wilayah tersebut. Namun, Inggris juga melakukan sejumlah tindakan yang dirancang untuk mencegah kekuasaan tersebut agar tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, tidak mampu memikul beban pemerintahan, serta tidak dapat melanjutkan jalannya pemerintahan. Untuk itulah Inggris bersiasat dengan membubarkan parlemen demi menciptakan kekacauan dan instabilitas politik.

Inggris kemudian mendorong rakyat untuk melakukan berbagai macam aktivitas politik yang dirancang untuk menciptakan konflik dan kekacauan. Jelas bahwa pembubaran parlemen menyebabkan kegemparan dan kegelisahan. Akibatnya, rakyat mulai merasakan ketidakmampuan penguasa dalam melaksanakan pemerintahan. Akhirnya, muncullah berbagai kelompok yang berusaha menyelamatkan keadaan.

Pada tanggal 29 November 1918, Dokter As'ad, seorang ahli bedah dari Yaman, terjun ke dunia politik dan menyerukan perlunya diadakan konferensi nasional di Ibukota. Ia mengumpulkan delapan partai besar dan sejumlah kelompok kecil untuk mendiskusikan berbagai masalah kenegaraan. Beberapa pertemuan diadakan. Konferensi pun berhasil dilaksanakan. Namun, konferensi itu tidak menghasilkan apa-apa.

Suatu kelompok yang beranggotakan 30 orang dari kalangan mantan menteri dan berbagai tokoh masyarakat membentuk suatu organisasi dengan nama *The National Unity* (Persatuan Nasional). Mereka bergabung dengan mantan juru bicara parlemen, Ahmad Ridha, pendiri Partai Turki Muda. Namun, organisasi ini pun tidak memperoleh keberhasilan. Para pendukung Turki Muda juga berupaya secara aktif, namun tidak menghasilkan apa pun.

Dengan demikian, rakyat mengetahui bahwa ada suatu pemerintahan. Namun, dalam waktu yang sama, mereka juga menyadari bahwa pemerintah tidak mampu menanggung beban pemerintahan dan politik. Untuk itulah orang-orang yang terjun di dunia politik bergabung dalam kelompok-kelompok politik untuk berusaha memperbaiki keadaan. Namun demikian, karena tidak ada koordinasi dan kesesuaian di antara mereka, segala upaya politik yang mereka lakukan mengalami kegagalan dan terhenti di tengah jalan.

Kevakuman politik di dalam negeri semakin nyata dan setiap orang dapat merasakannya. Karena tidak ada parlemen yang mewakili umat sebagai mitra Sultan dalam melakukan musyawarah dan meminta pendapat, maka tidak terjalin koordinasi yang memungkinkan Sultan dapat memelihara urusan negara dan menanggung beban pemerintahan. Selain itu, juga tidak terdapat hubungan pemerintah dengan umat yang dapat menjadikan setiap kebijakan pemerintah selaras dengan tindakan para politisi dan keinginan umat. Tidak terdapat pula lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah politik dan pemeliharaan urusan negara. Tidak ada Khalifah tempat umat berbagi pandangan, mengkoordinasikan setiap upaya, dan menciptakan berbagai kebijakan politik. Parlemen telah dibubarkan, pemerintah telah dilumpuhkan, dan Khalifah menjadi layaknya seorang tahanan. Dengan

demikian, kevakuman politis telah terwujud dan terefleksikan dalam ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan melanjutkan pemerintahan, meski rakyat dapat menyaksikan keberadaan negara dan penguasanya,

Kekacauan, kegelisahan, dan instabilitas politik juga semakin nyata. Telah banyak para politisi lokal yang gagal mengisi kevakuman ini karena kurangnya koordinasi di antara mereka, seiring dengan timbulnya berbagai pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda. Berbagai perdebatan dan pidato saja tidak akan menghasilkan suatu eksistensi politis yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Tujuan yang harus dicapai adalah mengarahkan pemerintah agar mampu menanggung beban pemerintahan, mampu menjalankan fungsinya, serta mampu melanjutkan jalannya pemerintahan; atau dengan cara merebut kendali pemerintahan dan memikul tanggung jawab sepenuhnya; atau dengan menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi dan melanjutkan jalannya pemerintahan. Merasa puas dengan sekadar berpidato dan mengeluarkan pernyataan tanpa memberikan hasil apa-apa, serta membiarkan negara dalam keadaan yang tidak stabil dan gelisah, merupakan upaya yang sia-sia dan langkah yang berputar-putar tanpa ujung seperti keledai yang berjalan mengitari penggilingan.

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan para politisi pribumi dan partai-partai politik mengalami kegagalan. Keadaan status quo ini berlanjut dalam kevakuman politis yang mengerikan selama enam bulan, yaitu antara November 1918 sampai dengan April 1919.

Sementara itu, Inggris melancarkan provokasi mengenai gagasan kemerdekaan ke seluruh negeri. Inggris menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap rakyat, bahwa negara Turki harus dimiliki oleh bangsa Turki sebagaimana negara Amerika menjadi milik bangsa Amerika, dan bahwa suatu negara modern harus didirikan pada landasan yang modern dan dengan pilar-pilar yang modern pula. Mereka menyarankan bahwa Turki yang modern harus didasarkan pada kehendak rakyat dan untuk rakyat—bahwa masyarakat Turki harus memperoleh kekuasaan mutlak dan kedaulatan mutlak sehingga tidak ada ruang bagi kekuasaan Sultan.

Pemikiran-pemikiran seperti itu disebarluaskan kepada seluruh rakyat, terutama di Istanbul dan kepada kalangan-kalangan muda dan perwira-perwira militer. Untuk dapat memahami kemampuan Inggris dalam menyebarluaskan pemikiran dan mencari dukungan, kita perlu mempelajari kembali apa yang telah Inggris capai ketika Daulah Utsmaniyah masih utuh, yaitu dengan membangkitkan kecenderungan nasionalisme dan separatisme dengan dalih kemerdekaan. Mereka berhasil mempengaruhi masyarakat Balkan sehingga timbul pemberontakan dan kekacauan, yang berakhir dengan pemisahan sejumlah wilayah dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Kita juga perlu mempelajari kembali langkah-langkah mereka dalam melakukan provokasi hingga timbul kecenderungan nasionalisme dan keinginan merdeka di kalangan Arab dan Turki sampai akhirnya mereka terpaksa mengubah warga negara menjadi dua bagian. Pada waktu itu, mereka hanya menggunakan slogan-slogan dan agen-agen mereka. Akan tetapi, kita dapat melihat betapa besar hasil yang mereka peroleh. Apalagi ketika sekarang mereka menguasai negara, mengambil-alih urusan kenegaraan sehingga Sultan dan Perdana Menteri hanya menjadi boneka di tangan mereka yang dapat mereka mainkan sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, dengan mudah mereka berhasil menanamkan gagasan-gagasan tersebut kepada sebagian besar umat.

Sementara itu, Musthafa Kemal kembali meneruskan aktivitas politiknya. Akan tetapi, kali ini ia melakukannya dengan sangat hati-hati dan tanpa menarik perhatian orang lain. Banyak kalangan menganggap ia adalah sahabat Sultan. Karena itu, ia tidak pernah menunjukkan kesan bahwa ia sedang menyusun rencana melawan Sultan atau membencinya. Ia menyembunyikan gerakannya dan dengan perlahan ia menyusun kekuatan dengan landasan menolak penjajahan dan berupaya menyelamatkan negara. Namun demikian, ia tetap mengungkapkan niatannya kepada sahabat-sahabat dekatnya. Dikabarkan bahwa pada suatu saat ia pernah mengungkapkan rencananya kepada sahabat dekatnya di Istanbul.

Pemerintah tidak memperoleh kebebasan dalam menentukan keputusan. Sultan tidak ada bedanya dengan tawanan di tangan penguasa (Inggris). Oleh sebab itu, pusat pemerintahan kaum nasionalis

harus dipindahkan ke tengah-tengah negeri, yaitu ke Anatolia. Sebab, di Anatolia rakyat dapat ditarik untuk bergabung dan berpartisipasi dalam gerakan nasionalis. Gerakan nasionalis dapat menjadi penyelamat tahta Sultan yang terancam dan pembebas dari tangan penjajah. Setiap upaya harus diselesaikan untuk menghindari bentrokan dengan bangsa Eropa, karena pergerakan yang akan kita tegakkan ini merupakan gerakan damai, dan yang pertama harus kita selesaikan adalah menyelamatkan Sultan. Saya tidak dapat memberikan kata-kata yang baik untuk menggambarkan pemerintahan Damad Farid Pasha. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa menggulingkan pemerintah tidak diragukan lagi merupakan kebutuhan gerakan nasionalis.

Musthafa Kemal menggabungkan aktivitas rahasia ini dengan upayanya menggapai jabatan komandan jenderal angkatan bersenjata. Namun, ia tidak berhasil dan kemudian kehilangan semua harapan. Ia mengaku terus-terang bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi komandan jenderal angkatan bersenjata ataupun menjabat kedudukan di pemerintahan. Namun, Musthafa Kemal tetap diam dan tidak menunjukkan kemarahan. Ia terus berpura-pura setia kepada Khalifah dan pemerintah. Ia juga tidak melakukan aktivitas lain selain mengumpulkan pendukung dan menyebarluaskan gagasan kemerdekaan, menyatakan bahwa kemerdekaan harus direbut bukan menunggu diberi, dan gagasan-gagasan lain yang mirip dengan ide-ide yang disebarluaskan negara-negara Barat, khususnya Inggris. []

INGGRIS MENGUBAH STRATEGINYA

Musthafa Kemal tidak melakukan apapun selain terus menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya serta menggalang para pendukungnya. Hal ini berlangsung sampai bulan Mei 1919, yaitu saat dipandang masanya telah tiba. Pada saat itu pula sekutu-sekutunya, dalam hal ini Inggris, mulai menggunakan sejumlah strategi lain untuk mencapai tujuan mereka, yakni memisahkan Turki dari wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah lainnya, menghancurkan Khilafah, sekaligus mendirikan Republik Turki. Hal ini terjadi setelah upaya mereka menciptakan krisis politik dan menempatkan agen-agennya dalam pemerintahan melalui jalur yang legal dan sah telah mengalami kegagalan. Aksi mereka yang baru ini bersifat politis, internasional, dan revolusioner. Yang mendorong mereka untuk segera mengubah metode tersebut adalah karena Italia berusaha menduduki Izmir, sementara Prancis juga mulai mengambil Kilikia sebagai wilayah jajahannya. Inggris menyadari bahwa selama mereka tidak dapat menguasai pemerintahan Turki untuk melawan negara-negara Sekutu lainnya, mereka tidak akan dapat melaksanakan rencananya di Turki dan menghalau saingannya, yaitu Prancis dan Italia, dari posisi-posisi strategisnya di wilayah Turki.

Setelah Italia berhasil menduduki kota Adolia dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya pada bulan April 1919 serta menduduki Fayum, yang semula merupakan wilayah Yugoslavia, Italia tertarik untuk

menduduki Izmir atas nama Sekutu. Inggris dan Prancis sama-sama menentang upaya Italia ini sekaligus mengancam akan melawan Italia jika Italia tetap berupaya menguasai Izmir atau wilayah Barat Anatolia. Mereka juga mulai menyatakan keberatannya atas pendudukan Adolia, dengan alasan, bahwa hal ini berarti memberi Italia kendali atas sisi timur Laut Tengah. Perjanjian yang disepakati oleh Inggris, Prancis, Italia, dan Rusia yang memberikan kuasa kepada Italia atas wilayah Izmir dan bagian barat garis pantai, dianggap batal. Sebab, Rusia telah menarik diri dari peperangan dan tidak pernah menandatangani kesepakatan tersebut. Kemudian Inggris menyusun rencana untuk menyerahkan Izmir kepada Yunani.

Inggris mulai menyiapkan pelaksanaan rencana itu. Di sisi lain, pada saat yang sama, Inggris mengklaim bahwa telah terjadi sejumlah krisis di Anatolia, di pedalaman Asia Kecil. Perampokan, perampasan, dan penjarahan merajalela yang mengakibatkan meningkatnya kecemasan masyarakat. Mereka juga menegaskan bahwa aparat keamanan telah melakukan upaya penertiban, namun tidak memberikan hasil yang berarti. Inggris menegaskan perlunya dilakukan evaluasi terhadap penegakan hukum di wilayah itu. Untuk menjalankan tugas tersebut diperlukan orang yang bertangan besi. Oleh karena itu, Inggris menuntut pemerintah agar mengirimkan seseorang yang kuat ke wilayah timur sekaligus menugaskannya untuk menegakkan hukum dan wibawa pemerintah.

Secara tidak resmi, Inggris merekomendasikan Musthafa Kemal untuk menjalankan tugas itu. Inggris kemudian berunding dengan Menteri Perang untuk membahas masalah ini. Jawad Pasha, Penasihat Senior Kementerian Perang, menyetujui usul ini. Jawad tidak mengetahui sedikit pun reputasi Musthafa Kemal. Awalnya Menteri Perang meragukan niat Musthafa Kemal karena ia menyadari rencana yang disembunyikannya. Namun demikian, Menteri Perang segera menyetujui usulan tersebut dan mengabarkannya kepada Musthafa. Musthafa segera menyambutnya. Ia lalu menyatakan, bahwa untuk menjalankan penyelidikan yang cepat dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani kerusakan yang merajalela di wilayah timur, ia membutuhkan kekuasaan yang besar dan agar keputusannya

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kementerian Perang menyetujui semua permintaan Musthafa Kemal.

Sampai saat itu, Musthafa masih tetap diam dan bersikap tenang. Tidak seorang pun mengetahui bahwa ia menyembunyikan rasa permusuhan terhadap Sultan dan pemerintah, karena selama ini ia mengumpulkan para pendukungnya dengan sangat rahasia. Ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan yang besar menjadikan ia pada mulanya menolak surat perintah yang diserahkan kepadanya. Ia kemudian mempelajari surat tugas tersebut. Ia lalu menuliskan surat perintah baru yang dirancang untuk dapat meraih tujuan yang diharapkannya. Setelah memperbaiki surat perintah tersebut, ia menunjukkannya kepada Perdana Menteri Damad Farid Pasha yang kemudian menandatangani tanpa memeriksanya kembali. Kemudian ia membawa surat perintah tersebut kepada Menteri Perang—yang pada awalnya meragukan Musthafa Kemal—untuk ditandatangani. Salinannya disampaikan kepada Komisaris Tinggi Inggris, Komandan Jenderal Harrington, dan seluruh perwira tentara Sekutu.

Yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa Inggris merupakan satu-satunya negara Sekutu yang secara berlebihan menunjukkan kekhawatirannya terhadap kerusakan tersebut. Karena itu, Inggris berkeinginan untuk memadamkan kerusakan ini. Adapun Prancis tidak pernah mengharapkan timbulnya gangguan yang mengkhawatirkan di Kekhilafahan Turki ini. Karena itu, Prancis tidak menaruh perhatian pada kerusakan tersebut.

Begitu Musthafa Kemal mendapatkan surat perintahnya dan berhasil memperoleh mandat kekuasaan yang diinginkannya, ia segera berlayar ke Anatolia. Ia meninggalkan Istanbul pada tanggal 15 Mei 1919 dengan kapal kecil bernama Anipoli, dengan tujuan Samsun, melalui Laut Hitam.

Siasat Inggris Menyerahkan Izmir kepada Yunani

Pada minggu kedua April 1919, Pemerintah Utsmaniyah telah menerima penjelasan bahwa sesuai dengan pasal ketujuh perjanjian perdamaian, pasukan Sekutu hendak menduduki wilayah Izmir. Sesuai

dengan pasal tersebut, mereka berhak melaksanakannya saat kepentingan mereka terancam. Oleh karena itu, Perdana Menteri Damad Farid Pasha memerintahkan kepada Gubernur Izmir untuk tetap menyimpan pasukannya di barak-barak mereka. Perdana Menteri juga memaksa gubernur untuk melarang berbagai bentuk unjuk rasa yang mungkin dilakukan oleh penduduk setempat dengan menggunakan kekerasan.

Pada tanggal 14 Mei 1919, armada Inggris terlihat di perairan sekitar Izmir, bekas wilayah Yunani yang berhasil ditaklukkan oleh Daulah Utsmaniyah. Komandan armada tersebut adalah Admiral Colthorpe. Dia lalu mengingatkan gubernur untuk bersiap-siap karena pasukan Sekutu akan mendarat. Kemudian dia memanggil gubernur untuk bertemu dengannya. Pada pertemuan itu, Colthorpe berkata, "Saya baru saja mendengar kabar bahwa pasukan Yunani lah yang akan mendarat dan menduduki Izmir."

Gubernur sangat terkejut dan memandang ke arah Colthorpe dengan pandangan tidak percaya. Ia tidak mampu membendung airmatanya hingga mengalir tak tertahankan. Ia lalu berkata dengan suara yang tersumbat. Dalam kata-katanya terkandung makna yang merendahkan dan penuh kekesalan, "Pasukan Yunani! Pasukan Yunani yang datang untuk menduduki Izmir?"

Admiral menjawab, "Begitulah perintah yang saya terima dari Paris."

Gubernur berkata, "Saya tidak bertanggung jawab dan saya tidak dapat menduga apa yang akan terjadi."

Admiral berkata kepada Gubernur, "Mustahil ada pasukan lain, selain tentara Yunani, yang akan menduduki Izmir. Anda mengerti?"

Gubernur Izmir menjawab, "Saya hanya perlu 300 orang tentara Anda untuk menenangkan kaum Muslim dan untuk membuktikan kepada mereka bahwa pendudukan dilakukan oleh tentara Sekutu, bukan pasukan Yunani, dan bahwa pendudukan ini bersifat sementara, tidak selamanya."

Namun, Admiral menjawab, "Tidak mungkin." Kemudian dia mengakhiri percakapan tersebut.

Pada pagi hari tanggal 15 Mei 1919, pada hari yang sama dengan keberangkatan Musthafa Kemal sebagai utusan Inggris dan Pemerintah Turki Utsmani untuk memadamkan kerusuhan di wilayah timur, tentara Yunani mulai mendarat di dermaga pelabuhan Izmir. Masyarakat Yunani di Izmir serentak keluar menyambut pasukan tersebut. Kegembiraan mereka sulit digambarkan. Mereka mulai bernyanyi dan memenuhi jalan-jalan di Izmir. Sementara itu, pasukan Turki berdiam diri di barak-barak mereka sesuai dengan perintah yang tegas dari Perdana Menteri. Masyarakat dan tentara Yunani memenuhi jalan-jalan untuk merayakan pendudukan ini secara provokatif dan dengan sikap menantang. Meskipun demikian, penduduk Izmir dan pasukan Utsmani kelihatan terkendali.

Akan tetapi, tidak lama setelah pasukan Yunani sampai di gedung pemerintah, satu butir peluru ditembakkan. Tidak seorang pun tahu darimana peluru tersebut ditembakkan. Yang jelas, peluru tersebut ditembakkan dengan perhitungan yang matang, dengan maksud untuk memprovokasi tentara Yunani. Begitu mendengar suara tembakan, tentara Yunani panik. Mereka mulai menghujani tentara Utsmani dan penduduk Izmir dengan hujan peluru hingga membunuh dan melukai banyak orang. Beberapa penduduk setempat mulai berupaya membela diri. Akibatnya, kerusuhan pecah dan kekacauan pun meluas. Tentara Yunani menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan dendamnya yang membara. Mereka menumpahkan kebenciannya dan memuaskan rasa dahaga mereka terhadap darah kaum Muslim. Mereka mulai memprovokasi para pejabat dengan meludahi wajahnya, memaksa orang-orang Turki untuk diinjak *tarbushnya* (peci khas Turki, *penerj.*) dengan kaki mereka. Mereka yang menolak langsung dibabat dengan pedang secara biadab. Mereka pun membuka hijab secara paksa dari kepala para Muslimah. Yang menolak membuka hijab langsung dibunuh. Mereka juga menjarah rumah-rumah kaum Muslim, menggunakan segala cara untuk menghina kaum Muslim, dan melakukan segala bentuk provokasi. Jelas bahwa peristiwa ini tidak wajar. Peristiwa ini sesungguhnya merupakan bentuk aksi yang dirancang dan dipersiapkan secara matang.

Saat kebiadaban dan provokasi yang mengerikan itu tengah berlangsung, pada tanggal 19 Mei 1919 kapal Anipoli berlabuh di pelabuhan Izmir, di antara kapal-kapal Inggris dan Yunani. Musthafa Kemal mendarat dan memasuki kota. Seperti diketahui, Musthafa Kemal berlayar meninggalkan Istanbul pada tanggal 15 Mei. Ia menumpang kapal Anipoli dengan tujuan ke Samsun melalui Laut Hitam. Namun, bukannya ke Samsun, Musthafa Kemal justru pergi ke Izmir.

Tampaknya Pemerintah mencium rencana busuk Musthafa Kemal, karena pada malam tanggal 16 Mei 1919, pada tengah malam setelah Musthafa Kemal berlayar dari Istanbul, Perdana Menteri Damad Farid mengadakan suatu pertemuan penting dengan perwakilan Komisaris Tinggi Inggris. Ia menjelaskan bahwa Sultan telah berubah pikiran mengenai pengiriman Musthafa Kemal ke wilayah timur. Sebab, ia mendengar informasi bahwa Musthafa Kemal bermaksud menciptakan pemberontakan di provinsi-provinsi pedalaman. Jadi, perjalanan Musthafa harus dihentikan dengan cara apapun. Inggris memberikan kesan bahwa mereka akan memerintahkan untuk melakukan penghadangan serta memaksanya untuk kembali ke Istanbul. Namun, ternyata mereka tidak melakukan apapun sehingga Musthafa dapat melanjutkan perjalanannya dengan kapal tersebut sampai ke Izmir pada tanggal 19 Mei. Saat itu, provokasi dan penghinaan tentara Yunani atas kaum Muslim sedang memuncak.

Segera setelah tiba, Musthafa Kemal mengumpulkan para gubernur. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa drinya bermaksud mengambil tindakan melawan Yunani, dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah. Kemudian dia mulai menghujat tentara Yunani. Dia juga mengumpulkan para pemimpin militer dan sipil. Dia memerintahkan mereka untuk mendorong massa melakukan demonstrasi kaum nasionalis. Dia juga sekaligus mengingatkan mereka untuk tidak melukai kaum Nasrani dan menekankan bahwa demonstrasi tersebut harus bersifat damai. Salah satu petikan pidatonya adalah sebagai berikut:

Sampai hari Senin, Anda sekalian akan selesai mengatur suatu demonstrasi nasionalis. Sebuah pertemuan besar yang melibatkan

sebagian besar penduduk akan diadakan. Sejumlah pidato yang berapi-api akan disampaikan. Tujuan utama pidato tersebut adalah untuk membangkitkan perasaan nasionalisme dan menyoroti kekuatan bangsa Turki. Kita ingin demonstrasi kita dapat menyingkap ketidakadilan bangsa Sekutu dan membuat mereka merasakan penindasan seperti yang kita alami. Saya sangat yakin bahwa demonstrasi nasionalis kita akan mendorong para bangsawan Inggris dan pemuka negara-negara Barat untuk menghentikan campur tangan yang memalukan pada urusan nasional kita yang paling sensitif. Demonstrasi ini harus berlangsung di seluruh wilayah. Telegram-telegram yang mengesankan harus dikirim ke negara-negara adidaya dan Sublime Porte. Saya dengan tegas mengingatkan Anda sekalian untuk tidak membiarkan seorang pun menimbulkan kesulitan dengan melukai kaum Nasrani dengan cara apapun. Demonstrasi kita harus bersifat nasionalis dan damai.

Selanjutnya, ia mulai menghujani pemerintah dengan serangkaian telegram yang keras, yang dikirimkan oleh para penduduk setempat. Di antara telegram tersebut berbunyi: *Negara dalam keadaan bahaya. Telegram lain berbunyi: Pemerintah pusat tidak mampu lagi menjalankan tugas utamanya. Ada juga yang berbunyi: Kita tidak mungkin bisa mempertahankan kemerdekaan negara kecuali dengan keinginan dan semangat rakyat.* Di antara telegram yang bunyinya paling keras adalah yang dikirimkan ke Istanbul dari pangkalan militer strategis di Sinub; massa pun menunjukkan kegemparan yang luar biasa. Petikan bunyi telegram tersebut adalah sebagai berikut: *Rakyat Turki tidak mungkin hidup di bawah suatu pemerintahan yang dikendalikan oleh Eropa sekehendak hati mereka dan diperintah sesuai dengan keinginan mereka.*

Musthafa Kemal Memulai Pemberontakan Melawan Khilafah

Akibat dari telegram-telegram tersebut, Gubernur Sinub diberhentikan dari jabatannya. Perdana Menteri—yang bertindak atas nama Sultan—saling berkirim telegram dengan Musthafa Kemal. Sultan memaksa Musthafa untuk segera kembali ke Istanbul. Namun, Musthafa

Kemal menolak dan mengirimkan telegram balasan. Dia menyatakan: *Saya akan tetap di Anatolia sampai kemerdekaan negara dicapai.* Penolakan ini merupakan langkah pertama Musthafa Kemal dalam melakukan pemberontakan. Dia pun terus berupaya mengumpulkan pendukung dengan menjelajahi seantero Anatolia sampai ia menyalakan api pemberontakan.

Demikianlah Musthafa memulai pemberontakannya. Pemberontakan ini diakhiri dengan penghapusan Khilafah dan pemisahan Turki dari wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah lainnya atau, menurut istilah Barat, kehancuran Kekaisaran Ottoman. Dari kejadian-kejadian itu saja orang dapat dengan mudah menyadari secara pasti bahwa Inggrislah yang memulai segalanya untuk menyalakan pemberontakan. Inggris lah yang mengirim Musthafa Kemal untuk melakukan pemberontakan tersebut. Sebab, sejak awal, Inggrislah yang menegaskan adanya gangguan keamanan di wilayah timur. Inggris lah yang juga mengirim Musthafa Kemal untuk memadamkan pemberontakan itu. Inggris lah yang menyerahkan Izmir kepada tentara Yunani dengan perlindungan dan penjagaan dari armada mereka serta menciptakan provokasi yang keji. Inggris lah yang memmbawa Musthafa ke Izmir sekalipun pemerintah telah meminta mereka untuk memulangkannya. Inggris pula yang merintis jalan bagi Musthafa untuk mengambil keuntungan dari provokasi tentara Yunani agar ia dapat mulai mengumpulkan para pendukungnya bagi gerakannya. Dengan demikian, berbagai peristiwa ini menuturkan sebuah hakikat yang pasti secara jelas dan terang bagi setiap orang yang mengetahuinya. []

DUKUNGAN INGGRIS TERHADAP PEMBERONTAKAN MUSTHAFa KEMAL

Seandainya Inggris membiarkan Musthafa Kemal sendirian meneruskan pemberontakan yang dirintisnya, ia tidak akan mampu melakukan satu langkah pun untuk meraih tujuannya selama ini. Hal itu karena meskipun mungkin didapati di Turki orang yang mendiamkan saja pemisahan negeri-negeri Islam yang berbicara dengan bahasa Arab dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah dan membatasi kekuasaan negara hanya pada wilayah Turki, tetapi tidak ditemukan adanya seorang Muslim pun yang setuju dengan penghapusan Khilafah atau bahkan berkeinginan untuk menghapuskannya, selain Musthafa Kemal dan teman-temannya yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Kesepakatan yang ada di tengah masyarakat adalah mempertahankan Khilafah. Kecintaan dan kesetiaan rakyat pada Khalifah telah berakar kuat di lubuk hati mereka. Setiap kali kalimat "*Badsyahin Tajuk Yasya*" diucapkan, perasaan rakyat akan tersentuh dan emosi mereka pun bangkit. Dengan demikian, tidak dapat dibayangkan ada segolongan orang dari umat yang berkeinginan untuk menghapuskan Khilafah.

Namun demikian, berbagai cara yang digunakan Inggris sekaligus dukungannya secara terus-menerus kepada Musthafa Kemal dan aktivitasnya memberikan hasil nyata bagi gerakan Musthafa Kemal. Selain mendukung pemberontakan Musthafa Kemal, Inggris juga menyiapkan manuver internasional untuk memetik hasil Pemberontakan tersebut. Inggris mulai melancarkan propaganda secara

luas dan membesar-besarkan pemberontakan tersebut sekaligus berupaya membangkitkan rasa takut di kalangan negara Sekutu melawan Turki.

Berbagai laporan kepada pemerintah Istanbul yang dikirimkan oleh para pemuja Barat dan para pejabat pun tumpah. Semuanya sarat dengan gambaran tentang dahsyatnya keributan yang melanda di seluruh Anatolia serta tumbuhnya nasionalisme yang meledak-ledak. Pada saat yang sama, surat-surat kabar dan kantor-kantor berita asing mulai sering meliput berita pemberontakan ini secara intensif. Pada saat itu, suatu konferensi perdamaian diadakan di Paris yang akan dihadiri oleh negara-negara Sekutu. Inggris merasa mendapat kesempatan untuk memasukkan berita pemberontakan Musthafa Kemal ke dalam agenda pembicaraan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa permusuhan dan menekankan perlunya penggunaan kekerasan.

Akan tetapi, Prancis menyadari bahwa pemberontakan itu merupakan hasil rekayasa Inggris. Karena itu, mereka tidak mepedulikan berbagai kabar tentang pemberontakan Musthafa itu. Prancis bahkan meninggalkan pembicaraan seputar pemberontakan tersebut. Prancis kemudian berupaya mengakomodasi pemerintahan Damad Farid Pasha. Dengan begitu, Prancis bermaksud menunjukkan kepada Damad Farid bahwa mereka tidak marah dengan adanya pemberontakan ini. Saat mereka mengetahui niat Damad Farid datang ke Paris untuk mencari simpati dan persetujuan Sekutu, Prancis segera menyiapkan bantuan sepenuhnya bagi delegasi Utsmaniyah yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Damad Farid. Damad Farid berniat menghadiri konferensi perdamaian di Paris ini untuk menyuarakan pandangan-pandangan Daulah Utsmani sebelum Sekutu mengambil keputusan mengenai nasibnya.

Namun demikian, Inggris menentang upaya ini. Inggris merasa khawatir atas antusiasme Prancis terhadap pemerintah Utsmaniyah. Pada mulanya Inggris berusaha mencegah kehadiran Damad Farid. Inggris berpura-pura menyatakan bahwa Damad Farid berkeinginan memimpin delegasi pemerintah Utsmaniyah, namun kesehatannya

tidak memungkinkan. Namun akhirnya, Damad Farid jadi menghadiri konferensi tersebut dengan menggunakan "baju perang" Inggris.

Dari Konferensi Paris dihasilkan sejumlah pernyataan keras yang disusun oleh Inggris dengan menyingkirkan pendapat negara-negara lain. Lloyd George menyampaikan pidato di Guildhall pada tanggal 8 November 1919, Ia menyatakan:

Syarat-syarat perdamaian sepenuhnya telah disetujui oleh Sekutu, khususnya syarat-syarat perdamaian dengan Kekaisaran Ottoman. Seluruh negara Eropa sepakat bahwa pemerintahan Ottoman yang berbahaya dan merusak harus dihapuskan dari wilayah-wilayah yang dihuni oleh bangsa Armenia, Yunani, dan Arab. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Laut Hitam dan Laut Tengah harus dibuka untuk seluruh negara.

Akan tetapi, Prancis menentang hasil perjanjian ini. Demikian juga Italia. Hanya saja, ternyata semangat Inggris terhadap perjanjian tersebut tidak diiringi dengan niat untuk menerapkannya. Inggris hanya bermaksud menjadikannya sebagai sebagai alat untuk mengancam Daulah Utsmaniyah, memprovokasi perlawanan rakyat Turki terhadap Sultan, serta membuat mereka bergabung dengan perlawanan Musthafa Kemal. Karena itulah, Inggris kemudian menyelenggarakan konferensi di London untuk membatalkan hasil perjanjian. Konferensi ini berlangsung pada bulan Februari 1921. []

TAHAP PERTAMA PEMBERONTAKAN MUSTHAFA KEMAL

Meski sering mengalami pasang surut, pemberontakan Musthafa Kemal terus berlanjut. Inggris terpaksa menyelamatkan Musthafa dari kemungkinan jatuh saat dia memimpin pemberontakan itu. Awalnya pemberontakan itu menampilkan keberhasilan. Sejumlah pejabat muda bergabung dengan Musthafa Kemal. Mereka menyatakan kesiapannya untuk mengikuti langkah Musthafa Kemal. Sejumlah pejabat senior juga bergabung bersama Musthafa Kemal. Hanya saja, mereka mengajukan syarat, yakni bahwa pergerakan tersebut tidak akan merongrong Khilafah. Setelah para pejabat tersebut bergabung bersama Musthafa Kemal sehingga dia memiliki kekuatan yang pantas diperhitungkan, dia segera berniat menyusun pemerintahan. Musthafa Kemal kemudian mengundang Rif'at Pasha dari Sivas. Rif'at Pasha adalah pejabat yang telah dirasuki pemikiran-pemikiran Barat dan termasuk pemuja berat negara-negara Eropa. Musthafa Kemal juga mengundang Ali Fuad, panglima angkatan bersenjata wilayah Ankara. Dia adalah seorang perwira militer yang brilian, yang memiliki pengetahuan kemiliteran yang mumpuni, dan merupakan salah seorang politisi ulung. Ali Fuad juga sahabat Rif'at Pasha yang pernah mengundurkan diri dari angkatan laut.

Suatu pertemuan rahasia dengan para pejabat tersebut diadakan, lengkap dengan seorang sekretaris yang bertugas mencatat secara detil pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Pada kesempatan

itu, Musthafa mengutarakan pandangannya dan menjelaskan pendapat-pendapatnya. Semua orang setuju bahwa pemberontakan merupakan harapan satu-satunya. Oleh sebab itu, mereka mulai merancang strategi yang akan dilakukan, yaitu dengan menggandakan dan mengorganisasi milisi untuk melindungi wilayah Izmir dari gerak maju pasukan Yunani. Setelah upaya perlawanan ini, mereka akan menyusun kembali pasukan nasional yang kuat dan padu dari sisa-sisa pasukan yang telah tercerai-berai.

Tentu diperlukan rancangan strategi mengenai kepemimpinan gerakan perlawanan. Mereka sepakat menunjuk Fuad sebagai panglima pasukan di wilayah barat, Katsim Qura Bakir sebagai panglima pasukan wilayah timur, dan Musthafa menjabat sebagai panglima pasukan di wilayah tengah.

Pada pertemuan itu Musthafa berkata, "Pemerintah pusat dan Sultan berada di bawah pengaruh musuh. Oleh karena itu, kita harus menyusun pemerintahan baru di Anatolia."

Belum selesai dia berbicara, peserta pertemuan menyela sembari menyatakan kemarahan dan kegusarannya. Mereka menentang langkah-langkah yang dapat menyebabkan kemarahan Khalifah atau pemerintah pusat. Seluruh peserta pertemuan lainnya juga menentang Musthafa Kemal. Mereka berkata kepadanya bahwa mereka mendukung Musthafa selama dia berkhidmat kepada negara dan berkorban bagi negara. Mereka memang menaruh kepercayaan kepada Musthafa. Namun, dukungan itu disertai dengan syarat, yakni Musthafa harus menahan diri dari tindakan yang dapat merongrong hak-hak Sultan dan melukai perasaannya. Mereka juga menekankan kepada Musthafa agar ia meletakkan Khilafah di atas segala-galanya dan tidak membahayakan Kesultanan.

Di hadapan permufakatan ini dan atas segala tekanan yang diarahkan kepadanya, Musthafa terpaksa menarik kembali pendapatnya dan sepakat dengan pendapat umum. Oleh karena itu, dia kemudian menyatakan bahwa gerakan tersebut tidak akan membahayakan Khilafah dan ia memberikan seluruh jaminan yang mereka kehendaki. Lalu aktivitas pemberontakan pun dimulai.

Karena mayoritas pendukung Musthafa Kemal menganggap pemberontakan mereka adalah pemberontakan terhadap penjajah Sekutu dan bukan menentang Sultan, kecuali sebatas formalitas, sementara bagi Musthafa Kemal sendiri pemberontakan itu hakikatnya adalah untuk melawan Sultan, maka dia terpaksa menyembunyikan niat sebenarnya dan memberikan jaminan bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang membahayakan Khilafah. Oleh karena itu, bentrokan dengan pasukan Sekutu pun tidak dapat dielakkan. Lalu terjadilah dua insiden, yaitu:

Sandiwara Pendudukan Samsun

Inggris menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk membentengi wilayah Samsun dengan pasukan garnisun yang kuat agar kaum pemberontak tidak dapat mencapainya dari laut dan merampas kota Sivas. Musthafa Kemal memerintahkan Rif'at untuk melindungi Samsun bagaimanapun caranya. Ia memerintahkan Rif'at untuk menghadapi Inggris dan mencegah mereka mendaratkan pasukannya. Rif'at mematuhi perintah tersebut. Bersama dengan pasukan kaum Muslim yang berjumlah 100 orang ia menghadang pasukan Inggris di pelabuhan Samsun. Sebuah pasukan kecil Inggris yang dipimpin seorang kolonel mendarat di pelabuhan. Namun, Rif'at dan pasukannya justru mundur masuk ke kota. Mereka menghadapi pasukan Inggris tersebut di dalam kota. Akan tetapi, pertempuran tidak terjadi di antara kedua pasukan tersebut. Pasukan Inggris lalu kembali lagi ke kapal dan pergi meninggalkan Samsun. Selanjutnya, diumumkan kepada semua orang bahwa pasukan Inggris merasa takut dan komandannya menyadari bahwa kecil harapan untuk tetap dapat bertahan. Lalu mereka pun mundur. Mereka lalu mengumumkan bahwa Samsun berhasil diselamatkan dari pendudukan Inggris dan Sivas tetap berada di tangan penduduk setempat.

Pemberontakan Bersenjata Musthafa Kemal

Insiden kedua terjadi dengan pasukan Yunani. Inggris menyiapkan tentara Yunani untuk melawan pasukan Turki melalui sejumlah pertempuran kecil, yang dapat membangkitkan semangat

juang penduduk setempat. Inggris tidak membiarkan darah tentara Inggris tumpah untuk maksud tersebut, karena ada darah pihak lain yang dapat ditumpahkan untuk meraih tujuan tersebut. Jadi, tentara Yunani dipergunakan sebagai tumbal dalam pertempuran-pertempuran itu. Kejadian selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tentara Yunani tidak merasa tenang tinggal di Izmir, sementara Gubernur Izmir melanggar larangan untuk tidak pergi meninggalkan kota. Oleh sebab itu, pasukan Yunani mulai bergerak merampas wilayah-wilayah di sekitarnya. Komandan pasukan Yunani memimpin pasukannya bergerak ke wilayah Aidin. Namun, belum lama pasukan Yunani bergerak ke Aidin, hujan peluru menimpa mereka secara bertubi-tubi. Akibatnya, pasukan Yunani terkejut dan panik sehingga mereka kehilangan akal sehatnya. Mereka menembaki penduduk sipil, lalu pasukan Turki pun membalasnya. Akibat perlawanannya yang membabi buta tersebut, tentara Yunani mengalami kekalahan. Pasukan Turki berhasil memaksa mereka mundur dan menembaki wilayah penduduk Yunani. Namun, setelah menambah jumlah pasukannya dan lebih mematangkan persiapan perangnya, tentara Yunani kembali lagi dan berhasil menduduki kota serta menembaki wilayah penduduk Turki. Mereka mulai melakukan pembantaian biadab terhadap penduduk Turki. Tujuannya adalah agar jumlahnya berkurang sehingga mereka akan menjadi penduduk mayoritas di Izmir. Akibatnya, setiap orang Turki yang sanggup berperang beramai-ramai mengangkat senjata. Mereka menuju daerah perbukitan dan mulai melakukan perlawanan terhadap tentara pendudukan. Perang gerilya terjadi secara sporadis. Muncullah rasa permusuhan terhadap Inggris dan Yunani.

Sementara itu, para pejabat mulai berkampanye di bawah bendera Musthafa Kemal. Musthafa mengirim mereka ke desa-desa untuk mengobarkan semangat juang rakyat. Berita ini berkembang hingga sampai ke ibukota. Inggris lalu berpura-pura mengajukan protes kepada Sultan. Sejumlah telegram yang dikirimkan Sultan kepada Musthafa Kemal dan pemanggilannya tidak menghasilkan apapun. Bahkan Musthafa Kemal menunjukkan pembangkangannya secara terang-terangan. Akibatnya, Sultan memerintahkan pemecatan Musthafa Kemal. Sultan mengeluarkan perintah kepada seluruh pejabat

sipil dan perwira militer untuk tidak mematuhi Musthafa Kemal. Kabar pemecatan Musthafa Kemal disiarkan ke seluruh negeri. Sultan mencoret namanya dari daftar perwira angkatan bersenjata serta memberikan ancaman pemecatan terhadap siapa pun yang menjalin kontak dengan Musthafa Kemal. Menanggapi hal ini, Musthafa Kemal mengeluarkan perintah kepada para perwira militer. Dia menyatakan bahwa apabila mereka dipecat, mereka tidak akan berhenti bekerja. Sebab, perwira-perwira militer yang baru diangkat Sultan tidak akan memperoleh kepercayaan dari anggota militer maupun penduduk sipil sehingga mereka akan menganggur. Musthafa Kemal terus mendorong massa untuk melakukan pemberontakan selama berminggu-minggu. Dia menggunakan seluruh upaya untuk menggagalkan setiap kebijakan pemerintah serta menentang segala langkahnya.

Konferensi Ardh Rum

Pada tanggal 23 Juli 1919, sejumlah orang berkumpul di sebuah bangunan kecil yang mirip dengan sekolah desa, di bagian wilayah pedalaman Ardh Rum. Para utusan pada pertemuan ini adalah wakil dari provinsi-provinsi timur. Mereka terdiri dari berbagai golongan. Ada mantan utusan wilayah, pegawai negeri senior, para pemimpin suku Kurdi, dan para pejabat. Konferensi itu diadakan atas nama umat. Agenda pertama konferensi adalah memilih ketuanya. Salah seorang peserta konferensi berdiri dan berkata, "Dapatkah para delegasi menyatakan pendapatnya, apakah Musthafa Kemal pantas diangkat sebagai pemimpin pertemuan ini, mengingat ia tidak pernah menjabat sebagai pemimpin di provinsi wilayah timur."

Namun, pejabat tersebut langsung diinterupsi secara kasar. Musthafa Kemal lalu dipilih oleh mayoritas mutlak sebagai pemimpin konferensi. Konferensi tersebut berlangsung selama empat belas hari. Diskusi-diskusi dalam pertemuan tersebut dilakukan dengan tidak semestinya dan penuh dengan hasutan. Konferensi itu pun berakhir dengan beberapa resolusi yang dihasilkan antara lain sebagai berikut:

Umat adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipecah-belah dan dibagi-bagi. Seluruh wilayah timur memutuskan untuk menentang

setiap bentuk penjajahan dan menolak campur tangan asing. Jika pemerintah Istambul menolak berpihak kepada rakyat dan melindungi rakyat dari serangan asing maka tidak ada pilihan lain kecuali meminta pemerintahan sementara untuk menjalankan kelangsungan urusan negara jika situasi telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Para delegasi juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka tetap setia kepada Khalifah Wahiduddin dan baiatnya masih ada di pundak mereka. Mereka juga memutuskan untuk mendirikan suatu lembaga yang dinamakan *Executive Parliamentary Committee* (Komite Pelaksana Parlemen) yang bertugas untuk melaksanakan resolusi-resolusi yang dihasilkan dari konferensi tersebut. Musthafa Kemal dipilih sebagai ketua komite tersebut. Resolusi-resolusi itu segera disampaikan kepada umat dan salinannya dikirimkan ke negara-negara Eropa. Selanjutnya mereka sepakat untuk mengadakan konferensi lanjutan di Sivas.

Begini pemerintah Istambul mengetahui Konferensi Ardh Rum dan hasil-hasilnya, mereka mengeluarkan suatu komunike yang disampaikan ke seluruh surat kabar. Lalu surat kabar-surat kabar internasional juga melansirnya. Petikan komunike tersebut adalah:

Sejumlah keributan terjadi di Anatolia. Sejumlah pertemuan diadakan yang bertujuan merusak sistem dan menentang konstitusi. Mereka menganggap bahwa pertemuan-pertemuan tersebut konstitusional dan representatif, padahal sesungguhnya mereka tidak representatif. Oleh karena itu, semua pejabat militer dan sipil harus menghentikan pergerakan ini dan menghancurkan para pemberontak tersebut dengan tegas.

Selebaran dari pemerintah tersebut sampai ke tangan penguasa Ardh Rum. Mereka lalu memberikan jawaban kepada pemerintah Istambul dengan mengatakan, "Penyelenggaraan sidang parlemen telah menjadi suatu kebutuhan mendesak. Jika parlemen didirikan maka tidak dibutuhkan lagi pertemuan-pertemuan seperti itu."

Pemerintah mempertimbangkan situasi yang kritis tersebut. Pemerintah menyadari bahwa pembubaran parlemen adalah tindakan inkonstitusional dan belum ditetapkan saat untuk melakukan pemilihan anggota parlemen yang baru. Namun demikian, pemerintah berusaha melakukan langkah-langkah untuk memadamkan pemberontakan. Untuk itu mereka menyiapkan suatu pasukan yang terdiri dari orang-orang yang terbukti setia. Kemudian, pasukan itu diberangkatkan menuju Anatolia.

Inggris Menghalangi Sultan Mengirim Pasukan Untuk Memadamkan Pemberontakan Musthafa Kemal

Saat Inggris mengetahui bahwa Sultan mempersiapkan pasukan untuk memadamkan pemberontakan Musthafa Kemal, atas nama Sekutu, Inggris segera menghalangi upaya tersebut. Mereka menyatakan bahwa salah satu syarat dalam perjanjian damai menetapkan pembubaran pasukan dan melarang pembentukan pasukan baru. Sultan berupaya menghancurkan pemberontakan tersebut. Akan tetapi, Sekutu menentang keras upaya tersebut. Yang dimaksud dengan Sekutu dalam konteks ini adalah Inggris. Sebab, merekalah yang menguasai negara. Kemudian Komisaris Tinggi Inggris bersama Jenderal Harrington—Komandan Pasukan Sekutu—adalah orang yang bertindak atas nama Sekutu.

Ketika Sultan menyadari bahwa Sekutu tetap bersikukuh mencegah dirinya mengirim pasukan guna memadamkan pemberontakan, ia berusaha mengajukan permintaan agar sekutu mengirimkan orang yang dianggap mampu untuk memadamkan pemberontakan. Sultan berkeras dengan pemintaannya tersebut. Akhirnya, Inggris menyatakan bahwa mereka bersikap netral dalam masalah tersebut, dan bahwa masalah tersebut di luar wewenang mereka mengingat pemberontakan tersebut adalah masalah domestik Turki. Mereka mengingatkan bahwa Sultan adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab menjaga sistem jika ia memang berniat mengatur negara.

Damad Farid Pasha merasa kecewa dengan sikap Inggris tersebut. Sultan pun terpaksa menggunakan caranya untuk

memadamkan pemberontakan. Untuk itu, Sultan merencanakan penangkapan Musthafa Kemal pada saat perjalanannya dari Ardh Rum menuju Sivas. Akan tetapi, rencana itu gagal karena Musthafa mendapat informasi tentang rencana tersebut. Karena ituah, dia segera mengambil langkah untuk menghindari penangkapan itu dengan mengubah jadwal perjalanannya. Tentara yang bertugas menangkap Musthafa gagal menemukan dirinya di tempat yang ditunjuk. Sebabnya, Musthafa Kemal telah lebih dulu berhasil sampai di Sivas.

Konferensi Sivas

Akibat dari kegagalan itu Sultan kemudian memerintahkan Ghalib Beik, salah seorang pendukung utamanya, untuk memimpin sejumlah suku Kurdi menyerang kota Sivas dan menangkap seluruh peserta konferensi. Namun, Ghalib Beik gagal menjalankan tugasnya. Para peserta konferensi datang ke Sivas dari berbagai tempat di wilayah Anatolia. Konferensi tersebut diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 1919 dan dipimpin oleh Musthafa Kemal. Namun, kepemimpinan Musthafa Kemal pada konferensi itu digugat sejumlah peserta. Tepat sebelum konferensi dimulai, Ra'uf Beik, salah seorang teman dekat Musthafa, mendatangi Musthafa seraya berkata, "Kami telah membahas kepemimpinan konferensi ini. Kami telah sepakat bahwa Anda sebaiknya tidak menerima kepemimpinan itu, apapun yang terjadi."

Pada saat konferensi dibuka oleh Musthafa Kemal, beberapa peserta berdiri dan menyatakan keberatannya dengan sikap kepemimpinan Musthafa yang otoriter. Sebabnya, Musthafa Kemal mengangkat dirinya sendiri sebagai pimpinan konferensi tanpa pemungutan suara. Musthafa lalu berdiri dan berusaha membela diri. Ia berkata, "Kita mengadakan konferensi sekarang ini tidak untuk saling bertikai dan berselisih. Jika kita sibuk berselisih maka bintang kekaisaran akan meredup dan pengaruhnya akan segera menghilang." Pernyataan yang menyentuh emosi ini cukup berpengaruh. Para pendukung Musthafa Kemal pun berdiri memberikan aplaus. Selanjutnya para peserta membiarkan kepemimpinannya. Ketika pemungutan suara diadakan, diumumkanlah bahwa Musthafa Kemal mendapatkan suara mayoritas.

Tidak lama setelah Musthafa Kemal terpilih menjadi pimpinan, ia berdiri untuk menyampaikan pidato. Ia menyatakan dengan jelas kesetiaannya kepada Sultan. Kemudian sidang-sidang konferensi pun dimulai dan berlangsung selama beberapa hari dalam suasana yang ramai; diwarnai dengan perdebatan yang panas dan penuh intrik. Sejumlah keberatan mengemuka. Salah satu peserta berdiri dan berkata, "Komite Pelaksana Konferensi tidak berhak menganggap dirinya sebagai pemerintah. Apa yang akan mereka lakukan jika bangsa Eropa ikut campur dalam urusan wilayah Anatolia dan menguasai sepenuhnya? Dari mana mereka mendapatkan dana untuk menggaji tentara dan para pegawai?"

Utusan lain berdiri dan berkata, "Amerika Serikat tidak memiliki ambisi kolonialis. AS adalah satu-satunya negara yang dapat menyelamatkan Turki dari deadlock (kebuntuan). Satu-satunya cara yang dapat ditempuh Turki untuk menghindari kejatuhan dan kehancurannya adalah dengan bergantung kepada AS."

Rauf Beik, Bakr Sami Beik, Kazhim Qura Bakir, Rif'at, Ali Fuad dan ketiga Pasha berdiri sembari menguatkan pendapat tersebut dan mendukungnya dengan sepenuh hati. Utusan lain berdiri dan berkata, "Pemerintahan AS tidak akan menghilangkan kemerdekaan kita. Dengan cara ini kita dapat membebaskan diri kita dari penjajahan Inggris. Karena penjajahan Inggris akan mengubah Turki menjadi koloni yang hina sekaligus menjadikan bangsa Turki sebagai budak."

Opini umum yang berkembang selama konferensi konferensi berlangsung mengarah kepada opini tersebut. Secara tidak langsung hal ini menghalangi sejumlah upaya Musthafa Kemal. Setelah melalui pembahasan yang alot, konferensi menghasilkan sejumlah resolusi yang tidak banyak berbeda dengan resolusi yang dihasilkan pada konferensi Ardh Rum. Namun, konferensi itu selesai dengan menghasilkan kegusaran (dendam) beberapa orang terhadap Musthafa Kemal. Kazhim Qura Bakir Pasha, satu-satunya komandan angkatan bersenjata Utsmani yang berusaha mempertahankan statusnya serta menolak menyerahkan peralatan perangnya dan menyerah kepada Sekutu, mendatangi Musthafa Kemal dan berkata kepadanya, "Pembicaraan atas nama Anda telah menimbulkan kritik banyak pihak. Wahai Pasha, dapatkah Anda

bayangkan akibat yang timbul dari tindakan seperti itu dan sulitnya menempuh cara seperti itu. Jadi, saya mohon, mulai saat ini biarkanlah Komite berbicara atas nama mereka sendiri."

Akibatnya, Musthafa Kemal merasa sangat jengkel ketika konferensi Sivas berakhir. Namun demikian, ia masih sempat mendorong para peserta konferensi untuk mempertahankan diri, ketika ia mendengar informasi bahwa Ghalib Beik datang memimpin pasukan Kurdi untuk menangkapi para peserta konferensi. Para pemberontak menuntut adanya kontak langsung dengan Istana. Namun, tuntutan tersebut tidak dikabulkan. Merasa terhina dengan penolakan tersebut, mereka langsung mengultimatum Perdana Menteri Damad Farid dengan menyatakan bahwa apabila mereka tidak diperbolehkan menjalin kontak langsung dengan Sultan dalam waktu satu jam, mereka mengancam akan memutuskan sama sekali hubungan dengan pemerintah pusat dan akan bebas bertindak sesuka hati. Batas waktu itu berakhir pada pagi hari tanggal 12 Agustus 1919. Mereka pun melaksanakan ancamannya dengan memutuskan semua kontak pejabat wilayah dengan Istana.

Musthafa Kamal merasa mendapatkan kesempatan. Ia segera meningkatkan upayanya. Ia berupaya memisahkan pemerintahan Istambul dari wilayah-wilayah lainnya. Sebabnya, ia merasa telah gagal dalam Konferensi Sivas dan tidak berani menyusun pemerintahan di Anatolia. Karena itu, Musthafa Kemal merasa cukup dengan meyakinkan orang-orang yang berada di sekelilingnya untuk menuntut pergantian pemerintahan di Istambul. Akan tetapi, mereka terdiam. Tidak ada laporan apakah mereka menerima atau menolak inisiatif Musthafa Kemal. Musthafa beranggapan bahwa dia tidak akan dapat mengendalikan angkatan bersenjata jika para perwiranya tidak mendukung pergerakannya. Dia juga tidak akan mampu mengalahkan pihak-pihak yang memberontak kepadanya jika dia tidak didukung oleh militer. Sementara itu, angkatan bersenjata ada di pihak Khalifah. Dia juga memahami dengan baik bahwa bagaimanapun dia tidak mungkin mengalahkan Khalifah. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk menjalin kesepahaman dengan Khalifah daripada dengan Perdana Menteri Damad Farid.

Musthafa Kemal Menjalin Kesepahaman dengan Khalifah untuk Mempersiapkan Pemberontakan Baru

Sementara itu, pemerintah Istanbul mempunyai anggapan yang berbeda terhadap penyelenggaraan Konferensi Sivas. Pemerintah menganggapnya sebagai kemenangan Musthafa Kemal. Hal ini didukung dengan kenyataan adanya pemboikotan peserta konferensi terhadap pemerintah Istanbul. Padahal pemboikotan tersebut dipicu oleh tindakan Perdana Menteri yang menghalangi kontak langsung peserta konferensi dengan Sultan dan upaya yang dilakukan Ghalib Beik untuk menangkap para peserta konferensi. Pemboikotan dan keberhasilan penyelenggaraan konferensi itu menggambarkan adanya anggapan yang berbeda antara pemerintah dan peserta konferensi.

Selanjutnya, Sekutu—dalam hal ini diwakili Inggris—mengusulkan kepada para pejabat Istanbul untuk membuat kesepakatan dengan Musthafa Kemal. Salah seorang teman terdekat Musthafa Kemal pada saat di Salonika, Abdul Karim, mendatangi Sultan dan mengajukan diri kepada Khalifah untuk menjadi mediator antara Sultan dan Musthafa Kemal. Abdul Karim menjelaskan bahwa Musthafa Kemal selalu setia kepada Negara Khilafah, Khalifah, dan Sultan Wahiduddin secara pribadi. Ia juga menyatakan kesiapannya membujuk Musthafa untuk menjalin kesepakatan dengan Sultan. Setelah mempertimbangkannya matang-matang, Sultan Wahiduddin setuju untuk mengadakan kesepakatan dengan Musthafa Kemal guna mengakhiri pemberontakan.

Abdul Karim lalu menelepon Sivas dan berbicara dengan Musthafa Kemal. Musthafa Kemal setuju untuk mengakhiri pemberontakan, dengan syarat, kabinet Damad Farid harus dibubarkan, dan harus diadakan Pemilu untuk menggantikan parlemen yang dibubarkan oleh Sultan. Atas tuntutan tersebut, Sultan Wahiduddin menyatakan persetujuannya.

Tiga hari setelah kontak telepon tersebut, pada tanggal 2 November 1919, Damad Farid Pasha mengundurkan diri dari kabinet. Secara terbuka ia menyatakan kepada masyarakat tentang kekecewaannya kepada Inggris. Sebabnya, pada masa-masa sebelumnya Inggris mendukungnya, namun kemudian cuci tangan atas

persoalan yang dihadapinya sekarang. Kemudian, Ali Ridha Pasha, Menteri Perang, ditugasi untuk menyusun pemerintahan. Hal ini dipandang sebagai kemenangan Musthafa Kemal.

Untuk itu, Musthafa Kemal kemudian menyatakan kepada rakyat melalui selebaran bahwa Komite Pelaksana Kaum Nasionalis mengakui pemerintahan baru yang dipimpin Ali Ridha Pasha dan menyatakan dukungan tanpa syarat. Dia juga memuji Yang Mulia Sultan karena telah bertindak arif dalam menjalankan kebijakannya dan membubarkan pemerintahan pimpinan Perdana menteri Damad Farid Pasha.

Namun demikian, Sultan merasa gusar atas selebaran ini. Sultan menyatakan tidak dapat menerima pernyataan Musthafa Kemal yang berbicara atas nama rakyat. Pemberontakan hampir berlangsung lagi. Akan tetapi, Musthafa mencegah niat para pendukungnya yang hendak melanjutkan pemberontakan. Komite Sivas memutuskan untuk menghindari bentrokan dengan pemerintah. Sebagian besar pejabat pun menarik nafas lega, karena mayoritas di antara mereka menentang niat sebagian peserta konferensi untuk melanjutkan pemberontakan, dan mereka semua setia kepada Khalifah.

Hanya saja, Musthafa Kemal berupaya mengulur-ulur waktu pembubaran Komite. Sebabnya, tujuan utamanya untuk mendirikan negara republik dan menghapuskan Khilafah mengalami kegagalan pada tahap ini. Oleh sebab itu, ia mempertahankan Komite tersebut sebagai senjata untuk melakukan upaya pemberontakan selanjutnya. Dia mulai merekayasa segala bentuk alasan untuk menanggukkan pembubaran Komite. Dia tidak mencari-cari alasan untuk tidak membubarkan Komite, namun menggunakan berbagai siasat untuk menunda-nunda pembubarannya. Penundaan pembubaran komite ini menyebabkan kemarahan pendukungnya. Bahkan banyak di antara mereka menyatakan secara terbuka mengenai tidak perlunya meneruskan kembali Komite tersebut karena umat sudah menyatakan persetujuannya terhadap pemerintah yang baru. Beberapa pendukung dan sahabat Musthafa Kemal, antara lain Izzat Pasha, bahkan menyuarakan protes dan teguran. Dengan tegas dirinya menghendaki diakhirinya permusuhan internal dan perpecahan yang memalukan

ini. Mereka beranggapan bahwa kelangsungan Komite berarti terus berlanjutnya perpecahan. Namun, Musthafa berdalih bahwa pemerintahan yang baru harus membuktikan dulu bahwa mereka memang layak mendapatkan kepercayaan umat, dan bahwa kepercayaan ini tidak dapat diberikan sampai cukup waktu untuk menilai keberhasilan program-program yang direncanakan serta membuktikan ketulusan mereka. Musthafa berkata, "Masalah utama pada saat ini adalah persiapan untuk pemilihan anggota parlemen yang baru, sampai mayoritas anggota parlemen adalah wakil-wakil kaum nasionalis."

Inilah tahap pertama dari pemberontakan Musthafa Kemal dan kejadian-kejadian di seputar pemberontakan tersebut. Seluruh kejadian itu menunjukkan bahwa Inggris lah yang mendorong dan melindungi pemberontakan. Sandiwara pendudukan Samsun oleh tentara Inggris yang diteruskan dengan penarikan mundur pasukan dengan jelas menunjukkan upaya Inggris untuk mengumpulkan pendukung bagi Musthafa Kemal. Jika tidak, bagaimana mungkin Inggris tidak mampu menguasai Samsun, sementara mereka bercokol dengan kuat di jantung pemerintahan Daulah Utsmaniyah dan menduduki sebagian besar wilayahnya yang terkenal sebagai wilayah yang tak terkalahkan? Di samping itu, siapa yang memberitahu Musthafa Kemal perihal rencana Inggris untuk menduduki Samsun sehingga ia dapat menugaskan Rif'at Pasha untuk "menahan" pendudukan tersebut? Apakah pasukan Rif'at yang berkekuatan hanya seratus orang cukup untuk menahan serangan Inggris, sementara Inggris telah bertekad untuk menguasai Samsun dengan cara apa pun? Lebih lanjut, apakah Samsun benar-benar terselamatkan dari pendudukan Inggris, mengingat kecilnya pasukan yang dikirimkan Musthafa Kemal? Apakah kejadian ini bukan semata-mata sandiwara untuk menunjukkan bahwa Musthafa adalah seorang pejuang yang bertekad mengusir Inggris dan Sekutu dari negaranya? Selanjutnya, mengapa terjadi bentrokan dengan tentara Yunani? Perintah yang diberikan pemerintah Yunani kepada komandan pasukannya adalah sebatas menguasai Izmir. Jadi, mengapa pasukan tersebut melangkahi wewenang dan berupaya menduduki wilayah-wilayah sekitarnya? Apakah ini merupakan inisiatif sendiri atau atas

perintah Komandan Tertinggi Sekutu? Apakah kejadian ini bukan sekadar dimaksudkan untuk memprovokasi penduduk setempat agar mengorganisasi milisi dan memberikan perlawanan bersenjata terhadap tentara pendudukan serta menjadikan mereka sebagai bagian dari pergerakan Musthafa Kemal? Apakah kejadian ini bukan sekadar ditujukan untuk mendorong dan mengobarkan pemberontakan bersenjata? Jika Inggris mendiamkan terjadinya pemberontakan, hal itu disebabkan karena masalah domestik itu bukan menjadi urusan mereka. Namun, bukankah keputusan mereka melarang Sultan memadamkan pemberontakan jelas merupakan bentuk perlindungan dan dukungannya terhadap pemberontakan itu? Pada musim panas tahun 1919, Sultan mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan pemberontakan, dan mulai menyusun suatu satuan tugas. Namun Inggris, atas nama Sekutu, melarangnya dengan dalih bahwa upaya penyiapan pasukan merupakan pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian damai dan memutuskan untuk membubarkan pasukan tersebut. Mengapa penyiapan pasukan untuk memadamkan pemberontakan tidak diperbolehkan, sementara tidak ada pasal dalam perjanjian damai yang menetapkan pelucutan senjata, pembubaran pasukan, serta kewajiban menyerahkan amunisi kepada Sekutu? Dalam perjanjian damai hanya ditetapkan bahwa angkatan bersenjata Turki harus segera dibubarkan kecuali pasukan-pasukan yang dibutuhkan untuk mengamankan perbatasan dan menegakkan keamanan. Jadi, dari mana mereka dapat mengatakan bahwa penyiapan pasukan untuk menghancurkan pemberontakan bertentangan dengan syarat-syarat dalam perjanjian damai?

Selain itu, pada awal Mei 1919 Inggris menyatakan bahwa telah terjadi kerusuhan di wilayah Timur, lalu menuntut Sultan untuk mengirimkan seorang panglima untuk memadamkan kerusuhan tersebut, dan mereka mengusulkan Musthafa Kemal. Lalu, mengapa dulu mereka menyarankan pengiriman satuan tugas untuk memadamkan kerusuhan—yang sesungguhnya tidak ada—sementara sekarang mereka melarang Khalifah mengirimkan pasukan untuk memadamkan pemberontakan yang mendapatkan liputan media massa internasional? Namun, ketika Khalifah memberikan pilihan kepada

mereka untuk mengambil tindakan terhadap pemberontakan tersebut, mereka berkata, "Kami mengambil posisi netral." Lalu, dimana letak netralitas tersebut ketika mereka melarang Sultan menyiapkan pasukan untuk menghancurkan pemberontakan, yang di permukaan menunjukkan perlawanannya kepada Sekutu dan membuat bentrokan dengan salah satu negara Sekutu, yaitu Yunani? Apakah sikap itu dapat disebut dengan sikap yang netral atau merupakan sikap yang jelas-jelas berpihak dan melindungi pemberontakan tersebut?

Tak dapat diragukan lagi bahwa tindakan melarang Sultan menyiapkan pasukan untuk menghancurkan pemberontakan—sementara syarat-syarat perjanjian damai menjamin upaya-upaya untuk menjaga keamanan—dimaksudkan untuk melindungi pemberontakan dan melumpuhkan Khalifah. Namun demikian, pemberontakan itu tidak mencapai hasil yang diinginkan, yaitu membuat pemerintahan tandingan melawan Sultan. Situasi ini memaksa para pemberontak membuat kesepakatan dengan Sultan dan kembali ke dalam kekuasaan Khalifah. Namun, para pemberontak berhasil mendorong rakyat untuk melawan Sekutu dan memberikan kesan bahwa mereka berhasil menghalangi pendudukan Inggris atas Samsun. Begitu juga bentrokan mereka dengan pasukan Yunani membantu membangkitkan gagasan melawan penjajahan dan memberikan kepada Musthafa Kemal tampuk kepemimpinan.

Musthafa Kemal Berhasil Mengumpulkan Pendukung Untuk Membebaskan Negara

Musthafa muncul sebagai pemenang karena dia berhasil mengumpulkan pendukung dengan landasan ide yang diyakini setiap orang, yaitu menyingkirkan Sekutu dari negeri mereka dan membebaskan mereka dari mimpi buruk penjajahan. Dia juga berhasil membangkitkan dari dalam diri para pendukungnya harapan untuk melawan penjajah. Dia juga berhasil melaksanakan aksi-aksi perlawanan terhadap tentara pendudukan. Oleh sebab itu, Musthafa Kemal menjadi tumpuan harapan rakyat dan kebanggaan para perwira militer, sekalipun mereka semua menaruh kecurigaan terhadap niatnya kepada Khalifah. Mereka menganggap niat tersebut melanggar kesakralan,

karena di mata mereka, kedudukan Khalifah adalah kedudukan yang sakral. Oleh sebab itu, rakyat berharap Musthafa Kembali bersepakat dengan Sultan, agar kesakralan Khalifah tetap terjaga utuh, dan dengan demikian mereka dapat mengusir para penjajah. Harapan rakyat ini muncul khususnya setelah mereka merasa berhasil menghalangi Sekutu menduduki Samsun dan setelah terjadi bentrokan dengan pasukan Yunani. Akibatnya, mereka sangat berharap kepada Musthafa Kemal yang dianggap sebagai pahlawannya. Mereka tidak melihat kemungkinan itu dalam pribadi Khalifah.

Oleh sebab itu, semua mata memandang kepada Musthafa Kemal. Mayoritas umat tidak memahami kompleksitas aktivitas politik dan jangkauannya. Sulit bagi orang (rakyat) biasa untuk memahami masalah tersebut. Para perwira militer pun mengalami kesulitan untuk memahami kerumitan politik jika mereka tidak terjun langsung ke arena politik. Akibatnya, mereka gagal memahami permainan politik Inggris. Mereka juga tidak memahami hubungan-hubungan internasional sehingga mereka tidak mampu mengerti mengapa Inggris terus-menerus berupaya menyingkirkan sekutu-sekutunya dari wilayah jajahan, sekalipun hal itu berarti membiarkan wilayah tersebut tetap berada di tangan negara yang kalah. Upaya Inggris ini dimaksudkan agar perimbangan kekuatan di dunia tetap menguntungkan Inggris sehingga ia tetap menjadi kekuatan utama di dunia. Mereka juga tidak menyadari bahwa pendudukan Italia atau Prancis di berbagai tempat di sepanjang garis pantai Turki dapat mengikis pengaruh Inggris di wilayah Timur dan pasukan mereka di Laut Tengah. Jadi, Inggris tidak akan membiarkan negara lain mengambil apa pun. Umat juga tidak mampu memahami bahwa Inggris tidak berusaha menyingkirkan Italia dan Prancis dengan pasukannya sendiri atau dengan aksi-aksi yang terbuka, namun dengan cara menghasut pihak lain, melakukan manuver-manuver, serta melakukan kebohongan dan penipuan.

Lebih lanjut, tak ada seorang Muslim pun yang sungguh-sungguh menyadari adanya kekhawatiran di hati negara-negara lain, khususnya Inggris, terhadap tegaknya Negara Khilafah, yang dianggap sebagai ancaman abadi bagi mereka. Oleh sebab itu, kaum Muslim tidak sadar mengenai adanya konspirasi besar yang dirancang Inggris

melalui pemberontakan Musthafa Kemal, untuk menghapuskan Khilafah lewat tangan-tangan kaum Muslim sendiri. Demikianlah, karena Musthafa Kemal berhasil mengambil-alih kepemimpinan Turki untuk melawan penjajah, maka dia dianggap menang pada tahap pertama ini. []

MUSTHAF A KEMAL MENJADIKAN ANKARA SEBAGAI MARKASNYA

Setelah mencapai kemenangan, Musthafa Kemal sekali lagi mencoba merebut kekuasaan melalui jalur yang konstitusional, yaitu melalui parlemen. Pemilihan anggota parlemen sedang dipersiapkan, namun masih menggunakan paradigma yang lama, yaitu parlemen Utsmaniyah yang berada di bawah kekuasaan Khalifah. Namun, Perdana Menteri Ali Ridha adalah orang yang lemah. Begitu ia merasa bahwa rakyat cenderung lebih percaya kepada Musthafa Kemal, ia menganggap perlu membuat kesepakatan dengannya. Untuk itu, ia mengutus Salih Pasha, Menteri Angkatan Laut, untuk menemui Musthafa di Anatolia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober 1919, Salih Pasha mengadakan pertemuan dengan Komite Parlemen, yang kemudian dikenal dengan nama "Konferensi Amasia". Konferensi ini berlangsung selama beberapa hari. Salih Pasha berhasil melakukan rekonsiliasi antara para anggota komite dan Pemerintah. Langkah pertama yang diusulkan dalam konferensi itu dan langsung disetujui oleh kedua belah pihak adalah "tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Kesultanan dan Khilafah". Selanjutnya, Pemerintah Istanbul mengakui seluruh resolusi yang dihasilkan dalam Konferensi Ardh Rum dan Konferensi Sivas. Perdebatan yang panas terjadi manakala kedua pihak membahas masalah pembubaran Komite Parlemen. Namun, setelah perdebatan yang panjang, diputuskan untuk menunda masalah

tersebut sampai para anggota parlemen yang baru mengadakan pertemuan untuk menentukannya.

Selanjutnya, Musthafa Kemal pindah ke Ankara untuk bertempat tinggal di sana dan menjadikan kota itu sebagai pusat pergerakannya. Berbagai persiapan dilakukan penduduk Ankara untuk menyambut kedatangannya. Pada pagi hari saat dia dijadwalkan tiba di Ankara, para penduduk setempat bangun lebih awal dan menunggu kedatangannya dengan penuh harap. Para petani meninggalkan sawahnya untuk ikut ambil bagian dalam acara penyambutan. Para *darwis* menyelenggarakan suatu upacara penyambutan yang besar, dengan membawa spanduk-spanduk hijau berukuran besar yang bertuliskan ayat-ayat suci al-Quran. Ketika dia tiba di kota itu, orang-orang bersorak-sorai, para wanita berteriak histeris, takbir dan tahlil pun dikumandangkan. Musthafa Kemal memasuki kota bagaikan seorang pahlawan, dan selanjutnya bertempat tinggal di sana.

Pemilihan umum berlangsung. Musthafa Kemal terpilih sebagai anggota parlemen dari wilayah Ankara. Kemudian, utusan-utusan dari berbagai wilayah datang ke Ankara. Mereka mengadakan perundingan awal mengenai berbagai masalah mereka. Selama perundingan berlangsung, sejumlah usulan diajukan untuk melaksanakan sidang Parlemen di ibukota dan membubarkan Komite, mengingat bahwa para anggota Komite telah menjadi utusan-utusan resmi di Parlemen. Namun, Musthafa Kemal menolak mentah-mentah kedua usulan tersebut, dan dengan berapi-api ia berkata, "Komite Perlemitter harus terus dipertahankan hingga kesetiaan Parlemen kepada nilai-nilai keadilan bisa terbukti dan kebijakannya terlihat jelas. Adapun perpindahan ke Ibukota merupakan suatu kebodohan belaka. Apabila Anda berbuat demikian, Anda sama saja dengan hidup di bawah belas kasihan penjajah Barat, karena Inggris masih menguasai negara, dan para penguasa akan selalu mencampuri urusan Anda. Bahkan mungkin saja Anda akan ditangkap. Oleh sebab itu, sidang-sidang Parlemen harus diselenggarakan di Ankara ini agar Parlemen tetap bebas dan independen."

Meskipun demikian, seluruh utusan sepakat bahwa peresmian Parlemen harus diadakan di Istanbul, di Gedung Parlemen, sehingga

mereka resmi di bawah kekuasaan pemimpin negara, Sultan Wahiduddin, Khalifah atas seluruh kaum Muslim. Atas kesepakatan ini, Musthafa Kemal terpaksa diam dan menyetujuinya. Namun, dia sendiri tidak berangkat ke Istanbul dan tetap tinggal di Ankara. Sebelum itu, Musthafa mengadakan perundingan awal dengan para utusan dari wilayah Ankara dan memberikan sejumlah instruksi penting, di antaranya meminta mereka untuk memilihnya menjadi ketua Parlemen.

Pada tanggal 11 November 1919, Parlemen diresmikan dengan pidato dari Sultan, dan kemudian dilakukan pemilihan ketua Parlemen. Para utusan menolak memilih Musthafa dan justru memilih Rauf Beik sebagai ketua Parlemen. Kemudian pada tanggal 28 Januari 1920, Parlemen mengesahkan piagam nasional, yang dikenal dengan nama "Piagam Milli" yang mengukuhkan resolusi-resolusi yang dihasilkan dari Konferensi Ardh Rum dan Sivas. Piagam tersebut menyerukan kemerdekaan dan kebebasan sepenuhnya provinsi-provinsi yang mayoritas dihuni oleh bangsa Turki, termasuk Istanbul dan wilayah-wilayah sekitarnya, yang terbentang di sepanjang Laut Marmara. Piagam itu juga menetapkan bahwa nasib wilayah-wilayah Negara Khilafah lainnya akan diputuskan melalui referendum.

Sementara itu, negara-negara Eropa memberitahukan kepada Pemerintah Utsmani melalui suatu memorandum resmi, bahwa Istanbul dan kawasan selat harus tetap di bawah kekuasaan Sultan. Para pengikut Musthafa Kemal menganggap hal ini sebagai kemenangan perjuangan mereka. Karena itu, mereka merasa optimis bahwa mereka akan dapat membuat kesepakatan yang lebih adil dengan bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu, Musthafa mulai berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan Ali Ridha Pasha, dan menggantikannya dengan pemerintahan nasionalis. Ia terus-menerus menekan para utusan untuk melakukan inisiatif ini dan menggunakan segala upayanya. Namun, para utusan menolak mendengarkan usulan Musthafa Kemal. Oleh sebab itu, ia menjadi sangat marah dan menyadari bahwa rencananya untuk merebut kekuasaan melalui jalur yang konstitusional dan menggantikan sistem Khilafah dengan sistem republik telah mengalami kegagalan. Untuk itu, ia kembali menyiapkan pemberontakan untuk merebut kekuasaan melalui jalan kekerasan. []

MUSTHAFA KEMAL KEMBALI MEMBERONTAK

Musthafa Kemal adalah pihak yang menyerukan pemilihan umum bagi para anggota Parlemen. Kemudian, secara resmi dia mengakui keabsahan Parlemen hasil pemilihan umum itu. Musthafa juga menyetujui para utusan yang terpilih serta berjanji untuk patuh pada berbagai keputusan Parlemen. Dia juga telah berhasil membubarkan pemerintahan sebelumnya serta dapat menerima pemerintahan yang sekarang berkuasa. Dia pula yang menuntut agar Daulah diatur sesuai dengan hukum-hukum yang konstitusional. Namun sebaliknya, dia justru kembali menyatakan pemberontakan setelah merasa kehilangan harapan untuk dapat merebut kekuasaan melalui Parlemen. Untuk itu, dia mulai mempersenjatai pasukannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran. Persenjataan dan dana mulai mengalir kepadanya dari Istanbul dengan sepengetahuan Komisaris Tinggi Inggris dan Prancis. Kedua perwakilan negara Eropa itu secara resmi menunjukkan keberatan atas tindakan tersebut, namun mereka tidak mengambil langkah-langkah apa pun dan menolak menyatakan segala sesuatu berkenaan dengan pemberontakan itu. Mereka membiarkan terjadinya berbagai peristiwa yang sangat serius, seperti ketika Musthafa Kemal mengumpulkan bertruk-truk senjata dan amunisi di Semenanjung Gallipoli, tepat di depan mata Komisaris Tinggi Inggris dan pengawasan mereka.

Perang gerilya terjadi melawan Sekutu. Wilayah Biria terkepung serta dipaksa untuk menyerah. Namun, para pemberontak membiarkan pasukan Italia mundur dari wilayah tersebut. Selanjutnya, bagian timur Kilikia juga diserang hingga mengakibatkan pasukan Prancis terpaksa mundur. London dan Paris menyerukan penghentian sepenuhnya operasi militer. Namun, seruan ini tidak dihiraukan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 7 Maret 1920, Sekutu memaksa Ali Ridha mundur dari jabatannya. Ali Ridha mengajukan pengunduran dirinya. Ia kemudian digantikan oleh Salih Pasha, Menteri Angkatan Laut, yang sebelumnya pernah membuat perjanjian dengan Musthafa Kemal dalam Konferensi Amasia. Ia menjalankan pemerintahan sambil berupaya menenangkan situasi.

Pada tanggal 10 Maret 1920, Lord Curzon menyampaikan sebuah pidato di Istana Kerajaan dimana ia berkata, "Negara-negara Sekutu tidak dapat membiarkan lagi sikap meremehkan bangsa-bangsa Eropa seperti yang terjadi di Istanbul, sementara kaum Nasrani dianiaya dan dibantai di berbagai wilayah.

Inggris Menduduki Istanbul

Tidak lama setelah pidato ini, pelabuhan di Semenanjung Tanduk Emas dipenuhi oleh kapal-kapal perang Inggris. Pegawai-pegawai Inggris dievakuasi dari Anatolia. Komando diberikan kepada tentara Inggris yang masih tertinggal untuk segera mundur secepatnya. Tentara Inggris yang tinggal di Ankara meninggalkan kota dengan terburu-buru.

Ketua Parlemen di Istanbul, Rauf Beik, menyatakan bahwa Inggris berniat untuk menangkapi para anggota Parlemen nasionalis dan mengembalikan pemerintahan Damad Farid Pasha. Oleh karena itu, Musthafa Kemal mengirimkan telegram kepada para pengikutnya untuk segera melarikan diri dan tidak menyerahkan diri kepada Inggris, tetapi para utusan tersebut menolak melarikan diri.

Pada dini hari tanggal 16 Maret 1920, langkah-langkah militer Inggris untuk menduduki Istanbul dan memperkuat cengkeraman terhadap penduduk setempat mulai dilakukan. Tugas ini dipercayakan

kepada Jenderal Inggris Henry Wilson, yang sebelumnya pernah ditugasi sebagai pimpinan panglima pasukan Sekutu.

Paris dan Roma sepakat bahwa ketiga pemerintahan—Inggris, Prancis, dan Italia—harus ikut ambil bagian dalam pemberian sanksi terhadap Daulah Utsmaniyah. Namun demikian, hanya Inggris yang mengirimkan marinirnya. Pada saat Prancis dan Italia sadar bahwa Inggris berhasil menduduki Istanbul, mereka turun tangan menghalangi gerak maju pasukan Inggris. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan internasional. Selanjutnya, mereka menuntut agar dapat ikut ambil bagian dalam pemerintahan. Namun, Inggris menolak tuntutan tersebut. Inggris bertindak sendirian dalam pemerintahan negara.

Tanpa menunda-nunda lagi, pasukan Inggris menjelajahi jalan-jalan di Istanbul, memamerkan kekuatannya, menduduki kantor pos, telegraf dan instalasi-instalasi pemerintahan lainnya, setelah mereka meneror para penduduk dan tentara Turki. Mereka menangkap sejumlah anggota Parlemen pengikut Musthafa Kemal, termasuk di antaranya Rauf Beik dan Fathi Beik. Mereka juga menangkap mantan Perdana Menteri Said Halim, dan kemudian memenjarakannya. Keesokan paginya, mereka dimasukkan ke dalam kapal yang selanjutnya membawa mereka ke Malta. Akibatnya, sejumlah anggota Parlemen dan perwira militer melarikan diri dari Istanbul ke Ankara. Dengan demikian, Sekutu mengambil-alih Istanbul, merebut kendali pemerintahan sepenuhnya, sekaligus memerintah Negara sebagaimana yang mereka kehendaki. Hukum darurat perang diberlakukan di Istanbul. Sensor yang ketat juga dikenakan terhadap media massa, komunikasi pos dan telegraf serta dan terhadap Pemerintah.

Kemarahan Rakyat atas Dukungan Sultan kepada Sekutu

Sultan mendukung langkah-langkah yang diambil pasukan Inggris dengan mengeluarkan komunike yang berisi desakan kepada rakyat agar tetap tenang dan menyatakan bahwa pendudukan tersebut merupakan bagian dari tugas pasukan Sekutu. Pemerintah memulai komunike tersebut dengan menyatakan, "Kewajiban terpenting setiap penduduk Turki adalah menaati perintah-perintah Sultan." Akibatnya,

massa dan tentara Turki yang berada dalam suasana ketakutan mulai memendam kemarahan terhadap Sultan dan meningkatkan hujatan kepadanya. Selanjutnya, Parlemen pun dibubarkan secara resmi.

Pada tanggal 5 April 1920, Salih Pasha mengundurkan diri dan Damad Farid Pasha menyusun pemerintahan baru atas permintaan Inggris. Damad Farid mulai memerintah Negara secara zalim. Begitu Parlemen dibubarkan, Damad Farid menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan. Secara terbuka dia mulai mengikuti kepentingan-kepentingan Inggris dan selalu berupaya menjilat dengan berbagai cara. Damad Farid nyaris menjadi 'lebih Inggris' daripada orang Inggris itu sendiri. Sultan sendiri tidak jauh berbeda, ia selalu berupaya mengutamakan kepentingan Inggris dan memerangi pengikut Musthafa Kemal. Sultan menghasut *Syaikhul Islam* untuk mengeluarkan fatwa yang menentang gerakan Musthafa Kemal. Fatwa itu menyatakan bahwa kaum nasionalis merupakan salah satu golongan manusia yang terkutuk dan tersesat dan bahwa kaum Mukmin yang mengabdikan kepada Allah wajib menyatakan perang terhadap mereka yang memberontak. Fatwa ini diikuti dengan keputusan Sultan yang mendukung fatwa tersebut dan menjatuhkan hukuman mati bagi Musthafa Kemal dan para pengikutnya.

Ketika Musthafa Kemal mengetahui hal ini, dia menangkap beberapa orang Inggris yang tinggal di Anatolia dan belum sempat mengungsi. Selanjutnya, dia memerintahkan pasukan Turki untuk menyerang tentara Inggris serta mengepung kota Eskisehir yang di sana terdapat satu peleton tentara Inggris yang berpangkalan. Pada waktu itu, tentara Inggris sedang menunggu tentara Italia yang sedang menuju ke kota Konia. Selanjutnya, pasukan Turki menyerang tentara Inggris dan mengepung kota Eskisehir. Pasukan Turki juga menyerang tentara Italia yang sedang dalam perjalanan menuju Konia. Tentara Italia akhirnya dapat mencapai Konia setelah menderita kerugian yang cukup besar. Akibatnya, tentara Italia terpaksa bergerak ke barat dan bergabung dengan tentara Yunani di Izmir. Tentara Inggris akhirnya mundur dari Eskisehir. Demikian pula tentara Italia, terpaksa meninggalkan Konia. Pada akhirnya, tak satu pun tentara Sekutu yang tertinggal di wilayah Anatolia. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak terjadi satu pun

bentrokan bersenjata dengan tentara Inggris, sementara hanya terjadi satu pertempuran kecil dengan tentara Italia yang sedang bergerak menuju Konia untuk bergabung dengan tentara Inggris. Pada akhirnya, kedua pasukan ini mundur dan meninggalkan kota.

Musthafa Kemal Mengumumkan Pemilihan Parlemen Baru

Dengan demikian, terdapat dua kutub kekuatan yang mendominasi Daulah Utsmani, yaitu Inggris—dengan dukungan Khalifah dan Pemerintah—di satu sisi dan partainya Musthafa Kemal yang didukung oleh seluruh rakyat di sisi yang lain. Musthafa Kemal menjadi oposisi Pemerintah, sementara rakyat menganggapnya sebagai pemimpin mereka melawan Inggris. Oleh sebab itu, opini publik sangat menguntungkan dirinya sehingga sebagian besar perwira militer dan pegawai negara berada di pihaknya. Di tengah-tengah suasana yang sangat menguntungkannya itu, Musthafa Kemal—atas nama Komite Parlemen yang belum sempat dibubarkan—berhasil merebut peluang untuk mengumumkan bahwa akan segera dilaksanakan pemilihan parlemen baru, dan bahwa parlemen baru yang akan dihasilkan tidak ada kaitannya dengan parlemen yang lama. Musthafa juga menyatakan bahwa parlemen tersebut bukanlah parlemen Utsmani, namun suatu lembaga legislatif nasionalis yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ankara ditetapkan sebagai pusat, tempat sidang-sidang lembaga nasionalis tersebut akan digelar.

Pemilihan parlemen jadi dilaksanakan. Namun, pemilihan ini bukan merupakan pemilihan yang sesungguhnya, melainkan hanya sekadar kebijakan formalitas, yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya suatu pemilihan umum yang sah. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan suatu pemilihan bagi pengikut Musthafa Kemal saja, dengan mengabaikan kelompok-kelompok lainnya, sehingga para pengikut Musthafa terpilih menjadi wakil-wakil negara. Inilah yang terjadi sehingga tidak ada anggota parlemen yang terpilih selain dari kelompok Musthafa Kemal.

Pada tanggal 23 April 1920, pertemuan kaum nasionalis diadakan di Ankara. Sidang peresmian diselenggarakan pada hari Jumat. Pada hari itu, setelah shalat Jumat di Masjid Haji Birim, para

utusan menaikkan bendera-bendera dan menyiapkan tempat pertemuan. Mereka menyembelih dua ekor kambing di depan pintu gerbang, kemudian memasuki ruangan untuk mengadakan upacara peresmian. Sementara itu, berbagai perayaan juga dilangsungkan di setiap masjid di wilayah Anatolia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa.

Pada waktu persiapan penyelenggaraan pertemuan Majelis Nasional dan upacara peresmiannya, Musthafa Kemal menghadirkan sejumlah pegawai negara dan perwira militer ke Ankara. Para penduduk setempat menyaksikan gelombang kehadiran para pendatang ke kota mereka. Di antara para pendatang tersebut adalah para perwira militer, guru, dan pegawai negeri senior. Awalnya, para penduduk tidak mengetahui alasan kehadiran para pendatang tersebut. Namun kemudian, mereka menyadari bahwa para pendatang tersebut akan dijadikan sebagai staf pemerintahan.

Musthafa Kemal Mendirikan Struktur Negara di Ankara

Demikianlah, Musthafa mendirikan struktur negara di Ankara. Dia mendirikan lembaga kemiliteran dan beberapa departemen pemerintahan. Musthafa juga menyiapkan sebuah mesin cetak dan sekelompok wartawan, kemudian menerbitkan sebuah koran bernama *Hakmit Milla*. Musthafa menyiapkan Ankara sebagai pusat pemerintahan dan ibukota negara. Dia menyiapkan dasar-dasar sebuah negara Republik Turki. Namun, ia melakukan segala upaya itu secara ekstra hati-hati dan penuh kerahasiaan, dengan berpura-pura melakukan segala upaya tersebut sebagai bentuk perjuangan melawan penjajah asing, dan menyebut peperangan itu sebagai peperangan melawan tentara pendudukan. Musthafa beralasan bahwa segala tindakannya hanya dimaksudkan untuk melindungi negerinya. Musthafa pernah menyatakan sikapnya kepada bangsa-bangsa Eropa melalui suatu pernyataan resmi yang berbunyi, "Kalian dapat menguasai seluruh wilayah Arab dan menduduki Suriah, namun saya tidak akan membiarkan kalian menguasai Turki. Kami hanya menuntut hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap negara. Kami ingin menjadi suatu negara

yang merdeka dalam batas-batas wilayah nasional kami. Kami tidak dapat menerima kurang dari itu. walau hanya satu qirath.”

Selama dan setelah upacara persemian Majelis Nasional, Musthafa Kemal menyatakan, “Segala langkah yang diambil ditujukan untuk memelihara Khilafah dan Kesultanan serta membebaskan Sultan dan negara dari perbudakan Barat.”

Selanjutnya, dia memberikan suatu pernyataan; dia berkata, “Karena Sultan menjadi tawanan negara-negara Barat yang mengatur ibukota sekehendak hatinya, maka ia tidak memiliki kekuasaan yang bebas dan sama sekali tidak memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, Majelis Nasional Tertinggi untuk sementara akan menjalankan urusan kenegaraan.”

Maka dari itu, suatu komite eksekutif disiapkan dan diberi tugas untuk menjalankan urusan-urusan kenegaraan. Komite eksekutif ini tersusun dari sebelas menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan Musthafa dipilih sebagai presidennya. Sebelum itu, Musthafa dipilih sebagai Ketua Majelis Nasional; kemudian Kolonel Ismat Pasha bergabung dengan pemerintahan.

Majelis Nasional mulai mengadakan sidang-sidang yang kemudian menghasilkan sejumlah keputusan. Sejumlah keputusan yang sangat penting ditetapkan, di antaranya adalah mambatalkan seluruh perjanjian dan kesepakatan perdagangan Pemerintah Istambul dengan negara-negara asing. Keputusan penting lainnya adalah menetapkan bahwa semua pendapatan negara, termasuk yang berasal dari kekayaan Sultan, tanah, dan wakaf, harus ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah Ankara.

Dengan demikian, suatu pemerintahan telah didirikan di Ankara, yang memiliki parlemen, departemen-departemen pemerintahan, dan lembaga kemiliteran. Pemerintahan ‘bayangan’ itu juga telah mengambil sejumlah keputusan yang sangat penting. Oleh karena itu, Sultan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengakhiri pemerintahan ‘bayangan’ atau menyerah kepadanya. Akhirnya, konfrontasi bersenjata antara kedua belah pihak tersebut tidak dapat dielakkan lagi.

Sultan Mengirimkan Pasukan untuk Menghancurkan Pemerintahan Ankara

Sultan mengirimkan suatu pasukan untuk mengakhiri pemerintahan Ankara dengan dipimpin oleh para perwira yang masih setia kepadanya. Pasukan tersebut bergerak ke arah barat laut Asia Kecil. Banyak sukarelawan bergabung dengan pasukan tersebut. Sultan juga mengirimkan utusan ke wilayah Kurdistan untuk mendorong perlawanan suku-suku di wilayah itu terhadap pemerintahan Ankara. Kemudian, ia mulai mendesak seluruh umat untuk mempertahankan tahta dan Khilafah. Ternyata, kesetiaan kepada Khalifah masih tetap kuat. Terbukti, umat masih menghormati perintah-perintahnya dan menganggap bahwa ketaatan kepadanya sama artinya dengan ketaatan kepada Allah SWT serta bahwa ketidakpatuhan kepadanya sama saja dengan ketidakpatuhan terhadap-Nya. Oleh sebab itu, seluruh provinsi bergabung dengan pasukan Khalifah, sementara yang lain berusaha melawan pemerintahan Ankara. Pasukan Khalifah berhasil menahan satu divisi pasukan Musthafa Kemal.

Pertempuran-pertempuran antara kedua pasukan terjadi sepanjang bulan Mei 1920. Pasukan Khalifah berhasil menghancurkan pasukan Musthafa Kemal di berbagai tempat. Semua provinsi bergabung dengan Khalifah dan seluruh umat berpihak kepadanya, kecuali wilayah Ankara yang menjadi pusat pemberontakan. Ankara sendiri hampir jatuh, karena wilayah-wilayah sekitarnya berpihak kepada Sultan dan satu demi satu bergabung dengan pasukan Khalifah. Musthafa Kemal dan pengikutnya berada dalam kesulitan. Di Ankara, para pengikut Musthafa Kemal mulai dilanda rasa putus asa dan bemiat untuk menyerah serta bergabung dengan Khalifah. Hidup Musthafa Kemal sendiri terancam maut dan gerakannya berada di ambang kehancuran.

Penyiaran Isi Perjanjian Damai Menguntungkan Musthafa Kemal

Bertepatan dengan kondisi ini, disiarkanlah syarat-syarat perjanjian damai—dikenal dengan Perjanjian Sevres—yang telah disepakati satu setengah tahun sebelumnya di Paris dan telah disetujui

oleh Sultan serta ditandatangani oleh Perdana Menteri Damad Farid. Selama ini, syarat-syarat perjanjian damai tersebut dirahasiakan dan rakyat Turki sama sekali tidak mengetahuinya. Justru pada saat itulah, isi perjanjian damai itu disiarkan ke seluruh Turki. Akibatnya, opini publik yang menentang Sultan dan Perdana Menteri berkembang luas di seluruh negeri. Ketika pertentangan itu mencapai puncaknya, Perdana Menteri Inggris, Lloyd George, membuat suatu pernyataan di Gedung Parlemen. Ia menyatakan, "Tujuan negara-negara Sekutu adalah untuk membebaskan bangsa-bangsa non-Turki dari penindasan bangsa Turki."

Pernyataan ini juga disebarluaskan di kalangan masyarakat. Akibatnya, penentangan masyarakat semakin meningkat. Akhirnya timbullah kemarahan rakyat terhadap Inggris dan kaki-tangannya, yaitu Khalifah dan Perdana Menteri Damad Farid Pasha.

Situasi pun berbalik 180 derajat. Rakyat mulai meninggalkan Khalifah dan bergabung dengan Musthafa Kemal. Wilayah-wilayah yang semula melawan gerakan Musthafa Kemal mulai menyingkir dari pasukan Khalifah. Hasilnya, pasukan Khalifah menderita kekalahan yang hebat dan kekuasaan Sultan pun jauh berkurang. Rakyat bersumpah akan menuntut balas kepada Damad Farid yang telah menandatangani perjanjian dan menyerahkan negara kepada musuh. Akibatnya, pemerintahan Ankara kembali dapat menguasai keadaan dan seluruh rakyat bergabung dengan gerakan Musthafa Kemal. Rakyat menganggap Musthafa Kemal sebagai juru selamat mereka dari pendudukan musuh dan menempatkan Musthafa Kemal sebagai pemimpin negeri. Isi perjanjian damai tersebut membuat marah bangsa Turki, karena perjanjian tersebut bermakna berakhirnya Daulah Utsmaniyah dan terbagi-baginya wilayah ke dalam kekuasaan negara-negara Eropa, atau dengan kata lain, pembagian wilayah Daulah Utsmani menjadi sejumlah wilayah merdeka membuat Turki menjadi negara yang kecil di wilayah Asia Kecil, dan menjadikan Istambul—Ibukota Turki dan satu-satunya jalan masuk ke wilayah Eropa—berada di bawah kekuasaan internasional. Perjanjian ini juga menjadikan kekuasaan Sultan menjadi tidak berarti dan membuat Turki menjadi wilayah yang berada di bawah pengaruh Inggris, Prancis, dan Italia.

Perjanjian damai itu memuat sejumlah pasal yang kontroversial, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tentang negara-negara Arab: Turki harus melepaskan kekuasaannya atas seluruh wilayah Arab yang semula menjadi bagian dari kerajaannya. Sementara itu, kerajaan Hijaz diakui sebagai suatu negara merdeka. Selain itu, Turki juga harus melepaskan dominasinya atas wilayah Palestina, Suriah, dan Mesopotamia, yang masa depannya akan ditentukan kemudian oleh Sekutu.
2. Tentang wilayah Turki Eropa: Damas Barat diserahkan kepada Yunani sampai garis batas Catalca. Pada saat yang sama, Yunani juga menerima wilayah jajahan Al-Gharbiyyah dari Sekutu, sehingga Yunani dapat memperluas perbatasannya sampai sekitar 20 mil dari Ibukota Turki.
3. Wilayah Smirna dan kepulauan Aegean. termasuk kota Smirna diserahkan kepada kekuasaan Yunani selama 5 tahun dan setelah itu penduduk setempat berhak memilih untuk bergabung dengan Yunani melalui referendum. Selain Kepulauan Aegean, Kepulauan Jambros dan Tinides juga diserahkan kepada Yunani. Kepulauan Dodicanis, termasuk Pulau Rhodes yang strategis, diserahkan kepada Italia.
4. Tentang wilayah Armenia: Turki mengakui Armenia sebagai negara yang merdeka dan siap menerima keputusan Presiden Wilson mengenai batas-batas wilayah antara kedua negara.
5. Wilayah Kurdistan: Turki dapat menerima wilayah Kurdi yang terbentang di sebelah timur Sungai Eufrat, sebagai suatu wilayah otonom. Turki juga siap menerima rencana apapun mengenai wilayah ini yang akan ditetapkan oleh suatu komite internasional yang diwakili oleh Inggris, Prancis, dan Italia. Turki juga menyetujui perubahan garis perbatasan antara wilayah Turki dan Iran. Selain itu, Turki juga sepakat bahwa satu tahun setelah penandatanganan perjanjian ini, suku bangsa Kurdi berhak meminta kemerdekaan. Permintaan tersebut harus dipenuhi apabila Liga Bangsa-Bangsa menganggap bangsa Kurdi layak mendapatkan kemerdekaan. Jadi, Turki harus melepaskan kekuasaannya atas wilayah ini. Naskah

perjanjian perlucutan kekuasaan tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Sekutu dan Turki.

6. Kawasan Selat dan Konstantinopel: Turki sepakat menyerahkan kawasan Selat kepada kekuasaan internasional dan siap mengosongkan wilayah sekitarnya dari kekuatan militernya. Sementara itu, Konstantinopel (Istambul) tetap berada dalam kekuasaan Turki. Selain itu, tentara Turki dibatasi hanya sampai jumlah 50.000 prajurit serta tunduk pada petunjuk dan saran dari Sekutu. Turki juga menyetujui pengawasan jangka panjang atas urusan keuangan negara yang dilakukan oleh Inggris, Prancis, dan Italia. Turki juga setuju untuk mempertahankan konsesi-konsesi pertambangan. Turki juga siap memberikan sejumlah hak istimewa kepada etnis-etnis minoritas, seperti bangsa Armenia, Yunani, dan Kurdi, dan secara umum kepada kaum Nasrani.

Penyiaran isi perjanjian damai yang demikian mengejutkan dan menghinakan ini cukup untuk mengobarkan pemberontakan rakyat terhadap Sultan, yang telah menerima dan menandatangani perjanjian ini. Oleh karena itu, arus yang besar mulai bergerak menuju Ankara sehingga seluruh negeri berpihak pada pemerintahan Ankara dengan memberikan dukungan militer dan kekuatan massa. Pemerintahan Ankara bahkan mampu mengancam Ibukota Istambul yang sedang diduduki pasukan Sekutu.

Dengan demikian, Musthafa Kemal memenangkan tahap kedua pemberontakannya dan berhasil mendirikan pemerintahan bayangan dengan Ankara sebagai pusatnya, serta berhasil menguasai negara dan tentara.

Demikianlah tahap kedua pemberontakan Musthafa Kemal dan kejadian-kejadian di seputar pemberontakan itu. Siapa pun yang mengikuti peristiwa-peristiwa itu dengan jernih pasti dapat menyimpulkan bahwa Inggrislah yang menyiapkan dan memprovokasi pemberontakan tersebut. Mereka pula yang menghalangi dan menggagalkan upaya-upaya untuk menghancurkan dan mengakhiri pemberontakan. Sekutulah yang mengeluarkan pemberitahuan melalui suatu memorandum resmi bahwa Istambul dan kawasan selat harus

tetap di bawah kekuasaan Sultan, sementara Pemerintah sendiri tidak memintanya. Pada saat itu tidak seorang pun yang memahami alasan di balik kemurahan hati Sekutu tersebut, sedangkan mereka masih menguasai Daulah Utsmaniyah. Alasan di balik memorandum itu tersingkap kemudian, yaitu agar Inggris dapat menduduki Istambul dan kawasan Selat atas usaha mereka sendiri, serta tidak memberi kesempatan bagi Prancis dan Italia untuk menguasainya.

Demikianlah manuver Inggris untuk dapat menguasai Ibukota dan kawasan Selat seorang diri. Selain itu, aliran dana dan senjata kepada Musthafa Kemal untuk meneruskan pemberontakan sepenuhnya diketahui oleh Komisaris Tinggi Inggris dan Prancis. Lalu mengapa mereka mendiampkannya? Mengapa mereka membiarkan berlangsungnya bongkar muat bertruk-truk senjata di Semenanjung Gallipoli? Lebih jauh lagi, kemarahan Inggris akibat bentrokannya dengan pasukan Musthafa Kemal seharusnya diarahkan kepada Musthafa Kemal, bukan kepada Pemerintah Istambul. Tindakan yang semestinya dilakukan Sekutu adalah dengan menyerang pasukan pemberontak yang berpusat di Ankara, bukan dengan menyerang dan menduduki Ibukota serta melakukan berbagai provokasi, yang tidak membahayakan pemberontakan.

Di samping itu, sama sekali tidak terjadi bentrokan senjata antara pemberontak dan pasukan Inggris. Bentrokan senjata hanya terjadi antara pemberontak dengan pasukan Prancis di Kilikia dan dengan pasukan Italia di dekat Konia. Jadi, yang seharusnya menyatakan kemarahan akibat perlawanan tersebut adalah Prancis dan Italia, bukan Inggris. Pada akhirnya, Inggris pula yang datang sendiri menyerang serta menduduki Istambul dan kawasan Selat serta menghalangi pendudukan Prancis dan Italia.

Lebih jauh, mengapa Inggris menyiarkan isi Perjanjian Sevres tepat pada saat Musthafa Kemal dikepung dan Ankara hampir jatuh? Mengapa perjanjian tersebut dirahasiakan sekalipun sudah ditandatangani lebih dari satu tahun yang lalu? Apakah perjanjian ini bukan merupakan pemicu pemberontakan Musthafa Kemal melawan Sekutu? Tidak diragukan lagi bahwa peristiwa ini merupakan persekongkolan yang direkayasa Inggris, mengingat bahwa merekalah

yang menyiarkan isi perjanjian tersebut pada saat yang tepat. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan gerakan Musthafa Kemal dan memberikan pukulan telak terhadap Khalifah sehingga dengan demikian pemerintahan yang baru dapat dibentuk. Setelah itu, mereka mulai menyusun rencana dan strategi untuk merekayasa langkah yang ketiga dan yang terakhir, yaitu tahap perundingan internasional dan perjanjian-perjanjian final. []

PENGUKUHAN PEMERINTAHAN ANKARA DAN HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN SEJUMLAH NEGARA

Tahap kedua pemberontakan Musthafa Kemal berakhir dengan tegaknya pemerintahan negara di Ankara. Kemal sekaligus menjadikan dirinya pemegang kendali kekuasaan dan penguasa efektif di Turki.

Sementara itu, Pemerintahan Istanbul menjadi penguasa yang tidak memiliki kewenangan apapun. Ini terjadi segera setelah pemerintahan bayangan ini tegak menjadi penguasa yang memegang kendali Negara. Inggris menyerukan perlunya diadakan perundingan. Perundingan yang diselenggarakan di London ini dihadiri oleh utusan-utusan dari Yunani dan Turki. Inggris menyatakan, "Tujuan penyelenggaraan perundingan ini adalah untuk mencari penyelesaian krisis di wilayah Timur." Hal ini berarti peninjauan kembali isi Perjanjian Sevres yang ditandatangani di Paris. Dengan kata lain, Perjanjian Sevres yang telah disepakati di Paris kembali menjadi obyek pembahasan dan pertimbangan sebelum perjanjian tersebut diberlakukan. Perjanjian tersebut memang belum diberlakukan dan tak satu pun pasal yang diterapkan. Kejadian ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Inggris menyepakati perjanjian ini untuk mengancam Turki serta menggunakannya sekedar alat untuk mencapai tujuan-tujuannya, bukan dengan maksud untuk diberlakukan. Terbukti bahwa perjanjian itu tetap dirahasiakan, sekalipun telah ditandatangani lebih dari satu tahun yang lalu, dan baru disiarkan pada saat Musthafa Kemal tengah terkepung dan ketika pemberontakannya nyaris dapat dihancurkan.

Adanya kenyataan bahwa Inggris mengadakan Perundingan London untuk meninjau kembali Perjanjian Sevres dipandang sebagai tindakan yang ganjil, mengingat perjanjian tersebut sangat menguntungkan Inggris. Meskipun Prancis kurang puas dengan Perjanjian Sevres dan merasa terpaksa menyepakati perjanjian itu, mereka menganggap bahwa wilayah bekas Daulah Utsmani itu akan menjadi wilayah jajahan negara sekutunya, Inggris, yang mendapatkan bagian terbesar. Jadi, Prancis merasa cukup puas mendapatkan wilayah Suriah dan Kilikia. Sungguh pun demikian, Prancis tetap beranggapan bahwa wilayah Suriah dan Kilikia masih merupakan wilayah yang dapat diperselisihkan. Italia juga merasa gusar dengan Perjanjian Sevres itu. Karena itu, mereka menolak kekuasaan Yunani atas Laut Tengah, khususnya ekspansi Yunani di wilayah Asia Kecil yang sesungguhnya merupakan wilayah kekuasaan Italia menurut rencana yang disusun Sekutu selama Perang Dunia. Oleh karena itu, akibat keserakahan kedua negara tersebut dalam memperebutkan wilayah jajahan, maka Prancis dan Italia menandatangani perjanjian ini dengan berat hati.

Ketika Inggris memilih untuk tidak memberlakukan Perjanjian Sevres—sekalipun perjanjian ini memberikan wilayah jajahan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan wilayah yang diperoleh negara-negara sekutunya—hal ini dipandang sebagai peristiwa yang menarik perhatian dan tidak wajar. Apalagi, ketika Inggris meminta peninjauan ulang atas perjanjian tersebut, hal ini dianggap sebagai kejadian yang mengejutkan dan ganjil. Yang lebih mengejutkan lagi adalah hadirnya delegasi pemerintahan Ankara yang datang bersama perwakilan Daulah Utsmani pada perundingan tersebut. Jelas bahwa pemerintahan Ankara sebenarnya tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam perundingan itu, mengingat bahwa pemerintah Daulah Utsmanilah yang ambil bagian dalam Perang Dunia dan mengalami kekalahan. Setelah itu, Pemerintah Utsmani pula yang menandatangani Perjanjian Sevres yang dibahas dan ditinjau ulang dalam perundingan tersebut. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan kedudukan pemerintahan Ankara—yang belum mendapatkan pengakuan—dalam perundingan ini, serta mengapa mereka menghadiri perundingan dalam rangka membahas syarat-syarat perjanjian damai ini? Apakah hal ini bukan merupakan bukti nyata

bahwa pendirian pemerintahan Ankara merupakan rekayasa Inggris untuk mengikutsertakan mereka dalam perundingan damai, untuk selanjutnya menjadikan mereka sebagai satu-satunya negosiator dalam perjanjian final.

Pemerintah Khilafah Utsmani seharusnya menolak keikutsertaan pemerintahan Ankara dalam perundingan ini, mengingat persetujuan atas keikutsertaan mereka berarti secara resmi mengakui keberadaannya. Selain itu, kehadiran dua pemerintahan atas satu negara di depan musuh-musuhnya dalam suatu perundingan damai jelas menunjukkan kelemahan dan kehancuran negara tersebut. Oleh sebab itu, wajar jika Pemerintahan Khilafah menolak keikutsertaan pemerintahan Ankara. Namun kenyataannya, Pemerintahan Khilafah dapat menerimanya. Kelemahan Daulah Khilafah itu semakin tampak jelas ketika Barat mengundang Musthafa Kemal sebagai upaya untuk mengambil hatinya dan mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, Taufiq Pasha menemui Musthafa Kemal dan berkata, "Atas nama Negara Turki dan demi Khilafah Utsmani, delegasi Turki yang hadir dalam perundingan itu harus merupakan satu kesatuan yang kuat dan harus menyampaikan usulan agenda yang satu pula, yang akan menunjukkan kerjasama dan persatuan seluruh umat, daripada harus berselisih dan terpecah-belah."

Namun demikian, Musthafa Kemal menolak usulan ini dan berkata, "Hanya Majelis Nasional yang memiliki kedaulatan konstitusional serta menjalankan kekuasaan dan hukum di negara ini. Negara-negara Eropa seharusnya mengirimkan undangan (perundingan) melalui majelis ini."

Pada waktu itu, Majelis Nasional menjadikan dirinya sebagai majelis yang permanen. Mereka juga menyusun konstitusi baru yang memakan waktu sampai sembilan bulan penuh. Masalah utama yang menghambat penyusunan konstitusi baru itu serta menimbulkan perdebatan yang sengit dan panas adalah masalah "Kesultanan dan Khilafah". Musthafa Kemal mendapatkan tekanan dari kesepakatan bersama dan kecenderungan yang luas di Majelis Nasional—disebut sebagai Majelis Atatürk, karena seluruh anggota majelis merupakan pendukung Musthafa Kemal—untuk mencantumkan secara eksplisit

dalam konstitusi bahwa Kesultanan dan Khilafah akan tetap dipertahankan. Oleh karena itu, dalam jawabannya ketika menemui Perdana Menteri Taufiq Pasha, Musthafa berkata, "Majelis Nasional dalam pasal satu konstitusinya menetapkan bahwa tidak akan merugikan Kesultanan dan tidak akan merusak kesucian Khilafah. Sultan harus mengakui Majelis Nasional agar pemerintahan Ankara dapat ikut serta mengirimkan delegasinya bersama-sama dengan delegasi Pemerintahan Sultan."

Namun, Sultan menolak mengakui keberadaan Majelis Nasional dan konstitusi yang disusunnya. Sebab, pengakuan atas konstitusi itu akan mengakibatkan penghapusan Khilafah, sekalipun secara formal konstitusi menetapkan untuk mempertahankannya. Selain itu, konstitusi juga menetapkan bahwa kekuasaan sepenuhnya, tanpa prasyarat, diserahkan kepada seluruh bangsa, dan bahwa bangsa merupakan sumber perundang-undangan negara. Konstitusi juga menetapkan bahwa Majelis Nasional memiliki hak-hak yang eksklusif dan mutlak sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Majelis Nasional lah yang menentukan masalah perang dan damai. Oleh sebab itu, Sultan jelas tidak dapat menerima konstitusi seperti itu. Akhirnya, perundingan antara Pemerintahan Khalifah dan Ankara mengenai pembentukan delegasi bersama terputus.

Akan tetapi, ketika negara-negara Barat mengetahui bahwa Musthafa Kemal menolak undangan tersebut karena disampaikan kepadanya melalui pemerintahan Sultan, Inggris—atas nama Sekutu—mengirimkan undangan langsung kepada pemerintahan Ankara. Undangan ini dipandang sebagai pengakuan resmi dari Sekutu atas pemerintahan Ankara. Dengan demikian, dua delegasi berangkat secara terpisah. Taufiq Pasha memimpin delegasi Khalifah, sementara Bakir Sami Beik mengetuai delegasi dari Ankara. Konferensi London itu diselenggarakan pada bulan Februari 1921.

Pimpinan Delegasi Sultan Menyerahkan Hak Bicara Atas Nama Dua Delegasi kepada Ketua Delegasi Ankara

Ketika kedua delegasi duduk bersama dalam meja perundingan, Perdana Menteri Taufiq Pasha sebagai pemimpin utusan Khalifah berdiri

dan menyatakan bahwa ia memberikan hak bicara kepada Bakir Sami Beik, yang akan berbicara atas nama dua delegasi dan mempertahankan aspirasi nasional bangsa Turki. Dengan demikian, Pemerintahan Istanbul hanya berdiam diri dan pendapat Ankaralah yang mengemuka dalam perundingan tersebut.

Selanjutnya, Lloyd George dari Inggris, Brian dari Prancis, dan Count Sforza dari Italia satu demi satu menjelaskan tujuan perundingan, yaitu semata-mata untuk menyelaraskan hubungan di antara bangsa-bangsa yang telah saling berbenturan dalam Perang Dunia. Mereka juga menyatakan bahwa Sekutu telah menyiapkan sejumlah perubahan dalam syarat-syarat perjanjian damai, khususnya mengenai hak-hak yang diberikan kepada Yunani. Mereka bertiga sepakat membentuk suatu panitia khusus yang bertugas meninjau kembali keadaan penduduk setempat di wilayah Izmir, dan menyatakan bahwa kesimpulan yang dicapai panitia khusus tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak. Bakir Sami Beik menyetujui gagasan pengiriman panitia khusus tersebut, namun delegasi Yunani menolak mentah-mentah usulan itu. Atas perdebatan ini, juru bicara kedua delegasi Turki mengajukan usulan menjadikan Izmir sebagai suatu wilayah dengan kemerdekaan domestik yang dipimpin oleh seorang Nasrani. Namun, Inggris menolak usulan ini; demikian pula Yunani, Prancis, dan Italia. Sementara itu, delegasi Prancis menyatakan bersedia mundur dari Kilikia dan menyerahkannya kepada bangsa Turki serta memberikan jaminan untuk menepati janji tersebut. Sebagai balasannya, Bakir Sami Beik memberikan hak-hak perdagangan istimewa kepada Prancis, yang akan menjadikannya sebagai negara yang lebih utama daripada negara-negara lain yang menjalin hubungan dagang dengan Turki. Akhirnya, Turki dan Prancis berhasil menyepakati suatu perjanjian. Namun demikian, Perundingan London mengalami kegagalan dan berakhir tanpa memberikan hasil apa-apa, selain dari kesepakatan antara Turki dan Prancis tersebut.

Tidak lama setelah kedua delegasi tersebut kembali ke Turki, Musthafa Kemal menolak perjanjian yang disepakati Bakir Sami dan Prancis. Selanjutnya, Bakir Sami dipaksa mengundurkan diri dari

jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Setelah itu, Bakir Sami bergabung dengan orang-orang yang menentang Musthafa Kemal.

Musthafa Kemal kemudian mengirim surat kepada Pemerinlah Prancis, menyatakan bahwa utusan yang ia kirimkan pada perundingan tersebut telah melakukan tindakan di luar wewenang yang diberikan. Jadi, seluruh keputusan yang dicapai dalam perundingan tersebut dianggap batal dan dihapuskan dan negara tidak dapat menerima atau memberikan penghormatan atas keputusan tersebut.

Selanjutnya, terjadi perundingan antara pemerintahan Ankara dan Prancis, yang berakhir dengan penandatanganan perjanjian antara pemerintahan Ankara dan pemerintah Prancis pada tanggal 20 Oktober 1921, yang berisi penyerahan Suriah kepada Prancis. Mereka juga menyepakati batas-batas wilayah antara Turki dan Suriah. Sesuai dengan kesepakatan ini pula, Prancis menarik mundur pasukannya dari Kilikia. Dengan demikian, Musthafa Kemal secara langsung menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Sebaliknya, negara-negara lain pun langsung berhubungan, melakukan perundingan, dan menyepakati perjanjian dengannya, serta mengabaikan keberadaan Pemerintahan Khilafah.

Mulai saat itu, negara-negara Eropa menunjukkan kecenderungan kepada pemerintahan Ankara. Prancis dan Italia mulai mencoba mengambil hati dan mendekatinya, sementara Inggris mulai menunjukkan dukungannya secara terbuka dalam masalah-masalah internasional. Inggris juga mulai menampakkan penghinaan dan kegusarannya kepada Yunani.

Musthafa Kemal juga berhubungan dengan Rusia, yang telah menarik diri dari Perang Dunia dan mendirikan pemerintahan komunis, serta berupaya mencari bantuan darinya. Musthafa menyerahkan wilayah Batum kepada Rusia, dan berusaha memaksa Rusia membuat perjanjian persahabatan dengannya atas nama Turki, yang dianggap sebagai pengakuan resmi Rusia atas pemerintahannya. Rusia menyetujui permintaan ini, karena mereka tidak mengalami kerugian sedikit pun, selain karena mereka menentang Islam dan keberadaan Khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, Rusia mendukung upaya Musthafa Kemal dalam melawan Inggris dan menentang Khilafah. kemudian

mengambil-alih Batum tanpa harus kehilangan apapun pada tanggal 16 Maret 1921. Sebelum kejadian ini, Italia melepaskan Altalia secara sukarela dan menarik mundur pasukannya pada bulan Januari 1921.

Dengan demikian, Prancis, Italia, dan Rusia berpihak kepada pemerintahan Ankara dan ini berarti memperkuat kekuasaan Musthafa Kemal Pasha. []

MUSTHAFA KEMAL MENYIAPKAN PEPERANGAN MELAWAN YUNANI

Setelah Perundingan London mengalami kegagalan dan Mushtafa Kemal berhasil meraih kesepakatan dengan Prancis, Italia, dan Rusia, maka satu-satunya persoalan yang belum dapat diselesaikannya adalah dengan Yunani. Oleh sebab itu, Musthafa Kemal mendapat kekuasaan penuh dan dorongan untuk menyelesaikan masalah itu melalui peperangan.

Untuk itu, ia segera mengumpulkan persenjataan, perlengkapan perang, dan amunisi serta melengkapi dan menambah pasukannya. Persenjataan dan amunisi mulai mengalir kepadanya secara melimpah. Ini menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh menyiapkan suatu peperangan. Senjata dan amunisi itu datang dari Rusia melalui jalur Inggris di Selat Bosphorus dan pantai Laut Hitam. Prancis telah menarik mundur pasukannya dari wilayah Kilikia, sehingga tentara Turki menempatkan diri di daerah tersebut. Sekitar 80.000 tentara bergerak ke front barat untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan diri. Akibatnya, Yunani merasa khawatir dan segera menyadari bahwa konsolidasi pasukan ini dimaksudkan untuk melawan mereka. Pemerintah Yunani mencium gelagat bahwa negara-negara Eropa lainnya menentang mereka, terbukti bahwa Inggris memalingkan muka terhadap mereka, dan merasa curiga bahwa Inggrislah yang menghasut Turki agar melawan mereka.

Yunani Memulai Peperangan Melawan Turki

Oleh sebab itu, Yunani memutuskan untuk menyerang Turki tanpa meminta persetujuan terlebih dulu kepada Sekutu, setelah yakin bahwa Sekutu memusuhi mereka. Ketika Sekutu mengetahui bahwa Yunani telah siap melancarkan serangan terhadap Turki, mereka menawarkan suatu perundingan kepada Turki dan Yunani dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Namun, tampaknya Yunani curiga bahwa hal tersebut hanya sekadar taktik untuk menunda serangan, agar Turki mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan pasukannya lebih lanjut. Jadi, mereka segera menyerang Turki sebelum sempat memberikan jawaban atas usulan Sekutu tersebut. Peperangan terjadi antara pasukan Turki dan Yunani selama kurang lebih satu setengah tahun.

Begitu pertempuran pecah, Sekutu menyatakan diri dalam posisi netral. Namun, sikap netral itu tampak ganjil, karena Daulah Utsmani tetap dalam kekuasaan Inggris dan menurut pandangan internasional masih berada dalam pendudukan Sekutu. Dengan demikian, setiap peperangan yang terjadi di Turki jelas akan mempengaruhi kedudukan negara penjajah. Jadi, bagaimana mungkin mereka tetap netral? Tindakan yang wajar bagi Sekutu adalah mendukung Yunani atau menentangnya, dengan maksud agar tidak terjadi peperangan. Namun, bersikap netral merupakan tindakan yang tidak lumrah, apalagi dalam keadaan kritis seperti itu. Namun demikian, ternyata netralitas tersebut benar-benar terbukti dan Yunani dibiarkan dalam kebingungan setelah dikecewakan oleh sekutunya, Inggris. Sewajarnya, Yunani akan menyerah dan siap melakukan perundingan, namun ternyata tidak demikian. Yunani tetap ngotot untuk melanjutkan peperangan. Selanjutnya, pemerintah Inggris menawarkan diri bertindak sebagai penengah antara Turki dan Yunani. Namun, Yunani menolak mentah-mentah tawaran itu. Tampaknya, Yunani bersikap waspada terhadap upaya mediasi ini, karena mereka mencium dukungan Inggris kepada Musthafa Kemal. Jadi, Yunani menolak mediasi Inggris dan melanjutkan peperangan.

Peperangan yang terjadi antara kedua belah pihak mengalami pasang-surut. Turki mengubah taktik perangnya, dari perang gerilya

melawan Yunani menjadi perang terorganisasi seperti perang-perang pada umumnya. Pada tanggal 23 Maret 1922, tentara Yunani bergerak menuju Eskisehir dan Afyon Karahisar, yang dianggap sebagai lokasi persimpangan jalur kereta api yang sangat strategis. Yunani berhasil menduduki Afyon Kara dalam waktu yang singkat, tetapi mengalami kekalahan telak di sebelah barat Ain Otto pada hari-hari pertama bulan April 1922 dan terpaksa mengundurkan diri ke Brossa.

Pada bulan Juli, Yunani mengumpulkan pasukannya dan memutuskan untuk melancarkan serangan ke Istambul. Mereka berusaha menduduki Istambul. Namun, Jenderal Harrington—Komandan Pasukan Sekutu—menghadang gerak maju pasukan tersebut dan mencegah niat pasukan Yunani menyerang Istambul. Selanjutnya, pasukan Yunani bergerak ke timur hingga mencapai jalur kereta api dan langsung berhadapan dengan pasukan Turki.

Ismat Pasha, Panglima Angkatan Bersenjata Turki, mampu menahan serangan tentara Yunani dalam selama 10 hari. Namun, pada hari ke-11 pasukan Yunani justru berhasil menembus jauh ke dalam wilayah Kutahya, yang dijadikan garis pertahanan pasukan Turki. Ismat Pasha berusaha membalas dengan melakukan serangan secara beruntun. Namun, tentara Yunani sedikit demi sedikit berhasil memperkuat cengkeramannya atas wilayah-wilayah di sekitarnya. Tentara Yunani yang ditempatkan di bagian utara berhasil merebut Afyon Karahisar dan mulai berusaha merebut wilayah bagian utara. Perang terus berlanjut dalam suasana yang semakin kritis. Namun demikian, panglima pasukan Turki merasa bahwa tugas negara yang diembannya adalah untuk terus bertahan sampai titik darah penghabisan.

Pada saat tersebut, Musthafa Kemal datang dan para panglima menyampaikan berita yang merisaukan itu kepadanya. Setelah mempelajari seluruh situasi, dia mengeluarkan perintah untuk menghentikan segera perlawanan dan menarik mundur pasukan ke front timur. Pasukan Turki pun segera mundur setelah nyaris putus asa dan mengalami kerugian yang sangat hebat. Mereka meninggalkan sejumlah besar senjata dan perlengkapan perang yang kemudian menjadi rampasan perang bagi musuh-musuh mereka. Kereta-kereta

bergerak membawa apa saja yang sempat dibawa, sementara wanita dan anak-anak bergerak bersama kereta-kereta tersebut dengan penuh penderitaan. Penarikan mundur pasukan Turki berakhir ketika mereka sampai di Sakarya. Sementara itu, Musthafa Kemal kembali dari Eskisehir menuju Ankara dengan kereta api.

Perundingan-perundingan dengan Yunani dilakukan, namun terbukti sia-sia. Musthafa Kemal telah siap memberikan berbagai konsesi kepada Yunani, namun semuanya ditolak.

Semangat juang bangsa Turki nyaris habis. Majelis Nasional mengadakan sejumlah pertemuan maraton yang berlangsung hiruk-pikuk. Para penentang Musthafa Kemal menumpahkan kemarahan kepada Musthafa dan para panglimanya. Para pengikut Musthafa terguncang serta merasa sangat khawatir dan kehabisan akal.

Ketika Musthafa Kemal kembali ke markasnya, ia mendengar para panglimanya sedang membicarakan situasi yang terjadi. Mereka semua dalam keadaan yang sangat buruk. Musthafa menjumpai dan berusaha memotivasi mereka. Ia sempat berkata, "Apa pentingnya jalur kereta api? Apa pentingnya kota Eskisehir atau kota-kota lainnya? Tidak ada! Angkatan bersenjata adalah segalanya dan militer kita tetap kuat. Dalam empat minggu kita akan dapat menaklukkan musuh kita."

Ketika para panglima mendengarkan apa yang dia sampaikan, mereka memandangi Musthafa dengan penuh kebingungan, karena kata-katanya benar-benar tidak masuk akal.

Namun demikian, perang terus berlanjut dan pasukan Yunani melanjutkan gerak maju mereka. Pasukan Jenderal Papolas bergabung di sebelah barat Sakarya. Tentara Turki dipaksa untuk menyerahkan Kara. Sayap kanan pasukan Turki berhasil meloloskan diri dengan penuh kesulitan. Tidak lama kemudian, sayap kiri pasukan juga dipaksa untuk meninggalkan satu demi satu wilayah mereka. Markas Musthafa Kemal pada waktu itu terdapat di Desa al-Ajwasy. Dia mengeluarkan setiap perintah dari ruangan yang tidak pernah ia tinggalkan, sedangkan Ismat Pasha menjadi panglima angkatan bersenjata. Pasukan Turki kembali mengalami kekalahan. Panglima telah kehabisan akal dan tidak tahu apakah harus menarik mundur pasukan atau tetap bertahan. Musthafa Kemal menyadari bahwa apabila pasukan tetap bertahan,

malapetaka dapat terjadi, namun bisa juga tidak terjadi. Akan tetapi, jika pasukannya ditarik mundur, kota tersebut pasti jatuh ke tangan musuh. Jadi, dia memutuskan untuk tidak menarik mundur pasukannya. Situasi menjadi sangat kritis.

Yunani Menarik Mundur Pasukan atas Tekanan Sekutu

Pada tanggal 7 September 1922 pukul 02.00 dinihari, datang suatu informasi yang mengatakan bahwa tentara Yunani harus membatalkan serangannya dan mulai mengundurkan diri. Pada waktu yang bersamaan, pasukan Turki melancarkan serangan balik kepada tentara Yunani yang sedang mengundurkan diri. Yunani menarik mundur pasukannya meninggalkan Sakarya dan kembali ke posisi sebelumnya, yaitu di dekat jalur kereta api Anatolia. Di sepanjang perjalanan, mereka membakar desa-desa, menghancurkan sumber-sumber air dengan dinamit, merampas ternak, dan membunuh siapa saja yang mereka temui. Mereka meninggalkan kerusakan hingga ratusan mil dan akhirnya mundur dari Izmir.

Pada tanggal 9 September, pasukan Turki kembali menguasai Izmir tanpa menembakkan satu butir peluru pun. Mereka ganti membakar separuh kota untuk menghilangkan jejak pendudukan Yunani. Inggris, Prancis, dan Italia menyerukan gencatan senjata yang diadakan pada tanggal 11 September 1922. Selanjutnya, Yunani melepaskan kekuasaannya atas wilayah Trakya sampai ke Marj. Perang antara Yunani dan Turki pun berakhir.

Demikianlah ringkasan peristiwa seputar peperangan antara Musthafa Kemal dan Yunani. Kejadian di atas adalah peristiwa yang sesungguhnya terjadi, bukan propaganda Barat yang menggambarkan situasi waktu itu. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penarikan mundur tentara Yunani dari wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka duduki bukan diakibatkan kekalahan mereka dalam peperangannya melawan Musthafa Kemal. Bahkan sebaliknya, mereka mulai menarik mundur pasukannya justru pada saat mereka dalam keadaan unggul. Sementara itu, pasukan Turki nyaris dapat ditaklukkan; semangat mereka telah habis dan rasa putus asa melanda mereka.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, jelas bahwa penarikan mundur pasukan Yunani mengindikasikan adanya tekanan internasional kepada Yunani hingga memaksa mereka untuk mundur. Tidak diragukan lagi bahwa tekanan itu berasal dari Sekutu. Merekalah—Inggris, Prancis, dan Italia—yang menyerukan gencatan senjata segera setelah Yunani menarik mundur pasukannya. Dengan demikian, gencatan senjata mulai diberlakukan secara efektif.

Inggris Mempromosikan Musthafa Kemal Secara Besar-besaran

Inggris memanfaatkan pertempuran-pertempuran antara Turki dan Yunani sebagai suatu cara yang dapat digunakan Musthafa Kemal untuk menghapuskan Khilafah. Inggris secara khusus mengabarkan dan menyebarluaskan berita pertempuran tersebut ke seluruh Dunia Islam. Inggris menyampaikan berita tentang Musthafa Kemal secara besar-besaran ke dalam dan ke luar wilayah Turki sehingga ia dikenal sebagai pemenang, yang memukul mundur pasukan Yunani dan melawan semua negara-negara Sekutu, serta berhasil mengusir mereka. Ia bahkan disebut-sebut sebagai “Sang Penakluk”. Pemberitaan ini memungkinkan Musthafa menempatkan dirinya semakin kokoh di dalam negeri dan memberi pukulan mematikan kepada kaum Muslim dan hukum-hukum Islam. Hal ini ditunjukkan dengan hapusnya Khilafah dan kekuasaan Islam dari muka bumi beberapa waktu kemudian.

Padahal isu tentang pengusiran tentara Yunani dari Trakya oleh Musthafa Kemal jelas-jelas merupakan sandiwara belaka. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa begitu pasukan Yunani meninggalkan Asia Kecil, pasukan Musthafa Kemal mulai bergerak ke barat untuk ‘merebut’ kembali Trakya dari pasukan Yunani.

Sementara itu, ketika Prancis, Italia, dan Inggris menyatakan kenetralan mereka pada tanggal 15 Mei 1921. Mereka membuat suatu zona netral, yang terbentang di sepanjang pantai Selat Bosphorus dan Laut Dardanella. Mereka melarang kedua pihak yang sedang berperang melalui zona netral ini. Pasukan Yunani pernah berusaha melewati zona melalui zona netral ini. Pasukan Yunani pernah berusaha melewati zona melalui zona netral ini. Pasukan Yunani pernah berusaha melewati zona melalui zona netral ini. Ketika Musthafa Kemal berusaha melalui menghalangi upaya tersebut.

zona ini untuk mengejar tentara Yunani, maka Harrington pun mencoba menghalanginya. Namun, Musthafa Kemal mengabaikan larangan ini, dan pasukannya berupaya menembus zona tersebut begitu saja. Pasukan Turki berkumpul di sepanjang pantai dan kemudian berhenti di dekat Dardanella.

Negara-negara sekutu Inggris, Prancis dan Italia menemukan keanehan ini. Mereka mengirimkan peringatan kepada pasukan Turki dan menegaskan kembali larangan Sekutu untuk melewati zona netral. Namun, Musthafa Kemal sama sekali mengabaikan peringatan ini. Hal ini mendorong Inggris untuk menempatkan pasukannya untuk bersiaga serta memerintahkan mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Inggris juga meminta Prancis dan Italia agar menyiagakan pasukannya, tetapi mereka menolak. Kemudian pasukan Prancis menarik pasukannya dari zona netral Canak Kale dan dari garis pantai Asia. Italia mengikuti langkah-langkah Prancis sehingga tinggal Inggris sendirian. Selanjutnya, Harrington bersiap menghadapi pertempuran dengan menempatkan pasukannya di Istanbul dan mengirimkan beberapa peleton untuk melindungi Canak Kale dan garis Pantai Asia.

Persoalannya sekarang bukan lagi antara Turki dan Sekutu, namun antara Turki dan Inggris. Pasukan Turki berhadapan dengan tentara Inggris. Pasukan Inggris dapat saja menghadapi pasukan Turki dan mencegah mereka mengejar pasukan Yunani. Apabila mereka sungguh-sungguh berniat melawan pasukan Turki, mereka pasti akan dapat menghancurkannya dengan pasukan darat mereka. Jika tidak, mereka akan dapat menggunakan pasukan angkatan laut dan pesawat-pesawat tempur. Sementara itu, Musthafa Kemal pada waktu itu tidak mempunyai kapal perang maupun pesawat tempur.

Beberapa penasihat melarang Musthafa Kemal memaksakan suatu pertempuran melawan tentara Inggris yang pasti berujung pada kekalahan. Namun, Musthafa berkeras untuk terus menerobos zona netral hingga dapat mengejar pasukan Yunani. Oleh sebab itu, pasukan Turki terus bergerak maju, sementara tentara Inggris berupaya menahan gerak maju mereka. Namun demikian, tidak terjadi pertempuran di antara kedua belah pihak tersebut. Tentara Inggris kelihatan bingung dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Komando yang sampai

kepada mereka tidak jelas. Sebab, mereka diperintahkan menahan pasukan Turki agar tidak melintasi zona netral, tetapi pada saat yang sama mereka dilarang menembak dan menggunakan kekerasan.

Pada saat itu, Prancis mengirimkan seorang utusannya bernama Franklin Bouillon untuk berunding dengan Musthafa Kemal. Utusan Prancis tersebut menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan kepada Sekutu agar mereka dapat mengupayakan penarikan mundur pasukan Yunani dari Triss dan mengembalikan Turki Eropa kepada bangsa Turki.

Atas berita tersebut, Jenderal Harrington meminta waktu kepada Musthafa untuk berkonsultasi dengan pemerintah Inggris. Sepuluh hari kemudian, datanglah jawaban dari pemerintah Inggris yang memberikan persetujuan terhadap penarikan mundur tentara Yunani, namun menolak evakuasi pasukan Eropa lainnya, sekalipun sesungguhnya tidak ada lagi pasukan Eropa yang tinggal di Turki selain pasukan Inggris saja.

Musthafa Kemal setuju dan memerintahkan pasukannya untuk menghentikan gerak majunya. Dia mengirimkan Ismat Pasha menemui Harrington di desa Mudanya untuk menyelesaikan perundingan. Sekutu juga menyetujui penarikan mundur tentara Yunani dari Triss. Selanjutnya, tentara Yunani ditarik mundur dan pemerintahan Ankara mengambil-alih kendali pemerintahan. Dengan demikian, tidak ada lagi pasukan asing yang tinggal di Turki selain dari bala tentara Kerajaan Inggris.

Kejadian di atas juga dianggap sebagai 'kemenangan' Musthafa Kemal atas Sekutu karena berhasil mengusir mereka dari Istanbul dan kawasan Selat. Musthafa mendapatkan pemberitaan yang luas, persis seperti ketika dia mendapatkan publikasi yang luas dari pertempuran pertempurannya dengan pasukan Yunani. Namun, jika kejadian itu dianalisis secara rasional, akan tampak jelas bahwa peristiwa-peristiwa tersebut hanya sandiwara belaka, yang diatur sebelumnya bersama Inggris dengan maksud untuk menyingkirkan sekutu-sekutu Inggris. Dengan begitu, Inggris menjadi satu-satunya kekuatan Barat yang berkuasa di Turki.

Para Politisi dan Para Perwira Mengingatkan Musthafa Kemal untuk Tidak Menghapus Khilafah

Sampai saat itu, tahap aksi-aksi domestik telah berakhir. Tinggal masalah perundingan damai yang masih menunggu penyelesaian. Sementara itu para politisi dan perwira mencium gelagat bahwa Musthafa Kemal bermaksud untuk menghapuskan Daulah Khilafah Islamiyah. Mayoritas anggota Majelis Nasional menentang pendapat Musthafa mengenai masalah yang rawan ini. Mereka telah menyatakan sikap kepada Musthafa bahwa mereka siap untuk berhadapan dengannya. Sebagian besar kalangan militer juga merasakan niat buruk ini.

Di antara mereka adalah Jenderal Katsim Qura Bakir Pasha, salah seorang pendukung setia Sultan. Ia mengingatkan Musthafa Kemal dalam suatu pidato. Ia berkata, "Sesungguhnya konstitusi yang baru tidak dapat dipandang sah sebagai undang-undang yang legal selama belum dimusyawarahkan bersama Negara dan belum meminta pendapat negara terhadap hal-hal yang rawan tersebut. Hanya umat yang dapat memutuskan bentuk pemerintahan yang dikehendaknya."

Kemudian ia menutup pidatonya dengan ucapan bernada ancaman, "Saya bersumpah akan menghalangi setiap upaya yang dilakukan untuk mengubah bentuk negara dari Kesultanan menjadi sebuah republik, semahal apa pun pengorbanannya."

Katsim Qura Bakir adalah pribadi yang dihormati di kalangan militer. Masyarakat juga menghargai alasan dan pandangannya, serta memberikan kepercayaan kepadanya. Ia mempunyai kemampuan membangkitkan perlawanan rakyat dan militer terhadap Musthafa Kemal. Karena itu, Musthafa Kemal yang menyadari situasi tersebut segera berupaya menenangkannya. Ia mengirimkan surat kepada Katsim Qura Bakir; ia menyatakan, "Konstitusi yang disusun oleh Majelis Nasional belumlah final. Konstitusi itu hanya berisi sejumlah prinsip umum yang disusun sebagai petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang hendak memimpin negara berdasarkan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari kekacauan. Tidak ada undang-undang yang mengurangi kesucian Kesultanan dan kesucian Khilafah atau yang mendorong ke arah pengambilan sistem pemerintahan republik. Orang-

orang yang membayangkan bahwa kami berniat menghancurkan Kesultanan dan mengganti hukum-hukum Sultan dengan hukum-hukum republik sesungguhnya hidup di planet lain, yaitu planet fiksi dan khayalan."

Surat ini ternyata memberikan pengaruh terhadap Katsim Qura Bakir dan orang-orang lain sehingga badai itu pun reda. Musthafa Kemal menyadari bahwa dia tidak akan mampu menegakkan suatu negara republik jika dia tidak mengandalkan suatu kekuatan yang besar, yang memungkinkannya mengatasi lawan-lawannya. Untuk itu, dia menyiapkan kekuatan yang dibutuhkannya dengan segala upaya. Dia sangat tertolong dengan publisitas yang disebarluaskan oleh Inggris ke seluruh Turki dan Dunia Islam. Oleh karena itu, ketika dia merasa telah memiliki kekuatan yang diperlukan dan ketika dia dapat mengandalkan dukungan kekuatan yang besar dari kalangan militer, dia mulai melaksanakan upaya untuk meraih tujuan yang selama ini dia sembunyikan. Dia mulai berpikir untuk menghapuskan Khilafah, sementara perundingan damai sedang dilangsungkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. []

PEMISAHAN KEKUASAAN DARI KHILAFAH

Inggris tidak akan mengadakan perundingan damai sampai final sebelum mereka dapat menyelesaikan seluruh manuver politik mereka dan meraih hasil yang mereka harapkan. Dari tinjauan terhadap semua aksi yang dilakukan di Turki, sejak dari kesepakatan gencatan senjata di Mondros sampai pada Perundingan Lausanne yang pertama, tampak jelas bahwa Inggris memainkan peran yang paling licik dan kotor untuk menghancurkan Khilafah.

Jenderal Inggris Harrington adalah Komandan Pasukan Sekutu yang menguasai wilayah Turki dan memegang sepenuhnya kendali pemerintahan di Istanbul dan seluruh wilayah Turki. Di tangannya, Turki dipisahkan dari wilayah Khilafah Islam lainnya. Dengan demikian, peluang untuk merealisasikan tujuan yang mereka sembunyikan semakin besar. Aktivitas mereka difokuskan untuk menghancurkan Khilafah dan menyingkirkan sekutu-sekutunya—Prancis, Italia, dan Yunani—dari wilayah Turki. Mereka pun mulai melakukan berbagai manuver ketika menyadari bahwa kedua rencana itu—menghancurkan Khilafah dan menyingkirkan sekutu-sekutunya—tidak dapat berlangsung dengan mudah.

Oleh karena itu, Inggris melakukan segala manuver yang licik dan jahat. Proses untuk menyingkirkan negara-negara sekutunya dilakukan oleh pemerintah Inggris melalui berbagai cara diplomatik dan politik, manuver internasional maupun militer, serta dengan cara

memprovokasi perang saudara, semua itu dilakukan sebagai cara untuk menghapuskan Khilafah. Sementara itu, proses penghancuran Khilafah dilakukan pemerintah Inggris melalui berbagai aktivitas langsung di wilayah Turki. Dua orang jenderal Inggris, Harrington dan Wilson, adalah operatornya. Selain itu, juga dilakukan berbagai aksi politik dan manuver internasional. Musthafa Kemal Pasha adalah orang yang membantu mereka dalam permainan politik yang mengerikan ini. Tanpa dia, persekongkolan jahat ini akan berakhir dengan kegagalan.

Selain ketiga orang tersebut, ada pula beberapa orang Inggris yang kurang dikenal, yang melakukan sejumlah aksi langsung di dalam wilayah Turki. Di antara mereka adalah Kapten H.S. Armstrong, seorang perwira rendah yang kurang dikenal, yang melakukan sejumlah aksi pada waktu itu. Sebelum Perang Dunia I, dia merupakan atase militer Inggris di Istanbul. Pada saat perang pecah, dia pernah ditawan bersama-sama dengan seluruh tentara Divisi 6. Dalam tawanan, dia pernah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Anwar Pasha. Permintaan ini sangat mengherankan mengingat pada saat itu Anwar Pasha adalah Menteri Perang dan seluruh negara berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, merupakan hal yang tidak wajar jika seorang tawanan Inggris meminta bertemu dengannya. Namun demikian, Anwar berkenan menerimanya, sehingga sempat terjadi sebuah pembicaraan yang cukup panjang. Ketika pembicaraan berakhir, Anwar memerintahkan supaya ia dimasukkan ke dalam sel tersendiri sebagai suatu hukuman. Tidak pernah diketahui apa yang menyebabkan Anwar marah dengan tawanan tersebut. Namun, disebutkan bahwa orang tersebut bermaksud memulai perang urat syaraf melawan Anwar dan bahwa dia melecehkan Anwar atau negara hingga mengakibatkan hukuman tersebut. Namun demikian, tampaknya tawanan tersebut menjalin hubungan dengan beberapa perwira militer, karena sebelum perang berakhir ia dapat meloloskan diri dari penjara dan kembali ke pasukan Inggris. Tidak diketahui siapa yang membantu dia meloloskan diri dari penjara. Tidak lama setelah Perang berakhir, pemerintah Inggris mengirim dia kembali ke Istanbul dan pemerintah pendudukan Inggris menyerahkan sejumlah tugas resmi kepadanya. Dia tinggal di Istanbul selama beberapa tahun. Selama

waktu itu, dia menjalin kontak langsung dengan orang-orang Turki, khususnya dengan Musthafa Kemal. Dia menyaksikan seluruh aktivitas yang dilakukan untuk menyingkirkan Khilafah. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa dia adalah salah seorang yang berkolusi dengan Musthafa Kemal untuk menghancurkan Khilafah.

Namun, peran terpenting adalah yang dilakukan oleh Jenderal Harrington, karena ia adalah Komandan Pasukan Sekutu yang mengendalikan sepenuhnya segala urusan negara. Tampaknya, dialah penghubung utama Musthafa Kemal dalam memainkan perannya. Pemerintah Inggris menganggap Harrington sebagai penguasa tertinggi di Turki, terbukti dengan adanya sejumlah pernyataan resmi yang menunjukkan perannya di Turki.

Pada tanggal 25 Februari 1924, Letnan Kolonel Dalemass menyatakan di depan Majelis Rendah Inggris, "Nama baik Inggris di belahan dunia timur telah berantakan." Dia menambahkan, "Inggris tidak boleh campur tangan dalam masalah Armenia." Dia kemudian menunjuk pada surat-surat yang diterima dari orang-orang Armenia yang menyatakan ingin hidup damai dengan bangsa Turki.

Atas pernyataan ini, Charles Bate menjawab, "Perasaan bangsa Turki terhadap kita sangat bersahabat dan langkah-langkah kita di sana berhasil dengan baik."

Dia mendasarkan jawabannya pada informasi yang sampai kepadanya dari Sir Charles Harrington, tetapi dia tidak menyingkap sifat informasi tersebut.

Pada tanggal 24 Maret 1940, dua hari setelah kematian Harrington, surat kabar *The Times* menulis suatu artikel sebagai berikut, "Segera setelah kekalahan Yunani dari bangsa Turki pada tahun 1921, Komandan Pasukan Sekutu Sir Harrington mendapatkan kekuasaan yang besar untuk bekerjasama dengan Musthafa Kemal."

Namun sifat kerjasama yang dimaksudkan dalam tulisan itu tidak dijelaskan. *Times* menambahkan, "Keasyikan Harrington dalam permainan politik menyembunyikan keteguhan hati dan tekadnya untuk meraih ambisi-ambisinya, dan dia pantas untuk itu."

Dengan kekuasaan yang besar untuk bekerjasama dengan Musthafa Kemal, tahap akhir penyelesaian masalah untuk memberikan

pukulan mematikan terhadap Khilafah telah dimulai. Setelah kesepakatan gencatan senjata pada bulan Juli 1922, penarikan mundur pasukan Yunani, dan setelah penarikan mundur pasukan Prancis dan Italia, maka wilayah Turki telah bebas dari pendudukan pasukan asing, kecuali dari pasukan Inggris. Dengan demikian, Harrington menjadi satu-satunya operator Barat di Turki, sementara pasukan Musthafa Kemal beserta pengaruh dan popularitasnya di seluruh negeri mencapai masa kejayaannya. Adapun Pemerintahan Istanbul hanya merupakan pemerintahan formal yang tidak mempunyai wewenang dalam masalah apapun, karena seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintahan Ankara, baik dalam perkara-perkara domestik seperti pelaksanaan undang-undang, kekuasaan atas militer, dan pemeliharaan semua urusan negara, maupun dalam masalah-masalah luar negeri seperti hubungan dengan negara-negara lain dan penandatanganan berbagai perjanjian.

Sementara itu, Sultan di dalam Istananya mengalami penderitaan yang berat. Tidak seorang pun yang mau memperhatikannya. Inggris pernah menunjukkan simpati dan rasa kasihan kepadanya. Mereka kadang-kadang memberi Sultan bantuan dana pada saat perbendaharaanya kosong dan kehabisan dana. Jadi, Sultan menerima dana dari mereka sebagai hadiah atas kemurahan hati mereka.

Di tengah-tengah situasi tersebut, Sekutu mengirimkan undangan kepada pemerintahan Ankara dan juga kepada pemerintahan Sultan di Istanbul untuk menghadiri Perundingan Lausanne dalam rangka menyepakati perjanjian damai. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 1922. Undangan kepada kedua pemerintahan tersebut ditanggapi dengan kemarahan Majelis Nasional. Lalu dimulailah upaya untuk menghapuskan Khilafah; demikian pula perjuangan untuk mempertahankannya. Majelis Nasional—alias Majelis Musthafa Kemal—tidak puas dengan tindakan Sekutu yang mengundang dua pemerintahan Turki dalam perundingan damai. Karena itu, mereka berniat untuk mengakhiri situasi ini dan menghilangkan dualisme kepemimpinan di negara itu. Beberapa anggota Majelis Nasional menganjurkan pengunduran diri pemerintahan Istanbul dan

pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin Musthafa Kemal seumur hidup.

Sementara para anggota Majelis Nasional memperdebatkan masalah ini, Musthafa Kemal berada di Izmir dengan tetap mengamati dengan cermat perdebatan itu. Sudah dua kali Majelis Nasional menghubungi dan mengajaknya membahas masalah perundingan damai yang akan datang. Namun, dia meminta maaf tidak dapat memenuhi ajakan itu, dengan alasan tugas kemiliterannya memaksanya untuk tetap tinggal di Izmir. Atas jawaban itu, Rauf dan sejumlah politisi menemui Musthafa Kemal di Izmir untuk meminta pendapatnya tentang bagaimana seharusnya pemerintahan baru di Turki, sebab tidak dapat dibayangkan bila terus menerus terjadi dualisme pemerintahan; yang satu merupakan pemerintahan sementara yang berkuasa dengan Ankara sebagai pusatnya dan satunya lagi adalah pemerintahan resmi yang beribukota di Istanbul dan dipimpin oleh Sultan beserta kabinet para menteri. Mereka menyarankan Musthafa agar menggabungkan kedua pemerintahan itu menjadi satu, dengan Khalifah sebagai pemimpin negara dan Musthafa sebagai perdana menteri. Namun demikian, dia tidak menanggapi usulan tersebut sehingga para utusan mencurigai niatnya. Rauf terus menekannya dengan sejumlah pertanyaan. Akhirnya, Musthafa Kemal berjanji akan menemuinya di Ankara.

Selanjutnya, Majelis Nasional menggelar sidang dan para utusan berdebat mengenai permasalahan itu. Para pendukung Musthafa Kemal berkata, "Apa yang dilakukan pemerintahan Ibukota untuk menyelamatkan Turki? Turki hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintahan di Ankara. Mayoritas para utusan menyarankan agar pemerintahan Istanbul mengundurkan diri dan agar Khalifah menjadi Sultan berdasarkan konstitusi."

Di tengah-tengah perdebatan yang panas dan suasana muram yang melanda Majelis, Musthafa Kemal maju ke podium dan meminta perhatian para utusan. Selanjutnya, dia mengajukan usulan pemisahan Kesultanan dari Khilafah, yaitu berarti penghapusan Kesultanan dan penyingkiran Wahiduddin. Sampai di sini, bahaya yang menghadang Khilafah semakin menakutkan dan semakin menimbulkan kegemparan

di kalangan Majelis. Oleh karena itu, Musthafa Kemal dengan didukung oleh delapan orang pengikutnya menuntut pemungutan suara langsung, tetapi Majelis memutuskan untuk menyerahkan permasalahan itu kepada suatu komite yang diberi tugas untuk mempelajarinya.

Pada hari berikutnya, komite tersebut dikumpulkan. Komite itu tersusun dari sekelompok ahli hukum dan ulama. Mereka membutuhkan waktu lama untuk mempelajari usulan mengenai pemisahan Kesultanan dari Khilafah. Para anggota komite merujuk pada dalil-dalil yang diambil dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selain itu, mereka juga menggunakan beratus-ratus contoh dari sejarah para khalifah di Bagdad dan di Kairo. Pada akhirnya, seluruh anggota komite sepakat menolak usulan tersebut.

Musthafa Kemal yang hadir pada saat itu, ketika mendengar permufakatan itu dan menyadari bahwa komite dengan suara bulat menyatakan menolak usulan tersebut, dengan marah langsung meloncat ke atas kursi, menginterupsi perdebatan para hadirin, dan berteriak, "Tuan-tuan, Sultan Utsmaniyah telah merampas kekuasaan dari rakyat dengan cara kekerasan. Dengan kekerasan pula rakyat akan merebut kembali kekuasaan itu darinya. Kesultanan harus dipisahkan dari Khilafah dan harus dihapuskan. Hal ini akan terjadi, baik dengan atau tanpa persetujuan Anda sekalian. Yang masuk akal adalah bahwa sebagian kepala Anda semua akan menggelinding dalam proses tersebut."

Mendengar ancaman itu, para anggota komite dilanda ketakutan hingga lutut mereka gemetar. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menyerahkan usulan tersebut kepada keputusan Majelis Nasional.

Majelis Nasional kemudian bersidang untuk memperdebatkan usulan tersebut. Mayoritas anggota Majelis menyatakan penolakannya terhadap usulan itu dan menyatakan kemarahan mereka terhadap Musthafa Kemal sendiri. Musthafa merasakan situasi ini. Ketika prosedur untuk melakukan pemungutan suara secara terbuka sedang disiapkan, dia menyadari bahwa usulan itu pasti ditolak dan mayoritas anggota Majelis menentangnya. Oleh karena itu, dia memerintahkan para pendukung setianya berdiri mengelilinginya untuk melindungi dirinya. Dia kemudian menuntut

bahwa pemungutan suara harus dilakukan secara langsung. Namun, beberapa utusan menolak dan menyarankan pemungutan suara dengan cara memanggil satu demi satu nama anggota Majelis. Akan tetapi, Musthafa Kemal menolak cara ini. Para pendukung Musthafa telah mempersenjatai diri dan telah siap mencabut pistol mereka ketika Musthafa berteriak, "Saya yakin Majelis akan menerima usulan ini secara mufakat. Untuk itu, pemungutan suara cukup dilakukan dengan mengangkat tangan."

Ketika pemungutan suara mengenai usulan tersebut dilakukan, hanya sedikit yang mengangkat tangan tanda setuju. Namun, ketua Majelis mengumumkan hasil pemungutan suara sebagai berikut, "Majelis telah menyetujui usulan secara mufakat."

Mendengar pengumuman ini, sejumlah utusan meloncat ke atas kursi menyatakan protes dan berteriak, "Ini tidak benar. Kami tidak setuju."

Para pendukung Musthafa ganti berteriak, "Duduk! Diam!"

Kecacauan pun pecah dan kegemparan semakin meningkat sehingga sidang berakhir dengan kerusuhan.

Pada awal November 1922, Musthafa Kemal meninggalkan gedung Majelis Nasional dengan perlindungan dari para pendukungnya. Peristiwa ini terjadi 14 hari setelah undangan untuk menghadiri Perundingan Lausanne diterima.

Lima hari setelah keputusan itu diambil, Rif'at Pasha melakukan kudeta militer mendadak di Istanbul untuk merebut kendali kekuasaan di Ibukota dengan bantuan dari militer dan kekuatan bersenjata lainnya. Kudeta ini terjadi tepat di depan mata Harrington. Dengan demikian, Musthafa menghapuskan pemerintahan Sultan dengan cara kekerasan. Sultan pura-pura tidak mengetahui situasi ini selama beberapa hari. Kemudian dia menyampaikan pesan kepada Harrington melalui seorang ahli musik Istana Kesultanan. Pesan itu bersifat lisan. Utusan itu menyampaikan kepada Harrington sebagai berikut, "Sultan meminta perlindungan dari Komandan Inggris dan pemerintah Inggris, karena Yang Mulia merasa yakin hidupnya dalam bahaya."

Dua hari kemudian, pada tanggal 17 November 1922, sebuah ambulan Inggris memasuki Istana Sultan. Sultan Wahiduddin terlihat

memasuki ambulan diikuti oleh anak laki-lakinya, seorang pembantu yang membawa sebuah kopor kecil, dan seorang penjaga yang membawa barang-barangnya. Mobil itu membawanya ke sebuah kapal api, yang kemudian membawanya ke sebuah kapal perang Inggris yang menunggu di pelabuhan. Kapal perang itu membawa Wahiduddin ke Malta.

Segera setelah kepergian Wahiduddin, sepupunya Amir Abdul Majid bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah kaum Muslim setelah mendapat persetujuan Majelis Nasional. Setelah itu, banyak pendukung Khalifah yang menemuinya untuk menyatakan dukungan kepadanya. Ia juga didatangi oleh Rauf Beik, Doktor Adnan Beik, Ali Fuad, dan Katsim Qura Bakir. Mereka semua secara terbuka menyatakan loyalitas (baiat) kepadanya. Semua ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetap setia kepada Khalifah serta untuk menunjukkan keberadaan Khalifah. Namun demikian, Musthafa Kemal telah merasa puas dengan pemisahan Kesultanan dari Khilafah dan dengan keberhasilannya mengambil-alih kendali kekuasaan serta melepaskan segala wewenang Khalifah. Kemudian dia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi perundingan damai.

Inggris Menetapkan Syarat Penghapusan Khilafah dan Sekularisasi Negara

Pada tanggal 20 November 1922, Perjanjian Lausanne dibuka. Perundingan tersebut dihadiri delegasi pemerintahan Ankara atas nama Daulah Utsmaniyah dan bertindak sebagai wakil Khilafah yang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia. Perundingan tersebut juga dihadiri oleh Lord Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris, sebagai pimpinan delegasi, karena pemerintahan Lloyd George telah mengundurkan diri pada tanggal 19 Oktober 1922. Selama perundingan, pimpinan delegasi Inggris, Lord Curzon, menetapkan empat syarat sebelum memberi pengakuan atas kemerdekaan Turki. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Penghapusan Khilafah secara total.
2. Pengusiran Khalifah sampai keluar batas-batas negara.

3. Penyitaan kekayaan Khalifah.
4. Pernyataan sekularisasi Negara.

Keberhasilan perundingan terletak pada pemenuhan syarat-syarat tersebut. Namun, perundingan itu berakhir pada tanggal 4 Februari 1923 tanpa menghasilkan keputusan apapun dan dinyatakan gagal.

Ismat Pasha kembali ke Turki dari perundingan dan Musthafa segera menemuinya di Eskisehir untuk mendapatkan informasi tentang segala hal yang telah mengemuka dalam perundingan. Kemudian mereka berdua kembali ke Ankara. Pada waktu kedatangan mereka di stasiun Ankara, keduanya terkejut dengan kelalaian Perdana Menteri Rauf Beik dan para utusan wilayah dalam menyambut kedatangan mereka. Musthafa Kemal marah karena ketidakmunculan mereka dan segera memanggil Rauf untuk meminta penjelasan atas kelakuan tersebut. Rauf menjawab dan menyatakan ketidaksetujuannya atas pengiriman Ismat pada Perundingan Lausanne tanpa bermusyawarah dengan Pemerintah dan keberatan dengan tindakan Musthafa Kemal yang segera menemui Ismat di Eskisehir juga tanpa berkonsultasi dengan Pemerintah. Rauf menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang inkonstitusional. Rauf melanjutkan protesnya dengan menyampaikan pengunduran dirinya dari kursi Perdana Menteri.

Akibatnya, Majelis Nasional bersidang untuk membahas perundingan damai tersebut. Majelis berpihak kepada Rauf dan bersama-sama memberikan dukungan kepadanya serta mayoritas anggota Majelis menentang Musthafa Kemal. Perdebatan memanasi hingga berlangsung sampai sembilan hari. Selama waktu itu, para utusan mengutuk Musthafa Kemal yang dulu pernah membuat kesepakatan dengan musuh (Yunani) di Mudanya, dengan menggambarkan kesepakatan itu sebagai tipudaya. Mereka menyatakan bahwa seharusnya Musthafa meneruskan pengejaran terhadap tentara Yunani itu sampai ke Istanbul, bahkan jika perlu sampai ke Mhena.

Para utusan kemudian melancarkan hujatan yang kasar kepada Ismat Pasha, dengan menuduhnya melanggar tatacara perundingan dan tidak mampu bernegosiasi dengan Lord Curzon. Mereka juga

mengkritik pengirimannya yang tidak melalui persetujuan mereka. Mereka memutuskan melakukan pemungutan suara untuk memecatnya dan mengangkat penggantinya untuk meneruskan perundingan lanjutan di Lausanne. Menyadari situasi ini, Musthafa Kemal marah dan mengeluarkan ancaman serta menghasut para utusan untuk menentang Rauf Beik hingga Rauf dapat menggagalkan pemecatan Ismat. Musthafa berkeras mempertahankan Ismat karena ia merupakan utusan yang sangat dipercaya dalam berhubungan dengan Inggris dan orang yang sangat patuh kepadanya. Mengirim utusan lain dapat menghalangi seluruh rencana Musthafa Kemal sehingga dapat memberikan hasil akhir yang berbeda. Oleh sebab itu, Musthafa berjuang mati-matian sampai akhirnya ia berhasil menggagalkan keputusan penggantian Ismat.

Kemudian, dia menyiapkan rencana untuk melawan Majelis Nasional sehingga persetujuan antara keduanya semakin meningkat sampai sebagian besar koleganya yang dulu berpihak kepadanya pada masa-masa sulit selama bertahun-tahun mulai bergabung melawannya, dengan dipimpin oleh Rauf Beik. Di antara penentang Musthafa Kemal adalah Rahmi, Adnan, Katsim Qura Bakir, Rif'at, Ali Fuad, Nuruddin, dan sebagainya. Hanya Ismat, Fauzi, dan beberapa sahabatnya yang tetap berpihak kepadanya. Para utusan satu demi satu bergabung dengan Rauf dan mulai mengkritisi Musthafa Kemal secara terbuka. Mayoritas anggota Majelis Nasional bergabung menentanginya. Musthafa mulai menyadari bahwa kekalahannya dapat dipastikan. []

PUKULAN MEMATIKAN

Ketika Musthafa Kemal merasa bahwa seluruh lingkungan menentanginya dan mayoritas anggota Majelis Nasional juga memusuhinya. Dia segera memikirkan jalan keluar dari situasi yang kritis ini. Situasi saat itu dirasakannya tidak menguntungkan untuk memulai kembali perundingan damai di Lausanne, mengingat bahwa para anggota Majelis Nasional pasti tidak akan menyetujui pelaksanaan keempat syarat bagi keberhasilan perundingan sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Curzon. Oleh karena itu, dia merasa perlu melakukan langkah-langkah yang memungkinkan dirinya dapat memenuhi syarat-syarat tersebut. Dia juga harus mendapatkan keputusan dari Majelis Nasional untuk menegaskan pembentukan negara republik, pengangkatan dirinya sebagai presiden negara republik itu, serta keputusan yang menetapkan penghapusan Khilafah. Karena mayoritas anggota Majelis Nasional menentanginya dan mustahil mau menjalankan rencananya atau menyetujui langkah-langkahnya, Musthafa Kemal berniat untuk membubarkan Majelis Nasional dan menyelenggarakan pemilihan anggota Majelis Nasional. Dengan demikian, dia berharap dapat membentuk Majelis Nasional baru yang berisi orang-orangnya, yang akan mendukungnya, melaksanakan cita-citanya, dan menetapkan keputusan-keputusan yang diinginkannya.

Oleh sebab itu, dia berupaya sekuat tenaga membubarkan Majelis Nasional dan menyelenggarakan pemilihan baru, serta berharap dapat menguasai mayoritas Majelis Nasional. Namun demikian, Majelis Nasional baru yang dihasilkan dari pemilu tersebut juga menentang rencananya sebagaimana Majelis Nasional yang lama. Jadi, dia terpaksa menyusun rencana untuk menentang Majelis Nasional dengan tujuan menjerumuskan mereka dalam kebingungan dan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk itu, dia merancang persekongkolan politik untuk menciptakan krisis dan kemudian memanfaatkannya. Dia mengundang para menteri untuk makan malam bersama di rumahnya di Cankaya dan membicarakan situasi politik yang sedang terjadi dalam segala aspek. Pada hari berikutnya, seluruh menteri mengundurkan diri sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada malam itu.

Majelis Nasional menggelar sidang untuk membentuk pemerintahan baru, namun mengalami kegagalan, karena terjadi perdebatan dan percek-cokan yang sengit di antara para anggota. Setiap anggota berkeras memaksakan pendapatnya dan memikirkan kepentingannya sendiri sehingga menghasilkan situasi yang kacau-balau.

Dua hari kemudian, Musthafa Kemal kembali mengadakan jamuan makan malam bersama beberapa teman setianya. Di antaranya Ismat Pasha, Fathi, dan Kemaluddin. Mereka memperbincangkan krisis yang terjadi di dalam Majelis Nasional yang diakibatkan karena ketidakmampuannya membentuk pemerintahan baru. Mereka saling bertukar pikiran mengenai situasi tersebut dan pada akhir pembicaraan Musthafa Kemal menyatakan di hadapan mereka, "Sekaranglah waktunya kita mengakhiri kekacauan ini. Besok kita akan menyatakan berdirinya republik. Inilah penyelesaian bagi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, Anda, Fathi, harus mempersulit segala persoalan di Majelis Nasional sejauh yang Anda mampu, agar Anda dapat menghasut Para anggota untuk saling bertentangan. Kemudian Anda, Kemaluddin, mengajukan usulan agar saya diundang untuk mengambil alih kendali dengan maksud untuk menyelamatkan Majelis Nasional dari krisis."

Pada hari berikutnya, setiap orang menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan malam itu. Majelis Nasional bersidang dan terjadilah perdebatan yang sengit. Para anggota saling bertengkar hingga hampir terjadi perkelahian fisik. Di tengah-tengah kekacauan ini, Kemaluddin mengajukan saran untuk mengundang Musthafa Kemal untuk membentuk pemerintahan. Para anggota menyetujui saran itu dan melupakan segala perselisihan mereka dengan Musthafa.

Pada mulanya, Musthafa menolak permintaan itu. Kemudian, Majelis Nasional mengirimkan pesan kepadanya; mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka dalam menyelesaikan krisis pemerintahan dan kemudian meminta bantuan Musthafa. Selanjutnya, Musthafa menetapkan syarat bahwa Majelis Nasional harus menerima pendapatnya tanpa perdebatan jika mereka menghendaki ia membentuk pemerintahan. Majelis Nasional menyetujui syarat tersebut.

Pada tanggal 29 Oktober 1923, Majelis Nasional mengadakan suatu pertemuan penting. Musthafa Kemal berdiri di atas podium dan menyampaikan pidato. Dia menyatakan pendirian negara Republik Turki. Di antara kutipan isi pidatonya adalah sebagai berikut, "Anda telah menugaskan saya untuk menyelamatkan keadaan di saat yang kritis ini. Namun, krisis ini bukan akibat perbuatan Anda. Sumber dari krisis ini bukanlah suatu perkara yang sederhana, namun karena kesalahan mendasar dalam sistem pemerintahan kita. Majelis Nasional melaksanakan fungsi sebagai lembaga legislatif sekaligus lembaga eksekutif. Setiap anggota Majelis Nasional masih harus ikut campur dalam tiap pengambilan keputusan pemerintahan dan turut mengatur departemen-departemen pemerintahan dan keputusan-keputusan para menteri. Tuan-tuan! Tidak seorang menteri pun yang dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menerima kedudukannya dalam kondisi seperti itu. Anda harus menyadari bahwa pemerintahan yang dibangun dengan landasan seperti itu tidak akan dapat berdiri tegak. Kalaupun tegak, itu suatu pemerintahan yang kacau. Kita harus mengubah keadaan ini. Oleh sebab itu, saya telah memutuskan bahwa Turki harus menjadi sebuah republik dengan seorang presiden terpilih."

Para anggota Majelis Nasional terpaksa mendengar pernyataan yang mengejutkan ini. Mereka tidak mampu berkata apa-apa karena mereka tidak menyangka akan mendengar pernyataan seperti itu. Ketika voting dilakukan, hanya kurang dari 40% anggota majelis yang ambil bagian. Namun demikian, keputusan yang telah disiapkan sebelumnya—yang menetapkan Turki sebagai negara republik—telah disetujui dan Musthafa dipilih sebagai presiden pertama. Kemudian, dia mulai mengupayakan penghapusan Khilafah dan menyatakan sekularisasi negara. Rakyat dapat merasakan langkah-langkah Musthafa dan mulai melancarkan hujatan kepadanya. Seruan yang tersebar luas di seluruh negeri adalah bahwa penguasa baru Ankara adalah kaum kafir. Para mubalig dan khatib mulai menghujat Musthafa Kemal. Berbagai selebaran dan karikatur yang secara kasar menyerangnya beredar luas di masyarakat. Banyak di antara para anggota dan tokoh masyarakat yang meninggalkan Ankara menuju Istanbul untuk bersatu dengan Khalifah Abdul Majid. Masyarakat di seluruh pelosok Turki berubah memusuhinya. Sebagai reaksinya, dia mulai mencoba mencari pendukung yang bisa mengurangi serangan gencar kepadanya.

Di tengah situasi seperti itu, Inggris mulai memberikan senjata untuk melawan orang-orang yang setia kepada Khilafah. Pada puncak unjuk rasa menentang Musthafa Kemal, dua orang pemimpin Muslim India, Agha Khan dan Amir Ali, mengirimkan surat protes atas nama Muslim India, menuntut penghormatan atas martabat Khalifah Utsmaniyah, Khalifah seluruh kaum Muslimin. Agha Khan adalah pemimpin sekte Ismailiyah, yang dikenal masyarakat Turki sebagai seorang sahabat dan agen Inggris. Surat ini dimuat dalam media massa di Istanbul, sebelum akhirnya sampai ke Ankara. Selanjutnya, Musthafa mulai mengorek masa lalu Agha Khan. Dia menemukan fakta bahwa Agha Khan pernah tinggal di Inggris, pernah mengikuti pacuan kuda di Inggris, dan bergaul dengan politisi dan diplomat Inggris. Dia juga mengetahui bahwa Inggris telah meningkatkan statusnya melalui propagandanya selama Perang Dunia sehingga ia dianggap sebagai pemimpin Muslim India, agar ia dapat digunakan untuk mengancam Sultan Turki jika diperlukan. Jadi, Agha Khan adalah boneka Inggris.

Musthafa Kemal menjadi sangat aktif mengungkapkan fakta-fakta tersebut dan mempengaruhi opini publik melawan Khalifah. Dia pernah berkata kepada rakyat, "Ketika Inggris, musuh yang nyata dan jahat, gagal menghancurkan Turki lewat sekutunya, Yunani, mereka terpaksa menggunakan tipudaya kuno. Mereka mendorong agennya, Agha Khan, untuk mendukung Khalifah dan memisahkan Turki menjadi dua kutub."

Selanjutnya, dia memprovokasi anggota Majelis Nasional sehingga mereka mulai melancarkan hujatan yang kasar melawan Khalifah, para ulama, dan para pemimpin oposisi. Mereka juga mengeluarkan sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa segala tindakan menentang negara republik dan segala bentuk kesetiaan kepada Sultan dianggap sebagai pengkhianatan kepada negara dan akan dijatuhi hukuman mati.

Pada saat beberapa anggota Majelis Nasional berupaya menunjukkan jasa-jasa Khalifah dari aspek diplomatik, para pendukung Musthafa Kemal berusaha membungkam suara mereka dengan berteriak, bersorak, dan memprotes pernyataan tersebut. Kemudian Musthafa berdiri dan berkata, "Bukankah Khalifah, Islam dan para ulama yang menyebabkan para petani harus berperang dan kehilangan nyawanya selama lima abad? Sekaranglah waktunya bangsa Turki menyelesaikan urusannya, mengabaikan bangsa India dan Arab, serta berusaha menyelamatkan dirinya dari kesulitan mengatur wilayah-wilayah Islam."

Kemudian dia berupaya menyelidiki angkatan bersenjata dan mencoba menilai seberapa besar dukungan atau penentangan mereka terhadap langkah-langkah penghapusan Khalifah dan pemisahan agama dari urusan-urusan negara. Untuk itu, dia mengikuti acara latihan perang tahunan yang diadakan di dekat Izmir dan meninjau situasi bersama-sama dengan Fauzi dan Ismat selama beberapa hari. Mereka juga memeriksa para perwira rendah dan para prajurit. Dari penilaian itu, dia menemukan fakta adanya penentangan yang kuat dan gagal mendapatkan kesimpulan yang dapat membuatnya tenang.

Kemudian, selama beberapa malam dia merenungkan masalah itu dengan serius. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan cara-

cara teror. Musthafa Kemal memilih salah seorang anggota Majelis Nasional yang menentangnya secara kasar pada suatu persidangan dan menyuruh seseorang untuk membunuhnya pada malam itu juga, saat ia pulang ke rumahnya. Selain itu, ketika seorang anggota Majelis menyampaikan pidato yang berisi dukungan kepada Khalifah, Musthafa mengancam akan menggantungnya apabila ia mengatakan kembali hal yang sama. Kemudian dia memanggil Rauf dari Istanbul dan memaksanya mengucapkan sumpah setia kepadanya dan kepada negara republik di depan Pimpinan Pusat Partai Rakyat. Dia mengancam akan memecatnya dari keanggotaan partai dan dari kepemimpinan partai apabila ia gagal menjalankan sumpahnya. Musthafa juga mengirimkan perintah yang tegas kepada Gubernur Istanbul untuk menghilangkan protokoler yang megah di sekeliling Khalifah pada saat pelaksanaan shalat. Dia juga melecehkan kedudukan Khalifah sampai tahap yang terendah dan memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkannya.

Pada saat suasana teror, yang penuh propaganda dan rumor tersebut, Majelis Nasional mengadakan suatu pertemuan. Majelis menggelar sidang pada tanggal 1 Maret 1924. Pidato pembukaan difokuskan pada perlunya penghapusan Khalifah. Pidato ini disambut dengan serangan kata-kata sengit yang menyatakan penentangannya.

Musthafa Kemal mengemukakan kepada Majelis Nasional suatu keputusan tentang penghapusan Khalifah, pengusiran Khalifah, dan pemisahan agama dari urusan-urusan kenegaraan. Kemudian dia menyatakan di depan para anggota yang marah, "Bagaimanapun kita harus menyelamatkan republik yang berada dalam bahaya dan membangunnya dengan landasan yang kokoh dan ilmiah. Khalifah dan para pewarisnya dari Banu Utsmaniyah harus pergi. Peradilan agama yang bobrok dan hukum-hukumnya harus diganti dengan peradilan dan hukum-hukum modern; sekolah-sekolah agama harus menyerahkan tempatnya kepada sekolah-sekolah negeri sekular."

Terjadilah perdebatan-perdebatan yang panas dan perselisihan yang sengit di antara para anggota Majelis, tetapi tidak menghasilkan apa pun.

Pada hari kedua, Majelis Nasional kembali bersidang untuk meninjau keputusan ini. Persidangan berlangsung sepanjang malam sampai pukul 06.30 pagi, penuh dengan argumentasi yang sengit dan perdebatan yang tak kunjung reda.

Pada pagi hari tanggal 3 Maret 1924, diumumkan bahwa Majelis Nasional telah menyetujui penghapusan Khilafah dan pemisahan agama dari urusan-urusan negara. Pada malamnya, Musthafa Kemal mengirimkan perintah kepada Gubernur Istambul yang menetapkan bahwa Khalifah Abdul Majid harus meninggalkan Turki sebelum fajar hari berikutnya. Pada tengah malam, Gubernur bersama satu pasukan dari kesatuan polisi dan militer mendatangi Istana Khalifah. Khalifah dipaksa masuk ke dalam mobil yang kemudian membawanya melintasi perbatasan menuju Swiss, setelah ia dibekali satu kopor berisi beberapa potong pakaian dan sejumlah uang. Dua hari kemudian, Musthafa mengumpulkan seluruh pangeran dan putri Sultan, kemudian mendeportasinya ke luar negeri. Seluruh peran agama dihapuskan dan wakaf kaum Muslim menjadi milik negara. Sekolah-sekolah agama diubah menjadi sekolah umum di bawah pengawasan kementerian pendidikan.

Dengan demikian, Musthafa Kemal berhasil memenuhi keempat syarat yang dituntut oleh Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris, sehingga seluruh rintangan yang menghambat persidangan dan upaya perundingan damai telah berhasil disingkirkan. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1924, Ismat Pasha, Menteri Luar Negeri Turki merangkap sebagai ketua delegasi, mengirimkan sebuah surat kepada panitia perundingan damai untuk meminta kelanjutan negosiasi. Sekutu pun menyetujuinya. Pada tanggal 23 April 1924, perundingan dimulai dan para peserta perundingan menyepakati syarat-syarat perdamaian. Perjanjian Lausanne ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1924. Negara-negara memberikan pengakuan atas kemerdekaan Turki. Inggris menarik mundur pasukannya dari Istambul dan kawasan Selat. Harrington pun meninggalkan Turki. Salah seorang perwira polisi militer Inggris menyatakan protes kepada Curzon di Gedung Parlemen mengenai pengakuan Inggris atas kemerdekaan Turki. Curzon menjawab, "Yang penting Turki telah dihancurkan dan tidak akan

pernah bangkit lagi, karena kita telah menghancurkan kekuatan spiritual mereka, yaitu Khilafah dan Islam."

Demikianlah bagaimana caranya Khilafah diruntuhkan. Khilafah benar-benar runtuh sehingga ikut runtuh pula Islam dalam kapasitasnya sebagai konstitusi negara, sebagai sumber perundang-undangan umat, serta sebagai pedoman hidup. Semuanya itu adalah perbuatan Inggris melalui kaki tangan dan agen mereka, si pengkhianat Musthafa Kemal Pasha. Oleh sebab itu, ketika orang-orang yang sadar dan ikhlas menyatakan bahwa Inggris adalah pemimpin negara-negara kufur, sesungguhnya memang demikianlah adanya. Sebab, mereka benar-benar pemimpin kekufuran dan musuh yang nyata bagi kaum Muslim. Kaum Muslim wajib menyusui anak-anak mereka dengan susu kebencian terhadap Inggris dan memberikan pembalasan terhadap mereka. Inggris berhasil meruntuhkan Khilafah dan Islam melalui tangannya, Musthafa Kemal, sekalipun terdapat banyak sekali umat Islam di seluruh dunia dan di Turki pada khususnya.

Dengan demikian, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia telah disingkirkan dari muka bumi. Tinggallah hukum-hukum selain dari yang Allah sampaikan. Tinggallah hukum-hukum kufur, hukum-hukum *thâghûl* saja yang menguasai seluruh manusia dan diterapkan di seluruh penjuru dunia. []

BERBAGAI PERSOALAN UTAMA SERTA TINDAKAN ANTARA HIDUP DAN MATI

Dari uraian di atas, mungkin ada pembaca yang bertanya-tanya, "Semudah itukah orang-orang kafir berhasil meruntuhkan Khilafah dan menghapuskan konsep-konsep Islam dari kancah perpolitikan, sementara ada ratusan juta umat Islam. Tidakkah mereka mempertahankan diri mereka atau mempertahankan entitas politik mereka?"

Jawabannya adalah, "Ya!" Memang semudah itulah kaum kafir menghancurkan Khilafah dan menghapuskan Islam dari kancah perpolitikan. Sementara itu, kaum Muslim tidak berupaya keras mempertahankannya. Mereka bahkan tidak berjuang sampai parit pertahanan terakhir, sebagaimana dilakukan oleh pasukan yang kalah perang sebelum meninggalkan medan pertempuran. Peristiwa semacam ini dapat terjadi karena masalah-masalah utama yang menyangkut urusan antara hidup atau mati tidak disadari oleh umat ketika mereka mendapat bahaya besar tersebut. Selanjutnya masalah utama tersebut tidak melingkupi jiwa dan suasana (lingkungan) kaum Muslim. Oleh karena itu, umat mendapatkan pukulan mematikan tanpa berupaya untuk menolaknya sampai pertempuran terakhir sebagaimana lazim dilakukan oleh pasukan yang terkalahkan sebelum meninggalkan medan pertempuran. Karena umat tidak merasa bahwa peristiwa yang terjadi adalah masalah utama, yang menjadikan eksis dan tidaknya umat bergantung kepadanya. Akibatnya, umat tidak berusaha

mencegah malapetaka yang terjadi sebagai suatu masalah yang sangat penting dimana nasib umat bergantung kepadanya. Dari sini umat tidak mengambil tindakan hidup atau mati. Dengan demikian, kaum kafir mudah meruntuhkan Khilafah dan menghapuskan keberadaan sistem Islam.

Adanya naluri untuk mempertahankan diri (*gharīzah al-baqâ'*) menyebabkan setiap umat dan bangsa di atas bumi mempunyai masalah utama. Setiap umat atau bangsa siap menumpahkan darahnya dengan ikhlas dan penuh semangat, tanpa keraguan sedikitpun untuk menghadapi masalah tersebut. Masalah ini merupakan masalah yang berkaitan dengan hidup dan matinya, atau yang berhubungan dengan musnah dan eksisnya suatu bangsa. Masalah-masalah tersebut berlaku umum bagi semua manusia. Begitu pula tindakan yang diambil untuk menyelesaikan semua masalah itu juga hampir sama bahkan sama, karena masalah tersebut nyata-nyata mengancam kehidupan mereka. Jadi, masalah utamanya adalah satu dan tindakan-tindakan yang diambil untuk menghadapi masalah tersebut juga satu. Meskipun demikian, masalah-masalah yang berhubungan dengan naluri mempertahankan diri tidak semuanya tergolong sebagai masalah utama. Begitu pula masalah utama bukan hanya berhubungan dengan naluri mempertahankan diri saja, karena masih ada masalah utama lain yang berkaitan dengan naluri beragama (*gharīzah at-tadayyun*) dan naluri melestarikan keturunan (*gharīzah an-naw'*). Akan tetapi, manusia saling berbeda pendapat mengenai masalah utama ini, karena masing-masing mempunyai sudut pandang kehidupan yang berbeda-beda. Mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah utama tersebut. Karena yang menjadikan suatu masalah sebagai masalah utama adalah sudut pandang mereka tentang kehidupan yang khas. Oleh karena itu tindakan-tindakan yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Dari sini menjadi jelas bahwa masing-masing bangsa dan umat berbeda-beda masalah utama yang dihadapinya sesuai dengan perbedaan sudut pandang mereka tentang kehidupan.

Kaum Muslim adalah satu umat yang memiliki sejumlah masalah utama. Masalah-masalah utama umat Islam, baik yang berhubungan

dengan naluri mempertahankan hidup, naluri beragama, maupun naluri melestarikan keturunan, harus sesuai dengan sudut pandang mereka tentang kehidupan. Sudut pandang yang khas bagi umat Islam telah ditentukan oleh Islam itu sendiri. Dengan demikian, Islam pula yang menentukan suatu masalah sebagai masalah utama serta tindakan-tindakan yang harus diambil untuk menghadapinya.

Islam telah menjelaskan kepada manusia apa saja masalah-masalah utama bagi mereka dan siap menjadikan perkara hidup atau mati mereka untuk mewujudkan kewajiban tersebut. Dengan demikian, kaum Muslim tidak mempunyai pilihan lain dalam menentukan masalah utama mereka. Umat Islam harus menerima masalah utama yang pasti mereka hadapi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Islam. Demikian pula, kaum Muslim juga tidak mempunyai pilihan selain menggunakan tindakan hidup atau mati dalam menghadapi masalah utama tersebut. Sebab, ketika Islam menentukan masalah-masalah utama yang harus dihadapi, Islam juga menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil kaum Muslim untuk menghadapinya.

Sudah jelas bahwa Islam senantiasa menghadapi ancaman. Demikian pula kaum Muslim harus siap melawan segala hal yang mengancam keberadaan mereka. Terbukti bahwa setiap harakah dalam kehidupan akan selalu menghadapi tantangan yang mengancam eksistensinya, terutama pada harakah-harakah pembaruan, dan lebih khusus lagi harakah-harakah yang sah. Sejak munculnya fajar kebangkitan Islam, terjadi pertarungan yang dahsyat antara Islam dan kekufuran, karena pertarungan ini akan menentukan nasib kedua belah pihak. Pertempuran berdarah, sebagai kelanjutan dari pertarungan pemikiran, yang terjadi sejak Daulah Islam ditegakkan di Madinah—sampai sekarang—merupakan upaya mempertahankan masalah utama kaum Muslim. Dengan demikian, keberadaan masalah-masalah utama bagi kaum Muslim sudah pasti dan jelas. Begitu pula, tindakan-tindakan hidup atau mati yang mereka terapkan untuk mempertahankan masalah utama juga sudah pasti dan jelas. Itulah mengapa jihad menjadi salah satu kewajiban yang paling penting. Rasulullah saw. bersabda (yang artinya): *Penghulu segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad.* (HR at-Tirmidzi).

Itulah sebabnya jihad akan terus berlangsung sampai Hari Akhir, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. (yang artinya): *Jihad akan terus berlangsung sejak aku diutus Allah sampai umatku yang terakhir memerangi Dajjal. Jihad tidak boleh dibatalkan oleh kezaliman orang yang zalim dan keadilan orang yang adil.* (HR Abu Dawud).

Rasulullah Muhammad saw. juga bersabda (yang artinya): *Jihad terus berlangsung bersama (pemimpin) baik maupun fajir.* (HR al-Bukhari).

Oleh sebab itu, kaum Muslim tidak boleh mengendorkan semangat jihad walau hanya sekejap untuk mempertahankan masalah-masalah utama dan juga tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil tindakan hidup atau mati dalam menghadapi masalah utama itu.

Ketika mereka berhadapan dengan tantangan yang mengancam masa depan mereka sebagai suatu umat dan negara pada masa Perang Salib, umat Islam mengambil tindakan hidup atau mati. Mereka segera mengobarkan perlawanan terhadap pasukan salibis dalam suatu peperangan yang dahsyat, yang berlangsung selama lebih dari satu abad. Demikian pula, ketika pasukan Mongol menyerbu wilayah kaum Muslim, mereka mengambil tindakan yang sama. Umat Islam menganggap serbuan pasukan-pasukan asing tersebut sebagai tindakan yang dapat mengancam keberadaan mereka. Jadi, kaum Muslim segera mengambil tindakan hidup atau mati untuk menghadapi masalah itu, yakni dengan mengobarkan peperangan melawan pasukan asing; mereka mengorbankan nyawa dengan ikhlas sampai kemenangan nyata di tangan mereka.

Demikianlah, kaum Muslim senantiasa menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah utama, dan mengambil tindakan yang wajib mereka lakukan, yaitu tindakan hidup atau mati, karena apa yang dijelaskan oleh Islam sebagai masalah utama, telah dipahami dan dipegang teguh oleh kaum muslimin. Akibatnya, mustahil bagi mereka jika tidak mengambil tindakan yang diwajibkan Islam kepadanya, yaitu tindakan hidup atau mati. Pada masa lalu, umat Islam dan Daulah Islam tidak pernah gagal dalam merasakan dan menyadari masalah-masalah utama, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam memahami tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan atau lalai

terhadap masalah tersebut. Akan tetapi, ketika persepsi mereka terhadap Islam mengalami penurunan dan ketakwaan dalam jiwa mereka semakin lemah, sampai mereka membiarkan terjadinya kekufuran yang nyata, masalah utama tersebut tidak dianggap lagi sebagai masalah utama, dan tindakan hidup atau mati untuk menghadapinya tidak pernah dilakukan. Akibatnya, terjadi ancaman terhadap eksistensi mereka sedangkan kaum Muslim tidak dapat mempersembahkan darah dan jiwa mereka dengan ikhlas untuk menyingkirkan ancaman ini. Dengan demikian, Khilafah berhasil diruntuhkan, sistem Islam dihapuskan, dan umat Islam berada dalam ancaman kepunahan.

Jadi, wajib bagi kaum Muslim untuk memahami masalah utama dari sudut pandang Islam sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kaum Muslim juga wajib memahami tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah utama sebagaimana yang diuraikan dalam Kitabullah dan hadits-hadits Rasulullah. Hanya dengan itu dapat diperoleh kesadaran terhadap masalah-masalah utama dan pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang wajib dilakukan untuk menghadapinya dan kelalaian mereka dapat diantisipasi. []

PERSOALAN UTAMA MENURUT ISLAM

Jika kita memperhatikan dalam Kitabullah dan Sunnah, kita akan mendapati bahwa Islam telah menentukan masalah-masalah utama tersebut secara eksplisit (jelas), Islam juga sudah menentukan tindakan-tindakan yang wajib dilakukan untuk menghadapinya yaitu hidup atau mati. Sebagai contoh, Islam telah menjadikan *riddah* (kemurtadan), baik dilakukan secara individual maupun berkelompok, sebagai masalah utama, dan menjadikan tindakan hidup atau mati dalam menghadapi masalah tersebut, yaitu bertobat atau menerima hukuman mati. Dengan demikian, Allah telah menjelaskan masalah utamanya dan risikonya. Rasulullah saw. bersabda (yang artinya): *Siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah*. (HR al-Bukhari dan Ibn Majah).

Ibnu Mas'ud juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda (yang artinya): *Tidak halal darah seorang Muslim yang telah menyatakan bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dalam tiga perkara, yaitu: ats-tsayyib az-zâni, pembunuh, dan orang murtad yang meninggalkan jamaahnya*. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Bagi kaum Muslim, masalah ini telah menjadi konsep utama dan hakikat yang harus dipegang teguh.

Pada masa lalu kaum Muslim menerapkan hal ini. Mereka akan membunuh orang yang murtad jika ia menolak untuk bertobat. Para

Sahabat menerapkan ketentuan ini di Yaman pada masa Rasulullah. Mereka juga menerapkan aturan ini pada masa-masa sesudah Rasulullah wafat. Begitu pula orang-orang sesudah mereka. Pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa disebutkan demikian (yang artinya):

Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Pergilah ke Yaman." Kemudian Rasulullah mengirim Muadz bin Jabbal untuk mendampinginya. Ketika Muadz sampai di depannya, Abu Musa menyerahkan sebuah alas duduk dan berkata kepada Muadz, "Duduklah." Ketika Muadz hendak duduk, ia melihat seseorang yang diikat sehingga ia bertanya, "Ada apa ini." Abu Musa menjawab, "Dulu ia seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, tetapi kemudian ia kembali menjadi seorang Yahudi." Mendengar hal ini, Muadz berkata kepada Abu Musa, "Aku tidak akan duduk sebelum orang ini dibunuh. Barangsiapa yang mengganti agamanya, ia harus dibunuh." (HR Ahmad).

Dalam riwayat Abu Dawud dinyatakan bahwa: Seseorang yang keluar dari Islam dibawa kepada Abu Musa. Abu Musa menyuruhnya bertobat selama duapuluh malam. Kemudian datanglah Muadz yang menyuruhnya bertobat. Namun, ia menolak, dan kemudian Mu'adz memenggal lehernya.

Imam Daruquthni dan al-Baihaqi juga menuturkan riwayat sebagai berikut: Abu Bakar pernah menyuruh seorang perempuan bernama Ummu Firkah untuk bertobat setelah sebelumnya memeluk agama Islam, namun kemudian murtad. Akan tetapi, perempuan itu menolak sehingga Abu Bakar membunuhnya.

Selain itu, ketika banyak suku-suku Arab menolak kewajiban membayar zakat, Abu Bakar menganggap hal itu sebagai bentuk kemurtadan dari Islam. Kemudian ia mengacungkan pedang kepada mereka dan memerangi mereka sampai ia berhasil membawa mereka kembali dalam pangkuan Islam.

Di dalam *Al-Fath* ada riwayat dari Abdullah bin Syarik dari ayahnya, yang berkata:

Telah disampaikan kepada Ali, bahwa ada sekelompok orang di pintu masjid yang mengakui Ali sebagai tuhan mereka. Kemudian Ali memanggil mereka dan berkata kepadanya, "Celakalah kalian! Apa yang kalian katakan?" Mereka berkata, "Anda adalah tuhan kami, pencipta kami, dan pemberi rezeki kami." Ali kemudian berkata, "Celakalah kalian! Aku tidak lain adalah hamba Allah seperti kalian. Aku makan seperti kalian dan minum seperti kalian. Apabila aku menaati Allah, Dia akan memberikan pahala kepadaku jika ia menghendaki. Kalau aku tidak menaati-Nya, aku takut Dia akan memberikan siksa kepadaku. Jadi, takutlah kepada Allah dan bertobatlah!" Namun, mereka tetap menolak untuk bertobat. Pada hari berikutnya, mereka dibawa ke hadapan Ali. Qanbar datang dan berkata, "Demi Allah, mereka datang kembali untuk mengatakan hal yang sama." Ali berkata, "Biarkan mereka masuk." Mereka pun kembali dan mengatakan hal yang sama. Pada hari yang ketiga, Ali berkata kepada mereka, "Apabila kalian berkata tentang hal yang sama lagi, aku akan membunuh kalian dengan cara yang paling buruk." Namun, mereka tetap menolak. Kemudian Ali memerintahkan penggalian sebuah lubang di antara pintu masjid dan istana bagi mereka. Ali memerintahkan melemparkan kayu-kayu ke dalam lubang tersebut dan kemudian menyalakannya. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Aku akan melemparkan kalian ke dalam lubang kalau kalian menolak bertobat. Namun, mereka tetap menolak sehingga Ali melemparkan mereka ke dalam api.

Ketika Ibnu Abbas mendengar berita pembakaran ini, ia menyatakan ketidaksetujuannya atas pembakaran mereka, namun ia berkata bahwa mereka memang harus dibunuh.

Ikrimah meriwayatkan: Sekelompok orang zindiq pernah dibawa ke hadapan Amirul Mukminin dan Ali membakar mereka. Ibnu Abbas mendengar hal itu dan kemudian berkata, "Kalau aku menjadi Ali, aku tidak akan membakar mereka, karena Rasulullah melarang hal ini dengan sabdanya, 'Jangan menghukum dengan hukuman Allah.'"

Aku akan membunuh mereka karena Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa mengganti agamanya ia harus dibunuh.' (HR al-Bukhari).

Pada masa Khalifah al-Mahdi, jumlah orang yang tak bertuhan (atheis) dan murtad bertambah. Al-Mahdi menyuruh mereka bertobat dan yang menolak bertaubat akan dibunuh. Pada waktu itu, al-Mahdi menghukum mati banyak orang di antara mereka.

Demikianlah pada masa lalu, kaum Muslim—para Sahabat, *tâbi'in* dan para khalifah—telah menghukum mati orang-orang murtad. Mereka memegang teguh ketentuan ini dengan istiqamah. Namun, ketika para khalifah mulai lemah dan pemahaman terhadap Islam juga melemah, kelalaian dalam menghukum mati para pemurtad mulai terjadi. Jumlah kaum atheis dan orang murtad semakin bertambah banyak dan tersebar luas sampai sebagian kaum murtad itu mampu mendirikan berbagai kelompok dan menganut ideologi selain Islam. Akibatnya, rasa takut mulai timbul di hati kaum Muslim, sekalipun sebenarnya hal ini merupakan masalah utama yang tidak mungkin diabaikan dan dimaafkan.

Dengan demikian, tidaklah mengejutkan jika seorang Musthafa Kemal menyatakan perang melawan Islam, yaitu murtad dari Islam, tanpa ada seorang pun yang menerapkan hukum syariah kepadanya, karena perkara *riddah* bukan lagi dianggap sebagai masalah utama. Inilah yang terjadi.

Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk menempatkan kembali perkara ini dalam proporsinya, dengan menganggap perkara itu sebagai masalah utama dan menghukum mati setiap pelaku *riddah*, meski jumlahnya jutaan orang.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat begitu saja menghukumi seseorang murtad karena ia mengemukakan pendapat yang di dalamnya masih ada kesamaran (*syubhat*) tentang kemurtadannya. Akan tetapi, kita harus mendapatkan kepastian sehingga dapat menghukumi seseorang sebagai kafir atau murtad. Andaikata, 99% apa yang ia ucapkan menjadikan seseorang melakukan *riddah*, sementara hanya 1% yang menunjukkan bahwa ia tidak melakukan *riddah*, maka 1% itu harus diunggulkan, sehingga orang itu harus dianggap sebagai seorang Muslim dan tidak boleh dihukumi

sebagai kafir. Sebab, seorang Muslim pada dasarnya adalah tetap seorang Muslim, dan tidak boleh dianggap sebagai seorang kafir atau murtad, sebelum kekufuran atau kemurtadannya pasti. Sebaliknya, kita juga tidak bisa memaafkan atau mencari-cari alasan untuk menolak penerapan hukum murtad dari seseorang apabila kemurtadan itu jelas-jelas terbukti, karena hal ini akan mengabaikan tindakan hidup atau mati dalam masalah utama.

Seorang Muslim yang melakukan suatu perbuatan yang menjadikan ia sebagai orang murtad, misalnya beribadah di gereja bersama-sama dengan kaum Nasrani serta dengan ibadah mereka, atau menyatakan sesuatu yang membuatnya menjadi seorang murtad, seperti menyatakan bahwa "Karena riwayat Nabi Ibrahim yang dijelaskan dalam al-Qur'an tidak diceritakan oleh sejarah, maka riwayat tersebut merupakan riwayat dusta dan palsu," atau meyakini sesuatu yang menjadikan ia sebagai seorang pelaku *riddah*, seperti meyakini bahwa Islam tidak layak diterapkan pada masa sekarang, atau meyakini pendapat bahwa agama harus dipisahkan dari negara, atau keraguan yang menjadikan ia murtad seperti ragu bahwa al-Quran adalah ayat-ayat dari Allah, maka ia telah terbukti murtad secara pasti. Selanjutnya, wajib untuk menjadikan masalah ini sebagai masalah utama sehingga tindakan hidup atau mati harus diterapkan kepadanya, yaitu bertobat atau menerima hukuman mati.

Islam juga menjadikan kesatuan umat Islam dan kesatuan negara sebagai masalah-masalah utama dan menjadikan tindakan hidup atau mati untuk mempertahankan kesatuan tersebut. Jadi, Islam telah menentukan masalah utamanya serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan.

Perkara ini tampak jelas dalam dua kasus, yaitu kasus adanya lebih dari seorang khalifah dan kasus mengenai pemberontakan (*bughât*). Abdullah bin Amru bin al-'Ash menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda (yang artinya): *Barangsiapa memberikan baiat saw. pernah bersabda (yang artinya): Barangsiapa memberikan baiat seorang imam, lalu memberikan uluran tangannya dan buah hatinya, hendaklah ia taat kepadanya semampunya. Apabila datang seseorang hendak mencabut kekuasaannya, maka bunuhlah.* (HR Muslim).

Abu Said al-Khudri juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda (yang artinya): *Jika dua orang dibaiat sebagai khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.* (HR Muslim).

Dengan demikian, Rasulullah saw. telah menjadikan kesatuan negara sebagai masalah utama ketika Beliau melarang banyak khalifah dan memerintahkan untuk membunuh orang yang mencoba mewujudkan banyak Khilafah, kecuali jika ia membatalkan upayanya tersebut.

Arfajah juga berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda (yang artinya): *Siapa saja yang mendatangi kalian, sementara urusan kalian berada di bawah seseorang (Khalifah), dan orang itu hendak merusak persatuan kalian atau memecah-belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia.* (HR al-Bukahri).

Dengan demikian, Rasulullah telah menjadikan kesatuan umat dan kesatuan negara sebagai masalah utama, manakala Beliau melarang disintegrasi jamaah dan memerintahkan untuk membunuh orang yang berupaya memecah-belah kesatuan umat, kecuali jika ia membatalkan upaya tersebut.

Sementara itu, mengenai pemberontakan (*bughât*), Allah SWT telah berfirman:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾

Jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tersebut sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah. (QS al-Hujurat: 9).

Inilah mengapa pemberontakan melawan kepemimpinan kaum Muslim—yaitu seseorang yang telah diangkat menjadi khalifah bagi seluruh kaum Muslim—dilarang oleh Islam. Alasannya, karena pemberontakan jelas akan mengarah pada disintegrasi kaum Muslim, tumpahnya darah mereka, dan habisnya kekayaan mereka secara sia-

sia. Rasulullah saw. bersabda (yang artinya): *Barangsiapa keluar (memberontak) dari umatku, sedangkan mereka dalam keadaan bersatu, maka bunuhlah, siapa pun mereka.*

Dengan demikian, orang-orang yang durhaka kepada imam dianggap sebagai pemberontak. Mereka diminta untuk bertobat dan keraguan mereka kepada imam harus dihilangkan. Namun, jika mereka menolak, mereka harus dibunuh.

Dengan adanya larangan lebih dari satu negara, larangan atas segala bentuk pemberontakan kepada imam, serta larangan terhadap disintegrasi umat, maka kesatuan umat dan kesatuan negara merupakan masalah utama karena Asy-Syâri' (Allah) telah menjadikan tindakan yang dihadapi, yaitu tindakan hidup atau mati, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siapa saja yang melakukan perkara-perkara di atas harus bertobat, atau jika menolak, mereka harus dibunuh. Kaum Muslim telah menerapkan ketentuan ini dan menganggapnya sebagai salah satu perkara yang paling penting dan paling kritis. Dalam perkara-perkara tersebut, mereka tidak pernah meremehkannya, siapa pun orangnya. Ali tidak pernah meremehkan Mu'awiyah. Ali, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah tidak pernah meremehkan masalah utama ini terhadap kaum Khawarij. Masih sangat banyak informasi terpercaya lainnya mengenai perkara ini.

Namun, ketika para khalifah semakin lemah dan pemahaman terhadap Islam semakin berkurang, kaum Muslim membiarkan terjadinya pemisahan beberapa wilayah Islam dari kekuasaan Khilafah. Lalu terjadilah disintegrasi di kalangan umat Islam menjadi sejumlah negara, sekalipun sebenarnya pemisahan suatu negeri dari Daulah Islam merupakan suatu masalah utama yang harus diselesaikan dengan kembalinya para pemberontak kepada negara atau memerangi mereka, tanpa menghiraukan biaya dan nyawa yang dikorbankan.

Keadaan tersebut semakin memburuk sampai pada situasi kaum Muslim hidup di sejumlah negara yang berbeda, sementara Negara Khilafah menjadi salah satu negara di antaranya. Situasi ini semakin buruk lagi ketika sebagian kaum Muslim menyerukan untuk membentuk Liga Islam dimana Negara Khilafah akan turut serta dalam suatu perjanjian bersama-sama dengan negara-negara lain yang sebelumnya

menjadi bagian dari Negara Khilafah. Dengan demikian, Negara Khilafah menyetujui pemisahan mereka dan memberikan pengakuan kepada mereka sebagai negara merdeka. Hal ini berarti semakin mendorong disintegrasi kaum Muslim menjadi sejumlah bangsa dan umat. Padahal sesungguhnya perkara tersebut merupakan masalah utama dan mengabaikan ketegasan hadits yang memerintahkan untuk bertobat atau untuk membunuhnya. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan ketika Musthafa Kemal menyatakan pemisahan Turki dari semua negeri Islam, dan bahkan menyetujui penyerahan negeri-negeri Islam kepada negara-negara kafir yang akan menentukan nasib mereka, karena perkara tersebut tidak lagi dianggap sebagai masalah utama, maka terjadilah malapetaka dan kaum Muslim tidak lagi peduli dengan kenyataan bahwa mereka hidup dalam negara yang berbeda-beda dan terpecah-belah menjadi sejumlah bangsa dan umat. Hal ini diakibatkan karena masalah kesatuan umat dan kesatuan negara tidak dianggap lagi sebagai masalah utama, serta tidak menjadikan tindakan untuk menghadapi masalah tersebut dengan hidup atau mati. Oleh sebab itu, wajib bagi kaum Muslim untuk mengembalikan masalah tersebut pada posisi yang sebenarnya, yaitu menganggapnya sebagai masalah utama. Karena itu, disintegrasi dari negara Khilafah harus dicegah, sekalipun harus melalui cara peperangan selama puluhan tahun bahkan harus mengakibatkan terbunuhnya jutaan kaum Muslim.

Islam telah menggariskan bahwa tindakan memperlihatkan kekufuran yang nyata adalah salah satu masalah utama serta menjadikan tindakan untuk menghadapinya dengan tindakan hidup atau mati. Jadi, Islam telah menentukan masalah utamanya dan tindakan yang harus dilakukan. Auf bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda (yang artinya): *"Kelak akan ada di antara kalian berbagai macam penguasa; kebijakan dan tindakan mereka ada yang kalian pandang baik dan ada yang kalian pandang munkar. Siapa saja yang membenci tindakan munkar mereka, maka dia terbebas dari dosa. Siapa saja yang menentang perbuatan munkar mereka, maka dia akan selamat. Namun, siapa saja di antara kalian yang rela dan mengikuti tindakan munkar itu maka dia telah berdosa."* Para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak lebih baik kita

perangi saja mereka?" Beliau menjawab. *"Tidak, selama mereka menegakkan shalat."* (HR Muslim).

Pada riwayat lain dinyatakan: Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja mereka?" Rasulullah menjawab, *"Tidak, selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kalian."* (HR Muslim).

Ubadah bin Shamit juga berkata, *"Rasulullah pernah mengajak kami (untuk membaicitnya). Lalu kami pun berbaiat untuk mendengarkan dan menaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun dalam keadaan yang tidak kami sukai; baik pada masa lapang maupun pada masa sulit, dan bahwa kami tidak akan merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan, yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah."* (HR Muslim).

Dalam riwayat Imam ath-Thabrani dijelaskan dengan istilah: *kufr[an] sharâh[an]* (kekufuran yang nyata), sementara dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan dengan kata-kata: *mâ lam ya'murka bi'itsm bawâh[an]* (sepanjang ia tidak memerintahkan kalian untuk berbuat dosa secara nyata).

Auf bin Malik juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda (yang artinya): *"Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; yang mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; yang kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian."* Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh memerangi mereka?" Beliau menjawab, *"Tidak, sepanjang mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kalian."*

"Menegakkan shalat" mempunyai makna menegakkan agama Islam. Kalimat ini merupakan kinâyah dari menegakkan hukum Islam dan menampakkan syiar-syiarinya. "Kekufuran yang terang-terangan" adalah kekufuran yang tampak dalam tindakan para penguasa, yaitu memerintah dengan hukum-hukum kufur.

Konsep yang diperoleh dari pengertian hadits-hadits di atas adalah bahwa kita harus memerangi para penguasa dengan pedang jika mereka tidak menegakkan hukum-hukum Islam dan tidak

menampakkan syiar-syiarnya, yaitu menerapkan hukum kufur, serta kita harus merebut kekuasaan apabila kita melihat kekufuran yang nyata. “Menentang mereka” bermakna memberi teguran kepada mereka sekalipun jika hal ini menyebabkan peperangan dengan mereka. Dijelaskan dalam Kitab *Al-Fath* bahwa:

Para ulama telah bersepakat mengenai kewajiban untuk taat kepada pemimpin (sultan) yang berkuasa dan menjalankan jihad di sampingnya. Ketaatan kepadanya lebih baik daripada pemberontakan melawannya karena hal ini menyelamatkan nyawa dan menenteramkan penduduk. Namun, mereka mengecualikan hal ini jika pemimpin memperlihatkan kekufuran yang terang-terangan—sementara kaum Muslim dilarang menaatinya—maka ia seharusnya dilawan oleh orang-orang yang mampu melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits.

Sementara itu, Imam asy-Syaukani dalam bukunya, *Nayl al-Awthar*, menyatakan, “Mereka yang beragumentasi bahwa wajib untuk melawan orang-orang fasik dengan pedang dan berjuang melawan mereka adalah berdasarkan keumuman dalil ayat-ayat al-Quran dan as-Sunnah.”

Jadi, kewajiban memerintah dengan hukum-hukum Islam dan menghalangi berlakunya hukum-hukum kufur merupakan masalah utama, karena Allah SWT telah menjadikan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai tindakan hidup atau mati. Jadi, barangsiapa tidak memerintah dengan hukum Islam serta memerintah dengan sistem kufur harus membatalkan tindakan tersebut atau—jika menolak—harus dibunuh. Kaum Muslim diwajibkan untuk tidak berdiam diri terhadap tegaknya hukum selain dari yang diturunkan Allah, karena hal ini merupakan masalah utama.

Namun, ketika ketakwaan dalam jiwa kaum Muslim melemah dan pemahaman mereka tentang Islam juga semakin lemah, maka mudah bagi mereka untuk membiarkan Khalifah dan para penguasa menerapkan hukum kufur di dalam satu perkara. Jika kelemahan mereka semakin parah, mereka akan mudah mendiamkan para

pemimpinnya memberlakukan hukum kufur di dalam banyak perkara. Akibat jangka panjang dari sikap diam mereka, para pemimpin mereka pun berani menerapkan hukum kufur secara terang-terangan. Kaum Muslim di Mesir diam saja ketika penguasa mereka memberlakukan Undang-undang Sipil Prancis dan menghapuskan hukum-hukum syariah pada tahun 1883. Kaum Muslim di dalam Daulah Islam juga diam saja ketika mereka menjadikan hukum-hukum kufur sebagai konstitusi mereka pada tahun 1909. Sekalipun pada awalnya mereka menolak penerapan konstitusi itu, mereka kemudian membiarkannya saja. Karena itu, tidaklah mengejutkan jika Musthafa Kemal berhasil meruntuhkan Khilafah dan menghapuskan seluruh hukum Islam, serta menyatakan berlakunya hukum-hukum kufur. Semua ini terjadi karena kaum Muslim tidak menganggap perkara ini sebagai masalah utama. Akhirnya, malapetaka terjadi, dan mudah bagi kaum Muslim untuk menyaksikan terjadinya kekufuran yang nyata tanpa kehendak mengangkat pedang untuk menyingkirkannya. Bahkan semakin mudah bagi mereka untuk diatur dengan hukum kufur tanpa keinginan untuk menolaknya. Lebih buruk lagi, mayoritas kaum Muslim menerima begitu saja diatur dengan hukum-hukum kufur, menjadi terbiasa dengan hukum-hukum kufur tersebut, dan kemudian melepaskan hukum-hukum Islam secara sukarela. Situasi ini semakin parah hingga kaum Muslim menerima kekufuran dan bahkan menyerukan pemberlakuan hukum-hukum kufur tersebut. Semua ini terjadi hanya karena kaum Muslim tidak menganggap pemerintahan dengan sistem kufur sebagai masalah utama mereka dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu bukan lagi tindakan dengan kriteria hidup atau mati.

Dengan demikian, wajib hukumnya mendudukkan kembali perkara tersebut pada proporsinya dan kembali menjadikannya sebagai masalah utama. Hanya dengan begitu pemerintahan dengan sistem kufur akan dapat dihalangi, sekalipun hal ini menyebabkan peperangan selama bertahun-tahun dan mengakibatkan terbunuhnya jutaan orang Islam dan syahidnya jutaan Mukmin.

Demikianlah, persepsi tentang berbagai masalah utama yang dijelaskan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Allah telah menentukan tindakan diberlakukan untuk menghadapi persoalan tersebut dengan

tindakan hidup dan mati. Namun, kini semua itu semakin lemah. Keterikatan masalah-masalah ini dengan akidah Islam juga semakin lemah. Masalah-masalah utama itu diturunkan dari kedudukannya sampai pada tarap tidak lagi dipandang sebagai hukum-hukum syariah yang sangat jelas dan kritis. Masalah ini diturunkan dari posisi yang ditentukan Allah baginya, yakni posisi sebagai masalah utama, yang harus dipertahankan sekalipun dengan kekuatan senjata. Kaum Muslim menganggap perkara tersebut tidak sebagaimana yang ditentukan oleh syariah. Akibatnya, tindakan-tindakan yang telah ditetapkan syariah untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak lagi dianggap sebagai perlawanan dengan kekuatan fisik dan mengangkat pedang untuk menyingkirkan hukum-hukum kufur dan mengembalikan hukum Islam. Oleh karena itu, masalah runtuhnya Khilafah dan hapusnya sistem Islam tidak dipandang sebagai suatu masalah utama, dan selanjutnya jiwa-jiwa dan suasana kaum Muslim tidak lagi menganggapnya sebagai masalah utama.

Dengan begitu, Musthafa Kemal mudah saja meneruskan aksinya. Khilafah pun runtuh dan Islam terhapus dari peta perpolitikan tanpa seorang pun yang mengangkat senjata melawan dan memerangnya. Penghancuran Khilafah dan penghapusan sistem Islam yang dilakukan kaum kafir terjadi begitu mudah dan sederhana di depan mata ratusan juta kaum Muslim. Andaikata kaum Muslim pada masa itu menyadari bahwa masalah ini merupakan masalah yang utama, dimana nasib kaum Muslim dan nasib Islam bergantung padanya, serta menganggap perlu menggunakan perjuangan bersenjata untuk melawan Musthafa Kemal, maka kaum Muslim tidak akan menerima pukulan yang telak ini dan tidak akan mengalami malapetaka yang mengerikan dan tragedi yang menyedihkan seperti ini. Yang terjadi, kaum Muslim tidak menyadari masalah ini sebagai masalah utama. Mereka lalai melakukan tindakan-tindakan yang dihadapi dengan tindakan hidup atau mati, yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah ini. Inilah latar belakang mengapa malapetaka ini menimpa mereka. []

MENEGAKKAN KHILAFAH DAN HUKUM ALLAH ADALAH MASALAH UTAMA KAUM MUSLIM

Hari ini kaum Muslimin mengalami penderitaan demi penderitaan dan cobaan demi cobaan. Solusi yang paling manjur bagi mereka bergantung pada pemahaman mereka mengenai suatu masalah apakah termasuk masalah utama atau tidak, serta pelaksanaan tindakan-tindakan hidup atau mati pada setiap masalah utama yang mereka hadapi. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan, apalagi karena kaum Muslim harus menyelesaikan dan menghadapi seluruh masalah utama mereka. Sepanjang pemahaman tersebut tidak menguasai jiwa kaum Muslim serta lingkungan mereka, kaum Muslim akan terus berada dalam keadaan terbelakang dan terpuruk, serta tidak akan mampu tampil sebagai negara yang berpengaruh. Oleh karena itu, kaum Muslim wajib memahami masalah-masalah utama mereka dan mengusahakan agar masalah-masalah tersebut mendapatkan tempatnya di hati mereka, jiwa mereka, dan di lingkungan mereka. Dengan begitu, pemahaman ini dapat mendorong mereka menghadapi masalah utama tersebut dengan tindakan-tindakan hidup atau mati, dan dengan tekad yang teguh dan semangat yang tak kenal menyerah. Inilah dasar bagi seluruh upaya kaum Muslim untuk beraktivitas dalam menyelesaikan realitas saat ini.

Realitas yang dihadapi oleh kaum Muslim saat ini dapat dirasakan oleh setiap Muslim tanpa memerlukan penjelasan atau uraian lagi. Negeri-negeri mereka diatur dengan sistem kufur sehingga secara pasti menjadi negara kufur. Mereka terbagi-bagi ke dalam lebih dari 40

entitas yang berbentuk negara, keemiran, atau kesultanan. Mereka semua terlalu lemah untuk berhadapan dengan negara-negara kafir. Oleh sebab itu, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negeri Muslim adalah mengubah dirinya menjadi Negara Islam dan menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya. Masalah ini merupakan masalah utama, bahkan merupakan gabungan semua masalah utama, sehingga wajib bagi kaum Muslimin melakukan tindakan hidup atau mati.

Sesungguhnya masalah utama kaum Muslim adalah masalah mengubah negeri Islam menjadi Negara Islam dan menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya. Ini merupakan tujuan yang harus direalisasikan kaum Muslim. Metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah menegakkan Khilafah. Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi umat Islam saat ini adalah menegakkan Khilafah sebagai sistem pemerintahan. Hanya dengan itulah terealisasi upaya mengubah negeri Islam menjadi Negara Islam dan selanjutnya menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya.

Namun demikian, perlu dijelaskan di sini bahwa masalah yang dihadapi kaum Muslim pada saat ini bukan masalah pengangkatan khalifah, dengan alasan bahwa masalah tersebut merupakan fardhu kifayah atas kaum Muslim sesuai dengan hadits Rasulullah dari riwayat Ibnu Umar (yang artinya): *Siapa saja yang mati tanpa ada seorang imam yang berkuasa atas mereka, ia mati dalam keadaan Jahiliyah.* (HR al-Hakim).

Dengan demikian, pengangkatan khalifah bukan merupakan masalah utama. Akan tetapi, sesungguhnya, masalah yang dihadapi kaum Muslim pada masa sekarang adalah menegakkan Khilafah. Dengan kata lain menjadikan sistem Khilafah sebagai sistem pemerintahan negara. Realita menegakkan Khilafah berbeda dengan realita mengangkat khalifah meskipun penegakkan sistem Khilafah secara pasti mengangkat seorang khalifah.

Menegakkan Khilafah merupakan masalah utama. Alasannya, karena selain menjadi satu-satunya metode untuk mengubah negara kufur menjadi negara Islam, penegakan sistem Khilafah juga bertujuan untuk menghancurkan sistem kufur—yaitu menghilangkan kekufuran yang nyata, yang diterapkan di negeri tersebut—yang merupakan suatu

masalah utama bagi kaum Muslim. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah saw., “...kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang terang-terangan.”

Demikian pula keterangan Rasulullah saw. dalam haditsnya ketika para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah tidak lebih baik kita perang saja mereka itu dengan pedang?” Beliau menjawab, “Tidak, selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kalian.” (HR Muslim).

Dengan demikian, metode untuk merealisasikan masalah-masalah utama kaum Muslim juga merupakan masalah utama, sebagaimana dalil-dalil syariah, yaitu as-Sunnah, menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut sebagai masalah utama. Dengan demikian, kaum Muslim menghadapi masalah-masalah tersebut dengan tindakan hidup atau mati.

Akan tetapi sejak kaum kafir berhasil menguasai kaum Muslim, dan urusan kaum Muslim jatuh ke tangan kaum kafir, kaum munafik, dan kaum murtad, maka kaum Muslim tidak henti-hentinya berupaya membebaskan diri mereka dari cengkeraman kekuasaan dan hegemoni kaum kafir dan agen-agennya. Namun kaum Muslim tidak menyadari bahwa permasalahan yang sedang mereka perjuangkan adalah masalah utama, dan tidak mengetahui bahwa tiada tindakan untuk menghadapi permasalahan itu kecuali hidup atau mati. Itulah kekurangpahaman sejumlah jamaah kaum Muslim yang menghalangi dan menghambat kesiapan mereka sebagai jamaah atau umat dalam menghadapi bahaya, penahanan, ataupun penyiksaan; apalagi dalam memikul penderitaan, kemiskinan, dan kematian sebagai konsekuensi yang dihadapi dalam perjuangan menghadapi masalah-masalah utama. Dengan demikian, seluruh upaya tersebut akan mengalami kegagalan, dan mereka tidak dapat bergerak maju, walau selangkah, untuk meraih segala sesuatu yang mereka perjuangkan.

Kaum Muslim tidak memerlukan pemikiran yang mendalam atau perenungan untuk dapat menyadari bahwa perkara yang mereka hadapi adalah masalah utama. Sebab, hal ini tampak jelas sejak awal, sebagaimana pula pada saat ini, bagi setiap orang yang dapat melihat. Sesungguhnya mustahil kaum kafir—baik secara tradisi maupun

logika—membiarkan kembalinya Islam ke dalam kancah perpolitikan (pemerintahan) dalam upaya pemberlakuan kembali hukum Islam selama mereka memiliki kekuatan walaupun sedikit untuk menyerang umat Islam yang berjuang untuk tujuan tersebut. Sementara itu, golongan orang-orang yang munafik dan murtad tidak kurang jahatnya dalam menindas kaum Muslim. Mereka akan selalu berupaya semampunya untuk memerangi kaum Mukmin yang berjuang untuk merebut kekuasaan dari tangan mereka dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah dan menjaga kesucian Allah melalui penegakan *hudûd* (syariah).

Dengan demikian, berbagai upaya kaum Muslim mustahil memperoleh keberhasilan jika mereka tidak menganggap masalah ini sebagai masalah utama yang harus dicapai melalui upaya-upaya hidup atau mati. Kaum Muslim, selama belum memahami karakteristik perjuangan peperangan yang mereka hadapi, dan belum memahami hakikat hukum Allah di dalam perjuangan tersebut, mereka akan menggunakan metode-metode mereka sendiri yang tidak sesuai dengan metode untuk menyelesaikan masalah utama. Kecuali metode yang seharusnya diterapkan untuk masalah biasa (bukan masalah utama). Akibatnya, mereka tidak menggunakan tindakan-tindakan hidup atau mati. Padahal, dalam menghadapi masalah utama—yakni menghapuskan sistem kufur dan menegakkan sistem Islam—mereka tidak akan memperoleh keberhasilan, sebesar apapun kekuatan yang mereka miliki dan sehebat apa pun usaha yang mereka lakukan, kecuali jika mereka menganggap bahwa masalah tersebut merupakan masalah utama dan bahwa tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah tindakan-tindakan hidup atau mati. Dengan demikian, perlu dijelaskan kepada kaum Muslim bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lain, selain berjuang melawan kekufuran dengan tindakan-tindakan hidup atau mati. Alasannya, karena masalah yang mereka hadapi menuntut tindakan-tindakan seperti itu, dan karena dalil-dalil syariah dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul menetapkan demikian.

Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bagaimana membatasi masalah utama dan memerintahkan kita untuk menjadikan tindakan hidup atau mati dalam setiap masalah utama. Ketika Allah

mengutus Beliau dengan risalah Islam, dan Beliau memulai dakwahnya melalui pertarungan pemikiran, Beliau menetapkan masalah kemenangan Islam sebagai masalah utama yang harus dihadapi dengan tindakan hidup atau mati. Diriwayatkan bahwa Beliau pernah diberitahu oleh pamannya, Abu Thalib, bahwa kaum Quraisy menginginkan agar Beliau menghentikan dakwahnya kepada kaum kafir Quraisy. Abu Thalib berkata, “Kaummu telah datang kepadaku dan mengatakan begini dan begitu, jadi selamatkan diriku dan dirimu, dan jangan engkau bebani aku dengan (masalah) yang tidak sanggup aku hadapi.”

Mendengar itu Rasulullah saw. lalu bersabda (yang artinya):

Wahai Paman, demi Allah, apabila mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwahku, aku tidak akan menghentikannya sampai Allah memberikan kemenangan atau aku mati karenanya. Oleh karena itu, aku tidak akan menghentikannya (dakwah). (HR ath-Thabari).

Ketika Beliau menegakkan Daulah Islam dan melaksanakan jihad dengan pedang, Beliau juga menjadikan kemenangan Islam sebagai masalah utama dan menghadapi masalah tersebut dengan tindakan hidup atau mati. Diriwayatkan bahwa ketika Beliau berada di Asafan, dua *marhalah* dari Makkah, dalam perjalanannya untuk beribadah umrah dalam Peristiwa Hudaibiyah, Beliau bertemu dengan seseorang dari Bani Ka'ab. Beliau bertanya kepada orang tersebut tentang kabar dari Makkah. Orang itu mengatakan, “Mereka (Quraisy) telah mengetahui perjalananmu dan mereka mempersiapkan diri mereka serta berselubung kulit harimau (menunjukkan kekuatan yang menakutkan). Mereka berkemah di Dzi-Thuwa dan bersumpah kepada Allah tidak akan membiarkanmu memasuki Makkah selamanya. Pasukan berkuda mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid berada di Kira'a al-Ghamim.”

Mendengar berita ini, Rasulullah saw. bersabda (yang artinya):

Celakalah kaum Qurays. Mereka telah dihancurkan oleh peperangan. Apa ruginya mereka jika mereka membiarkan masalah antara

aku dan semua manusia lainnya? Jika mereka membunuhku maka demikianlah yang mereka inginkan. Jika Allah memberikan kemenangan atas mereka kepadaku, mereka akan dapat masuk Islam tanpa mengalami kekerasan. Jika mereka tidak mau (masuk Islam), mereka akan memerangiku selagi mereka kuat. Apa yang mereka pikirkan? Demi Allah, aku akan meneruskan jihad untuk apa yang Allah sampaikan kepadaku sampai Allah memberikan kemenangan atau salifah ini terpisah. (HR Ahmad).

Salifah adalah permukaan leher. Jadi, terpisahnya salifah bermakna kematian. Selanjutnya Rasulullah meneruskan perjalanannya sampai ke Hudaibiyah.

Dalam kedua peristiwa ini, yakni pada saat Rasulullah menyampaikan dakwah melalui pertarungan pemikiran dan saat Rasulullah melangsungkan jihad dengan pedang, Beliau membatasi masalahnya, yaitu kemenangan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan untuk menghadapi kedua masalah tersebut dengan tindakan-tindakan hidup atau mati. Pada kasus pertama Rasulullah saw. bersabda, "...sampai Allah memberikan kemenangan atau aku mati karenanya." Beliau juga menyatakan, "Sampai Allah memberikan kemenangan atau salifah ini terpisah," pada kasus kedua.

Andaikata Rasulullah saw. tidak menjadikan masalah ini sebagai masalah utama dan tidak menjadikan tindakan hidup atau mati untuk menghadapi masalah ini, Islam tidak akan memperoleh kemenangan, baik pada saat penyampaian dakwah melalui perjuangan pemikiran ataupun pada saat berdakwah melalui perjuangan bersenjata (jihad).

Peristiwa ini mirip dengan realitas kaum Muslim saat ini, yaitu pada saat kaum Muslim didominasi sistem kufur serta umat Islam berada dalam kekuasaan kaum kafir dan para munafik.

Jika kaum Muslim tidak menganggap kemenangan Islam dan umat Islam sebagai masalah utama, dan tidak menjadikan tindakan yang dihadapi dengan tindakan hidup atau mati untuk menyelesaikan masalah utama itu, maka segala upaya yang mereka lakukan tidak

akan menghasilkan apapun, sehingga mereka tidak akan mampu maju ke depan, walau selangkah.

Oleh sebab itu, kami menyeru seluruh kaum Muslim di tengah-tengah dominasi kekuasaan kufur di negeri-negeri mereka, untuk berjuang bersama-sama menegakkan sistem Khilafah sebagai metode untuk mengubah negeri mereka menjadi Negara Islam dan kemudian menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya, serta bersama-sama menyampaikan dakwah ke seluruh penjuru dunia demi kemenangan Islam, dan kembali mengulang sumpah Rasulullah saw. dengan keyakinan yang kokoh, kecemerlangan, dan kesadaran: *Demi Allah, apabila mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwahku, aku tidak akan menghentikannya sampai Allah memberikan kemenangan atau aku mati karenanya.*

Demikian pula sabda Beliau: *Demi Allah, aku akan meneruskan jihad untuk apa yang Allah sampaikan kepadaku sampai Allah memberi kemenangan atau salifah ini terpisah. []*



Saat ini, tidak banyak kaum muslim yang mengetahui, bahwa mereka pernah memiliki sebuah institusi politik Islam yang sangat mumpuni dan berwibawa, yakni Khilafah Islamiyah, yang berusia lebih dari 13 abad. Dalam sejarah dunia tidak ada satu institusi politik modern pun yang ideologis bisa bertahan sedemikian lama, dengan kekuasaan sedemikian luas, dan dengan segudang kemajuan yang pernah diraihinya, selain Khilafah Islamiyah. Dibandingkan dengan adidaya Uni Soviet yang komunis (yang hanya bertahan tidak sampai 50 tahun) atau AS yang Kapitalis (yang tidak sampai 200 tahun kini sudah tampak menuai tanda-tanda kehancurannya), maka kebesaran Khilafah yang berbasiskan ideologi Islam jelas sangat luar biasa.

Namun, semua kebesaran Khilafah kini tinggal romantisme sejarah. Khilafah, saat ini hampir 100 tahun sudah terkubur. Sayang, sebagian kaum muslim juga tidak paham, bahwa keruntuhan Khilafah bukanlah kejadian 'alami', tetapi sebuah peristiwa yang memang sudah direkayasa oleh musuh-musuh Islam puluhan tahun sebelumnya, dengan penuh intrik politik dan konspirasi jahat negara-negara Barat, khususnya Inggris; disamping keterlibatan beberapa kalangan di dalam negeri yang kemudian menjadi pengkhianat, terutama Mustafa Kemal Atatürk. Buku ini dengan sangat rinci dan analitis menyingkap berbagai intrik politik dan konspirasi jahat musuh-musuh Islam itu terhadap Khilafah hingga Khilafah berhasil dihancurkan.

Membaca buku ini, kita disadarkan betapa dalamnya kebencian musuh-musuh Islam terhadap Islam dan kaum Muslim juga terhadap Khilafah sebagai pengayomnya selama berabad-abad lamanya. Tidak berlebihan, buku ini sangat penting dibaca oleh kaum Muslim, khususnya para pengemban dakwah yang mencita-citakan kembali kejayaan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah ar-Rasyidah, yang memang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. []

Sejarah/Tsaqafah

ISBN 978-602-83-0000-0



9 783118 652001

**Al Azhar
Press**



Penerbit: **Al Azhar Fresh Zone Publishing** |

Alamat : Jl KS Tubun No 19, Cibuluh, Bogor
Utara, Kota Bogor, kode pos : 16151 |

☎ : 0817 011 7771 | ✉ : AlAzharPress | @ : @tokobukuazhar |

al-azharpress.com | alazhar_press@yahoo.com / alazharfresh@gmail.com